



ABIPRAYA

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)



ABIPRAYA



LAPORAN TAHUNAN [2014] ANNUAL REPORT

LAPORAN TAHUNAN [2014] ANNUAL REPORT PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

Kantor Pusat :

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang,
Jakarta Timur 13340

Telpon : (021) 851 6290 - (Hunting)

Fax : (021) 851 6095

Email : bap@brantas-abipraya.com

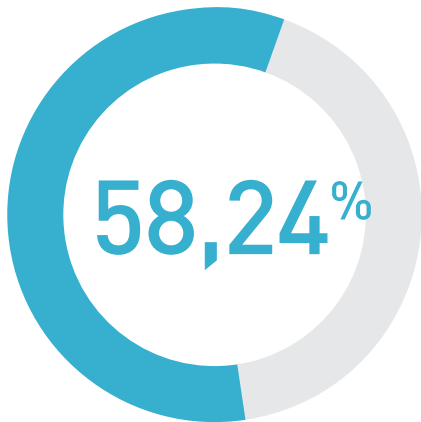
www.brantas-abipraya.co.id



LAPORAN TAHUNAN **[2014]** ANNUAL REPORT
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

PENCAPAIAN TAHUN 2014

Achievement 2014



Pendapatan usaha meningkat Business Revenue Increasing

Selama tahun 2014 terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp839,35 miliar atau 58,24% dari tahun 2013 sebesar Rp1.441,26 miliar menjadi Rp2.280,61 miliar di tahun 2014. Kenaikan pendapatan yang cukup signifikan tersebut didukung oleh pendapatan jasa konstruksi Non JO yaitu proyek Rusunawa dari Kemenpera dengan nilai sekitar Rp500 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah melakukan diversifikasi pasar, artinya tidak hanya proyek pengairan saja yang dikerjakan, tetapi sudah berkiprah di segmen lain dalam bidang jasa konstruksi.

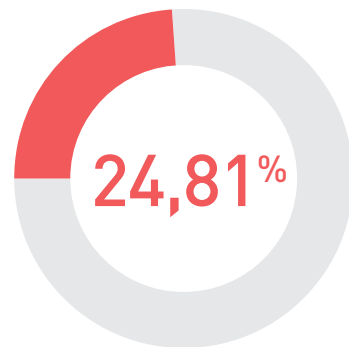
During 2014 there was an increase of income of IDR839.35 billion, or 58.24% of the year 2013 amounting to IDR1441.26 billion to 2280.61 billion in 2014. The significant increase in revenues was supported by construction services revenues Non JO ie Rusunawa of Kemenpera project with a value of around IDR500 billion. This shows that the Company has diversified market, meaning not only the irrigation projects are done, but has engaged in other segments in the field of construction services.

Tahun 2014 Year 2014	Rp2.280,61 miliar
Tahun 2013 Year 2013	Rp1.441,26 miliar

Laba Meningkat Increase Profit

Kebijakan manajemen dalam penerapan program utilisasi fasilitas *supply chain financing* dalam pembayaran biaya pelaksanaan proyek, perbaikan struktur pembayaran kepada rekanan, dan penerapan manajemen arus kas yang lebih baik, serta peningkatan pendapatan usaha dari proyek Non JO berdampak pada peningkatan perolehan laba bersih tahun berjalan dari Rp72,78 miliar tahun 2013 menjadi Rp90,84 miliar di tahun 2014 atau naik 24,81%.

Management policy in the implementation of supply chain program financing facility utilization in payments project implementation costs, repair structure payment to partners, and management of cash flow better. As well as increased revenue from non-JO project impact on improving the current year's net profit of IDR72.78 billion in 2013 to IDR90.84 billion in 2014, up 24.81%.



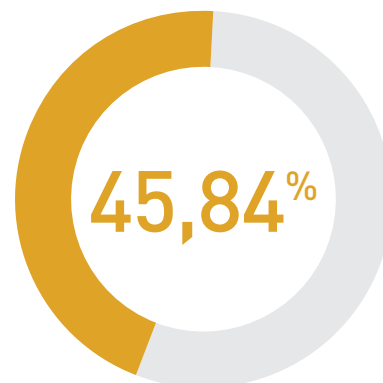
Tahun 2014 Year 2014	Rp90,84 miliar
Tahun 2013 Year 2013	Rp72,78 miliar

Peningkatan Laba Sebelum Bagian Laba Joint Operation (JO)

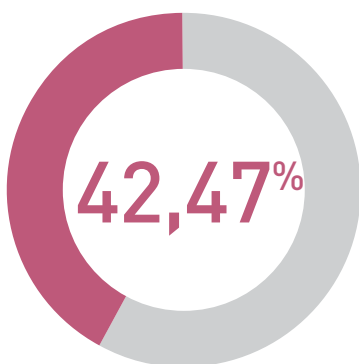
Increased Income Before Profit Joint Operation (JO)

Labanya kotor sebelum bagian laba JO terjadi peningkatan cukup signifikan yaitu 45,84% dari Rp155,46 miliar di tahun 2013 menjadi Rp226,72 miliar di tahun 2014. Hal ini menandakan posisi PT Brantas Abipraya cukup kuat diantara kontraktor-kontraktor lain yang setara.

The gross profit before share of profit JO increased quite significantly by 45.84% from IDR155.46 billion in 2013 to IDR226.72 billion in 2014. This indicates the position of PT Brantas Abipraya quite strong among contractors equivalent.



Tahun 2014 Year 2014	Rp226,72 miliar
Tahun 2013 Year 2013	Rp155,46 miliar



Pertumbuhan Asset

Asset growth

Pertumbuhan asset dalam 3 tahun terakhir cukup tinggi seiring dengan perkembangan Perseroan. Pertumbuhan asset tahun 2014 sebesar Rp487,69 atau 42,47% dari Rp1.148,43 miliar di tahun 2013 menjadi Rp1.636,12 miliar di tahun 2014. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai piutang usaha. Selain itu, Perseroan juga melakukan belanja modal yang cukup besar di tahun 2014 sehubungan dengan kegiatan pengembangan bisnis.

Asset growth in the last 3 years is quite high along with the growth of the Company's assets in 2014 amounted to IDR487,69 or 42.47% from IDR1148.43 billion in 2013 to IDR1636.12 billion in 2014. The increase was due by increasing the value of accounts receivable. The Company also conducts substantial capital expenditure in 2014 in connection with business development activities.

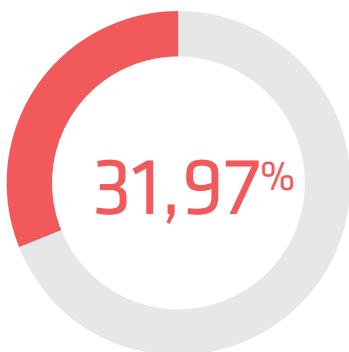
Tahun 2014 Year 2014	Rp1.636,12 miliar
Tahun 2013 Year 2013	Rp1.148,43 miliar

“Market Leader” Dalam Proyek Bendungan Diantara 6 Kontraktor Besar Lainnya

Market Leader In Dam Project Between 6 Other Large Contractors

Perseroan memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Perseroan diantaranya, cost structure yang sangat kompetitif, tenaga ahli serta pengalaman yang dimiliki Perseroan dalam beberapa jenis proyek. Khususnya dalam jasa konstruksi untuk proyek bendungan Perseroan menjadi “Market Leader” diantara 6 Perusahaan Kontraktor besar lainnya yaitu PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Utama Karya dan PT Nindya Karya.

The Company has a strong position in the competition. This is mainly supported by the Company’s competitive advantage among other things, a very competitive cost structure, expertise and experience of the Company in certain types of projects. Particularly in construction services for the Company dam project became “Market Leader” among other great Construction Company 6 Namely PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Housing Development, PT Waskita Karya, PT Utama Karya and PT Nindya Karya.



Investasi Terus Tumbuh Investment Keeps Growing

Selama 3 tahun terakhir investasi tumbuh sebesar 383,32% yaitu Rp40.143 miliar di tahun 2012 menjadi Rp194.018,91 miliar di tahun 2014, Sedangkan pertumbuhan di tahun 2014 sebesar Rp46.221,15 miliar atau tumbuh 31,97% di banding tahun 2013. Meskipun kebutuhan akan investasi begitu besar karena sedang ada pengembangan bisnis, namun manajemen melakukan investasi dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dari proyek dan kemampuan likuiditas perusahaan.

Over the last 3 years investment grew by 383.32% ie IDR40,143 billion in 2012 became IDR194.018,91 billion in 2014, while growth in 2014 amounted to IDR46,221.15 billion or 31.97% growth compared to 2013. Although the need for investment is so great because there was a business development, but investing with management very carefully taking into consideration the urgent needs of the project and the ability of the company’s liquidity.

Tahun 2014 Year 2014	Rp194,02 miliar
Tahun 2013 Year 2013	Rp147,80 miliar



24 Proyek besar telah diselesaikan di Tahun 2014 24 major projects have been completed in 2014

Berbagai pengalaman keberhasilan perseroan dalam membangun proyek baik dari segmen pengairan, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, kelistrikan maupun prasarana perhubungan laut dan darat telah membawa kemajuan perseroan. Terbukti dengan telah diselesaikannya 24 proyek besar, 50% diantaranya dengan nilai di atas 100 miliar selama tahun 2014. Pencapaian dan percepatan-percepatan ini membuat posisi perseroan makin kuat yang semakin optimis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

The success of the company's wide range of experience in building projects both from segment irrigation, roads and bridges, buildings, electricity and infrastructure sea and land transportation has brought progress of the company. Evidenced by completion of 24 major projects, 50% of which with a value of over 100 billion during 2014. Achieving and velocities have made the company stronger position increasingly optimistic in the face of increasingly fierce competition.

Beberapa Penghargaan Telah Diraih Several Rewards Gained

Berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh jajaran direksi dan karyawan perseroan untuk mencapai prestasi di berbagai bidang dalam rangka menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Upaya tersebut telah dibuktikan dengan pencapaian berbagai penghargaan antara lain: Bidang Keuangan, Bidang Teknik, serta bidang Ketenagakerjaan.

Various efforts have been made by all the directors and employees of the company to achieve excellence in various fields in order to meet the Era of the Asean Economic Community (AEC Era). Such efforts have been demonstrated by the achievement of numerous awards, among others: Finance, field engineering, as well as the field of labor.



Komitmen Meningkatkan Kompetensi SDM

Commitment to Increase the Competence of Human Resources

Untuk menjawab tantangan global dan kesiapan menghadapi “initial public opening” perseroan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi. Hal ini dituangkan pada program pelatihan yang memberikan peningkatan keahlian. Peningkatan kompetensi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas pegawai serta organisasi. Oleh karena itu perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM, yang diwujudkan dengan anggaran biaya pelatihan dan pengembangan SDM sebesar Rp4,96 miliar di tahun 2014.

To answer global challenges and to face life “initial public opening” company focuses on improving competence. It is poured on a training program which provides enhanced expertise. Increased competence will contribute significantly to increased productivity and the productivity and quality of the employee and the organization. Therefore, the company is committed to continuously improve the capacity and capability of human resources, which is realized with a budget cost of training and human resources development for IDR4.96 billion in 2014.



Tanggung Jawab Sosial dan PKBL Perseroan

Corporate Social Responsibility and PKBL Program

Dampak positif penerapan Tata Kelola Perusahaan melahirkan 3 unsur penting:

- *People* {aspek sosial}, menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu mengadaptasi nilai-nilai GCG.
- *Profit* {aspek ekonomi}, mengoptimalkan perolehan laba dan mencapai pertumbuhan yang tinggi.
- *Planet* {aspek lingkungan}, berkontribusi nyata terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

The positive impact of the application of good Corporate Governance Principle brings about 3 key element; i.e:

- *People* (social aspect), bringing about human resources having competency and adaptability to GCG values..
- *Profit* (economic aspects), optimizing the profit gained and attaining the high growth.
- *Planet* (environmental aspects), providing real contribution to the environment and community empowerment.

Tanggung Jawab Sosial

Social Aspect



Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, Perusahaan, bekerja sama dengan PMI telah menyelenggarakan donor darah di lingkungan perusahaan pada tanggal 4 November 2014. Program donor darah ini juga mengundang para tamu yang pada saat kegiatan tersebut berada di lokasi. Acara tersebut di Kegiatan donor darah ini berhasil mengumpulkan 80 kantong darah untuk disumbangkan kepada masyarakat melalui PMI.

As a form of concern for humanity, the Company, in cooperation PMI has organized blood donations in the corporate environment on November 4, 2014. This event also invited public who live near the office. The blood donor activity was able to collect 80 blood bags to be donated to the community through the PMI.

Program Kemitraan Economic Aspect

Program Kemitraan adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman dana kemitraan untuk modal kerja dan investasi serta bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi usaha kecil menengah (UKM). Akumulasi Penyaluran dana kemitraan sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp3,31 miliar atau terserap 98% dari akumulasi sumber dana yang sebesar Rp3,37 miliar.

Partnership Program is a program of economic empowerment and improvement of society through the provision of partnership loans for working capital and investment and development assistance in the form of business management training assistance, marketing assistance (promotion/exhibition) and others. This program aims to improve the competence of small and medium Enterprises (SMEs) to become strong and independent and can absorb new workers. Fund distribution partnership in 2014 amounted to USD 825 million or absorbed 59% of the RKA in 2014 amounted to IDR1.40 billion. Distribution of funds rose 450% compared to 2013. The significant increase is due to the increase of loans around services and other sectors.



Tahun Year	Dana Tersedia Fund available	Dana Tersalurkan Fund Channeled	Persentase Percentage
2014	889,55 juta	825 juta	92,20%
2013	505,32 juta	150 juta	29,68%

Bina Lingkungan Environmental Aspect

Program Bina Lingkungan diutamakan untuk kegiatan sosial khususnya untuk masyarakat di sekitar lokasi proyek di seluruh Indonesia, terutama untuk:

- Korban bencana alam
- Pendidikan dan /pelatihan
- Peningkatan kesehatan
- Pengembangan sarana dan prasarana umum
- Bantuan sarana peribadatan
- Bantuan Pelestarian alam

Community Development Program prioritized for social activities, especially for the communities around the project site in Indonesia, especially for:

- Victims of natural disasters
- Education and training
- health improvement
- The development of public infrastructure
- Help places of worship
- Nature conservation assistance



STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategy and Policy



Mempertahankan Market Leader Pengairan Maintain Position as Market Leader in Irrigation

Lebih dari 34 tahun pengalaman pada jasa konstruksi pengairan, membuat perseroan makin mantap menyanggah gelar sebagai "Market Leader" di antara perusahaan konstruksi lain. Oleh karena itu, perseroan tetap mengandalkan segmen yang sudah menempati posisi kurang lebih 70% ini sebagai "core competence" karena memberikan margin yang relatif tinggi. Proyek dari pemerintah masih mempunyai daya tarik yang cukup kuat, maka proyek-proyek pemerintah masih mendominasi proyek-proyek perseroan. Selama 3 tahun terakhir nilai proyek pemerintah di atas 75% dari total nilai proyek perseroan sebagai "anchor" atas keterjaminan pembayaran. Perseroan juga mulai meningkat pendapatan dari segmen jasa konstruksi lain non pengairan.

More than 34 years of experience in construction of irrigation, making the company more firmly hold the title as the "Market Leader" among other construction companies. Therefore, the company still relies segment already occupies a position of approximately 70% of this as "core competence" because it provides a relatively high margin. The project of the government still has a strong enough appeal, the government projects still dominate the company's projects. Over the last 3 years the government project value above 75% of the total value of the company's projects as "anchor" for the assuredness of payment. The company also began to increase revenue from other segments of the construction services of non irrigation.



Diversifikasi Pasar dan Produk Markets and Products Diversification

Perseroan menjalankan strategi diversifikasi pasar dengan melakukan penetrasi pasar-pasar baru dari sisi pemberi kerja serta diversifikasi produk dengan melakukan pengembangan produk jasa konstruksi. Secara keseluruhan, proyek dari pemerintah masih memiliki daya tarik yang cukup kuat. Jenis layanan proyek sipil didorong terus untuk tumbuh serta melakukan investasi sumber daya baru (khususnya peralatan konstruksi), sedangkan proyek Gedung masih dalam kategori pertumbuhan yang cukup selektif. Sasaran diversifikasi utama Perseroan adalah Jalan, Jembatan dan Gedung. Ketiga jenis produk layanan tersebut ditawarkan pada dua jenis pasar utama yaitu Pemerintah dan Swasta. Perseroan masih harus selektif dan mengukur risiko terhadap proyek-proyek dari swasta pada bidang gedung.

The Company operates verified strategy to penetrate the market with new markets of the employer as well as the product is verified by conducting product development services, construction. Overall, the project of the government still has an appeal that is strong enough. Driven civil service type project continues to grow and invest new resources (especially construction equipment), while the building project is still in a fairly selective growth category. The Company's main products are building services and civil, as well as the EPC. The three types of products that service is offered at two types of major markets, namely the Government and the private sector. The company still need to be selective and quantify risks to projects from the private sector in the field of building and civil.the private sector in the field of building and civil.



Pengembangan Portofolio Usaha Business Portfolio Development

Kebijakan pemerintah tentang optimalisasi usaha dan optimalisasi aset bagi perusahaan BUMN disambut dengan antusias oleh Manajemen Brantas Abipraya. Selain pembentukan anak perusahaan PT BRANTAS ENERGI juga dilakukan pengembangan portofolio usaha lain melalui pembangunan pabrik beton pracetak serta pembentukan unit usaha properti.

The government's policies on business optimization and asset optimization for state-owned companies was greeted with enthusiasm by the management Brantas Abipraya management. In addition to the establishment of a subsidiary of PT BRANTAS ENERGI also conducted other business portfolio development through the construction of precast concrete factories and the establishment of property business unit.

Anak Perusahaan - Brantas Energi Subsidiary - Brantas Energi



Perseroan juga melakukan diversifikasi usaha dan mengembangkan bisnis melalui Entitas Anak Perseroan yaitu PT Brantas Energi yang berkecimpung didalam investasi Pembangkit Listrik Hydro Power. PT Brantas Energi memiliki kemampuan yang didukung pengalaman serta potensi yang besar di bidang konstruksi dan ketenagalistrikan, berdasarkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sesuai motto kami "*Eco Responsible*". PT Brantas Energi diharapkan mampu berkembang dan berperan dalam menyediakan pasokan tenaga listrik terbarukan yang berkelanjutan. Dengan telah dibukanya peran serta investasi swasta oleh pemerintah dalam bidang penyediaan pasokan tenaga listrik, kami optimis PT Brantas Energi dapat berkembang dan tumbuh sebagai pengembang Hydro Power terkemuka di Indonesia. Dan juga secara resiko, pemilihan investasi di bidang Hydro Power ini mempunyai resiko yang tidak „linear” dengan resiko sektor Konstruksi, sehingga ke depannya diharapkan arus kas Perseroan dapat lebih kuat dan „sustain”.

The Company also diversified its business through developing a business through the Company's Subsidiary, PT Brantas Energi is engaged in investment Power Hydro Power. PT Brantas Energi with the ability and supported by the experience and potential of the Company in the field of construction and electricity power based on a concern for environmental conservation in accordance motto "*Eco Responsible*". PT Brantas Energi is expected to grow and play a role in providing renewable electrical power supply sustainable. With the opening of the participation of private investment by the government in the provision of electricity supply, we are optimistic PT Brantas Energi can develop and grow as a leading developer of Hydro Power in Indonesia. As well as the risks, the selection of investments in Hydro Power is at risk is not "linear" risk construction sector, so that the future cash flows expected to be more robust and sustain.

Abipraya Beton (Precast)

Abipraya Beton

Perseroan berupaya mengembangkan bisnis beton pracetak yang dimilikinya. Perseroan memiliki 2 sumber untuk memenuhi kebutuhan Perseroan akan beton pracetak, yaitu melakukan pembelian dari eksternal dan produksi internal. Sebagian besar dari beton pracetak yang digunakan Perseroan berasal dari pembelian eksternal. Perseroan telah memiliki 3 (tiga) lokasi produksi beton precast yaitu di Sunter-jakarta, Porong-Sidoarjo dan Padang-Sumatera Barat, yang mempunyai total kapasitas produksi sebesar 207.000 meter kubik per tahun. Unit usaha ini adalah sebagai cikal bakal dari awal bisnis Beton ke depan. Divisi beton ini di tahun 2014 mampu berkontribusi pada pendapatan sebesar Rp11,07 miliar. Bahkan di tahun 2013 sempat tercatat di rekor MURI dalam pekerjaan terowongan underpass terpanjang dengan sistem "jacking".

The Company strives to develop its precast concrete business. The Company has two sources to meet the needs of the Company will be precast concrete, which make the purchase of external and internal production. Most of precast concrete in use shall be made from the external purchases. Company has three (3) precast concrete production sites, namely in Sunter-jakarta, Porong-Sidoarjo and Padang, West Sumatra, which has a total production capacity of 207,000 cubic meters per year. This business unit is a forerunner of early Concrete Company's business forward. The concrete division in 2014 were able to contribute to the revenue of IDR11.07 billion. Even in 2013 company got award from MURI for the work of the longest tunnel underpass with a system of "jacking".



Abipraya Properti

Abipraya Properti

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan, mulai dijajaki pengembangan bisnis properti melalui kerjasama dengan konsultan yang berpengalaman menggeluti bisnis properti. Dalam hal organisasi perusahaan melakukan rintisan pembentukan unit usaha strategis di bidang properti.

In order to optimize the utilization of assets of the company, started to explore the development of the property business through cooperation with experienced consultants in the business of property. In terms of the company's organization did pioneering formation of strategic business units in the property.

DAFTAR ISI

Table of Content

Pencapaian Tahun 2014 Achievement 2014	2
Strategi dan Kebijakan Strategy and Policy	8
Daftar Isi Table of Content	12
KILAS KINERJA 2014 PERFORMANCE HIGHLIGHT	17
Ikhtisar Data Keuangan Financial Highlight	18
Proyek-proyek Yang Telah diselesaikan Tahun 2014	
The Projects have been Completed in 2014	22
Peristiwa-peristiwa penting Event Highlight	26
LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI MANAGEMENT REPORT'S ..	29
Laporan Dewan Komisaris Board Of Commissioner's Report	30
Laporan Dewan Direksi Board Of Director's Report	34
Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2014	
Management's Responsibility on Annual Report 2014.....	38
PROFIL PERUSAHAAN MANAGEMENT REPORT'S	41
Nama Dan Alamat Identitas Perusahaan	
The Name and Address of the Company's Identity.....	42
Jejak Langkah Milestone.....	44
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History.....	46
Bidang Usaha Business Fields.....	48
Struktur Organisasi Organization Structure.....	50
Visi & Misi Vision & Mission	52
Identitas & Riwayat Hidup Dewan Komisaris dan Direksi	
Commissioners' and Directors' Identity and Curriculum Vitae	54
Dewan Direksi Board of Directors.....	60
Komposisi Pemilikan Saham Composition of Stock Ownership	62
Profil Anak Perusahaan Profile Subsidiary.....	64
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	66
Profil Lembaga Penunjang Profile Supporting Institutions	68
Daftar Alamat Addresses	70

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 73

Tinjauan Industri Industry Review.....	74
Kondisi Umum Global Global General Condition.....	75
Kondisi Umum Domestik General Domestic Condition.....	76
Industri Industry.....	77
Tinjauan Operasional Operational Review.....	84
Tinjuan Operasi Per Segmen Usaha	
Operational Overview Per Business Segment.....	84
Kegiatan Usaha Business Activities.....	85
Kinerja Segmen Usaha Jasa Konstruksi	
Performance of Construction Segment.....	86
Kinerja Pemasaran Marketing Pemasaran.....	86
Kinerja Operasional Operational Performance.....	88
Pengairan Irrigation.....	88
Jalan dan Jembatan Roads and Bridges.....	89
Gedung/ Bangunan Buildings/ Constructions.....	90
Kelistrikan Electricity.....	90
Prasarana perhubungan laut dan udara	
Sea and air transportation facilities.....	90
Kinerja Segmen Usaha Non Konstruksi	
Performance of Non Construction Business Segment.....	91
Proses Bisnis Business Process.....	91
Aspek Pemasaran Marketing Aspects.....	91
Pangsa Pasar Market Share.....	92
Pemasaran Marketing.....	93
Pelanggan & Daya Saing Customer & Competitiveness.....	95
Segmen Pasar Market Segment.....	95
Pelanggan Berulang Recurring Customers.....	95
Daya Saing Competitiveness.....	96

Aspek Produksi Aspect Production	97
Pengendalian Mutu (Quality Control) Quality Control (Quality Control).....	97
Kebutuhan Investasi Mesin/Alat Berat	
Machinery/Heavy Equipment Investment Requirement.....	98
Bahan Baku Raw Material.....	98
Strategi Usaha Business Strategy.....	99
Tinjauan Keuangan Financial Review	100
Kinerja Keuangan Financial Performance	100
Pendapatan Usaha Operating Revenues.....	101
Beban Langsung Direct Expenses.....	102
Bagian Laba Joint Operation (JO) Profit Joint Operation (JO)	104
Beban Usaha Operating Expenses	105
Laba Usaha Operating Profit.....	105
Laba Bersih Tahun Berjalan Current Year Net Profit	106
Aset, Liabilitas dan Ekuitas Assets, Liabilities and Equity	107
Aset Asset.....	107
Liabilitas Liabilities	111
Likuiditas Equity.....	116
Struktur Modal Capital Structure	117
Dampak Perubahan Harga The Impact Of Price Changes	118
Perbandingan RKAP Dan Realisasi Comparison RKAP And Realization	119
Prospek Usaha 2015 Business Prospects in 2015.....	120
Kebijakan Dividen Dividend Policy.....	122
Informasi Penting Important Information	123

TATA KELOLA PERUSAHAAN | GOOD CORPORATE GOVERNANCE 129

Dasar-Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan	
Basics Corporate Governance Implementation.....	130
Pedoman Implementasi GCG GCG Implementation Guidelines	131
Prinsip-Prinsip GCG Principles GCG	132
Transparansi Transparency.....	132
Kewajaran Fairness	133
Akuntabilitas Accountability	134
Pertanggungjawaban Responsibility.....	135

Kemandirian Independency.....	136
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure.....	137
Pemegang Saham Dan RUPS Shareholders and RUPS.....	137
Komisaris Commissioner	138
Direksi Board of Directors.....	146
Komite Audit Audit Committee	147
Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Control Unit.....	150
Auditor Eksternal External Auditor	151
Sekretaris Perseroan Corporate Secretary.....	153
Proses Tata Kelola Governance Process	151
Organ Persero Company Units.....	168
Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct	184

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 203

Sumber Dana Source of Funds	204
Realisasi Program Kemitraan Partnership Program Realization	205
Realisasi Program Kemasyarakatan Realization Community Program	206

SUMBERDAYA MANUSIA | HUMAN RESOURCES 209

Profil Sumberdaya Manusia Profile Human Resources.....	210
Penghormatan Terhadap Karyawan Prestige of Employees.....	220

LAPORAN KEUANGAN | FINANCIAL STATEMENT





KILAS KINERJA

Performance Highlight

Secara umum kondisi makro perekonomian Indonesia tahun 2014 kurang menguntungkan bagi dunia usaha termasuk industri konstruksi.

Dua faktor utama penyebab kondisi ini adalah

1. Diselenggarakannya pemilihan umum
2. Terlampauinya anggaran BBM bersubsidi

Namun demikian Perseroan masih dapat memenuhi target-target yang ditetapkan dalam RKAP dengan strategi dan kebijakan korporasi yang tepat.

In general macro-economic conditions of Indonesia in 2014 are less favorable for the business world including the construction industry.

Two major factors causing this condition is

1. Election
2. Exceeding subsidized fuel budget

However, the Company is able to meet the targets set out in the CBP with corporate policy and the right strategy.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Financial Highlight

Ikhtisar Hasil Usaha

Dalam Jutaan Rupiah

Operational Overview

(in million rupiah)

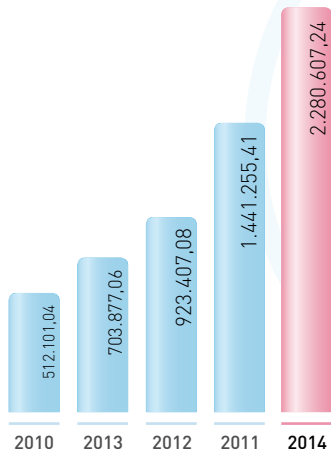
URAIAN	2014	2013	2012	2011	2010	DESCRIPTION
Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian						Consolidated Income (Loss) Statement
• Pendapatan Usaha	2.280.607,24	1.441.255,41	923.407,08	703.877,06	512.101,04	Operating Revenue •
• Beban Langsung	(2.053.888,97)	(1.285.793,92)	(830.607,26)	(622.655,17)	(439.101,46)	Direct Expenses •
Laba Kotor-Sebelum Bagian Laba Joint operation	226.718,26	155.461,48	92.799,83	81.221,89	72.999,58	Gross Profit-Before Profit of Joint Operation
• Bagian Laba Joint Operation	39.776,40	74.171,43	79.163,77	27.809,46	20.528,29	Profit of Joint Operation •
Laba Kotor	266.494,66	229.632,92	171.963,60	10.903.135,00	93.527,87	Gross Profit
• Beban Usaha	(80.891,72)	(68.352,15)	(52.885,42)	(43.539,60)	(38.177,67)	Operating Expense •
Laba Usaha	185.602,94	161.280,77	119.07,18	65.491,75	55.350,20	Operating Profit
• Pendapatan (Beban) lain-lain	(6.888,46)	(19.306,80)	(6.827,63)	13.261,12	1.732,83	Other Income (Expenses) •
Laba Sebelum Beban Bunga dan Pajak Penghasilan	178.714,49	141.973,97	112.250,55	78.752,87	57.083,03	Earning Before Interest and Tax
• Beban Bunga	(27.584,12)	(32.632,81)	(39.953,49)	(38.745,37)	(30.743,46)	Interest Expense •
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	151.130,37	109.341,16	72.297,06	40.007,50	26.339,57	Earning Before Tax
• Beban Pajak Penghasilan Bersih	(60.294,44)	(36.557,20)	(21.459,62)	(13.994,76)	(9.350,68)	Expenses net income Tax Benefits •
Laba Bersih Tahun Berjalan	90.835,92	72.783,96	50.837,44	26.012,74	16.988,90	Current Year Net Profit

Ikhtisar Posisi Keuangan

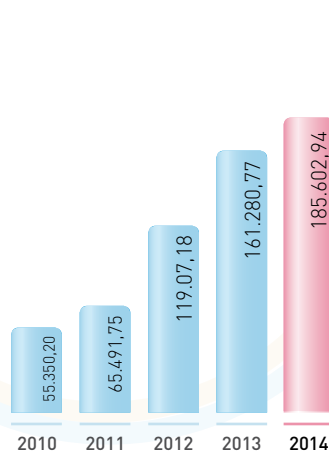
Consolidated Statements of Financial Position

URAIAN	2014	2013	2012	2011	2010	DESCRIPTION
• Total Aset Lancar	1.253.456,31	858.224,43	642.729,67	387.032,47	403.575,22	Total Current Assets •
• Total Aset Tidak Lancar	382.664,54	290.204,12	267.245,25	253.708,27	243.697,52	Total Non-Current Ass •
JUMLAH ASET	1.636.120,84	1.148.428,55	909.974,91	640.740,74	647.272,74	TOTAL ASSET
• Total Liabilitas Jangka Pendek	971.688,70	481.559,74	424.547,80	272.742,88	229.915,53	Total Current Liabilities •
• Total Liabilitas Jangka Panjang	289.723,92	379.490,58	270.892,85	205.980,78	281.872,86	Total Long-Term Liabilities •
Total Liabilitas	1.261.412,62	861.050,32	695.440,64	478.723,66	511.788,40	Total Liabilities
Total Ekuitas	374.708,23	287.378,23	214.534,27	162.017,08	135.484,34	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.636.120,84	1.148.428,55	909.974,91	640.740,74	647.272,74	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

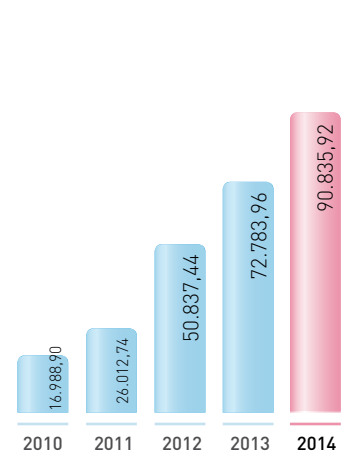
PENDAPATAN USAHA | OPERATING REVENUE



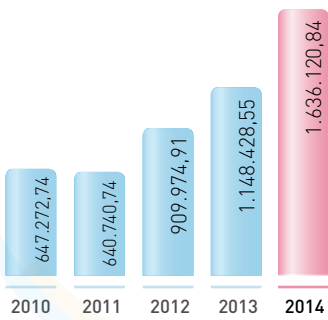
LABA USAHA | OPERATING PROFIT



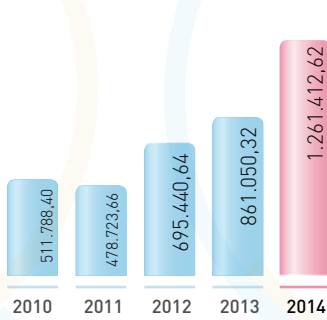
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN | CURRENT YEAR NET PROFIT



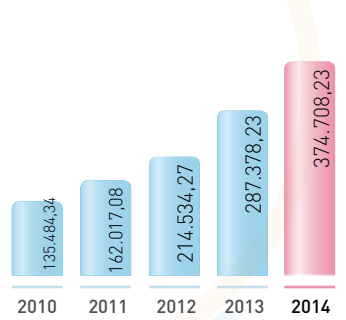
JUMLAH ASET | TOTAL ASSET



TOTAL LIABILITAS | TOTAL LIABILITIES



TOTAL EKUITAS | TOTAL EQUITY

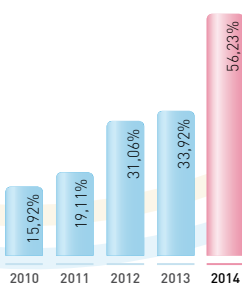


Ikhtisar Rasio Keuangan

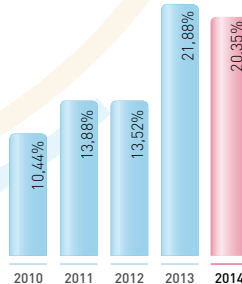
Financial Ratio

URAIAN	2014	2013	2012	2011	2010	DESCRIPTION
Imbal Balik Modal	56,23%	33,92%	31,06%	19,11%	15,92%	Return on Equity (ROE)
Imbal Balik Investasi	20,35%	21,88%	13,52%	13,88%	10,44%	Return on Investment (ROI)
Rasio Kas	47,08%	91,61%	45,97%	47,47%	20,40%	Cash Ratio
Rasio Lancar	129,00%	178,82%	151,39%	141,58%	122,33%	Current Ratio
Periode Penagihan	95,09	91,61	79,24	52,29	47,10	Collection Period
Perputaran Persediaan	6,39	9,49	5,29	10,01	11,85	Inventory Turn Over
Perputaran Aset	139,39%	125,18%	183,59%	176,87%	133,45%	Total Asset Turn Over
Ekuitas Terhadap Aset	17,35%	14,03%	23,58%	25,23%	20,93%	Equity to total Assets

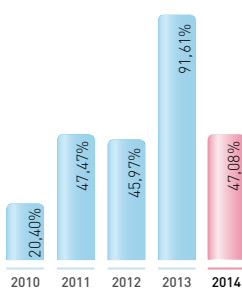
IMBAL BALIK MODAL
RETURN ON EQUITY (ROE)



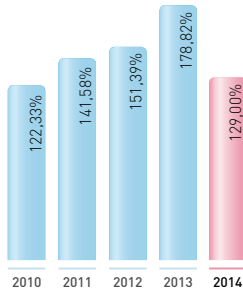
IMBAL BALIK INVESTASI
RETURN ON INVESTMENT (ROI)



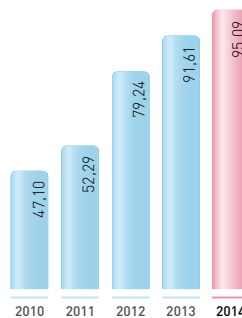
RASIO KAS
CASH RATIO



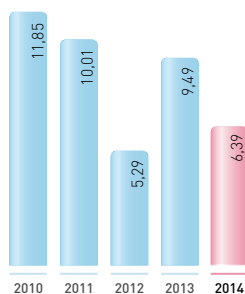
RASIO LANCAR
CURRENT RATIO



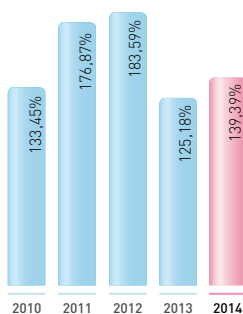
PERIODE PENAGIHAN
COLLECTION PERIOD



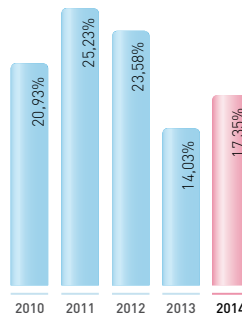
PERPUTARAN PERSIDIAAN
INVENTORY TURN OVER



PERPUTARAN ASET
TOTAL ASSET TURN OVER



EKUITAS TERHADAP ASET
EQUITY TO TOTAL ASSETS





FLYOVER BUKITTINGGI

Terletak di Sumatra Barat, mulai dikerjakan pada 6 Desember 2013 dan selesai pada 30 Desember 2014

Located in West Sumatra, began working on December 6, 2013 and completed on December 30, 2014

PROYEK-PROYEK YANG TELAH DISELESAIKAN TAHUN 2014

The Projects have been Completed in 2014



MULTIPURPOSE DAM JATIBARANG



PANDANDURI DAM



TEMPE BARRAGE



MERAPI MOUNTAIN
SABO DAM CONSTRUCTION



BUKIT TINGGI FLY OVER



DOLAGO BRIDGE



CIBUBUR UNDERPASS



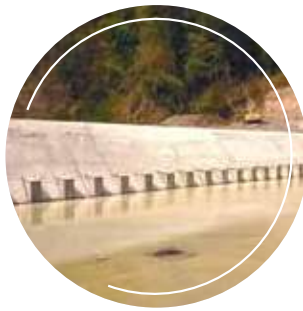
DEKAI-OKSIBIL ROAD



TRANS KALIMANTAN



SUNTER RIVER NORMALITATION



RAIBERE IRIGATION PROJECT



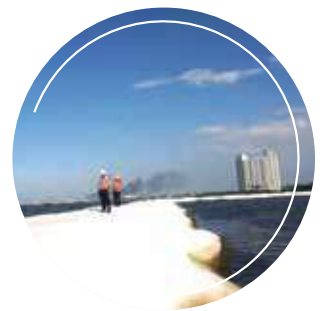
JATIBARANG DIVERSION TUNNEL



PANDANDURI TUNNEL



HOT MUD DISASTER MITIGATION



ANCOL GEOTUBE



RUSUNAWA JATIM



RUSUNAWA JATENG



JUANDA TERMINAL 2 AIRPORT



TANGERANG CITY HALL



BEKASI AQUATIC



DISTRICT GENERAL HOSPITAL OF
BEKASI



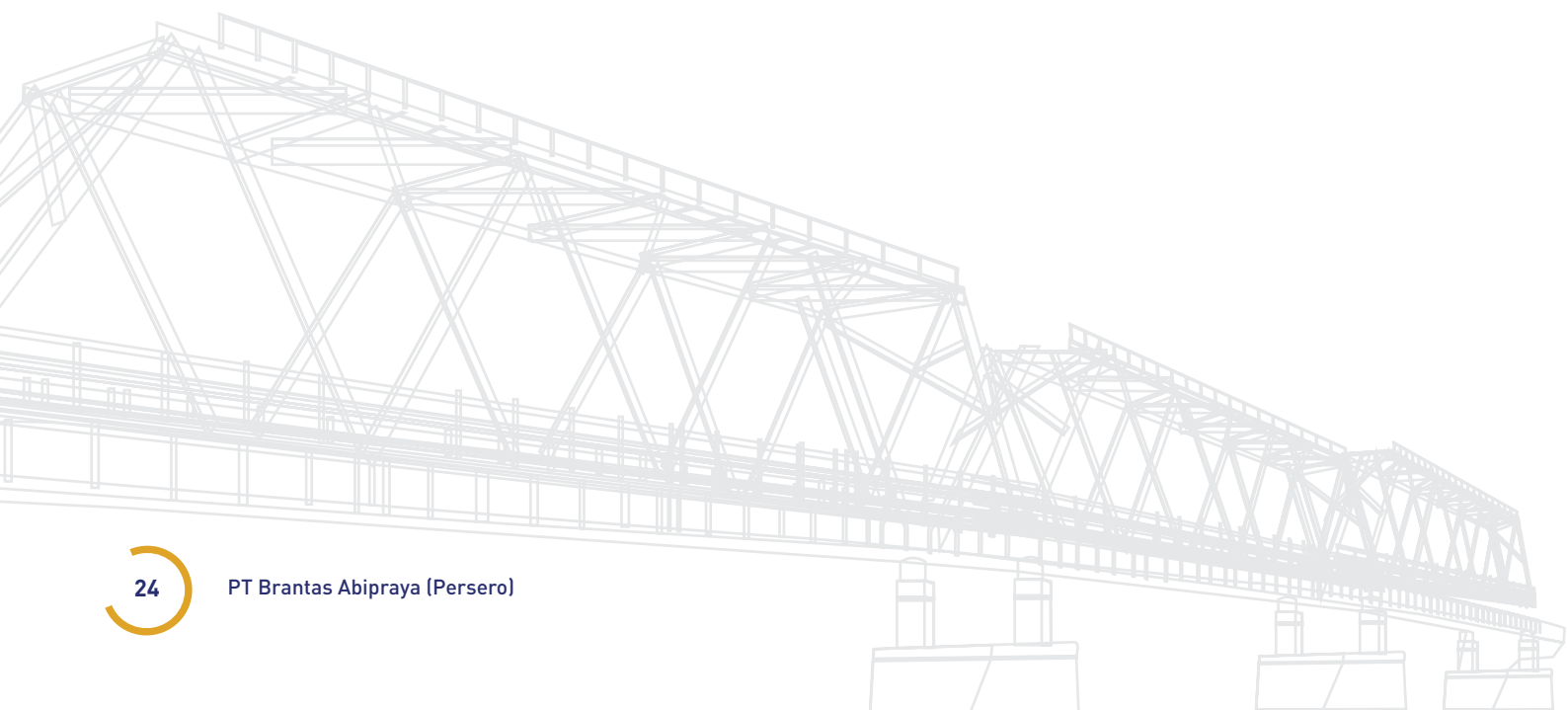
NDUNGA MICRO HYDRO
POWER PLANT



SANTONG MICRO HYDRO
POWER PLANT



PRAFI MICRO HYDRO POWER
PLANT





JEBATAN BUOL

Jembatan Buol terletak di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Buol. Dengan panjang 220 meter, jembatan ini selesai dikerjakan dengan waktu pengerjaan 540 hari.

The bridge is located in Buol, Central Sulawesi, precisely in Buol. With a length of 220 meters, the bridge is completed with the processing time of 540 days.

PERISTIWA-PERISTIWA PENTING

Event Highlight



27-29 Januari | January 27-29
Rapat Kerja 2014
Annual Meeting 2014



27 Maret | March 27
RUPS Hasil Usaha 2013
Profit Sharing AGM 2013



8 Mei | May 8
Pameran Hari Air Dunia 2014
Exhibition of World Water Day 2014



2-4 September | September 2-4
Rapat Kerja 2014
Annual Meeting 2014



5 September | September 5
Ground Breaking PLTM Padang Guci, Bengkulu
Ground Breaking hydropower Jar Padang,
Bengkulu



2 Oktober | October 2
Pengangkatan Direksi Baru
Split Welcomes Directors Abipraya



12 November | November 12
Peringatan HUT PT Brantas Abipraya
Anniversary of PT Brantas Abipraya



12 November | November 12
Abipraya Vendor Gathering
Abipraya Vendor Gathering



14 November | November 14
Penandatanganan MOU dengan JAMDATUN
MOU signing ceremony



1-6 Juni | June 1-6

International Commission on Large Dams (ICOLD) 2014
International Commission on Large Dams (ICOLD) 2014



23 Juli | July 23

Mudik Bersama
the homecoming Together



4 Agustus | August 4

Halal Bihalal
Halal Bihalal



3 November | November 3

Penghargaan Bumh Terbaik 2014
Wins Best Enterprises 2014



4 November | November 4

Kegiatan Donor Darah
Blood Donation Activity



8-9 November | November 8-9

Tournamen Tenis Meja ABIPRAYA CUP
Table Tennis friendly match



15 November | November 15

Abipraya Family Gathering
Abipraya Family Gathering



16 November | November 16

Abipraya Golf Gathering
Abipraya Golf Gathering



20 Desember | December 20

Khitanan Massal
Mass Circumcision

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL YIMAKASSAR
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH SULTENG





LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Management Report's

Untuk memperkuat usaha, Perusahaan melakukan diversifikasi usaha dengan mendirikan anak perusahaan yang bergerak dalam pengembangan ketenagalistrikan yang bersifat green energy, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan precast beton yang semakin meningkatkan perusahaan telah mendirikan unit usaha precast beton sehingga diharapkan bisa meningkatkan efisiensi usaha dan mampu bersaing. Dalam implementasi pengembangan usaha baru tersebut Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi supaya tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan terlebih dahulu melakukan kajian yang komprehensif terhadap setiap proyek sebagai prasyarat.

To strengthen the business, the Company diversified its business by setting up a subsidiary wich engaged in the development of the electricity that is green energy, and in order to meet the needs of precast concrete which further increased the company has established a business unit precast concrete so expect can improve business efficiency and ability to compete. In the implementation of the new business development BOC always remind the Board of Directors in order to keep running the precautionary principle and first doing a comprehensive study on each project as a prerequisite.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioner's Report



Hedyanto W. Husaini
Komisaris Utama |
President Commissioner

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa PT Brantas Abipraya (Persero) pada tahun buku 2014 telah mengalami pertumbuhan yang cukup baik, terlihat dari meningkatnya laba bersih, aset dan ekuitas perusahaan dari tahun sebelumnya dari tahun sebelumnya serta kepercayaan dari dunia jasa konstruksi.

Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 kinerja Perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yang terlihat dari pertumbuhan: laba sebesar 24,80%, Total Aset 42,47% serta Ekuitas sebesar 30,39% dari tahun sebelumnya. Juga Dewan Komisaris memberikan apresiasi pada Jajaran Direksi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan atas capaian kinerja produksi bisa mencapai 100,78% dari RKAP yang selama kurun waktu dari Tahun 2010 – 2014 belum pernah mencapai target. Dengan keberhasilan tersebut diharapkan pada tahun-tahun mendatang bisa meraih keberhasilan yang lebih baik lagi.

By saying grace the presence of Allah the Almighty PT Brantas Abipraya (Persero) in the financial year 2014 has experienced a fairly good growth, evident from the increase in net income, assets and equity from the previous year's and the trust from construction services.

BOC provides the highest awards to the entire Board of Directors. In the 2014 Financial Statements the Company's performance to experience high growth as seen from the growth: profit of 24.80%, 42.47% Total Assets and Equity amounted to 30.39% from the previous year. BOC also gave appreciation to the Board of Directors may increase the ability of the company on the production performance achievements can be reached 100.78% of CBP that during the period from year 2010 to 2014 has never reached the target. With this success is expected in the coming years could achieve better success again.

Dalam upaya menghadapi persaingan yang semakin ketat, perlu membangun Perusahaan yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dan mitra kerja, keuntungan serta nilai tambah bagi Pemegang Saham, peningkatan kompetensi, jenjang karier, dan kesejahteraan karyawan, serta mampu memenuhi harapan stakeholder lainnya. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu peningkatan komitmen bersama dalam menjalankan proses bisnis selain mengacu pada persyaratan Standar Sistem Manajemen Mutu, juga mengacu pada prinsip-prinsip GCG, BUMN Bersih, dan penilaian kinerja berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), serta adanya peningkatan komitmen pengelolaan resiko sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi perusahaan. Dengan demikian diharapkan seluruh manajemen dan staf dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan dimasa mendatang. Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan menghadapi persaingan usaha, Dewan Komisaris menyambut baik bahwa Direksi melakukan perubahan struktur organisasi pada tahun 2014 dengan menyempurnakan sistem sentralisasi, penggabungan fungsi pengelolaan alat dengan fungsi operasi produksi, fungsi pemasaran dengan produksi, merampingkan organisasi serta memperpendek sistem birokrasi. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan bisa meningkatkan efisiensi operasi perusahaan.

Selain itu untuk memperkokoh usaha, Perusahaan melakukan diversifikasi usaha dengan mendirikan anak perusahaan PT Brantas Energi yang bergerak dalam pengembangan ketenagalistrikan yang bersifat green energy, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan precast beton yang semakin meningkatkan perusahaan telah mendirikan unit usaha precast beton sehingga diharapkan bisa meningkatkan efisiensi usaha dan mampu bersaing. Dalam implementasi pengembangan usaha baru tersebut Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi, prinsip kehati-hatian dan terlebih dahulu melakukan kajian yang komprehensif terhadap setiap proyek sebagai prasyarat.

Pada tahun 2014 banyak saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dan aspirasi Pemegang Saham yang telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan jajarannya. Untuk masa mendatang dalam rangka mencapai target RKAP yang telah disepakati Direksi agar terus memperbaiki tingkat efisiensi, efektivitas, prosedur kerja, dan kualitas SDM yang dampaknya akan bisa meningkatkan

In facing increasingly tight competition, it needs to build a Corporate responsibility and is able to provide satisfactory service to customers and partners, gains and added value for shareholders, increased competence, career, and employee benefits, as well as to meet the expectations of other stakeholders. To implement this needs to increase joint commitment in running business processes in addition to referring to the requirements of the Quality Management System Standards, also referring to the principles of GCG, SOE Clean, and performance assessment based Superior Performance Assessment Criteria (KPKU), as well as an increase in the risk management commitments so that it can benefit the company. It is expected the entire management and staff can realize the vision and mission of the company in the future. To support the company's growth and to face competition, the Board welcomed the news that the Board of Directors to change the organizational structure in 2014 with menyempurnakan centralized system, merging tool management functions with functions production operatinal function, marketing function with the production, streamlining the organization and shorten the bureaucratic system. These changes are expected to improve the operating efficiency of the company.

In addition to strengthening the business, the Company diversified its business by setting up a subsidiary company of PT Brantas Energi is engaged in the development of the electricity that is green energy, and in order to meet the needs precast concrete which further increased the company has established business units precast concrete which is expected to improve business efficiency and ability to compete. In the implementation of the new business development BOC always remind the Board of Directors, the precautionary principle and first doing a comprehensive study on each project as a prerequisite.

In 2014 a lot of suggestions and recommendations of the Board of Commissioners and the aspirations of Shareholders which has been acted upon by the Board of Directors and staff. For the foreseeable future in order to achieve the agreed targets RKAP Board of Directors to continue to improve the efficiency, effectiveness, work procedures, and quality of human resources that impact

kinerja Perusahaan, dengan langkah-langkah yang perlu ditempuh diantaranya meningkatkan kinerja pemasaran, memperluas pangsa pasar diluar bidang Sumber Daya Air (SDA), dan memperluas pangsa pasar pada proyek-proyek swasta

Dalam rangka mendukung penerbitan dan mengembangkan Sistem Teknologi dan Informasi Perusahaan termasuk program Akuntansi, serta standar prosedur operasi Perusahaan, serta dalam pelaksanaan operasi perusahaan perlu patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk memperkuat perusahaan, agar lebih fokus dan mendorong perkembangan Anak Perusahaan PT Brantas Energi dan melakukan pengendalian atas pengelolaannya. Serta mengembangkan Unit Usaha Beton yang bis mendukung kegiatan utama perusahaan dibidang industri kontruksi dan memperluas pasar produk-produk beton tersebut.

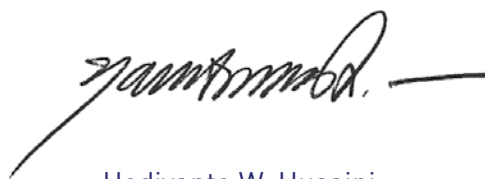
Akhir kata, kepada Direksi dan jajarannya, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas dukungan dan perhatiannya bagi Perseroan sepanjang 2014. Semoga Perseroan dapat semakin meningkatkan kinerjanya dan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada di masa depan. Terima kasih.

will be able to improve the performance of the Company, with the steps that need to be taken include improving marketing performance, expanding market share beyond field of Water Resources (SDA), and expand market share in private projects

In order to support the publishing and developing Systems and Information Technology Company including accounting programs, as well as the Company's standard operating procedures, as well as in the implementation of the company's operations need to adhere to rules and regulations.

To strengthen the company, to be more focused and to encourage the development of Subsidiary PT Brantas Energi and exercise control over pengelolaannya. As well as developing the bus Concrete Business Unit to support the company's main activities in the field of construction industry and expand the market of the concrete products.

Finally, the Board of Directors and staff, the Board expressed thanks for the support and cooperation in carrying out the duties and functions of each. The Board of Commisioners also thanked the shareholders for their support and concern for the Company throughout 2014. We wish the Company to further improve its performance and more robust in the face of challenges and exploit opportunities in the future. Thank you.



Hedyanto W. Husaini

Komisaris Utama | President Commissioner



Adhy Duriat Soemono
Komisaris
Commissioner

R. Eko Subekti
Komisaris
Commissioner

Hediyanto W. Husaini
Komisaris Utama
President Commissioner

H. Ramli Ibrahim
Komisaris
Commissioner

LAPORAN DEWAN DIREKSI

Board of Director's Report



Bambang E. Marsono

Direktur Utama
President Director

Bagi bangsa Indonesia, tahun 2014 adalah tahun politik. Dua peristiwa politik besar terjadi di tahun 2014, yaitu Pemilu Legislatif di bulan April dan Pemilu Presiden di bulan Juli. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap denyut roda perekonomian di tanah air. Dari sisi anggaran, pemerintah terpaksa melakukan koreksi terhadap APBN 2014 sebagai akibat dari meningkatnya subsidi BBM.

Kondisi di atas mengakibatkan pertumbuhan PDB Nasional 2014 hanya mencapai 5,1%, jauh dibawah rata-rata 5 tahun terakhir yang mencapai 6,2%. Bagi sektor konstruksi, akibat langsung yang dirasakan adalah; (1) beberapa proyek ditunda pelaksanaan tendernya, (2) beberapa proyek, khususnya proyek pemerintah, harus mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan.

For the Indonesian, 2014 was a political year. Two major political events occurred in 2014, namely the legislative elections in April and presidential elections in July. These conditions directly influence the pulse of the economy in the country. In terms of budget, the government was forced to make corrections to the 2014 state budget as a result of increasing fuel subsidies.

The above conditions resulted in the growth of national GDP in 2014 was only 5.1%, far below the average of the last 5 years to reach 6.2%. For the construction sector, the direct result is perceived; (1) some projects delayed implementation of the tender, (2) some of the projects, in particular government project, should experience significant budget cuts.

PT Brantas Abipraya (Persero), sebagai bagian dari industri konstruksi nasional juga tidak terlepas dari kondisi di atas. Realisasi perolehan kontrak baru hanya tercapai 63,7% dari RKAP menjadi gambaran nyata dari situasi tersebut. Namun demikian, dari sisi produksi perusahaan justru mencatat prestasi yang sangat baik, dengan pencapaian penjualan dan laba yang lebih tinggi dari target RKAP. Capaian yang sangat menggemblirakan ini merupakan hasil dari kerja keras dan cerdas seluruh Insan Abipraya didukung dengan kebijakan dan strategi yang tepat dari jajaran manajemen.

Tahun 2014 merupakan awal pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018. Hasil yang telah dicapai semakin menguatkan keyakinan seluruh jajaran perusahaan, bahwa target lima tahun ke depan akan dapat dicapai, bahkan dilampaui. Beberapa pembenahan yang telah dilakukan perusahaan sebagai "prakondisi" untuk menuju visi perusahaan dengan target "menjadi 5 besar perusahaan konstruksi nasional" adalah:

- Penetapan budaya perusahaan yang baru
- Perubahan logo dan motto sebagai bagian dari usaha rebuilding brand image.
- Pembenahan organisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada unit usaha.
- Pembentukan strategic business unit baru untuk menambah portofolio bisnis.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, laporan tahunan ini disusun secara sederhana tanpa meninggalkan kaidah-kaidah umum dalam hal keterbukaan informasi sesuai yang dianut dalam good Corporate governance. Namun demikian, data-data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat dijadikan referensi bagi seluruh stakeholder untuk mengetahui dan memahami perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Tentu saja, kami masih membutuhkan kritik dan saran untuk dijadikan bahan evaluasi menuju perbaikan ke depan.

PT Brantas Abipraya (Persero), as part of the national construction industry can not be separated from the above conditions. The realization of the new contract is reached only 63.7% of CBP becomes a real picture of the situation. However, from the production company actually recorded a very good performance, with the achievement of sales and profit higher than the target RKAP. Very encouraging achievement is the result of hard work and smart throughout Insan Abipraya supported by appropriate policies and strategies of the management.

2014 is the beginning of the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP) 2014-2018. Results achieved reinforce the belief the whole range of the company, that the target of the next five years will be achieved, even exceeded. Talah some improvements by the company as a "precondition" for leading the company's vision with the target "into 5 major national construction company" is:

- Establishment of a new corporate culture
- Change the logo and motto as part of the rebuilding effort brand image.
- Restructuring the organization which gives greater powers to the business units.
- Establishment of a new strategic business unit to increase its business portfolio.

As in previous years, the annual report is structured in a simple without leaving the general rules in terms of disclosure of information in accordance adhered to in good Corporate governance. However, the data and information presented is expected to be used as a reference for all stakeholders to know and understand the company as a decision-making. Of course, we still need criticism and suggestions to make an evaluation toward future improvements.

Akhir kata, perusahaan mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih kepada:

1. Pemegang saham, dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN, Deputy Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN, khususnya Asdep Jasa Konstruksi beserta tim.
2. Dewan Komisaris, termasuk Sekretaris Komisaris dan Komite Komisaris.
3. Pihak perbankan dan para kreditor lainnya.
4. Mitra kerja, baik badan usaha maupun perorangan.
5. Masyarakat di sekitar lokasi proyek.
6. Dan stakeholder lain yang telah berperan dalam pencapaian kinerja perusahaan.

Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan yang Maha Esa.

Finally, the company say the high appreciation with a thank you to:

1. The shareholders, in this case represented by the Minister of State, Deputy Financial Services, Construction Services and Other Services of the Ministry of SOEs, especially Deputy Assistant Construction Services and his team.
2. The Board of Commissioners, including Commissioner and Committee Secretary Commissioner.
3. Banking institution and other creditors.
4. Partners, both enterprises and individuals.
5. People around the project site.
6. And the other stakeholders who have been instrumental in achieving the company's performance.

May we always get the protection of God Almighty.



Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director



Ekodjati Tunggulgeni
Direktur
Director

Muhammad Basir
Direktur
Director

Bambang E. Marsono
Direktur Utama
President Director

Sudi Wantoko
Direktur
Director

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014

Management's Responsibility on Annual Report 2014

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk tahun 2014 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

We the undersigned hereby declare that all information in the annual report of PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk in 2014 has been published in full, and are fully responsible for the accuracy of the content of the company's annual report.



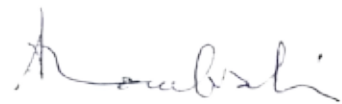
Hedyanto W. Husaini
Komisaris Utama | President Commissioner



R. Eko Subekti
Komisaris | Commissioner



Adhy Duriat Soemono
Komisaris | Commissioner



H. Ramli Ibrahim
Komisaris | Commissioner



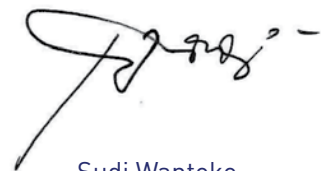
Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director




Eko Djati Tunggulgeni
Direktur | Director



Muhammad Basir
Direktur | Director



Sudi Wantoko
Direktur | Director



BENDUNGAN JATIBARANG

Berlokasi di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen, Kota Semarang, bendungan tipe urugan batu berzona dengan inti di tengah ini direncanakan memiliki tampungan total sebesar 20.400.000 m³.

Located in the district and sub-district Gunungpati Mijen, Semarang, the dam with splites in the core urugan is planned to have a total of 20.4 million m³ pitcher.





PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Perseroan semula dibentuk sebagai bagian dari Kantor Proyek Pelaksana Pengembangan Sungai Brantas (dikenal sebagai Proyek Brantas), yang telah terlibat dalam pembangunan berbagai infrastruktur bangunan air, seperti bendungan dan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air, dengan dasar kekuatan pada: Perencanaan, Pengawasan, Operasional dan Pemeliharaan, sejak 1961. Pada tahun 1980, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menjadikan sumber keahlian dan pengalaman ini menjadi BUMN. Kegiatan utama Perseroan sejak pendirian sampai saat ini adalah Jasa Konstruksi. Sesuai dengan sumber daya, pengalaman dan keahlian yang dimiliki Perseroan, segmen pasar utama Perseroan adalah jasa konstruksi pengairan. Perseroan telah memperluas kegiatan usahanya dengan melakukan investasi pada pembangkit listrik tenaga mini hidro melalui entitas perusahaan anak yaitu PT BRANTAS ENERGI pada tahun 2011. Mulai tahun 2014 Perseroan telah melakukan pengembangan kompetensi melalui difersifikasi usaha dan pengembangan portofolio usaha berupa pembangunan pabrik beton pracetak dan rintisan usaha properti.

The Company was originally formed as part of the Office of the Brantas River Development Implementing Project (known as Project Brantas), which has been involved in the construction of waterworks infrastructure, such as dams and hydroelectricity projects, with a power base in the Planning, Monitoring, Operations and Maintenance, since 1961. In 1980, the Government of the Republic of Indonesia decided to make it a source of expertise and experience into SOEs. The main activities of the Company since establishment to present is the Construction Services. In accordance with the resources, experience and expertise of the Company, the Company's main market segment is irrigation construction services. The Company has expanded its business activities by investing in a mini-hydro power plant through a subsidiary entity, PT BRANTAS ENERGI in 2011. Beginning in 2014, the Company has developed competence through business diversification and development of the business portfolio in the form of precast concrete factory construction and property business startups.

NAMA DAN ALAMAT IDENTITAS PERUSAHAAN

The Name and Address of the Company's Identity





PROFILE PERUSAHAAN | COMPANY PROFILE:

Bidang Usaha | Business Fields:

Industri Kontruksi
Construction Industry

Status Perusahaan | Company Status :

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
State Owned Enterprises (SOEs)

Pemilik | Owner:

100 % dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
100% owned by the Republic of Indonesia

Tanggal Pendirian | Date of Establishment:

Tanggal 12 November 1980 | Dated 12 November 1980

Dasar Hukum Pendirian | Basic Law of Establishment:

No. 88 Tahun tanggal 12 November 1980
Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 12 Maret 1982, Tambahan No. 306
No. 88 Year dated 12 November 1980
State Gazette of The Republic of Indonesia No.21 dated 12 March 1982, Addendum No. 306

Produk | Product:

Jasa Kontruksi | Construction Services
Investasi pembangkit listrik | Investment Power Plants
Beton Pracetak | Precast

Jaringan Kantor | Office Network:

3 Kantor Divisi | 3 Division Office
5 Kantor Divisi Regional | 5 Division Office
7 Kantor Cabang | 7 Branch
3 Pabrik Beton | 3 Precast Factory

Kantor Pusat | Head Office:

Jl. DI. Panjaitan Kav.14 Cawang, Jakarta Timur, 13340
Phone: (021) 851 6290
Fax: (021) 851 6095
Website: www.brantas-abipraya.co.id
Email: bap@brantas-abipraya.com

JEJAK LANGKAH

Milestone



PT Brantas Abipraya didirikan sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, yang berdiri berdasarkan hasil pemekaran proyek Brantas, dengan kantor pusat di Malang, Jawa Timur dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum terhitung sejak tahun 1981

PT Brantas Abipraya established as a profit-oriented company, which is established based on the results of the development of Brantas project division, with headquarters in Malang, East Java and obtained approval as a legal entity since 1981

1980



Dipercaya untuk membangun Dam Kotapanjang HEPP, Bangkinang, Riau dengan metode *Roller Compacted Concrete* (RCC), yang pertama kali digunakan dalam konstruksi dam di Indonesia

Trust to build Kotapanjang HEPP Dam, Bangkinang, Riau with Roller Compacted Concrete methods (RCC), which was first used in the construction of the dam in Indonesia

1992



Perseroan dinyatakan sebagai "Wajib Pajak Patuh" dalam kurun waktu tahun 2009-2014 dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia

The Company declared a "Taxpayer Obey" in the period 2009-2014 from the Directorate General of Taxation of the Republic of Indonesia

2009

1990

Seiring dengan pertumbuhan Perseroan, manajemen terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Setelah 10 tahun Perseroan memulai proyek selain konstruksi sumber air seperti jalan, jembatan, gedung, dan airport

Along with the growth of the Company, management continues to perform continuous improvement. After 10 years the Company started another projects besides construction projects such as the water source project, roads, bridges, buildings, and airports



1995

Manajemen memindahkan kantor pusat ke Jakarta

Management moved its headquarters to Jakarta





- Dianugerahi “Green Contractor” dalam bidang bangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
- Dianugerahi oleh asosiasi konstruksi Indonesia sebagai pelopor pelaksanaan bendungan dengan proyek terbanyak di Indonesia
- Awarded “Green Contractor” in terms of the building by the Ministry of Public Works
- Awarded by the construction association of Indonesia as the pioneer of dam works with the most in number of similiar projects in Indonesia

2011



Dicatat Rekor MURI: Pekerjaan terowongan *Underpass* terpanjang dengan sistim *Jacking*

Mulai melakukan diversifikasi bisnis dengan investasi pada pabrik beton precast

Recorded by MURI: The longest underpass tunnel with jacking system

Started business diversification by investment in precast concrete manufacture

2013

2010

Dianugerahi sebagai perusahaan konstruksi BUMN terbaik berdasarkan pertumbuhan kinerja dan rasio keuangan oleh Majalah Info Bank

Awarded as the best state-owned construction company based on the growth in performance and financial ratios by Info Bank Magazine



2012

Melakukan diversifikasi bisnis dengan investasi pada *Hydroelectric Power Plant* melalui “Brantas Energi” sebagai anak perusahaan dari PT Brantas Abipraya

Commencing business diversification by investing in *Hydroelectric Power Plant* through “Brantas Energi” as a subsidiary of PT Brantas Abipraya



2014

Per September 2014, BRAP sudah mempunyai 3 unit fasilitas Pabrik Beton Pracetak yang berlokasi di Porong-Jawa Timur, Sunter-DKI Jakarta dan Padang-Sumatera Barat. Saat ini BRAP memproduksi produk-produk Pracetak antara lain:

As of September 2014, BRAP already have 3 units of Precast concrete factory facilities located in Porong, East Java, Sunter-Jakarta and Padang, West Sumatra. Currently BRAP producing precast products as follows:

- *Corrugated Concrete Sheet Pile*
- *Flat Prestress Concrete Sheet Pile*
- *I Girder, Box Girder, Box Culvert*
- *U Ditch, V Ditch*



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History



Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama PT Brantas Abipraya sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Brantas Abipraya No. 88 tanggal 12 November 1980, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan No. 36 tanggal 6 April 1981, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/257/15 tanggal 11 April 1981, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di bawah No. 171/PP/IV/1981 tanggal 23 April 1981 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 306, Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 1982 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya No. 15 tanggal 12 Agustus 2008, yang dibuat oleh Tjipto Pranowo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah

The Company was originally established under the name PT Brantas Abipraya as set out in the Deed of Limited Liability PT Brantas Abipraya No. 88 dated November 12, 1980, made in the presence of Kartini Muljadi, SH, Notary in Jakarta in conjunction with the deed of Amendment No. 36 April 6, 1981, all of which have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in accordance with decree No. YA5/257/15 dated April 11, 1981, and was registered at the Malang District Court under No. 171/PP/IV/1981 dated 23 April 1981 and was published in Supplement No. 306, the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 21 dated March 12, 1982 ("Deed of Establishment").

The articles of association of the Company have been amended several times and changes to the articles of association of the Company to comply with the Company Law is as stated in the Deed of Amendment of Articles of Association of the Company (Persero) PT Brantas Abipraya No. 15 dated August 12, 2008, made by Tjipto Pranowo, SH, Notary in Jakarta and has obtained the approval of

memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-62129.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0083587.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 20470, Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 21 Oktober 2008 ("Akta No. 15/2008").

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Brantas Abipraya No. 32 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Retno Santi Prasetyati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-57022.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 November 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0096695.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 November 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013, Tambahan No. 64293 ("Akta No. 32/2012").

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15/2008, maksud dan tujuan Perseroan ialah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan bidang konstruksi, teknologi informasi dan pengembang untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan bidang konstruksi, teknologi informasi, dan pengembang. Sejak tahun 2011 Perseroan berusaha untuk melakukan perluasan kegiatan usaha pada bidang Pembangunan, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa melalui pendirian PT Brantas Energi.

the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Menkumham") in accordance with decree No. AHU-62129.AH.01.02. Tahun 2008 September 12, 2008 and was registered in the Company Register under No. AHU-0083587.AH.01.09. Tahun 2008 September 12, 2008 and was published in Supplement No. 20470, Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 85 dated October 21, 2008 ("Act No. 15/2008").

Changes in the Company's articles of association of the latter in order to increase the authorized capital, issued and fully paid as set forth in the deed of General Meeting Extraordinary Shareholders Company (Persero) PT Brantas Abipraya No. 32 dated August 15, 2012, made before Retno Santi Prasetyati, SH, Notary in Jakarta and has obtained approval Menkumham accordance with decree No. AHU-57022.AH.01.02.Tahun 2012 dated 7 November 2012 and was registered in the Company Register under No. AHU-0096695.AH.01.09.Tahun 2012 dated November 7, 2012, and was published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013, Supplement No. 64293 ("Act No. 32/2012").

As set out in, the Deed No. 15/2008, the purpose and objective of the Company is to participate in doing business in the construction industry, industrial manufacturing, rental services, agency services, investment, agro-industry, trade, area management, capacity building services in construction, information technology and developers to produce goods and or services of high quality and strong competitiveness, as well as the pursuit of profit in order to increase the value of the Company by applying the principles of limited liability companies.

The Company has conducted its business activities in the field of construction industry, industrial manufacturing, rental services, agency services, investment, agro-industry, trade, area management, capacity building services in construction, information technology, and developers. Since the year 2011, the Company seeks to expand business activities in the fields of Development, Industry, Trade and Services through the establishment of PT Brantas Energi.

BIDANG USAHA

Business Fields

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Konstruksi. Perseroan menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi kepada kliennya untuk setiap tahapan kegiatan proyek yang dimiliki oleh klien.

A. Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi terdiri dari segmen jasa pengairan, jalan/jembatan, gedung/bangunan, kelistrikan, prasarana perhubungan (laut & udara) dan lain-lain.

1. Pengairan

Segmen jasa konstruksi pengairan mendominasi pendapatan usaha Perseroan. Jasa konstruksi pengairan yang diberikan oleh Perseroan meliputi pekerjaan bendungan, bendung, Irigasi, perbaikan bangunan sungai atau normalisasi kali atau perkuatan tebing banjir, prasarana pengendali banjir, tanggul laut dengan geotube, tanggul lumpur lapindo dan pembangunan sarana penyediaan air baku.

2. Jalan atau Jembatan

Jasa konstruksi jalan/jembatan merupakan penyumbang kedua terbesar pendapatan usaha Perseroan. Jasa konstruksi jalan/jembatan yang diberikan oleh.

3. Gedung atau Bangunan

Jasa konstruksi gedung atau bangunan yang diberikan oleh Perseroan meliputi pondasi gedung, struktur gedung, arsitektur mekanikal dan elektrik serta landscape.

4. Kelistrikan

Jasa konstruksi kelistrikan yang diberikan oleh Perseroan meliputi pembangkit listrik tenaga minihydro.

The main business activities conducted by the Company are Construction Services. The Company provides a variety of services to their clients and deliver solutions for every stage of project activities owned by the client.

A. Construction Services

Construction services consisting of services segment irrigation, roads/bridges, buildings, electricity, transportation infrastructure (sea and air) and others.

1. Irrigation

Waterworks construction services segment dominated the revenues of the Company. Irrigation construction services provided by the Company includes the work of dams, weirs, irrigation, building improvement or normalization river or cliff reinforcement flood, flood control infrastructure, the sea dike with Geotube, Lapindo mud embankments and the construction of raw water supply facilities.

2. Roads or Bridges

Construction services road/bridge is the second largest contributor to the Company's revenue. Construction services road/bridge given by the Company.

3. Buildings

Construction of buildings or building services provided by the Company include building foundations, building structures, mechanical and electrical architecture and landscape.

4. Electricity

Electricity construction services provided by the Company include power plants minihydro.

5. Prasarana Perhubungan (Laut & Udara)

Jasa konstruksi prasarana perhubungan yang diberikan oleh Perseroan meliputi dermaga, *airport building*, pekerjaan *runway* dan *taxiway*.

B. Investasi PLTMH

Perseroan melakukan diversifikasi usaha dan mengembangkan bisnis melalui Entitas Anak Perseroan yaitu PT Brantas Energi yang bergerak dibidang Pembangkit Listrik *Hydro Power*. Dengan dibukanya peran serta investasi swasta oleh pemerintah dalam bidang penyediaan pasokan tenaga listrik, Perseroan optimis dapat berkembang dan tumbuh sebagai pengembang *Hydro Power* terkemuka di Indonesia. Dan juga secara resiko, pemilihan investasi di bidang *Hydro Power* ini mempunyai resiko yang tidak linear dengan resiko sektor Konstruksi, sehingga ke depannya diharapkan arus kas Perseroan dapat lebih kuat dan "sustain".

C. Produk Beton

Mulai tahun 2013, Perseroan mendirikan pabrik-pabrik beton yang berlokasi di Porong (Jawa Timur), Sunter (DKI Jakarta) dan Padang (Sumatera Barat). Pembentukan pabrik beton ini ditujukan untuk diversifikasi usaha Perseroan dan melayani kebutuhan produk beton untuk proyek-proyek yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan. Adapun jenis produk beton yang dihasilkan antara lain *corrugated concrete sheet pile*, *flat prestress concrete sheet pile*, *i girder*, *box girder*, *box culvert*, *u ditch*, dan *v ditch*.

D. Properti

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan, mulai dijajaki pengembangan bisnis properti melalui kerjasama dengan konsultan yang berpengalaman menggeluti bisnis properti. Dalam hal organisasi Perseroan melakukan rintisan pembentukan unit usaha strategis di bidang properti.

5. Infrastructure Transportation (Sea & Air)

Transportation infrastructure construction services provided by the Company include the docks, the airport building, runway and taxiway work.

B. PLTMH (Micro Hydro Power Plant) Investment

Company to diversify its business and grow the business through the Company's Subsidiary, PT Brantas Energi engaged in Power Hydro Power. With the opening of the participation of private investment by the government in the provision of electricity supply, the Company is optimistic that it can evolve and grow as a leading developer of Hydro Power in Indonesia. In terms of risk factor, the decision of selecting investments in Hydro Power has a non-linear risk with the risk in construction sector, so that the future cash flows expected to be more robust and "sustain".

C. Concrete Products

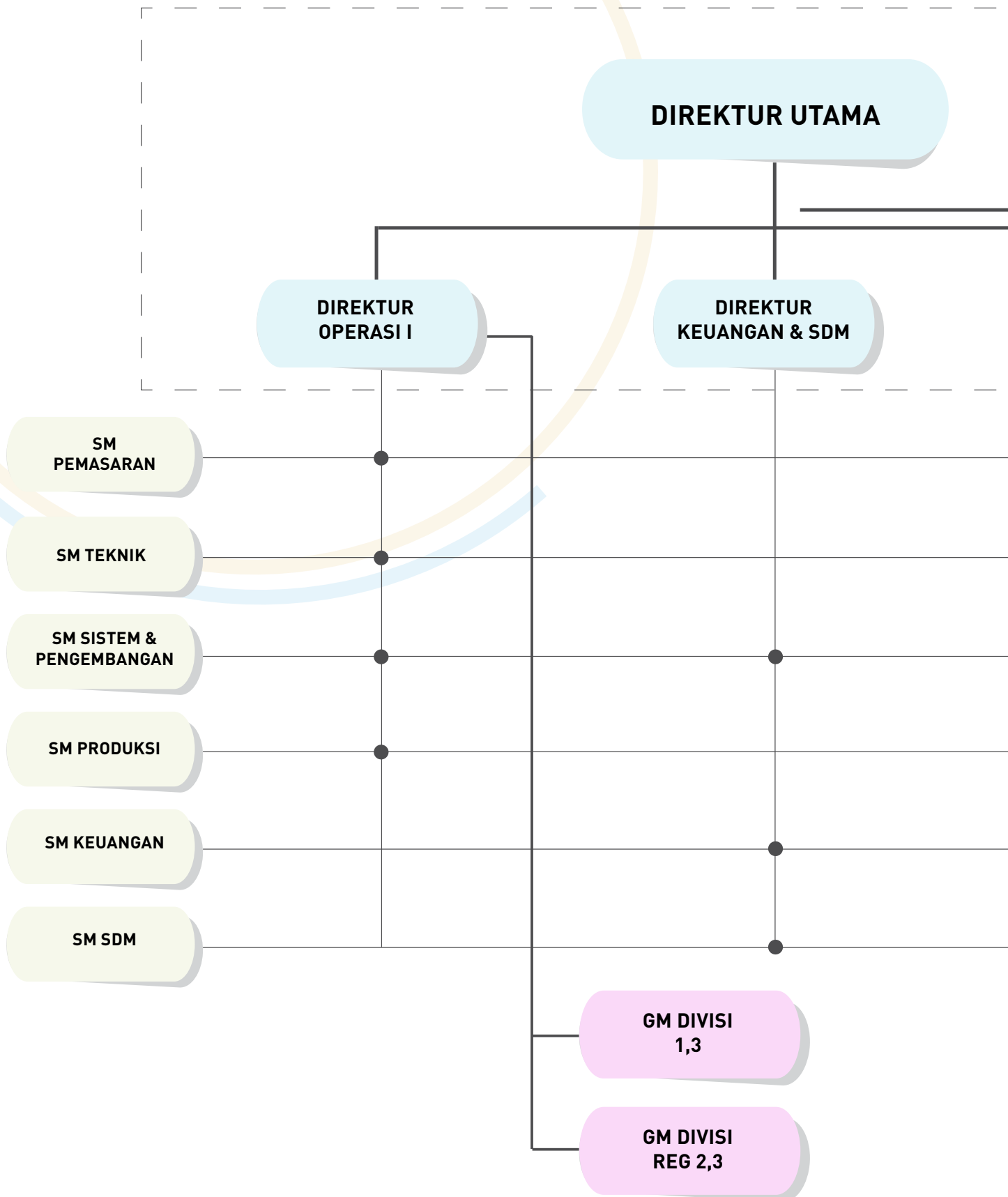
Beginning in 2013, the Company set up concrete factories located in Porong (East Java), Sunter (Jakarta) and Padang (West Sumatra). The establishment of the concrete plant is intended to diversify the Company's business and serving the internal needs of concrete products for the Company projects. The type of concrete products produced by the Company among others are corrugated concrete sheet pile, flat prestress concrete sheet pile, i girder, box girder, box culvert, u ditch and v ditch.

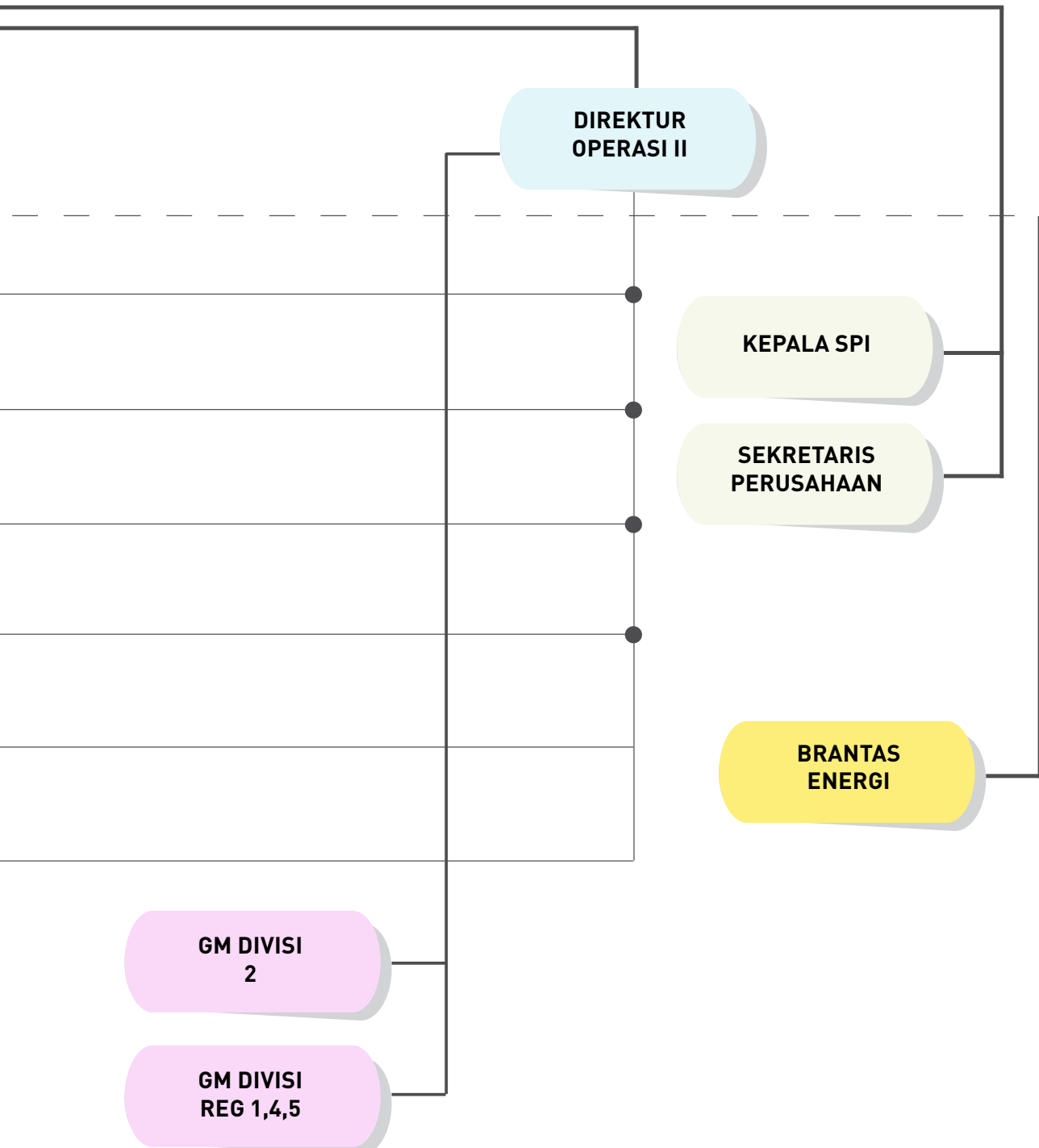
D. Property

In order to optimize the utilization of the company's assets, the Company explored the property business development through cooperation with experienced consultants in the property business. In terms of the Company's organization, the Company pioneered the formation of strategic business units in the property.

STRUKTUR ORGANISASI

Organization Structure





VISI & MISI

Vision & Mission

Spirit for Giving the Best

Visi - Vision

Menjadi Perusahaan Terpercaya
dalam Industri Konstruksi

Become To Be Trusted
Company in the Construction
Industry

Misi-Mission

Menyediakan Produk Konstruksi
Bermutu Tinggi Secara
Profesional dan Berkelanjutan

Provide Excellent Construction
Product Professionally and
Sustainably



Budaya Perusahaan

Nilai Budaya

a. **Entrepreneurship**

"Dalam setiap tindakan mempertimbangkan untung rugi bagi Perusahaan, baik finansial maupun non finansial, risiko dan tanggung jawab terhadap para *stakeholder*."

b. **Professionalism**

"Jujur, kompak, *team-work*, mandiri, bekerja dengan standar yang unggul dan diakui secara internasional serta menjunjung tinggi etika profesi guna memenuhi harapan *stakeholder*".

c. **Innovative**

"Bekerja dengan dengan konsep yang jelas, kreatif dalam menerapkan solusi baru yang lebih baik dalam hal input, proses, produk dan layanan untuk memberikan keuntungan bagi Perusahaan serta memuaskan pelanggan".

d. **Competitive**

"Tangguh, pantang menyerah dan ulet dalam mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Perusahaan memenangkan persaingan dalam industri konstruksi serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi Perseroan."

Corporate Culture

Cultural Values

a. **Entrepreneurship**

"Consider the costs and benefits for the Company in any action, both financial and non-financial, risk and responsibility towards *stakeholders*."

b. **Professionalism**

"Honest, firm, teamwork, independent, working with a superior standard and is recognized internationally and uphold professional ethics in order to meet the expectations of *stakeholders*".

c. **Innovative**

"Work with the clear concept, creative in applying new and better solutions in terms of inputs, processes, products and services to benefit the Company and satisfy customers".

d. **Competitive**

"Tough, unyielding and tenacious in maintaining and improving the Company's existence to win the competition in the construction industry and provide the best added value for the Company."

IDENTITAS & RIWAYAT HIDUP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Commissioners' and Directors' Identity and Curriculum Vitae

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya No. 23 tanggal 30 September 2014, dibuat di hadapan Retno Santi Prasetyati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-33325.40.22.2014 tanggal 2 Oktober 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101154.40.80.2014 tanggal 2 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Hedyanto W. Husaini
- Komisaris : H. Ramli Ibrahim
- Komisaris : Adhy Duriat Soemono
- Komisaris : R. Eko Subekti

Direksi

- Direktur Utama : Bambang E. Marsono
- Direktur : Ekodjati Tunggulgeni
- Direktur : Muhammad Basir
- Direktur : Sudi Wantoko

Sehubungan dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), Perseroan berkomitmen untuk mengangkat Komisaris Independen yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 33/2014 selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan Obligasi PT Brantas Abipraya (Persero) di Bursa Efek Indonesia.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as set out in the Deed of Shareholders of the Company (Persero) PT Brantas Abipraya No. 23 September 30, 2014, made in the presence of Retno Santi Prasetyati, SH, Notary in Jakarta, and has been accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SABH) of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-33325.40.22.2014 dated October 2, 2014 and was registered in the Company Register under No. AHU-0101154.40.80.2014 dated October 2, 2014 is as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Hedyanto W. Husaini
- Commissioner : H. Ramli Ibrahim
- Commissioner : Adhy Duriat Soemono
- Commissioner : R. Eko Subekti

Board of Directors

- President Director : Bambang E. Marsono
- Director : Ekodjati Tunggulgeni
- Director : Muhammad Basir
- Director : Sudi Wantoko

In connection with the FSA Regulation No.33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company ("POJK No. 33/2014"), the Company is committed to appoint independent commissioner who meet the qualifications and requirements as stipulated in POJK No. , 33/2014 no later than six (6) months from the date of commencement of the listing and trading of bonds PT Brantas Abipraya (Persero) in Indonesia Stock Exchange.

The Company has made the fulfillment of certain qualification by the Board of Directors in accordance with the provisions of legislation that is regulated by the Ministry of SOEs.

The following is a brief description of the Board of Commissioners and Board of Directors:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Hedyanto W. Husaini

Komisaris Utama | President Commissioner

Warga Negara Indonesia, Lahir di Cimahi, 18 September 1958

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1980 dan Magister di bidang Construction Management dari Reliigh University, USA pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak bulan tahun 2013 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (2013-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian Umum (2012-2013), Kepala Pusat Kajian Strategis, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum (2010-2012), Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat, Direktorat Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (2007-2010), Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat (2006-2007), Kepala Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat (2001-2006), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumatera Barat (1999-2001), Kasubdin Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat (1994-1999), Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat (1990-1994), Asisten Teknik RBO Padang (1987-1988), Pimpinan Bagian Proyek Sawah Tambang – Batas Jambi (1984-1987), Pim Proyek Manager Bungo – L. Lingau (1983-1984), Asisten Teknik M. Bungo – L. Lingau (1981-1983).

Indonesian, born in Cimahi, 18 September 1958

Graduated in Engineering from Institut Teknologi Bandung, West Java, in 1980 and a Master of Construction Management of Reliigh University, USA in 1990.

Appointed as Commissioner of the Company since 2013 with a term of 5 (five) years. He currently serves as Head of Construction Development Ministry of Public Works (2013-present). Previously served as Advisor to the Minister of Social Affairs Ministry of Culture and the Role of Public Works (2012-2013), Head of Strategic Studies, Secretariat General Ministry of Public Works (2010-2012), Director of Roads and Bridges Western Region, Directorate General of Highways Ministry of Public Works (2007-2010), Head of Planning Agency of West Sumatra Province (2006-2007), Head of the Department of Road Infrastructure West Sumatra Province (2001-2006), Head of the Department of Public Works Highways West Sumatra (1999-2001), Head of Program Development Department of Public Works Sumatra West (1994-1999), Section Head Road West Sumatra Department of Public Works (1990-1994), Assistant Engineering RBO Padang (1987-1988), Head of Section Sawah Tambang project- Batas Jambi (1984-1987), Pim Project Manager Bungo – L. Lingau (1983-1984), Assistant Technical M. Bunge – L. Lingau (1981-1983).



H. Ramli Ibrahim
Komisaris | Commissioner

Warga Negara Indonesia, Lahir di Sigli, 23 September 1951

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Unsyiah, Banda Aceh pada tahun 1978, Magister Manajemen dibidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor, pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Pengawasan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam & Nias (2007-2009), Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nanggroe Aceh Darussalam & Nias (2005-2007), Inspektorat Jendral Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi (2003-2005), Direktur Investasi & Kemitraan Departemen Transmigrasi (2000-2003), Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi & Pajak Penghasilan Propinsi Nusa Tenggara Barat (1997-2000), Direktur PT Bintang Aceh Motor (1978-1980), Komisaris Utama PT Jampee Tujoh (1985-1980). Pangkat Terakhir Pembina Utama IVE pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dna Pensiun pada tanggal 10 Oktober 2008.

Indonesian, born in Sigli, 23 September 1951

Graduated in Economics from the Faculty of Economic Development Unsyiah, Banda Aceh in 1978, Master of Management in the field of Agribusiness of pertanian Bogor Institute, in 1997.

He has served as Commissioner since 2011 with a term of 5 (five) years. He previously served as Deputy Supervision Agency for the Rehabilitation and Reconstruction of Nanggroe Aceh Darussalam and Nias (2007-2009), Secretary General of the Ministry of Manpower and Transmigration Decree, Nanggroe Aceh Darussalam and Nias (2005-2007), the Inspectorate General of the Ministry of Manpower and Transmigration (2003-2005), Director of Investment & Partnership Transmigration Department (2000-2003), Head of the Regional Office of the Ministry of Transmigration and Provincial Income Tax Nusa Tenggara Barat (1997-2000), Director of PT Bintang Aceh Motor (1978-1980), President Commissioner PT Jampee Tujoh (1985-1980). Last rank Patrons Main IVE at the Ministry of Manpower and Transmigration dna Retirement on October 10, 2008.



Adhy Duriat Soemono
Komisaris | Commissioner

Warga Negara Indonesia, Lahir di Semarang, 6 Januari 1951

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada tahun 1978, Master dibidang land & water development dari IHE Delft Belanda, pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juni 2011 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Logistik, Deputy Logistik & Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB) (2010-2011), Direktur Penilaian Kerusakan, Deputy Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2008-2010), Direktur Pemulihan Fisik, Deputy Bidang Pemulihan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) (2007-2008), Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Bencana Alam, Direktorat Sungai, Danau dan Waduk Departemen Pekerjaan Umum pada Kementerian Pekerjaan Umum (2005-2007), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sungai Danau dan Waduk Departemen Pekerjaan Umum pada Kementerian Pekerjaan Umum (2006), Kepala Seksi Irigasi, Air Tanah, Rawa & Pantai Wilayah IV, Direktorat Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Barat Departemen Pekerjaan Umum pada Kementerian Perkerjaan Umum (2003-2005), Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir Lahar Gunung Kelud Departemen Pekerjaan Umum pada Kementerian Pekerjaan Umum (2001-2003), Pimpinan Proyek Pengendalian Banjir Lahar Gunung Kelud Departemen Pekerjaan Umum (1995-2001), Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Alam Gunung Berapi 7 Pantai, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Departemen Pekerjaan Umum pada Kementerian Pekerjaan Umum (1994-1995), Kepala Seksi Penanggualangan Bencana Alam Gunung Berapi, Direktorat Sungai Departemen Pekerjaan Umum pada Kementerian Pekerjaan Umum (1990-1994), Asisten Perencanaan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Gunung Galunggung Departemen Pekerjaan Umum (1985-1990), Asisten Operasi Proyek Penanggulangan Bencana Alam Gunung Galunggung Departemen Pekerjaan Umum (1982-1985), Counterpart Teknis Proyek Induk PWS Citanduy (1978-1982).

Indonesian citizen, born in Sigli, 23 September 1951

Graduated in Economics from the Faculty of Economic Development Unsyiah, Banda Aceh in 1978, Master of Management in the field of Agribusiness of Pertanian Bogor Institute, in 1997.

He has served as Commissioner since June 2011 with a term of 5 (five) years. He previously served as Director of Logistics, Deputy Logistics & Equipment National Agency for Disaster Management (BNPB) (2010-2011), Director of Damage Assessment, Deputy for Rehabilitation & Reconstruction of National Disaster Management Agency (2008-2010), Director of Physical Recovery, Deputy Recovery National Coordinating Agency for Disaster Management (Bakornas PB) (2007-2008), Deputy Director of Natural Disaster Management, Directorate Rivers, Lakes and Reservoirs Department of Public Works at the Ministry of Public Works (2005-2007), Committing Officer (CO) of the Directorate River Lake and Reservoir Department of Public Works At the Ministry of Public Works (2006), Section Chief of Irrigation, Ground Water, Wetlands and Coastal Region IV, Directorate of Water Resources (SDA) Western Region Public Works Department at the Ministry of Public The work (2003-2005), Project Leader Lava Flood Control Kelud Department of Public Works at the Ministry of Public Works (2001-2003), Lava Flood Control Project Leader Kelud Department of Public Works (1995-2001), Section Head of Disaster Management Volcanoes 7 Beach, Directorate of Development and Utilization of Water Resources Department Public Works at the Ministry of Public Works (1994-1995), Section Head of Volcano National Disasters, Directorate of River Department of Public Works at the Ministry of Public Works (1990-1994), Assistant Planning for Natural Disaster Mitigation Project Galunggung Department of Public Works (1985-1990), Assistant Operations Disaster Management Project Galunggung Department of Public Works (1982-1985), Parent Project Technical Counterpart PWS Citanduy (1978-1982).



R. Eko Subekti
Komisaris | Commissioner

Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya, 28 April 1955

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Hidroteknik (Sipil Basah) dari Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, pada tahun 1979; Magister dibidang hydraulic works in river valley dari Unesco IHE Institute for Water Education, Belanda, pada tahun 1984 Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2012 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Irigasi & Rawa, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (2013 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bina Program, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (2012-2013), Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (2008-2012), Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Wilayah Barat, Direktorat Irigasi (2005-2008), Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Bina Teknik Sumber Daya Air (2004-2005), Kepala Staf Pelaksanaan Proyek Induk PW Bengawan Solo (2001-2004), Pimpinan Proyek Irigasi Yogyakarta (1998-2001), Pimpinan Proyek Irigasi Sulawesi Utara (1994-1998), Pimpinan Proyek Irigasi Wawotabi, Sulawesi Utara (1992-1994), Kepala Staf Proyek Irigasi Wawotabi, Sulawesi Utara (1988-1992), Pimpinan Bagian Proyek Irigasi Wawotabi, Sulawesi Utara (1987-1988), Asisten Perencanaan Proyek Irigasi Wawotabi, Sulawesi Utara (1985-1987), Ka.Sub Seksi V Sub Direktorat CanteK Irigasi, Direktorat. Irigasi (1984-1985), Counterpart Perencanaan Proyek Teluklada (1981-1983), Staf Seksi Perencanaan II, Subit CanteK Direktorat. Irigasi (1980-1981).

Indonesian, born in Surabaya, 28 April 1955

Graduated in the field of Hidroteknik (Hydro) of the Faculty of Engineering, Institute of Technology, Surabaya, in 1979; Masters in the field of hydraulic works in river valley of Unesco IHE Institute for Water Education, Netherlands, in 1984. He has served as Commissioner since 2012 with a term of 5 (five) years. He currently serves as Director of Irrigation & Swamps, the Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works (2013 - present). Previously served as Director of Planning, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works (2012-2013), head of the Brantas River Basin (2008-2012), Deputy Director for Implementation of the Western Region, Directorate of Irrigation (2005-2008), Head Sub Directorate for Policy and Strategy, Technical Development of Water Resources (2004-2005), Chief of Staff of the Parent Project Implementation PW Solo (2001-2004), Head of Yogyakarta Irrigation Project (1998-2001), North Sulawesi Irrigation Project Leader (1994-1998), Wawotabi Irrigation Project Leader, North Sulawesi (1992-1994), Chief of Staff Wawotabi Irrigation Project, North Sulawesi (1988-1992), Head of Section Wawotabi Irrigation Project, North Sulawesi (1987-1988), Assistant Planning Wawotabi Irrigation Project, Sulawesi North (1985-1987), Section V Ka.Sub CanteK Irrigation Sub-Directorate, Directorate. Irrigation (1984-1985), Counterpart Teluklada Project Planning (1981-1983), Staff Planning Section II, Subit CanteK Directorate. Irrigation (1980-1981).



SIRING ROAD

Porong - Siring Relocation Road-BPLS, Lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi membentang mulai dari Kecamatan Tanggulangin, Porong, dan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sampai ke Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Porong - Siring Relocation Road-BPLS, Located in Sidoarjo, East Java. Stretched from the Tanggulangin District, Porong, and Jabon, Sidoarjo Region until the Gempol District, Pasuruan Region.

Dewan Direksi
Board of Directors



Bambang E. Marsono
Direktur Utama | Director

Warga Negara Indonesia, Lahir di Cilacap, 15 September 1953.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Teknik Sipil dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1979. Pasca Sarjana jurusan Manajemen dari Institute Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 1995 dan Doctoral jurusan Manajemen SDM dari Universitas Negeri Jakarta, Jakarta pada tahun 2013. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2011 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2008-2011), Direktur Bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Wakita Karya (Persero) Tbk (2001-2008) dan karyawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (1979 – 2001).

Indonesian, born in Cilacap, 15 September 1953.

Graduated in the field of Civil Engineering of the University of Gajah Mada in 1979. Graduate of the Management Department Prasetya Mulya Management Institute, Jakarta in 1995 and Doctoral majoring in Human Resource Management from the State University of Jakarta, Jakarta in 2013. Menjabat as Director of the Company (2011 - present). He previously served as Director of Development and Human Resources PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2008-2011), Director of Marketing and Business Development of PT Wakita Karya (Persero) Tbk (2001-2008) and employees of PT Waskita (Persero) Tbk (1979-2001).



Ekodjati Tunggulgeni
Direktur | Director

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jember, 24 Desember 1963.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada tahun 1988 dan Magister Teknik Sipil dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 2006. Menjabat sebagai Direktur Perseroan (2011–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Produksi I PT Brantas Abipraya (Persero) (2004-2011), Kepala Bagian Pengendalian dan Pengawasan Proyek SDA (2004), Kepala Bagian Operasional (2001-2004), Kepala Bagian Operasi cabang Ujung Pandang (1999-2001), Kepala Bagian Teknik Cabang Ujung Pandang (1998-1999), Staf Teknik (1998), Kepala Proyek (1994-1998), Kepala Bagian Teknik Pemasaran (1992-1994), Kepala Seksi Teknik (1991-1992), Staf Teknik (1990-1991).

Indonesian, born in Jember, December 24, 1963.

Graduated in the field of Irrigation Engineering of the University of Brawijaya, Malang, East Java in 1988 and Master of Civil Engineering of the University of Tarumanegara, Jakarta in 2006. Served as a Director of the Company (2011 - present). Previously served as Head of Production Division I PT Brantas Abipraya (Persero) (2004-2011), Head of Control and Supervision of Natural Resources Project (2004), Head of Operations (2001-2004), Head of Operations branch of Ujung Pandang (1999-2001), Head of Engineering Branch Ujung Pandang (1998-1999), staff Engineering (1998), Head Project (1994-1998), Head of Technical Marketing (1992-1994), Section Head of Engineering (1991-1992), Engineering Staff (1990-1991).



Muhammad Basir
Direktur | Director

Warga Negara Indonesia, Lahir di Ujung Pandang, 24 Januari 1961.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada tahun 1985 dan Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2000. Menjabat sebagai Direktur Perseroan (2014 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Yodya Karya (Persero) (2008-2014), Kepala Cabang PT Yodya Karya (Persero) (1997-2008), Kepala Bidang Engineering PT Yodya Karya (Persero) Cabang Makassar (1997), Kepala Bagian Administrasi Teknik PT Yodya Karya (Persero) Cabang Makassar (1993-1997), Tenaga Ahli PT Yodya Karya (Persero), bertugas menangani proyek-proyek perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan (1990-1993), Dosen Tetap Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia di Makassar (1986-19990), Asisten Luar Biasa Fakultas Teknik Sipil Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia Makassar (1985-1986) dan Guru Fisika SMA Swasta di Makassar (1983-1985).

Indonesian, born in Ujung Pandang, January 24, 1961.

Graduated in the field of Civil Engineering of the University of Hasanuddin, South Sulawesi in 1985 and a Master of Management from the University of Hasanuddin in 2000. Served as Director of the Company (2014-present). He previously served as Director of PT Yodya Karya (Persero) (2008-2014), Head of Branch PT Yodya Karya (Persero) (1997-2008), Head of Engineering PT Yodya Karya (Persero) Branch Makassar (1997), Head of Technical Administration Yodya PT Karya (Persero) Branch Makassar (1993-1997), Expert PT Yodya Karya (Persero), in charge of projects planning and supervision of roads and bridges (1990-1993), Lecturer of Faculty of Civil Engineering at Indonesian Muslim University in Makassar (1986-19990), Senior Assistant of Civil Engineering Faculty of Hasanuddin University and the Indonesian Muslim University Makassar (1985-1986) and Physics Teacher at Private High School in Makassar (1983-1985).



Sudi Wantoko
Direktur | Director

Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, 6 Agustus 1967.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada tahun 1991 dan Magister Manajemen Bisnis dan Teknologi dari Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada tahun 2001. Menjabat sebagai Direktur Perseroan (2014–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai General Manager SDM Kantor Pusat Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) (2012-2014), General Manager Keuangan Kantor Pusat Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) (Januari 2012–Oktober 2012), Kepala Biro Keuangan Kantor Pusat Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) (2009-2012), Kepala Biro Keuangan & Akuntansi Kantor Pusat Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) (2005-2009), Kepala Bagian Keuangan & Likuiditas, Biro Keuangan & Akuntansi Kantor Pusat Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) (2002-2005), Kepala Bagian Administrasi & Keuangan Cabang III –Surabaya PT Brantas Abipraya (Persero) (1997–2002), Staf Keuangan Kantor Pusat Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) (1996-1997), Staf Keuangan Kantor Pusat Malang PT Brantas Abipraya (Persero) (1992-1996).

Indonesian, born in Malang, August 6, 1967.

Graduated in Economics from the University of Brawijaya, Malang, East Java in 1991 and Master in Business Management and Technology from Institute of Technology Bandung, West Java in 2001. Served as Director of the Company (2014-present). Previously served as General Manager of Human Resources at Head Office Jakarta (2012-2014), General Manager of Finance at Headquarters Jakarta (January 2012 - October 2012), Chief Financial Bureau Central Office in Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) (2009-2012), Head of Finance & Accounting Headquarters Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) (2005-2009), Chief of Finance & Liquidity, Finance Bureau & Accounting. 2002-2005), Chief of Administration and Finance Section at Branch III-Surabaya (1997–2002), Finance Staff at Headquarters (1996-1997), Finance Staff at Malang Office (1992-1996).

KOMPOSISI PEMILIKAN SAHAM

Composition of Stock Ownership



Negara Republik Indonesia
100%



Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) number of Shares (Sheet)	Nilai Nominal (Rp) Face Value (IDR)	(%)
Modal Dasar Authorized Capital	600.000	600.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh: Pemerintah Republik Indonesia Negara Republik Indonesia	161.555	161.555.000.000	
Issued and fully paid: The Government of the Republic of Indonesia The Republic of Indonesia			
Jumlah Saham Dalam Portepel The number of shares in Portfolio	438.445	438.445.000.000	100,00



BENDUNGAN TITAB

Bendungan Titab yang terletak di Kabupaten Buleleng ini direncanakan memiliki panjang 210 m dan tinggi 82,40 m dengan volume tampungan total 12,8 juta m.

Titab dam located in Buleleng is planned to have a length of 210 m and height of 82.40 m with a total volume of 12.8 million m³ pitcher.

PROFIL ANAK PERUSAHAAN

Profile subsidiary

PT Brantas Energi

PT Brantas Energi ("BE") didirikan dengan nama PT Brantas Energi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Brantas Energi" No. 06 tanggal 12 Desember 2011, dibuat di hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-62350.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0103528.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4643 Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 15 Februari 2013.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BE sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BE jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Brantas Energi" No. 5 tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-03443.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006358.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014, maksud dan tujuan BE ialah turut berusaha dalam bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan, jasa. BE memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00365-05/PB/1.824.271 tanggal 24 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

BE beralamat di:

Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Cawang

Jakarta Timur 13340

No. Telp : (021) 2961 3918

Faksimili : (021) 2961 3809

Email : brantas.energi@yahoo.com

Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Brantas Energi" No. 06 tanggal 12 Desember 2011, dibuat di hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Brantas Energi" No. 5 tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

PT Brantas Energi

PT Brantas Energi ("BE") established under the name PT Brantas Energi under Deed of Incorporation "PT Brantas Energi" No. 06 dated December 12, 2011, made before Suparmin, SH, M.Kn., Notary in Bogor, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") in accordance with decree No. AHU-62350.AH.01.01.Tahun 2011 dated December 16, 2011, and was registered in the Company Register under No. AHU-0103528.AH.01.09.Tahun 2011 dated December 16, 2011, and was published in Supplement No. 4643 News of the Republic of Indonesia No. 14 dated February 15, 2013.

Under the provisions of Article 3 of the Articles of Association as set out in the Deed BE BE jo establishment. Deed "PT Brantas Energi" No. 5 dated December 23, 2013, which was made in the presence of Virly Yusrini, SH, M.Kn., Notary in Purwakarta, where the deed was approved by the decree No. Menkumham AHU-03443.AH.01.02.Tahun 2014 dated January 27, 2014 and was registered in the Company Register No. AHU 0006358.AH.01.09.Tahun 2014 dated January 27, 2014, the intent and purpose of the BE is also sought in the fields of construction, industry, trade, services. BE has a Business License (SIUP) Large No. 00365-05/PB/1824271 dated January 24, 2012, issued by the Head of the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, and Trade of Jakarta.

BE is located at:

Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Cawang

East Jakarta 13340

No. Tel : (021) 2961 3918

Facsimile : (021) 2961 3809

Email : brantas.energi@yahoo.com

Based on the Supervisory Board and the Deed of Incorporation "PT Brantas Energi" No. 06 dated December 12, 2011, made before Suparmin, SH, M.Kn., Notary in Bogor jo. Deed "PT Brantas Energi" No. 5 dated December 23, 2013, which was made in the presence of Virly Yusrini, SH, M.Kn., Notary in Purwakarta that have been received and recorded in the database of Legal Entity Administration System (SABH) in the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under

Indonesia di bawah No. AHU-03443.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006358.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BE pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sutjipto
Direktur : Sunarko Amarmojo

Dewan Komisaris

Komisaris: Suyono Sonto Sumarto
Komisaris: Sukarno Joso Saputro

Struktur permodalan dan pemegang saham berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham "PT Brantas Energi No. 1 tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009505 tanggal 13 Februari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0018765.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Brantas Energi

Struktur Perseroan

Diagram kepemilikan perseroan dengan entitas anak, entitas anak tidak langsung, dan pemegang saham perseroan

No. , AHU-03443.AH.01.02.Tahun 2014 dated January 27, 2014 and was registered in the Company Register No. AHU-0006358.AH.01.09.Tahun 2014 dated January 27, 2014, Board of Directors and Board of Commissioners BE on the date of the Prospectus are as follows:

Management

Director: Sutjipto
Director: Sunarko Amarmojo

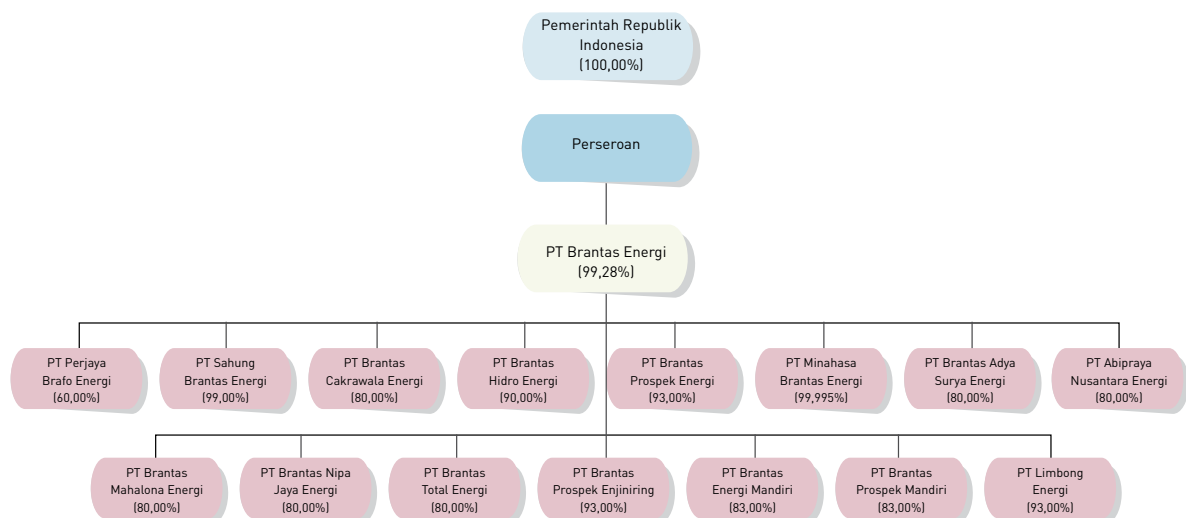
Board of Commissioners

Commissioner: Suyono Sonto Sumarto
Commissioner: Sukarno Joso Saputro

Capital structure and shareholders based on the statement of shareholders' PT Brantas Energi No. 1 dated 2 February 2015 made before Virly Yusrini, SH, M.Kn., Notary in East Jakarta Municipality, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Letter of Acceptance Notification Amendment No. AHU-AH.01.03-0009505 dated February 13, 2015 and was registered in the Company Register No. AHU 0018765.AH.01.11.Tahun 2015 dated February 13, 2013, the capital structure and shareholding Brantas Energi.

Company structure

Ownership diagram with subsidiary company, indirect subsidiaries and shareholders of the company



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards And Certifications

Infobank 2009



Infobank 2012



Infobank 2014



Karya Konstruksi
Indonesia 2014 Dolago



Karya Konstruksi Indonesia
2014 Bajulmati



Rekor Muri



SNI ISO 9001:2008



ISO 9001:2008



ISO 14001:2004 |
SNI 19-14001:2005



ISO 14001



OHSAS 18001:2007



Sertifikat Audit



PROFIL LEMBAGA PENUNJANG

Profile Supporting Institutions

Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Jalan Ciledug Raya No.36 A RT 006 / RW002 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, 12230

Telepon : (021) 7261212
Faksimili : (021) 7261313
Nomor STTD : 296/PM/STTD-AP/2001 atas nama Jimmy Jansen AK, CPA
Tanggal STTD : 23 Juli 2001
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Nama & Nomor

Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), No. Reg. IAPI: 427

Surat

Penunjukan : No. 603/D/KEU/XI/2014, tanggal 6 November 2014

Public Accountants HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners

Jalan Raya No.36A Ciledug RT 006 / RW 002 Cipulir Village, Kebayoran Lama sub-district Jakarta Selatan, 12230

Telephone : (021) 7261212
Facsimile : (021) 7261313
STTD Number : 296/PM/STTD-AP/2001 atas nama Jimmy Jansen AK, CPA
STTD Date : 23 Juli 2001
Guideline : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Name & Number

Association : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), No. Reg./API: 427

Letter of Instruction : No. 603/D/KEU/XI/2014, tanggal 6 November 2014

Notaris Retno Santi Prasetyanti, SH

M.T. Haryono Square Office Space
Jl. MT. Haryono Kav. 10, Unit 23, Lantai I, Jakarta Timur 13330
Telepon : 021 - 29067210,
Fax : 021 - 29067211
Email : retnosoetomo@yahoo.co.id

Retno Santi Prasetyanti, SH Notary

M.T. Haryono Square Office Space
Jl. MT. Haryono Kav. 10, Unit 23, Lantai I, East Jakarta 13330
Telephone : 021 - 29067210,
Facsimile : 021 - 29067211
Email : retnosoetomo@yahoo.co.id

Kantor Hukum Nengah Sujana & Rekan

Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt. 3
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan
Telepon : 021-79191264

Nengah Sujana & Rekan Law Firm

Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt. 3
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, South Jakarta
Telephone: 021-79191264

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia

Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Attorney for Civil and State Administrative of the Republic of Indonesia

Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru - South
Jakarta

PT Bahana Securities

(Terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta 12190
Telepon : (021) 2505081
Faks : (021) 5225869
Website : www.bahana.co.id
Email : bs_ibcm@bahana.co.id

PT Bahana Securities

(Terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta 12190
Telephone : (021) 2505081
Facsimile : (021) 5225869
Website : www.bahana.co.id
Email : bs_ibcm@bahana.co.id



UNDERPASS CIBUBUR

Pembangunan underpass Cibubur mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai jalan terowongan terpanjang yang menggunakan teknologi *push-jacking*.

Cibubur underpass, gaining an award from the Indonesian Record Museum (MURI) as the longest tunnel using push-jacking technology.

DAFTAR ALAMAT

Addresses

MEDAN (DIVISI REGIONAL I)

Jl. Pabrik Tenun No. 66A
Medan
Telp : (061) 4529184
Fax : (061) 4529184

PADANG

Jl. Gunung Semeru I No. 12
Padang
Telp : (0751) 705135
Fax : (0751) 705135

PEKANBARU

Jl. Nuri No. 21
Kel. Kampung Melayu Sukajadi
Pekanbaru
Telp : (0761) 20597
Fax : (0761) 20597

JAKARTA (DIVISI REGIONAL II)

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang
Jakarta 13340
Telp : (021) 8576633
Fax : (021) 8576633

PALEMBANG

Jl. Dwikora I Lorong Karya II No. 1322
Palembang 30129
Telp : (0711) 369928
Fax : (0711) 355317

SURABAYA (DIVISI REGIONAL III)

Graha Abipraya, Jl. Kerto Menanggal IV/1
Surabaya 60234
Telp : (031) 8481028
Fax : (031) 8481028

BRANTAS ENERGI

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang, Jakarta Timur 13340,
Telp: (021) 8516290 - (Hunting),
Fax: (021) 8516095,
Email: bap@brantas-abipraya.com

PABRIK BETON SUNTER

Jl. Yos Sudarso No.57, Kel Sunter, Kec. Tanjung Priok
Jakarta 14350
Telp : (021) 65834986
Fax : (021) 65834986
Email: abiprayabeton@gmail.com

PABRIK BETON GEMPOL

Jl. Raya Melaten No.59, Kel. Kejapanan, Kec. Gempol
Kab. Pasuruan
Telp : (0343) 852776
Fax : (0343) 852776
Email: pabrikbetonprecast@yahoo.co.id

SEMARANG

Perum Perwira, Diponegoro VIII No. 90
Banyumanik - Semarang
Telp : (024) 7466304
Fax : (024) 7466304

DENPASAR

Jl. Turi Gang Sari No.2A
Kesiman - Denpasar
Telp : (0361) 8860395
Fax : (0361) 228501

MATARAM

Jl. Bung Karno No. 6
Mataram
Telp : (0370) 633522
Fax : (0370) 633522

MAKASSAR (DIVISI REGIONAL IV)

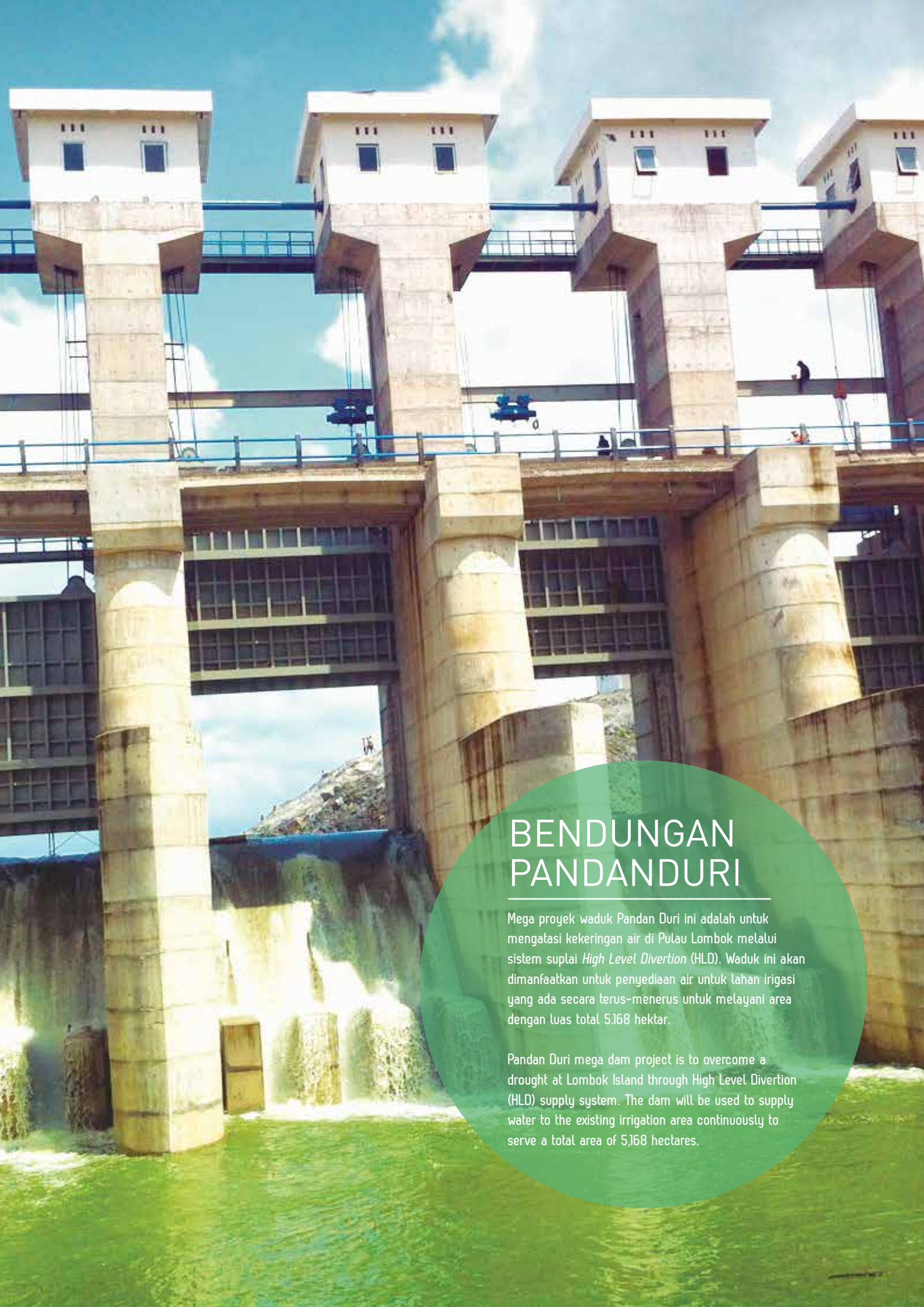
Jl. Boulevard Blok A-3 No. 1
Panakkukang Mas, Makassar 90114
Telp : (0411) 454490
Fax : (0411) 441840

SAMARINDA (DIVISI REGIONAL V)

Jl. Kebahagiaan No. 23 Samarinda
Telp : (0541) 736162
Fax : (0541) 736162

BANJARMASIN

Jl. Perumahan Citra Raya Angkasa Blok D/9
Landasan Ulin, Banjar Baru 70724
Telp : (0511) 705865
Fax : (0511) 705865



BENDUNGAN PANDANDURI

Mega proyek waduk Pandan Duri ini adalah untuk mengatasi kekeringan air di Pulau Lombok melalui sistem suplai *High Level Diversion* (HLD). Waduk ini akan dimanfaatkan untuk penyediaan air untuk lahan irigasi yang ada secara terus-menerus untuk melayani area dengan luas total 5.168 hektar.

Pandan Duri mega dam project is to overcome a drought at Lombok Island through High Level Diversion (HLD) supply system. The dam will be used to supply water to the existing irrigation area continuously to serve a total area of 5,168 hectares.





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Pada tahun 2014, Perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp2.280,61 miliar baik dari proyek dalam negeri maupun luar negeri meningkat 58,24% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp1.441,26 miliar sedangkan laba bersih tahun berjalan diperoleh sebesar Rp90,84 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 24,08% dibanding tahun 2013 sebesar Rp72,78 miliar.

In 2014, the Company recorded an income of IDR2280.61 billion both from domestic and overseas projects, increased by 58.24% compared to the year 2013 amounting to IDR1441.26 billion, while net income for the current year amounted to IDR90.84 billion, representing a growth of 24.08% compared to the year 2013 amounted to IDR72.78 billion.

TINJAUAN INDUSTRI

Industry Review

“ Sejarah telah mencatat bahwa sektor konstruksi di Indonesia terus tumbuh sejak krisis tahun 1998. Selama periode 2009–2014, sektor konstruksi melaju dengan pertumbuhan rata-rata 6,73%. Sektor konstruksi merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2014, sektor konstruksi tumbuh sebesar 6,58% dan merupakan sektor dengan pertumbuhan kedua terbesar di bawah sektor transportasi dan komunikasi sebesar 9,31%. Satu hal yang harus diakui bahwa pertumbuhan sektor konstruksi in-line dengan pertumbuhan ekonomi negara.

The history has recorded that the construction sector in Indonesia has continued to grow since the crisis of 1998. During the period 2009-2014, the construction sector drove with an average growth of 6.73%. The construction sector is one of the growth drivers of the national economy. In 2014, the construction sector grew by 6.58% and is the second-largest growth sector under the transport sector and communication amounted to 9.31%. One thing that must be recognized that the growth of the construction sector is in-line with the country's economic growth.

“



Kondisi Umum Global

Kondisi perekonomian global tahun 2014 tidak begitu menggembirakan, disebabkan oleh turunya perekonomian Cina dan Jepang. Laju pertumbuhan ekonomi Cina turun dari 7,83% menjadi 7,3% pada triwulan ke 3 di tahun sebelumnya. Sedangkan perekonomian Jepang turun menjadi - 0,2 % pada awal triwulan ke 3 dari 2,4 % pada triwulan tahun sebelumnya. Pelambatan perekonomian global yang hanya tumbuh 2,6% selama tahun 2014, terjadi sejak krisis finansial global. Perdagangan global telah menurun secara signifikan, hanya tumbuh kurang dari 4% pada 2013 dan 2014, jauh di bawah pertumbuhan rata-rata sebelum krisis, yaitu sebesar 7% per tahun. Namun demikian, kondisi ekonomi tahun 2014 ini sedikit lebih baik dibanding tahun 2013 yang tumbuh 2,4%.

Laporan *Global Economic Prospect* (GEP) dari Kelompok Bank Dunia menganalisa pertumbuhan yang lemah ini disebabkan oleh rendahnya permintaan dan berkurangnya sensitivitas perdagangan dunia dalam merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktivitas global. Perubahan dalam rantai nilai global (*global value chains*) dan perubahan komposisi permintaan impor bisa jadi telah berkontribusi pada rendahnya pertumbuhan perdagangan global. Negara-negara berkembang akan mulai tumbuh tahun 2015 karena rendahnya harga minyak, menguatnya ekonomi Amerika Serikat, suku bunga global yang rendah dan berkurangnya tekanan domestik di sebagian negara-negara berkembang. Setelah tumbuh 2,6% pada 2014, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3% di tahun 2015, 3,3% di tahun 2016 dan 3,2% di tahun 2017.

Kondisi ekonomi global akan terus membaik, ditambah dengan Asia yang kian memimpin pasar konstruksi dunia, dengan lebih dari 40% bagian dari pasar konstruksi global yang diprediksi akan meningkat hingga hampir setengah kali dari pengeluaran industri konstruksi global di tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan tahun 2014 didorong oleh tren urbanisasi

Global General Condition

Global economic conditions in 2014 are not so encouraging, due to lower economies of China and Japan. China's economic growth rate dropped from 7.83% to 7.3% in the third quarter in the previous year. While the Japanese economy fell to - 0.2% at the beginning of the 3rd quarter from 2.4% in the quarter of the previous year. The global economic deceleration that grew only 2.6% during 2014, occurred since the global financial crisis. Global trade has declined significantly, only grew less than 4% in 2013 and 2014, far below the average growth before the crisis, that is equal to 7% per year. However, economic conditions in 2014 is slightly better than in 2013, which grew 2.4%.

Global Economic Prospect Report (GEP) of the World Bank Group analyzed weak growth is caused by reduced sensitivity to lower demand and world trade in response to the changes that occur in global activity. Changes in global value chains (global value chains) and changes in the composition of demand for imports may have contributed to the low growth of global trade. Developing countries will begin to grow in 2015 due to low oil prices, the strengthening of the US economy, low global interest rates and reduced domestic pressure in most developing countries. After growing 2.6% in 2014, the global economy is expected to grow by 3% in 2015, 3.3% in 2016 and 3.2% in 2017.

Global economic conditions will continue to improve, coupled with the growing Asian to be a world market lead in the construction, with more than 40% share of the global construction market is expected to increase to almost half times that of the global construction industry spending in 2020. Projected growth in 2014 driven by the trend of urbanization and economic

dan pembangunan ekonomi di beberapa pasar besar di Asia, termasuk Tiongkok, India, Indonesia, dan Vietnam.

Adanya indikasi prospek yang cerah ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk ikut menjaga pertumbuhan ekonominya, dengan terus memacu pembangunan infrastruktur, khususnya sektor konstruksi. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan pada tahun ini akan membangun banyak bendungan dan waduk untuk mendukung program swasembada pangan, khususnya beras.

Kondisi Umum Domestik

Kondisi ekonomi makro sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan melalui indikator makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat 5,1% , lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang sebesar 6%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi global dan kondisi Indonesia, yang mengalami defisit transaksi berjalan cukup besar sehingga diterapkan kebijakan pengetatan, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Dengan kebijakan yang ketat, pertumbuhan akan terkendala dan tidak mencapai apa yang diharapkan. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8,36%, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2014 yang sebesar 5,3%. Hal ini terjadi karena APBN-P 2014 belum mengasumsikan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Realisasi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,8%, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2014 yang sebesar 6,0%. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat rata-rata sebesar Rp11.878 per dollar AS, lebih tinggi dari angka yang ditetapkan dalam APBN-P 2014, sebesar Rp11.600 per dollar AS. Harga

development in several major markets in Asia, including China, India, Indonesia, and Vietnam.

The indication of a bright prospect becomes a momentum for Indonesia to participate in maintaining economic growth, by continuing to spur infrastructure development, especially the construction sector. Moreover, the government has launched this year will build many dams and reservoirs to support food self-sufficiency program, especially for rice.

General Domestic Condition

Macroeconomic conditions throughout 2014 showed a good performance, as demonstrated by macroeconomic indicators. Economic growth in 2014 was recorded 5.1%, lower than the target set in the Budget and Expenditure Amendment (APBN-P) 2014 which amounted to 6%. This is influenced by global conditions and conditions in Indonesia, the current account deficit is large enough so that the applied policy tightening, both in terms of monetary and fiscal. With strict policy, growth will be constrained and do not achieve what was expected. It is also influenced by the inflation rate in 2014 was recorded at 8.36%, higher than the revised Budget assumption in 2014 that amounted to 5.3%. This happens because the APBN-P 2014 has not assumed any price adjustment of fuel oil (BBM). Realization of the interest rate of Treasury Bills (SPN) 3 months by 5.8%, lower than the assumptions in the APBN-P 2014 that amounted to 6.0%. Other factors affecting the economic growth is the realization of the rupiah against the US dollar (USD) recorded an average of IDR11.878 /US dollars, higher than the figure set in APBN-P 2014, IDR11,600 /US

minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 97 dollar AS per barel, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2014, sebesar 105 dollar AS per barel.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global menjadi modal besar bagi Indonesia untuk memacu diri. Apalagi tahun 2015, diperkirakan ekonomi global juga akan makin tumbuh dan kondisi tersebut, pasti akan berimbas mengerek pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Hal ini akan terwujud, kalau pembangunan di sektor infrastruktur, khususnya konstruksi juga dipacu dan ditingkatkan.

Berdasarkan *Asia Construction Outlook 2014*, pasar konstruksi Indonesia mencapai nilai 267 miliar dollar AS. Jauh di atas sesama negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Atau sepuluh kali lipat di atas Singapura. Nilai pasar tersebut sekaligus menempatkan Indonesia terbesar keempat di Asia, di bawah Tiongkok dengan 1,78 triliun dollar AS, Jepang dengan 742 miliar dollar AS, dan India 427 miliar dollar AS.

Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dengan kebutuhan infrastruktur dasar senilai Rp6.500 triliun akan membuat kapasitas pasar konstruksi bakal terus meningkat. Dalam RPJM 2015-2019, pembangunan jalan, jembatan, dan jalan tol diperkirakan akan mencapai Rp805 triliun, sedangkan pembangunan infrastruktur sumber daya air diperkirakan akan mencapai Rp400 triliun.

Industri

Sejarah telah mencatat bahwa sektor konstruksi di Indonesia terus tumbuh sejak krisis tahun 1998. Selama periode 2009 – 2014, sektor konstruksi melaju dengan pertumbuhan rata-rata 6,73%. Sektor konstruksi merupakan salah satu penggerak pertumbuhan

dollar. Indonesia's crude oil price stood at USD97 per barrel, lower than the assumptions in the APBN-P 2014, amounting to USD105 per barrel.

Indonesia's economic growth in 2014 which is above the average growth of the global economy into a great asset for Indonesia to pace yourself. Moreover, in 2015, predicted the global economy will also be a growing and these conditions, it would have an impact hoist economic growth in the country. This will be realized, if the construction in the infrastructure sector, particularly construction also encouraged and enhanced.

Based on *Asia Construction Outlook 2014*, Indonesian construction market reached a value of USD267 billion. Far above other fellow Southeast Asian countries, such as Malaysia, Thailand, Philippines, and Vietnam. Or ten times above Singapura. Market value put Indonesia fourth largest in Asia, under China with USD1.78 trillion, Japan with USD742 billion, and India USD427 billion.

With the existing Medium Term Development Plan (Plan) 2015-2019 with the basic infrastructure needs amounted to IDR6,500 trillion will make the capacity of the construction market continue to increase. In the 2015-2019 Development Plan, the construction of roads, bridges, and toll road is expected to reach IDR805 trillion, while the infrastructure development of water resources is expected to reach IDR400 trillion.

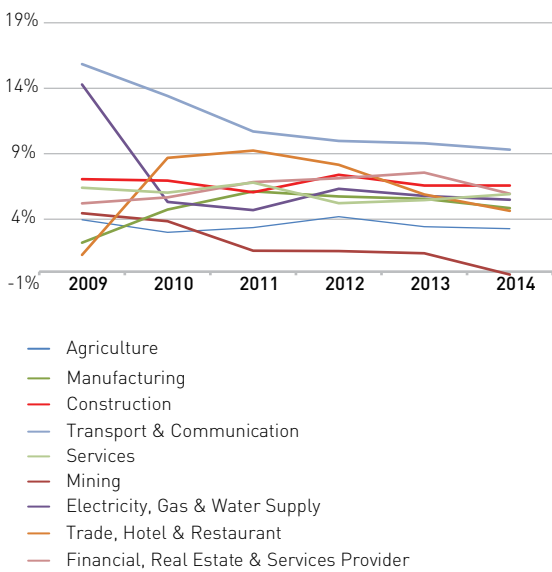
Industry

History has recorded that the construction sector in Indonesia has continued to grow since the crisis of 1998. During the period 2009-2014, the construction sector drove with an average growth of 6.73%. The construction sector is one of the growth drivers of the

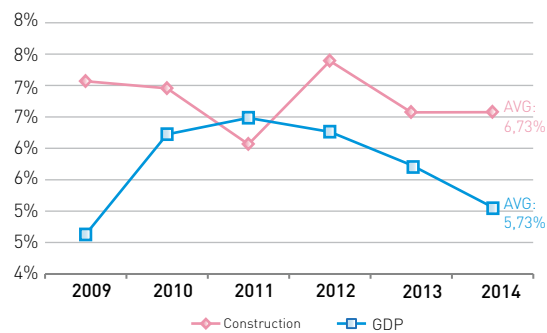
ekonomi nasional. Pada tahun 2014, sektor konstruksi tumbuh sebesar 6,58% dan merupakan sektor dengan pertumbuhan kedua terbesar di bawah sektor transportasi dan komunikasi sebesar 9,31%. Satu hal yang harus diakui bahwa pertumbuhan sektor konstruksi in-line dengan pertumbuhan ekonomi negara. Rata-rata pertumbuhan sektor konstruksi pada periode 2009 – 2013, lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDB pada periode yang sama, yaitu 6,73 dibandingkan dengan 5,73.

national economy. In 2014, the construction sector grew by 6.58% and is the second-largest growth sector under the transport sector and komunikasi amounted to 9.31%. One thing that must be recognized that the growth of the construction sector in-line with the country's economic growth. The average growth of the construction sector in the period 2009-2013, higher than the growth of GDP in the same period, which is 6.73 compared to 5.73.

Pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha
Gross domestic income growth based on business opportunity



Perbandingan Pertumbuhan Sektor Konstruksi dengan pendapatan domestik bruto (PDB)
Growth of construction sector VS Gross domestic income



Sejak lima tahun terakhir, pendapatan Persero menunjukkan angka yang bertumbuh secara stabil. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha pada Jasa Konstruksi yang signifikan dari tahun ke tahun yang dikarenakan strategi usaha manajemen untuk menjadi salah satu perusahaan kontraktor nasional yang masuk dalam kategori lima besar. Dari

Since the last five years, the Company's revenue figure shows a growing stably. It is caused by an increase in operating revenues for the Construction Services significantly from year to year due to the management's business strategy to become one of the national construction company entered into five major

sisi margin, Persero berusaha untuk meningkatkan margin pendapatan melalui *cost reduction program*, serta peningkatan sistem kerja internal Persero secara menyeluruh. Persero juga secara konsisten berupaya untuk meningkatkan daya saingnya, hal ini terbukti dari persentasi tender yang dimenangkan dari tahun ke tahun. Persero terus mendapatkan proyek-proyek besar setiap tahunnya untuk mencapai target RKAP tahunan yang telah ditentukan.

Keunggulan Bersaing

1. Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur Pemerintah.

Sebagai BUMN di bidang konstruksi, Perseroan memiliki posisi yang solid dalam mendapatkan proyek-proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah. Proyek tersebut, antara lain bendungan dan bendung, jalan dan jembatan, gedung, mekanikal dan kelistrikan, pengerukan dan reklamasi, dan proyek-proyek lainnya. Sejak tahun 1980-an, Perseroan selalu mendapatkan proyek-proyek unggulan dari Pemerintah, seperti Proyek Bendungan Serba Guna Kedung Ombo, Bendungan Serba Guna Jatibarang, Bendungan Bajulmati, Underpass Cibubur, Fly-over Bukittinggi, dan proyek-proyek unggulan lainnya. Dalam lima tahun terakhir kontrak yang diperoleh Perseroan adalah dari pekerjaan infrastruktur Pemerintah, yaitu rata-rata sekitar 80% dari total nilai kontrak yang diperoleh Perusahaan.

Kondisi ini merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang terus dipertahankan oleh Perseroan. Dikatakan keunggulan karena berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Perseroan. Kontrak-kontrak infrastruktur Pemerintah cenderung memiliki nilai kontrak yang jumlahnya lebih signifikan dan memiliki kepastian pembayaran lebih baik dibandingkan dengan kontrak-kontrak dengan pihak swasta.

In terms of margins, the Company seeks to improve revenue margins through cost reduction program, as well as an increase in the Company's internal working system as a whole. The company also consistently seeks to improve its competitiveness, it is shown from the percentage of the tender won from year to year. The Company continues to get big projects every year to reach the target annual predetermined budget.

Competitive Advantage

1. Has a favorable position in the cultivation of the potential of the Government infrastructure projects.

As a state-owned company in construction field, the Company has a solid position in getting large infrastructure projects planned by the Government. The projects, among others are dams and weirs, roads and bridges, building, mechanical and electricity, dredging and reclamation, and other projects. Since the 1980s, the Company always get the flagship projects of the government, such as the Multipurpose Dam Project Kedung Ombo, Jatibarang Multipurpose Dam, Bajulmati Dam, Cibubur Underpass, Bukittinggi Fly-over, and other flagship projects. In the last five years the contract obtained by the Company is of the Government infrastructure works, ie an average of about 80% of the total value of the contract obtained by the Company.

This condition is one of the competitive advantages that continue to be maintained by the Company. It is stated the advantages derived from experience of the Company. Government infrastructure works tend to have more significant contract value and better payment certainty than one of the private sector.

Dalam lima tahun kedepan pemerintah baru telah mencanangkan pembangunan bendungan dan segala prasarana pelengkap bendungan seperti irigasi dan saluran irigasi. Pemerintah juga telah menyusun program untuk mengatasi masalah krisis listrik nasional, salah satunya adalah dengan pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA & PLTH), dimana PLTA & PLTH sesuai dengan *core* bisnis Perseroan. Dengan ditunjang dari hal-hal tersebut, diharapkan kedepannya Perseroan memiliki pertumbuhan yang semakin meningkat.

Perseroan merupakan salah satu perusahaan konstruksi besar nasional dengan reputasi dan *customer base* yang luas. Perseroan juga telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dalam usahanya dari lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidangnya.

Pertumbuhan dan perkembangan usaha Perseroan yang cukup maju tersebut juga didukung oleh *customer base* Perusahaan yang luas; terdiri dari instansi pemerintah, BUMN dan pihak swasta (dalam negeri dan luar negeri). Selain itu, hubungan dengan klien yang terjalin dengan baik juga dapat dibuktikan dari jumlah pelanggan berulang dalam lima tahun terakhir.

2. Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas

Perseroan memiliki beberapa produk unggulan yang membantu dalam pelaksanaan proyek-proyeknya, diantaranya pembangunan bandara, dermaga, bendungan, tunnel, fly-over dan jembatan bentang panjang. Konsumen menuntut penyelesaian pekerjaan dengan waktu *delivery* lebih cepat dan mutu pelaksanaan yang lebih baik. Dalam hal itu Perseroan dapat mengungguli pesaing-pesaing lainnya dengan pengalaman yang dimilikinya dalam pembangunan proyek-proyek tersebut.

Untuk menunjang *performance* Perseroan dalam menciptakan produk dengan kualitas yang bermutu, Perseroan menerapkan proses standar dengan sistem ISO 14001: 2004 (*environmental management*

In the next five years the new government has launched the construction of the dam and all the complementary infrastructure such as irrigation dams and irrigation channels. The government has also set up programs to address the issue of national power crisis, one of which is the development of projects hydroelectricity (Hydropower & PLTH), where hydropower and PLTH is in-line with the Company's core business. Supported by these things, the Company is expected to growth increasingly in the future.

The Company is one of the major national construction company with a reputation and a wide customer base. The Company has also received various awards in his quest of the competent institutions in the field. This shows that the company has expertise and a good reputation in its field.

The growth and development of the Company's business are quite advanced is supported by the Company's broad customer base; consisting of government agencies, state Enterprises and the private sector (domestic and foreign). In addition, relationships with clients who are good also evident from the number of repeat customers in the last five years.

2. Have supreme products and quality products

The Company has some supreme products that help in the implementation of its projects, including the construction of airport, port, dam, tunnel, fly-over and long span bridge. Consumers are demanding completion of the work with faster *delivery* times and better execution quality. In that case the Company can outperform other competitors with its experience in the construction of these projects.

To support the Company's performance in creating quality products with quality, the Company implements the standard process with System ISO 14001: 2004 (*environmental management*

system), ISO 9001; 2008 (*quality management system*), dan OHSAS 18001: 2007 (*Health and Safety Management System*).

3. Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat

Sejak 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan Perseroan menunjukkan angka yang bertumbuh secara stabil. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha pada jasa konstruksi yang signifikan dari tahun ke tahun yang dikarenakan strategi usaha Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan kontraktor nasional yang masuk dalam kategori 5 besar. Dari sisi margin Perseroan berusaha untuk meningkatkan margin pendapatan melalui *cost reduction* program, serta peningkatan sistem kerja internal Perseroan secara menyeluruh.

Perseroan juga secara konsisten berupaya untuk meningkatkan daya saingnya, hal ini terbukti dari presentasi tender yang dimenangkan dari tahun ke tahun. Perseroan terus mendapatkan proyek-proyek besar setiap tahunnya untuk mencapai target RKAP tahunan yang telah ditentukan.

4. Desentralisasi organisasi dan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia

Sistem organisasi perusahaan saat ini telah bergeser dari sentralisasi yang berarti bahwa saat ini telah terjadi pelimpahan kewenangan dari kantor pusat kepada masing-masing unit usaha untuk menyusun, mengatur, dan mengurus unit usahanya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan langsung dari kantor pusat. Hal ini bertujuan untuk membentuk beberapa *Strategic Business Unit* (SBU) dalam bagan organisasi Perseroan yang dapat berjalan secara mandiri dan secara otomatis berdampak positif dalam pengembangan perusahaan.

Perseroan telah melakukan reorganisasi dalam rangka melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan struktur organisasi yang ada sebelumnya. Dengan adanya struktur organisasi baru ini, Perseroan dapat mewujudkan sistem desentralisasi dan pemberdayaan divisi yang dibagi

system), ISO 9001; 2008 (*quality management system*), and OHSAS 18001: 2007 (*Health and Safety Management System*).

3. Stable revenue growth and increased competitiveness

Since the 5 (five) years, the Company's revenue shows a stable growing numbers. This is due to the increase in operating revenues by construction services significantly from year to year due to the Company's business strategy to become one of the National Contracting Company is included in the 5 major categories. In term of margin, the Company seeks to improve revenue through cost reduction program, as well as an increase in the Company's internal work system as a whole.

The company also consistently seeks to improve its competitiveness, it is indicated from the percentage of tender gained year by year. The Company continues to gain big projects every year to reach the target of annual predetermined RKAP.

4. Decentralization of organization and marketing network and extensive production region in Indonesia

Company organization system has now shifted from the centralized which means that at this time there has been a delegation of authority from Headquarters to each business unit to compile, organize, and take care of his own business unit is no sign of intervention as well as direct assistance from the central office. It aims to establish several Strategic Business Units (SBU) within the Company's organization chart that can run independently and automatically has positive impact in the development of the company.

The Company has been reorganized in order to perform evaluation on the effectiveness of the implementation of the existing organizational structure. With this new organizational structure, the Company may realize the decentralization and empowerment of division which divided into regional

divisi regional dan proyek sebagai unit usaha yang bertanggungjawab menjalankan fungsi masing-masing untuk mencapai sasaran usaha Perseroan.

Dengan organisasi Perseroan yang ramping dan jalur birokrasi pendek menjadikan beban tetap Perseroan (beban usaha) rendah. Setiap unit usaha mempunyai fungsi marketing secara "cost" hal tersebut lebih efisien dibanding dengan pembukaan kantor cabang baru. Sehingga secara keseluruhan harga pokok produksi Perseroan dapat lebih kompetitif untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar lagi.

5. Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam penyelesaian proyek dengan tepat waktu

Manajemen Perseroan adalah orang-orang yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi dalam bidang konstruksi. Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kapasitas yang tinggi dan pantas, profesional dan memiliki *global mindset*.

Sumber daya manusia adalah aspek yang sangat penting bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan senantiasa mengembangkan keahlian tenaga kerjanya dengan pengembangan dan pelatihan dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA). Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif diwujudkan dengan penerapan beberapa program, seperti rekrutmen *Management Trainee* (MT), Beasiswa bagi pegawai untuk mengikuti program S2 dalam dan luar negeri, Program *Merit System*, dan menjalankan *sharing knowledge* secara *online*.

Guna makin mengokohkan perkembangan Persero di masa depan, manajemen melakukan diversifikasi usaha dengan sistem investasi. Beberapa proyek yang sedang dirintis untuk program investasi, antara lain:

1. Proyek *Hydro Power* (Pembangkit Listrik Mini Hydro)
2. Abipraya Beton
3. Properti

division and project as a business unit responsible for carrying out the functions of each one to achieve the business objectives of the Company.

With slim Company's organization and short bureaucracy makes fixed expenses of the Company (operating expenses) low. Each business unit has a marketing function as a "cost" it is more efficient compared with the opening of new branches. So overall production cost of the Company become more competitive to gain a greater market share.

5. Having skilled and reliable management and labor in the completion of the project punctually

Management of the Company is the people who are reliable and have high capability in the field of construction. Company always strives to create reliable human resources, having a high capacity and proper, professional and having a *global mindset*.

Human resources is a very important aspect for the Company. To that end, the Company continues to develop the expertise of its workforce with the training and development and has a Certificate of Expertise (SKA). Partially form the Company's commitment in developing a competitive human resources realized by the implementation of some programs, such as the recruitment of *Management Trainee* (MT), scholarships for employees to follow the doctoral program at home and abroad, Program *Merit System*, and carried out an *online knowledge sharing*.

In order to further strengthen the development of the Company in the future, the management carried out business diversification through investment. Several projects are being piloted for the investment program, among others are :

1. Hydro Power Project (Mini Hydro Power Plant)
2. Abipraya Concrete
3. Property



TANGERANG CITY HALL

Mulai dikerjakan pada 1 Januari 2014 dan
selesai pada 2 Desember 2014.

Began to be executed on January 1, 2014 and
completed on December 2, 2014.

TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Review

“ Sejak 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan Perseroan menunjukkan angka yang bertumbuh secara stabil. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha pada Jasa Kontruksi yang signifikan dari tahun ke tahun yang dikarenakan strategi usaha Perseroan untuk menjadi salah satu Perusahaan Kontraktor Nasional yang masuk dalam kategori 5 besar. Dari sisi margin Perseroan berusaha untuk meningkatkan margin pendapatan melalui cost reduction program, serta peningkatan sistem kerja internal Perseroan secara menyeluruh.

Since the last 5 years, the Company's revenue shows that growing numbers stable. It is caused by an increase in operating revenues for the Construction Services significantly from year to year due to the Company's business strategy to become one of the National Contracting Company in the category of large 5. From the side margin of the Company seeks to improve revenue margins through cost reduction program, as well as an increase in the Company's internal work system as a whole.

“



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Perseroan semula dibentuk sebagai bagian dari kantor proyek pelaksana pembangunan waduk Sungai Brantas (dikenal sebagai Proyek Brantas), yang telah terlibat dalam pembangunan berbagai infrastruktur bangunan air, seperti bendungan dan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air, dengan dasar kekuatan pada: perencanaan, pengawasan, operasional dan pemeliharaan, sejak 1961.

Operational Overview Per Business Segment

The Company was originally formed as part of the project executor of Brantas river basin development (known as the Brantas Project), which involved in the construction of waterworks infrastructure, such as dams and hydroelectricity projects, with the strength in planning, monitoring, operations and maintenance, since 1961.

Pada tahun 1980, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menjadikan sumber keahlian dan pengalaman ini menjadi BUMN. Kegiatan utama Perseroan sejak pendirian sampai saat ini adalah Jasa Konstruksi. Sesuai dengan sumber daya, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki, segmen pasar utama Perseroan adalah jasa konstruksi pengairan. Perseroan telah memperluas kegiatan usahanya dengan melakukan investasi pada pembangkit listrik tenaga mini hidro melalui entitas anaknya pada tahun 2011.

Pada waktu pendiriannya, Perseroan berkantor pusat di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1995, manajemen Perseroan memutuskan untuk memindahkan kantor pusat ke lokasi saat ini yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang. Perseroan telah memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 7 (tujuh) kantor cabang, 5 (lima) kantor divisi regional dan 4 (empat) Pabrik yang tersebar hampir diseluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Perseroan menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi kepada kliennya untuk setiap tahapan kegiatan proyek yang dimiliki oleh klien. Adapun rincian penjualan dari masing-masing segmen pasar Perseroan terhadap total pendapatan usaha Perseroan tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut:

In 1980, the Government of the Republic of Indonesia decided to make it a source of expertise and experience into SOEs. The main activities of the Company since establishment until today is the Construction Services. In accordance with the resources, experience, and expertise, the Company's primary market segment is irrigation construction services. The Company has expanded its business activities by investing in a mini-hydro power plant through its subsidiary entity in 2011.

At the moment of the establishment, the Company is headquartered in Malang, East Java. In 1995, the Company's management decided to move its headquarters to the current location at Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang. The Company has 1 (one) Head Office, 7 (seven) branches, 5 (five) regional divisions and 4 (four) plants spread almost throughout the Indonesian archipelago.

The company provides various services and provide solutions to its clients for each stage of the project activities. The details of the sales of each market segment to the Company's total operating revenues in 2010-2014, is as follows:

Kegiatan Usaha

Komposisi Pendapatan Per Segmen Usaha

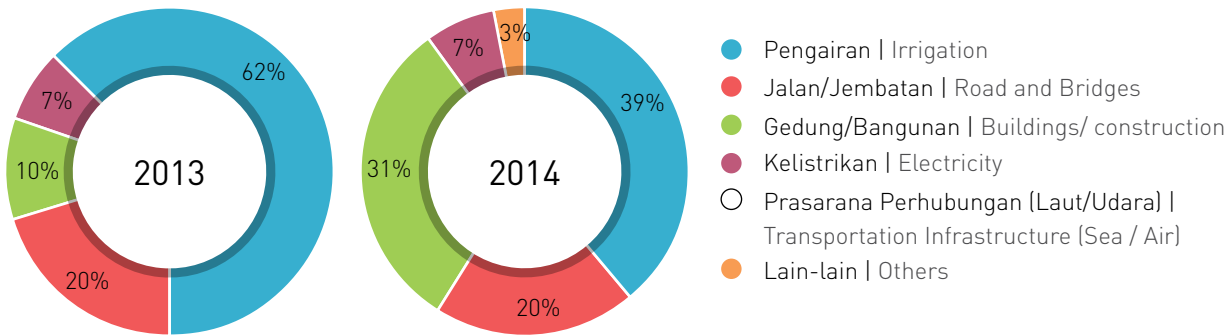
Dalam Jutaan Rp

In Million IDR

Jenis Pekerjaan	RKA 2014			REALISASI 2014			REALISASI 2013			Job Type
	Kontrak Lama Remaining	Kontrak Baru New Contract	Jumlah Total	Kontrak Lama Remaining	Kontrak Baru New Contract	Jumlah Total	Kontrak Lama Remaining	Kontrak Baru New Contract	Jumlah Total	
Pengairan	1.054.365,84	482.072,60	1.536.438,49	980.982,71	122.558,99	1.103.541,70	938.512,72	448.877,50	1.387.390,22	Irrigation
Jalan/Jembatan	459.367,25	214.640,00	674.007,25	436.353,63	118.597,58	554.951,21	245.904,97	196.449,28	442.354,25	Road/Bridge
Gedung/Bangunan	78.000,00	65.900,00	143.900,00	232.037,72	648.979,06	881.016,78	73.264,77	154.234,50	227.499,27	Building
Kelistrikan	221.654,26	10.000,00	231.654,26	192.686,33		192.686,33	129.290,88	23.750,89	153.041,77	Electrical
Prasarana Perhubungan (Laut/Udara)	-	65.000,00	65.000,00	-	13.884,22	13.884,22	-	-	-	Transportation Infrastructure (Sea / Air)
Lain-lain	-	165.000,00	165.000,00	3.491,40	88.503,42	91.994,82	-	23.855,65	23.855,65	Others
Jumlah	1.813.387,35	1.002.612,60	2.816.000,00	1.845.551,79	992.523,27	2.838.075,06	1.386.973,34	847.167,82	2.234.141,16	Total

Business Activities

Komposisi Pendapatan Per Segmen Usaha



Kinerja Segmen Usaha Jasa Konstruksi

Perseroan fokus pada bidang usaha utamanya, yaitu sebagai kontraktor untuk pekerjaan konstruksi bangunan pengairan (bendungan, bendung dan saluran irigasi), jalan dan jembatan, bangunan gedung, bangunan kelistrikan (PLTA, PLTU, PLTMH) jalan kereta api serta bangunan pelabuhan laut dan udara.

Performance of Construction Segment

Company to focus on its main business areas, namely as a contractor for the construction work of building irrigation (dam, weirs and irrigation tunnel), roads and bridges, buildings, electricity building (hydropower, power plant, Mini Hydro) railways and building of ports and airports.

Kinerja Pemasaran

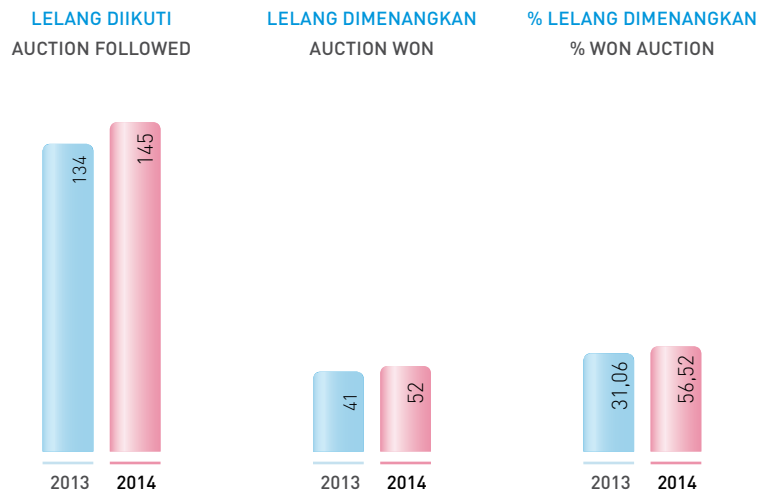
Kuantitas Kontrak | Contract Quantity

Dalam Unit Kontrak

In Contract Unit

Uraian	2014	2013	Perubahan (%) Change (%)	Description
Lelang Diikuti	145	134	8,21	Auction Followed
Lelang Dimenangkan	52	41	26,83	Auction Won
% Lelang Dimenangkan	56,52	31,06	81,97	% Won Auction

Marketing Performance



Di tahun 2014 jumlah kontrak yang dihasilkan oleh perseroan dibandingkan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 13,04% dimana pada tahun 2014 jumlah kontrak tercatat sebanyak 52 kontrak sedangkan tahun 2013 sebanyak 46 kontrak.

Sedangkan kuantitas kontrak dinilai dalam mata uang disajikan sebagai berikut

In 2014 the number of contracts generated by the company compared to the year 2013 increased by 13.04% whereas in 2014 the number of contracts recorded as many as 52 contracts while in 2013 as many as 46 contracts.

While the quantity contract valued in the currency are presented as follows

Kuantitas Kontrak | Contract Quantity

Dalam jutaan (Rp)

In Million Rupiah

Uraian	2014	2013	Perubahan (%) Change [%]	Description
Lelang Diikuti	13.235.671,00	16.266.460,00	(18,63)	Auction Followed
Lelang Dimenangkan	2.076.449,00	3.237.400,00	(35,86)	Auction Won
% Lelang Dimenangkan	19,18	24,99	(23,25)	% Won Auction
Tanpa Lelang	188.130,46	193.820,00	(2,94)	Without Auctions
Kerja Tambah	15.290,87	33.385,84	(54,20)	Additional Works
Jumlah	2.264.579,46	3.431.220,00	(34,00)	Total

Di tahun 2014 nilai kontrak yang dihasilkan oleh perseroan sebesar Rp2.264,58 miliar turun 34% dari tahun sebelumnya yaitu Rp3.431,22 miliar selama tahun 2014 lelang yang diikuti turun sebesar 18,63%, sedangkan lelang yang dimenangkan turun 35,86% dibandingkan tahun 2013 dan kontrak yang didapat tanpa lelang menurun sebesar 2,94%.

In 2014 the value of contracts generated by the company amounted to IDR2.264,58 billion, down 34% from the previous year IDR3.431,22 billion during the 2014 auction that followed fell by 18.63%, while the won auction fell to 35.86% compared to the year 2013 and obtained contracts without auctions decreased by 2.94%.

Komposisi Nilai Kontrak Berdasarkan Segmen Usaha

Composition of Contract Value by Segment Geographic

dalam jutaan Rp

(in million IDR)

Jenis Pekerjaan	RKA 2014			REALISASI 2014			REALISASI 2013			Job Type
	Kontrak Lama Remaining	Kontrak Baru New Contract	Jumlah Total	Kontrak Lama Remaining	Kontrak Baru New Contract	Jumlah Total	Kontrak Lama Remaining	Kontrak Baru New Contract	Jumlah Total	
Pengairan	1.985.528,67	1.942.150,00	3.927.678,67	2.254.651,69	507.966,39	2.762.618,08	1.592.113,64	2.151.183,61	3.743.297,25	Irrigation
Jalan/Jembatan	647.241,99	853.350,00	1.500.591,99	746.117,62	484.389,47	1.230.507,09	583.794,86	555.258,62	1.139.053,48	Road/Bridge
Gedung/Bangunan	107.549,40	239.500,00	347.049,40	264.758,56	819.734,73	1.084.493,29	140.878,94	268.933,79	409.812,73	Building
Kelistrikan	490.779,94	150.000,00	640.779,94	416.857,30	149.540,00	566.397,30	191.990,56	341.500,00	533.490,56	Kelistrikan
Prasarana Perhubungan (Laut/Udara)	77.670,00	165.000,00	242.670,00		153.936,35	153.936,35		85.532,87	85.532,87	Transportation Infrastructure (Sea / Air)
Lain-lain		250.000,00	250.000,00	3.491,40	149.012,52	152.503,92		28.811,11	28.811,11	Others
Jumlah	3.308.770,00	3.600.000,00	6.908.770,00	3.685.876,57	2.264.579,46	5.950.456,03	2.508.778,00	3.431.220,00	5.939.998,00	Total

Kinerja Operasional

Operational Performance

Nilai Kontrak yang bisa diproduksi |

Contract Value

Dalam jutaan (Rp)

In Million Rupiah

Uraian	2014	2013	Description
Kontrak Lama	3.685.876,56	2.509.778,00	Remaining Contract Value
Kontrak Baru	2.264.579,46	3.431.220,00	New Contract Value
Total Kontrak	5.950.456,02	5.939.998,00	Total Value of Contract

Kinerja nilai kontrak 2014 tercatat sebesar Rp5.950,5 miliar mengalami peningkatan sebesar 0,18% dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp5.940 miliar.

The performance of the contract value in 2014 amounted to IDR5950.5 billion, an increase of 0.18% compared to the year 2013 which was IDR5.940 billion.

Proyek-proyek jasa konstruksi yang telah dan sedang diselesaikan dengan nilai kontrak diatas Rp100 miliar tahun 2014.

Construction projects that have been and are being finalized with a contract value of more than IDR100 billion in 2014.

Pengairan

Irrigation

A. Proyek pengairan yang diselesaikan dengan nilai diatas Rp100 miliar

A. The irrigation project has been completed with a value of more than IDR100 billion

Nama Proyek Project Name	Lokasi Location	Pemberi Tugas Assignor
Komponen B: Pembangunan. Waduk Serba-guna Jatibarang; Paket B-1; Tubuh Bendungan dan Struktur lainnya Component B: Development. Multipurpose reservoirs Jatibarang; Package B-1; Dams and other body structures	Jawa Tengah Central Java	BBWS Pemali Juana BBWS Pemali Juana
Pembangunan Bendungan Titab Di Kabupaten Buleleng Titab dam construction In Buleleng	Bali	Balai Wilayah Sungai Bali - Penida Balai Wilayah Sungai Bali - Penida
Paket 9: ICB 5 Pekerjaan Sipil untuk Saluran Sekunder Muncak Kabau, Seksi-1 dan Saluran Sub-Sekunder Blok-A dan B dan Pekerjaan Perbaikan untuk Fasilitas yang ada Package 9: ICB 5 Civil Works for the Secondary Channels Muncak Kabau, Section 1 and Sub-Secondary Channel Block-A and B and Work Improvement for Existing facilities	Sumatera Selatan South Sumatra	SNVT PPSDA Sumatera VIII SNVT PPSDA Sumatera VIII
Paket 10: ICB 6 Pekerjaan Sipil untuk Saluran Sekunder Muncak Kabau, Seksi-2 dan Saluran Sub-Sekunder Blok-B dan C dan Pekerjaan Perbaikan untuk Fasilitas yang ada Package 10: ICB 6 Civil Works for the Secondary Channels Muncak Kabau, Section-2 and Sub-Secondary Channel Block-B and C and Work Improvement for Existing facilities	Sumatera Selatan South Sumatra	SNVT PPSDA Sumatera VIII SNVT PPSDA Sumatera VIII
Normalisasi Kali Sunter Paket-1 Normalization Sunter River-1 Package	DKI Jakarta DKI Jakarta	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Central River Region Ciliwung-Cisadane
Pembangunan Bendungan Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur Dam construction Pandanduri in East Lombok	Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara west	BWS Nusa Tenggara BWS Nusa Tenggara

Nama Proyek Project Name	Lokasi Location	Pemberi Tugas Assignor
Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo Dam Merapi (14 Unit) Rehabilitation and Reconstruction Works Building Sabo Dam Merapi (14 Unit)	DI Yogyakarta DI Yogyakarta	BBWS Serayu Opak BBWS Serayu Opak
Pembukaan lahan dan pencetakan sawah seluas 2.650 ha serta infrastruktur penunjang lainnya di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Land clearing and farming covering 2,650 Ha And other Supporting Infrastructure at Ketapang region, West Kalimantan Province	Kalimantan Barat West Kalimantan	PT Sang Hyang Seri (Persero) PT Sang Hyang Seri (Persero)
Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Sabo DAM Merapi Kab. Sleman, Magelang dan Boyolali Rehabilitation and reconstruction of Sabo DAM building Merapi, Sleman region, Magelang and Boyolali	DI Yogyakarta DI Yogyakarta	BBWS Serayu Opak BBWS Serayu Opak
Pembangunan Bendungan Bintang Bano Dam construction of Bintang Bano	Sumbawa Barat West Sumbawa	Dinas PU, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Department of Public Works, the Government of West Sumbawa region

B. Proyek pengairan yang sedang berjalan dengan nilai diatas Rp100 miliar

B. Ongoing irrigation projects with a value of more than IDR100 billion

Nama Proyek Project Name	Lokasi Location	Pemilik Proyek Projek Owner
Pembangunan Bendung Sei Padang D.I. Bajayu, D.I. Paya Lombang dan D.I. Langau 7.588 Ha Sei Padang weir construction D.I. Bajayu, D.I. Paya Lombang and D.I. Horsefly 7588 HA	Sumatera Utara North Sumatra	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prop. Sumatera Utara SNVT Implementation of Water Utilization Network Sumatra II Prov. North Sumatra
Pengaliran Lumpur ke Kali Porong - 2014 Mud drainage into the Porong River - 2014	Jawa Timur East Java	BPLS, Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS, Sidoarjo Mud Disaster Unit

Jalan dan Jembatan

Roads and Bridges

A. Proyek jalan dan jembatan yang telah diselesaikan dengan nilai diatas Rp100 miliar

A. Project roads and bridges that have been completed with a value of more than IDR100 billion

Nama Proyek Project Name	Lokasi Location	Pemilik Proyek Own Projects
Pembangunan Jalan Dekai - Oksibil (MYC) Dekai road construction - Oksibil (MYC)	Papua	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X National Road Implementing Agency X
Pembangunan Jalan Wagete - Timika (MYC) Waghete road construction - Timika (MYC)	Papua	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X National Road Implementing Agency X

- B. Proyek jalan dan jembatan yang sedang berjalan dengan nilai diatas Rp100 miliar
- B. Project roads and bridges that are running with a value above IDR100 billion

Nama Proyek Project Name	Lokasi Location	Pemilik Proyek Own Projects
Tanjung Palas - Sekatak (Section 2) (Package No. 34-RCP-02) Tanjung Palas - Sekatak (Section 2) (Package No. 34-RCP-02)	Kalimantan Timur East Kalimantan	PPK Of Tanjung Selor - Sekatak Buji PPK Of Tanjung Selor - Sekatak Buji
Pelebaran Jalan Pinolosian - Onggunoi - Molobog (Multi years contract) The road widening of Pinolosian - Onggunoi - Molobog (Multi-Years contract)	Sulawesi Utara North Sulawesi	Balai Pelaksana Jalan Nasional XI Manado Implementing Hall of National Roads XI Manado

Gedung/ Bangunan

Buildings/ Constructions

- A. Proyek gedung atau bangunan yang telah diselesaikan dengan nilai diatas Rp100 miliar
- A. Project building or constructions that have been completed with a value of more than IDR100 billion

Nama Proyek Project Name	Lokasi Location	Pemberi Tugas Assignor
Pekerjaan konstruksi penyediaan rumah susun Wilayah II (Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta) (Rusun 14-04) Provision of flat housing construction work Region II (Central Java and Yogyakarta) (Flat 14-04)	Jawa Tengah Central Java	Kementerian Perumahan Rakyat RI Ministry of Housing RI
Pekerjaan Konstruksi Penyediaan Rumah Susun Wilayah III (Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB) (Rusun 14-05) Provision of flat housing construction work Region III (East Java, Bali, NTT and NTB) (Flat 14-05)	Jawa Timur East Java	Kementerian Perumahan Rakyat RI Ministry of Housing RI

Kelistrikan

Electricity

- A. Proyek kelistrikan yang sedang berjalan dengan nilai diatas Rp100 miliar
- A. Ongoing electricity projects with a value of more than IDR100 billion

Nama Proyek Project Name	Lokasi Location	Pemilik Proyek Own Projects
Pembangunan PLTM Padang Guci 1 (3 x 2,0 MW) MHP development Padang Guci 1 (3 x 2.0 MW)	Bengkulu Bengkulu	PT Sahung Brantas Energi PT Sahung Brantas Energi

Prasarana perhubungan laut dan udara

Sea and air transportation facilities

- A. Proyek prasarana perhubungan yang telah diselesaikan dengan nilai diatas Rp100 miliar
- A. transportation facility projects that have been completed with a value of more than IDR100 billion

Nama Proyek Project Name	Lokasi Location	Pemberi Tugas Assignor
Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Selatan Beserta Fasilitas Penunjangnya Di Bandar Udara International Juanda - Surabaya (Tahap 2): Taxiway, Fasilitas, Mekanikal, Elektrikal dan Elektronika South Terminal Building Construction Work As well as supporting facilities at the airport International Juanda - Surabaya (Phase 2): Taxiway, facilities, Mechanical, Electrical and Electronics	Jawa Timur East Java	PT Angkasa Pura I (Persero) PT Angkasa Pura I (Persero)

Kinerja Segmen Usaha Non Konstruksi

Perseroan mengembangkan usaha pabrik beton dalam rangka memenuhi kebutuhan internal. Kelebihan kapasitas produksi menjadi pedapatan tambahan untuk keuntungan perusahaan. Ditahun 2014 nilai pendapatan sebesar Rp11,07 miliar.

Performance of Non Construction Business Segment

The Company developed a concrete factory effort in order to meet internal needs. Excess production capacity to pedapatan addition to its advantage. Year 2014 revenue of IDR11.07 billion.

Proses Bisnis

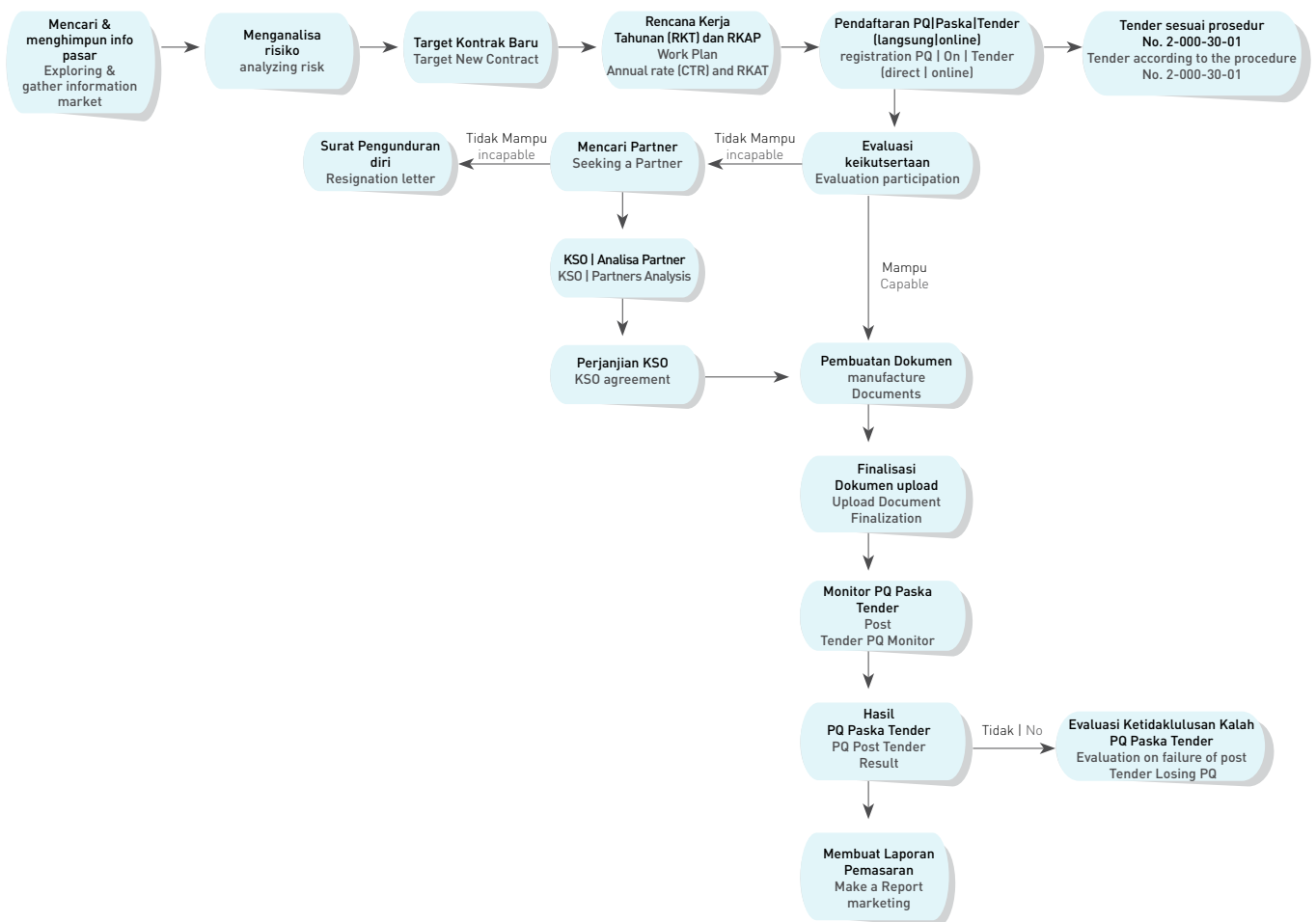
Proses bisnis segmen jasa konstruksi Perusahaan dibagi menjadi 2 Aspek Kunci, yaitu aspek Pemasaran dan aspek Produksi.

Business Process

Business process of construction services of the Company is divided into two key aspects, namely Marketing and Production aspect.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspects



Pangsa Pasar

Berdasarkan Peraturan Pengembangan Lembaga Jasa Konstruksi (LPJK), Perlem No. 2 tahun 2013 dan Perlem No. 10 tahun 2013 usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri dari:

1. Usaha bersifat General (umum)
2. Usaha bersifat Spesialis
3. Usaha bersifat perseorangan dengan keterampilan kerja

Untuk klasifikasi usaha bersifat umum terdiri dari dua klasifikasi yaitu:

- Berdasarkan Perlem No. 2 Tahun 2013 klasifikasi B1 (peralihan), dapat melaksanakan pekerjaan < 250 M
- Berdasarkan Perlem No. 10 Tahun 2013 untuk klasifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan > 250 M, dengan rincian sebagai berikut:

Klasifikasi Classification	Nilai Proyek Project value
Kelas B (Besar) Class B (Large)	≥ Rp10 Miliar ≥ IDR10 Billion
Kelas M (Menengah) Class M (Intermediate)	Rp1 Miliar s/d Rp10 Miliar IDR1 Billion s/d IDR10 Billion
Kelas K (Kecil) Class K (Minor)	<Rp1 Miliar <IDR1 Billion

Saat ini Perseroan berada pada klasifikasi B. Persaingan dalam Industri Jasa konstruksi cukup tajam karena jumlah pesaing sekitar 125 perusahaan klasifikasi B di seluruh Indonesia. Persaingan tersebut menjadi semakin ramai dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing untuk mengikuti tender-tender ICB (International Competitive Bidding) pada proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Walau demikian, tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk masuk dalam usaha jasa konstruksi klasifikasi B karena dibatasi oleh penguasaan teknologi, padat modal dan pengusahaan serta penguasaan pasar tingkat tinggi. Jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri yang sama dengan Perseroan, maka Perseroan berada di kelompok 6 besar. Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Perseroan diantaranya cost structure yang sangat kompetitif, tenaga kerja yang ahli serta pengalaman khusus yang dimiliki Perseroan dalam

Market Share

Pursuant to Rule Construction Service Development Institute (LPJK), Perlem No. 2 in 2013 and Perlem No. 10 in 2013 to the contractor business services consists of:

1. General nature of business (general)
2. Business with specialist characteristic
3. Business with individual who has job skill characteristic

For general business classification is composed of two classifications, namely:

- Based Perlem No. 2 In 2013 the classification B1 (intermediate), can carry out the work of <250 M
- Based Perlem No. 10 In 2013, for the classification of B2 can carry out jobs > 250 M, with details as follows:

Presently, the company is in B classification. The competition in the construction services industry is quite sharp as the number of competitors around 125 companies in B classification throughout Indonesia. Competition is becoming more and more crowded with the entry of foreign contractors to participate in tenders ICB (International Competitive bidding) on projects funded by foreign loans. However, it is not easy for a company to enter the construction services business B classification because it is limited by the mastery of technology, capital intensive and exploitation as well as the high level of market control. When compared to the State Owned Enterprise that engaged in the same industry with the Company, therefore is in big 6 construction Company. The Company understands that the competition in sales in the construction industry in Indonesia is extremely tight. However, with the expertise and experience that has had, the Company believes it has a strong position in the competition. This is mainly supported by the Company's competitive advantage include cost structure highly competitive, skilled workforce and specialized experience of the Company in some specific kinds of

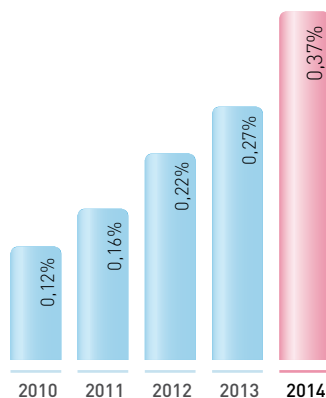
beberapa jenis proyek tertentu. Selain itu, Perseroan merupakan market leader dalam jasa konstruksi untuk proyek-proyek bendungan.

Berikut ini adalah beberapa perusahaan konstruksi besar yang antara lain menjadi pesaing Perseroan:

Nama Perusahaan Company Name	Kegiatan Usaha Business Activities	Pesaing dalam Hal Competitors within
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Construction Services	Penjualan Selling
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Construction Services	Penjualan Selling
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Construction Services	Penjualan Selling
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi Construction Services	Penjualan Selling
PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Konstruksi Construction Services	Penjualan Selling
PT Nindya Karya (Persero)	Jasa Konstruksi Construction Services	Penjualan Selling

Dalam persaingan industri konstruksi, berdasarkan data yang bersumber dari BPS, pangsa pasar Perseroan dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend meningkat dibandingkan dengan pasar potensial konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2014	2013	2012	2011	2010	Description
Potensial Pasar Konstruksi	756.042,00	818.514,00	768.053,00	715.200,00	661.000,00	Construction Market potential *)
Realisasi Pendapatan Perseroan	2.838,07	2.234,14	1.670,60	1.132,33	824,72	Realization Company Acquisition
Pangsa Pasar	0,37%	0,27%	0,22%	0,16%	0,12%	(%)



Pemasaran

Perusahaan melakukan pemasaran secara desentralisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Divisi dan Unit usaha. Di bidang jasa konstruksi kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna jasa telah menaruh

projects. In addition, the Company is the market leader in construction services for dam projects.

Here are some major construction companies that become competitor of the Company:

In the construction industry competition, based on data from BPS, the Company's market share in the past five years shows an upward trend compared to the potential market of construction with the following details:

Marketing

The company carries out decentralized marketing in accordance with the authority of each division and business unit. In the construction services, the marketing activities can only be accomplished if the

kepercayaan kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan sifat jasa konstruksi menawarkan sesuatu yang belum berwujud dengan suatu harga, kualitas dan waktu penyerahan yang telah di tentukan.

Proses produksi dalam bentuk pengerjaan proyek pelaksanaan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersama antara Perusahaan Jasa dan Penyedia Jasa. Perusahaan melakukan pemasaran secara konsisten dengan program peningkatan kepuasan Pemberi Pekerjaan (klien) dari tahun ke tahun. Perusahaan selalu berupaya memberikan alternatif solusi kepada pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Selain itu, Perusahaan juga memiliki sistem informasi yang tangguh yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perusahaan.

Berbagai informasi pasar dari berbagai sumber daya (departemen/ instansi, konsultan, hubungan individual dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang saling menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan. Guna mengintensifkan usaha-usaha pemasaran, Perseroan melakukan pemasaran untuk mendapatkan proyek-proyek dari pelanggan baru dan pelanggan yang sudah ada.

Untuk pasar pelanggan baru, tingkat margin relatif lebih rendah dibandingkan pasar dari pelanggan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan pelanggan yang sudah ada memberikan proyek berupa pekerjaan tambah, repeat order, baik melalui pemilihan langsung maupun penunjukan langsung tanpa melalui proses tender yang menghasilkan margin yang relatif lebih tinggi dari pasar pelanggan baru. Perseroan melaksanakan kegiatan pemasaran melalui kantor pusat yang berlokasi di daerah Jakarta dan kantor-kantor cabang yang berlokasi di Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin.

Perseroan melakukan kegiatan pemasaran untuk memperoleh proyek-proyek yang ditenderkan oleh pihak swasta maupun oleh Pemerintah Pusat dan

user has put their trust on the executor. It is related to the nature of construction services that offer tangible things at a certain price, quality and delivery time that has been set.

The production process in the form of project implementation in place service users based on mutually agreed contract between the Company and the Service Provider. Companies do marketing consistently with continuous improvement program for the Job assignor (clients) satisfaction from year to year. The company always strives to provide alternative solutions to customers based on the principle of mutual benefit. In addition, the Company also has a robust information system that allows decisions accurately and quickly, so the opportunity to obtain various types of jobs or projects that benefit can be done in an integrated manner at the level of the Company.

Various market information from various resources (departments/ agencies, consultants, individual relationships and others) managed optimally by the Company in obtaining various types of work or projects of mutual benefit can be conducted integratedly at the level of the Company. In order to intensify marketing efforts, the Company carried out marketing strategy to gain projects from new customers and existing customers.

For new customer markets, the level of margin is relatively lower than the market of existing customers. This is because the customer's existing deliver the project in the form of additional work, repeat orders, either through direct election or appointment directly without going through a tender process which produces relatively higher margin than new customer markets. The company carries out marketing activities through its headquarters located in Jakarta and branch offices located in Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Denpasar, Mataram and Banjarmasin.

The company carries out marketing activities to acquire projects tendered by the private sector and by the Central Government and Local Government. For contracts

Pemerintah Daerah. Untuk kontrak-kontrak dengan nilai dibawah Rp50 miliar yang berhasil diperoleh oleh kantor cabang, pelaksanaan pekerjaannya akan dilaksanakan oleh Kantor Divisi Regional yang terkait, untuk kontrak-kontrak dengan nilai diatas Rp50 miliar akan langsung dikerjakan oleh Kantor Pusat.

Pelanggan & Daya Saing

Segmen Pasar

Segmen pasar dibagi dalam beberapa segmen yaitu, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Pemerintahan Daerah, Swasta dalam Negeri dan Luar Negeri.

Komposisi Perolehan Kontrak Baru

Composition of New Contract Gaining

Keterangan Description	2014		2013		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pemerintah Government	1.303.149,46	58%	2.588.781,84	75%	1.683.882,97	72%
BUMN/D BUMN/D	623.850,00	28%	449.545,23	13%	441.935,06	18%
Swasta Private	337.580,00	15%	392.892,93	11%	257.451,16	11%
Total	2.264.579,46	100%	3.431.220,00	100%	2.353.269,19	100%

Pelanggan Berulang

Perseroan juga telah menjalin kerja sama yang baik dengan klien-kliennya. Hal ini terbukti dengan banyaknya order pengerjaan proyek yang diberikan oleh pihak yang sama. Sejak tahun 2009 sampai dengan 30 September 2014, Perseroan telah menyelesaikan proyek antara lain:

Jumlah Proyek Number of Projects	Pemberi Proyek Project giver
9	BAPEL - BPLS, Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
7	Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Provincial Government of East Kalimantan
6	BBWS Sumatera VIII
5	Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi Bekasi District Office Building
4	BBWS Bengawan Solo
4	BBWS Pompengan - Jeneberang
3	PT Pembangunan Jaya Ancol
3	PT Bio Jatropha Indonesia, PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan, PT Sangsaka Hidro Barat
3	SNVT PJSA Serayu Opak
3	BBWS Cimanuk - Cisanggarung
3	PJSA Sumatera IV Propinsi Kepulauan Riau PJPA IV Sumatra Riau Islands Province

with a value below IDR50 billion that was successfully obtained by the branch offices, the implementation of the work will be carried out by the relevant Regional Division Office, for contracts with a value above IDR50 billion will be directly carried out by the Head Office.

Customer & Competitiveness

Market Segment

Segment of the market is divided into several segments, namely, the Government, State Owned Enterprises ("SOEs"), Local Government, Public and Private Sector in Foreign Affairs.

Recurring Customers

The company also has established good cooperation with its clients. This is evidenced by the many project orders given by the same party. Since 2009, through September 30, 2014, the Company has completed projects among others are:

Jumlah Proyek Number of Projects	Pemberi Proyek Project giver
3	BWS Kalimantan III
2	SNVT Pelaksanaan jalan Nasional Metropolitan / Jakarta SNVT Implementation of National road / Jakarta Metropolitan
2	PT Sang Hyang Seri (Persero)
2	BBWS Ciliwung - Cisadane
2	BWS Bali - Penida
2	BBWS Brantas
2	PPSDA Sulawesi IV
2	Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta Fisheries Indonesia Jakarta Housing Branch

Pendapatan dari Pelanggan Berulang Revenue from Recurring Customers

Keterangan Description	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year ended December 31				
	2014	2013	2012	2011	2010
Kementerian Pekerjaan Umum Ministry of Public Works	561.004,61	1.487.533,28	681.439,96	893.347,49	281.731,58
Pemerintah Daerah Local Government	134.303,03	170.689,67	128.856,28	9.117,75	25.857,52
Total pelanggan berulang Total recurring customer	-	250.000,00	210.591,36	17.977,33	23.003,20
Total pendapatan usaha Total operating revenue	9,00	12,00	11,00	11,00	8,00
% Pelanggan Berulang terhadap Pendapatan Usaha % Recurring customer to operating revenue	1.552.841,92	3.237.397,98	1.916.825,49	1.280.459,55	717.865,87

Daya Saing

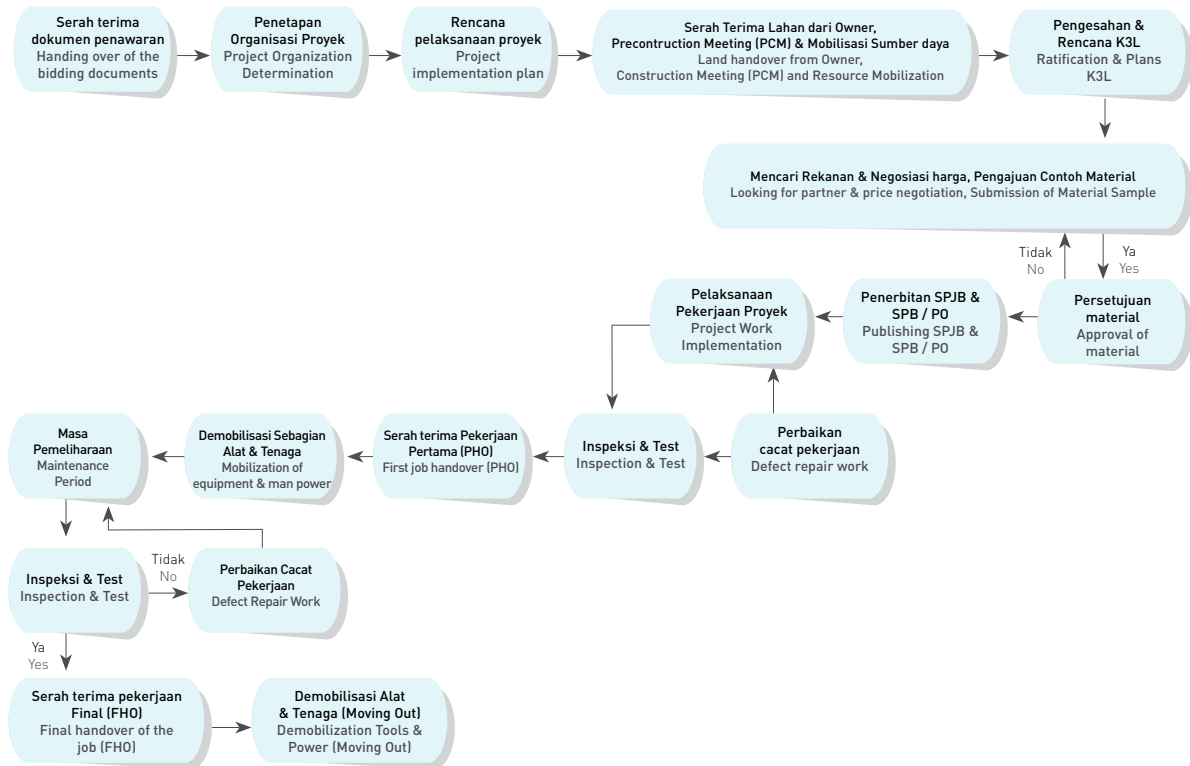
Proyek-proyek yang didapat Perusahaan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan daya saing Perseroan dari tahun 2010-2014:

Competitiveness

The projects are derived from the acquired company and the appointment of the auction. The following table is about the development contracts obtained by the Company from the years 2010-2014:

Uraian	2014	2013	2012	2011	2010	Description
Lelang yang diikuti	13.235.671,00	16.266.416,36	13.053.880,25	7.873.088,38	7.223.237,81	Followed Auction
Lelang yang diumumkan	10.828.082,00	12.954.425,48	9.685.154,20	6.989.662,08	6.422.931,49	Auction announced
Lelang yang dimenangkan	2.076.449,00	3.237.400,00	1.916.832,47	1.280.455,38	717.873,05	Auctions won
Daya Saing (%)	19,18%	24,99%	19,79%	18,32%	11,18%	Competitiveness (%)

Aspek Produksi



Aspect Production

Pengendalian Mutu (Quality Control)

Perusahaan memiliki komitmen bersama untuk menjalankan proses bisnis dengan mengacu persyaratan standar Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & SMK3, guna membangun Perusahaan yang berdaya saing tinggi, memberi pelayanan memuaskan kepada pelanggan, menghasilkan keuntungan dan nilai tambah bagi Pemegang Saham, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan Karyawan, serta mampu memenuhi harapan stakeholder lainnya, yang:

1. Berbasis pada ketepatan mutu produk, biaya, waktu, dan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan proses bisnis perusahaan serta peraturan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab dan terlibat langsung di dalam pemeliharaan dan penyempurnaan K3L di area kerja masing-masing, dengan:
 - Meniadakan kecelakaan fatal dan cacat permanen (*zero fatal accident*);

Quality Control (Quality Control)

The Company has a commitment to execute business processes with reference to the requirements of ISO 9001 Management System standard, ISO 14001, OHSAS 18001 & SMK3, in order to build a company that is highly competitive, provide satisfactory service to customers, generating a profit and added value for shareholders, improve the competence and well-being of employees, as well as to meet the expectations of other stakeholders, which:

1. Based on the accuracy of product quality, cost, time, and human resources empowerment in accordance with the company's business processes and regulations.
2. Responsible and directly involved in the maintenance and improvement of K3L in the work area respectively, by:
 - Eliminating fatal accident and permanent disability (*zero fatal accident*);

- Meminimalkan jumlah kejadian kecelakaan (frequency rate);
 - Meminimalkan jumlah hari kerja hilang (severity rate);
 - Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan selalu mengantisipasi terhadap dampak lingkungan pada setiap aktifitas;
 - Mencegah pencemaran lingkungan berdasarkan perundangan/ persyaratan lain yang berlaku dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan
3. Mengelola risiko yang dapat mengganggu tercapainya sasaran / tujuan Perusahaan.
 4. Menjadikan Teknologi Informasi sebagai pendorong terwujudnya bisnis perusahaan dan karyawan yang berbudaya informasi.
 5. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan masyarakat di sekitar proyek atau aktivitas pekerjaan.

Kebutuhan Investasi Mesin/Alat Berat

Kebutuhan investasi alat berat Perseroan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan jumlah Proyek-Proyek yang ditangani oleh Perseroan, biaya untuk investasi alat tersebut akan dibebankan pada masing-masing biaya proyek sesuai dengan studi kelayakan yang dilakukan. Kebijakan Perseroan dalam rangka investasi mesin dan alat berat adalah dengan terus melakukan peremajaan untuk alat berat yang memiliki usia relatif tua yaitu lebih dari 8 tahun. Melalui kebijakan ini diharapkan alat berat yang dimiliki oleh Perseroan selalu dalam kondisi baik dan menjadi competitive advantage bagi Perseroan untuk memenangkan tender-tender yang diikuti, sehingga jumlah pencapaian proyek yang ditangani dapat meningkat setiap tahunnya.

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan oleh Perusahaan sebagian besar berasal dari material Lokal (berkisar hampir 95%) sedang sisanya Impor (khususnya untuk peralatan sistem keamanan Bendungan). Biaya bahan baku yang berasal dari pemasok, dalam struktur Beban Kontrak (cost structure) Persero adalah sebesar 30% - 40%, yang pengadaannya dituangkan dalam bentuk Surat

Machinery/Heavy Equipment Investment requirement

The Company's investment needs heavy equipment tailored to the number of needs and the number of Projects that are handled by the Company, the investment cost for the equipment will be charged to each project costs in accordance with the conducted feasibility study. The Company's investment policy in the context of machinery and heavy equipment is to continue doing rejuvenation for heavy equipment which has a relatively old age of more than 8 years. Through this policy it was expected that the Company's heavy equipment always in good condition and become a competitive advantage for the Company to win tenders, so the number of projects achievement can increase each year.

Raw Material

The raw materials used by the Company mostly from local materials (ranging from almost 95%) while the rest Import (especially for equipment security system Dam). The cost of raw materials originating from suppliers, the Contract Expenses structure (cost structure) of the Company is 30% - 40%, which is realized in the form of procurement Procurement Agreement (SPM) for a certain period of

Perjanjian Pengadaan Material (SPM) untuk jangka waktu tertentu. Banyaknya pemasok yang tersedia, menguntungkan Persero untuk mendapatkan bahan baku sehingga Perusahaan selama ini tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

Strategi Usaha

Strategi Perseroan diwujudkan melalui pencapaian sasaran dalam hal nilai kontrak, pendapatan usaha dan laba Perseroan dengan menempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- Memperluas pangsa pasar konstruksi yang dimiliki Perseroan,
- Meningkatkan kemampuan SDM ditingkat Pusat, Divisi/Wilayah dan Proyek dalam melakukan pengadaan bahan/Material, peralatan dan Sub Kontraktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan berproduksi, serta peningkatan sense of business karyawan,
- Meningkatkan penjualan, kecepatan berproduksi serta meminimalkan resiko produksi yang ada,
- Menyempurnakan metode konstruksi yang dimiliki disesuaikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,
- Meningkatkan produktifitas dan kesiapan peralatan Perseroan serta melakukan sertifikasi untuk memastikan peralatan produksi memenuhi ketentuan K3L,
- Meningkatkan jumlah rekanan sebagai sub kontraktor/pemasok dan meningkatkan kemampuan pengadaan,
- Menyempurnakan sistem manajemen ISO 9001-2008, OHSAS 18001:1999, SMK3 serta ISO 1400.

Perseroan tetap percaya bahwa kesiapan manajemen didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan SDM yang berkesinambungan dan strategi usaha yang telah diprogramkan, akan membawa peluang pertumbuhan dan mewujudkan harapan masa depan Perseroan yang lebih baik.

time. Numbers of vendor availability can be profitable for the Company to obtain raw materials so long as the Company has no dependency on certain vendor.

Business Strategy

The Company strategy is realized through the achievement of targets in terms of contract value, revenues and profits of the Company by taking strategies and policies as follows:

- Expanding the Company's market share in construction,
- Increasing the level of human resources capability at head office, division/regional and project site in the procurement of materials, equipment and sub-contractors who can support the smooth production operation, as well as increasing sense of business employees,
- Increase sales, production speed and minimize the risk of existing production,
- Improving owned construction methods adapted to take advantage of technological advances,
- Increase productivity and readiness of the Company as well as melakukan certified equipment to ensure the equipment meets the provisions K3L production,
- Increase the number of partners as sub-contractors/suppliers and improve procurement,
- Improving management system ISO 9001-2008, OHSAS 18001: 1999, and ISO 1400 SMK3.

The Company continues to believe that the readiness of the management is supported by good corporate governance, human resources sustainable development and programs of business strategy will bring growth opportunities and realize a better Company's future expectation.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review



Pencapaian kinerja keuangan Persero di tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter dan infrastruktur. Adapun kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan Perseroan adalah kebijakan harga BBM, tarif pajak dan ketenagakerjaan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional adalah pengembangan unit usaha baru dan pengembangan entitas anak perusahaan.

Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material.

Achievement of the Company's financial performance in 2014 was influenced by external and internal factors. External factors affecting the operations of the Company are government policies such as fiscal, monetary and infrastructure. The government policies that affect the financial position of the Company is the fuel price policy, tax rates and employment. While internal factors that affect the financial and operational performance is the development of new business units and the Company's subsidiaries.

Financial Performance

Financial Statements for the years ended December 31, 2014 and 2013 have been audited by Public Accountant Office HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners and got opinions fairly in all material respects.

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Consolidated Comprehensive Income (Loss) Statement

dalam jutaan Rp

(in million IDR)

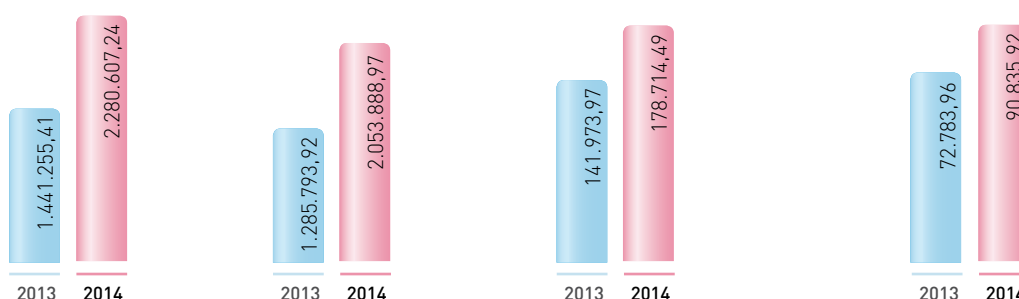
Uraian	2014	2013	Perubahan (%)	Description
Pendapatan Usaha	2.280.607,24	1.441.255,41	58,24	Operating revenue
Beban Langsung	2.053.888,97	1.285.793,92	59,74	Direct Expenses
Laba Kotor-Sebelum Bagian Laba Joint operation	226.718,26	155.461,48	45,84	Gross Profit-Before Profit Part Of Joint Operation
Laba sebelum beban bunga dan pajak penghasilan	178.714,49	141.973,97	25,88	Profit before income tax expense and
Laba komprehensif tahun berjalan	90.835,92	72.783,96	24,80	Comprehensive income for the current year

PENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUE

BEBAN LANGSUNG DIRECT EXPENSES

LABA SEBELUM BEBAN BIAYA DAN PAJAK PENGHASILAN PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE AND

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR



Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2014 sebesar Rp2.838,08 miliar, mengalami peningkatan 27,03% atau sebesar Rp603,93 miliar dibanding pendapatan usaha tahun 2013 sebesar Rp2.234,14 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari komposisi proyek Non JO sebesar Rp2.280,61 miliar atau 80,36% dan JO sebesar Rp557,47 atau 19,64% dari seluruh pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan jasa konstruksi proyek Non JO sebesar 58,24% atau setara dengan Rp839,35 miliar,

Operating Revenues

The Company's operating revenues in 2014 amounted to IDR2,838.08 billion, an increase of 27.03% or IDR603,93 billion compared to revenues in 2013 amounted to IDR2,234.14 billion. The revenue is comprised of the composition of Non JO project IDR2,28.61 billion, or 80.36% and JO IDR557,47 or 19.64% of all revenues. This is caused by the increase in service revenues of Non-JO construction project by 58.24% or equivalent

karena pada awal tahun 2014 diperoleh beberapa proyek Rusunawa dari Kemenpera yang jangka waktunya di bawah 1 tahun dengan nilai sekitar Rp500 miliar dan dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah melakukan diversifikasi pasar, dimana portofolio pendapatan usaha tidak hanya didominasi oleh sektor PU Pengairan saja. Selain itu Perseroan sudah menempati posisi yang cukup eksis sebagai "Market Leader" khususnya di segmen jasa konstruksi Pengairan yang memberikan margin lebih baik dibandingkan segmen jasa konstruksi lain.

to IDR839.35 billion, due to several Rusunawa of Kemenpera projects acquired in early 2014 which term was under 1 year with a value of around IDR500 billion and can be completed on time. This shows that the Company has diversified market, where business income portfolio is not only dominated by the Irrigation. In addition the Company has placed considerable exist as a "Market Leader" particularly in the Irrigation construction services segment that give better margins than other segments.

Komposisi Pendapatan Usaha

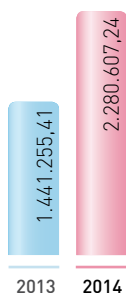
Composition of Income (Loss)

dalam jutaan Rp

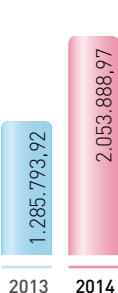
(in million IDR)

Uraian	2014	2013	Perubahan (%)	Description
Pendapatan Non JO				Revenue Non-JO
• Pendapatan jasa konstruksi	2.265.316,37	1.407.055,48	61%	Services revenue contribution •
• Pendapatan jasa peralatan	4.224,20	33.261,13	(87,30%)	Revenue service equipment •
• Pendapatan produk beton	11.066,67	124,71	8.773%	Revenue concrete products •
• Pendapatan jasa konsultasi	-	814,09	-	Consulting services revenue •
Total Pendapatan Non JO	2.280.607,24	1.441.255,41	58,24%	Total Revenue Non JO
Pendapatan JO	557.467,82	792.885,75	(29,69%)	revenue JO
Total Pendapatan Usaha	2.838.075,06	2.234.141,16	(27,03)	Total Operating Revenues

PENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUE



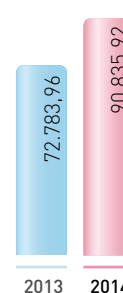
BEBAN LANGSUNG DIRECT EXPENSES



LABA SEBELUM BEBAN BIAYA DAN PAJAK PENGHASILAN PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE AND



LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR



Beban Langsung

Beban langsung Perseroan pada tahun 2014 sebesar Rp2.571,58 miliar, mengalami kenaikan sebesar 28,29% atau setara dengan Rp567,07 miliar dibanding

Direct Expenses

The Company direct expenses in 2014 was amounted to IDR2,571.58 billion, an increase of 28.29% or equivalent to IDR567,07 billion compared to total expenses of

tahun 2013 sebesar Rp2.004,51 miliar. Beban langsung ini terdiri dari komposisi beban langsung proyek Non JO sebesar Rp2.053,89 miliar atau 79,87% dan JO sebesar Rp517,69 miliar atau 20,13% dari seluruh beban langsung. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan bahan material sebesar 39,96% atau setara dengan Rp180,55 miliar serta kenaikan beban sub kontraktor sebesar 207,81% atau setara dengan Rp465 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya proyek-proyek di luar PU Pengairan (diluar core businessnya). Perseroan masih belum bisa menekan beban langsungnya dikarenakan Perseroan masih berusaha untuk menemukan kompetensi baru pada "core business" yang baru.

2013 amounted to IDR2,004.51 billion. The direct expenses consist of the composition of Non-JO project IDR2,053.89 billion, or 79.87% and JO project IDR517.69 billion, or 20.13% of the total direct expenses. This is mainly due to the increase of materials by 39.96% or equivalent to IDR180.55 billion and the increase of sub-contractor direct expense 207.81% or equivalent to IDR465 billion. The increase was primarily due to projects other than the Irrigation Works (outside of its core business). The company still has not been able to suppress the direct expense because that the Company was still trying to find a new competence in the "core business".

Komposisi Beban Langsung

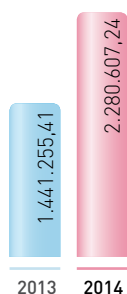
Composition of Direct Expenses

dalam jutaan Rp

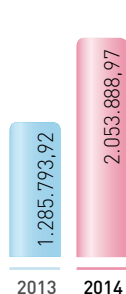
(in million IDR)

Uraian	2014	2013	Perubahan (%)	Description
Beban Langsung Non JO				Revenue Non-JO
• Bahan material	632.383,03	451.832,63	39,96%	materials •
• Upah langsung	137.992,58	104.190,08	32,44%	direct wages •
• Peralatan	303.973,78	297.727,66	2,10%	equipment •
• Penyusutan	46.031,13	29.208,79	57,59%	decrease •
• Subkontraktor	688.759,17	223.758,75	207,81%	subcontractors •
• Persiapan dan penyelesaian proyek	88.823,57	66.474,65	33,62%	Preparation and completion of the project •
Beban umum proyek				General expenses projects
• Administrasi bank & keuangan	9.232,24	14.790,01	(37,58%)	Banks and financial administration •
• Pegawai	83.432,39	52.199,27	59,83%	Employee •
• Kendaraan	14.228,88	9.508	49,65%	Vehicle •
• Umum & administrasi	46.352,08	36.104,06	28,38%	General and administrative •
Pengembangan usaha	2.680,12	-	-	Business development
Jumlah Beban Langsung Non JO	2.053.888,98	1.285.793,92	59,74%	Total Revenue Non JO
Beban Langsung JO	517.691,44	718.714,32	(27,97%)	Revenue JO
Total Beban Langsung	2.571.580,41	2.004.508,24	28,29%	Total Operating Revenues

PENDAPATAN USAHA
OPERATING REVENUE



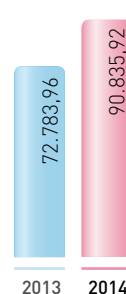
BEBAN LANGSUNG
DIRECT EXPENSES



LABA SEBELUM BEBAN BIAYA DAN PAJAK PENGHASILAN
PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE AND



LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR



Bagian Laba Joint Operation (JO)

Tahun 2014 bagian laba JO mengalami penurunan sebesar Rp34,39 miliar atau 46,37% dari Rp74,17 miliar di tahun 2013 menjadi Rp39,78 miliar di tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dari proyek JO tahun 2014 sebesar Rp235,42 miliar atau 29,69% dari Rp792,89 miliar di tahun 2013 menjadi Rp557,47 miliar di tahun 2014.

Profit Joint Operation (JO)

In 2014 the JO profit shares decreased by IDR34.39 billion or 46.37% from IDR74.17 billion in 2013 to IDR39.78 billion in 2014. This was due to a decrease in revenue from JO project in 2014 amounted to IDR235.42 billion, or 29.69% from IDR792.89 billion in 2013 to IDR557.47 billion in 2014.

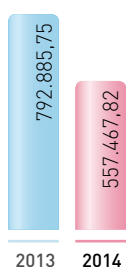
Komposisi Pendapatan dan Bagian Laba JO
JO Revenue and Profit

dalam jutaan Rp

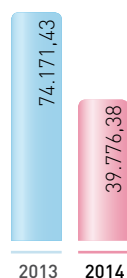
(in million IDR)

Uraian	2014	2013	Perubahan (%)	Description
Pendapatan JO	557.467,82	792.885,75	(29,69%)	JO Revenue
Laba JO	39.776,38	74.171,43	(46,37)	JO Profit

PENDAPATAN JO
REVENUE



LABA JO
PROFIT JO



Beban Usaha

Beban usaha Perseroan tahun 2014 sebesar Rp80,89 miliar mengalami peningkatan sebesar 18,35% atau setara dengan Rp12.539,57 miliar dibanding beban usaha tahun 2013 sebesar Rp68,35 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pegawai sebesar 22,73%, atau setara dengan Rp9,54 miliar dan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 6,76% atau setara dengan Rp1 miliar, serta kenaikan beban kendaraan sebesar 68,35% atau setara dengan Rp2,53 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemenuhan fasilitas-fasilitas dalam rangka mendukung program kerja Perseroan.

Komposisi Beban Usaha

Composition of Operating Expenses

dalam jutaan Rp

(in million IDR)

Uraian	2014	2013	Perubahan (%)	Description
Pegawai	51.529,33	41.986,44	22,73%	Employee
Umum dan administrasi	15.839,14	14.835,94	6,09%	General and administrative
Kendaraan	6.713,14	4.186,43	60,35%	vehicle
Penjualan	4.279,55	4.844,54	11,66%	selling
Penyusutan	2.530,56	2.498,75	1,27%	Decrease
Jumlah	80.891,72	68.352,14	18,35%	Total

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan tahun 2014 sebesar Rp185,60 miliar meningkat 15,08% atau setara dengan Rp24,32 miliar dibanding tahun 2013 sebesar Rp161,28 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha dari proyek non JO yang cukup signifikan yaitu sebesar 58,24% atau setara dengan Rp839,35 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang signifikan, sehingga perolehan laba usaha juga mengalami peningkatan. Kenaikan laba usaha terutama disebabkan oleh meningkatnya laba pada proyek pembangunan Bendung Bajulmati di Banyuwangi, Proyek pembangunan Rusunawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Operating Expenses

The Company's operating expenses in 2014 amounted to IDR80.89 billion, an increase of 18.35%, equivalent to IDR12539.57 billion, compared to operating expenses in 2013 amounted to IDR68.35 billion. This is mainly due to the increase in personnel expenses amounted to 22.73%, equivalent to IDR9.54 billion and an increase in general and administrative expenses amounted to 6.76%, equivalent to IDR1 billion, and the increase in vehicle load by 68.35% or equivalent to IDR2.53 billion. The increase was primarily due to the increasing needs of employees' welfare and facilities fulfillment in order to support the Company's working program.

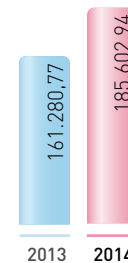
Operating Profit

The Company's operating profit in 2014 amounted to IDR185.60 billion, increased by 15.08%, equivalent to IDR24.32 billion compared to the year 2013 amounting to IDR161.28 billion. This was mainly due to higher revenue from non-JO project, significantly fair amounted 58.24% or equivalent to IDR839.35 billion. The increase was primarily due to a significant increase in revenue, so the acquisition of operating profit also increased. The increase in operating profit was primarily due to increased earnings in Bendung Bajulmati development projects in Banyuwangi, the construction flat housing (Rusunawa) in Central and East Java.

dalam jutaan Rp

(in million IDR)

Uraian	2014	2013	Perubahan Alteration(%)	Description
Laba Usaha	185.602,94	161.280,77	15,08%	Operating Profit



Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan Perseroan sebesar Rp90,84 miliar mengalami kenaikan sebesar 24,80% atau setara dengan Rp18,05 miliar dibanding laba bersih tahun berjalan pada tahun 2013 sebesar Rp72,78 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dari Proyek Non JO sebesar 58,24% atau setara dengan Rp839,35 miliar yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha, sehingga perolehan laba bersih tahun berjalan juga mengalami peningkatan, penurunan beban bunga sebesar 15,48% atau setara dengan Rp5,05 miliar. Penurunan beban bunga tersebut terutama disebabkan karena semakin optimalnya utilisasi fasilitas *supply chain financing* dalam pembayaran biaya pelaksanaan proyek. Selain itu juga adanya perbaikan struktur pembayaran kepada rekanan, dan penerapan manajemen arus kas yang lebih baik, sehingga beban bunga dapat lebih efisien dan kenaikan pendapatan lain-lain sebesar 259,64% atau setara dengan Rp13,76 miliar yang disebabkan oleh adanya penerimaan bunga deposito sebesar Rp11,15 miliar.

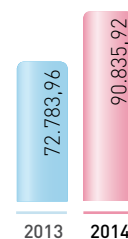
Current Year Net Profit

Company's net profit for the current year amounted to IDR90.84 billion, an increase of 24.80%, equivalent to IDR18.05 billion compared to the net profit in 2013 amounted to IDR72.78 billion. This was mainly due to increased revenues from the Project Non JO by 58.24% or equivalent to IDR839.35 billion due to an increase in revenue, so that the net profit for the year also increased, decreased interest expense amounted to 15.48% or equivalent to IDR5.05 billion. Decrease in interest expense was primarily due to more optimal utilization of facilities supply chain financing facilities in the payment of the cost of implementing the project. There was also an improvement in the structure of payments to partners, and the application of cash flow management is better, so the interest charges can be more efficient and increase in other income amounted to 259.64%, equivalent to IDR13.76 billion due to the receipt of interest deposits amounting to IDR11.15 billion.

dalam jutaan Rp

(in million IDR)

Uraian	2014	2013	Perubahan Alteration(%)	Description
Laba Bersih Tahun Berjalan	90.835,92	72.783,96	24,80%	Current Year Net Profit



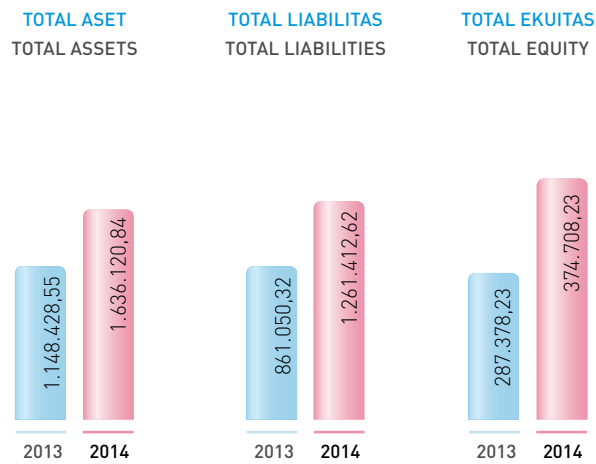
Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Assets, Liabilities and Equity

Komposisi Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Composition of Assets, Liabilities and Equity

Uraian	2014	2013	Perubahan Alteration (%)	Description
Total Aset	1.636.120,84	1.148.428,55	42,47%	Total Assets
Total Liabilitas	1.261.412,62	861.050,32	46,50%	Total Liabilities
Total Ekuitas	374.708,23	287.378,23	30,39%	Total Equity



Aset

Tahun 2014 jumlah Aset Perseroan sebesar Rp1.636,12 miliar terjadi peningkatan sebesar 42,47% atau setara dengan Rp487,69 miliar dibandingkan dengan posisi tahun 2013 sebesar Rp1.148,43 miliar. Tahun 2014, terdapat kenaikan jumlah aset lancar dibandingkan tahun 2013 sebesar 46,05% atau setara dengan Rp359,23 miliar, yang disebabkan oleh besarnya nilai piutang usaha perseroan serta tagihan bruto kepada pemberi kerja yang masih belum bisa dicairkan dikarenakan adanya beberapa proyek yang terkendala pada dana anggarannya. Aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp92,46 miliar atau naik 31,86% terjadi kenaikan pada aset tetap karena adanya pembelian aset.

Asset

In 2014 the amount of assets of the Company amounted to IDR1636.12 billion, an increase of 42.47%, equivalent to IDR487.69 billion compared to the year 2013 amounting to IDR1148.43 billion. In 2014, there is an increase compared to the amount of current assets in 2013 amounted to 46.05%, equivalent to IDR359.23 billion, which is caused by the value of the company's account receivable and gross invoice to the employer who still has not been disbursed because of some projects are constrained by the fund budget. Non-current assets increased by IDR92.46 billion, increase up to 31.86% due to fixed assets purchases.

Komposisi Aset

Composition of Assets

dalam jutaan Rp

(in million IDR)

Uraian	2014	2013	Perubahan (%)	Description
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	457.460,70	441.167,64	3,69%	Cash and cash equivalents
Piutang Usaha	374.014,41	213.549,64	75,14%	Accounts Receivable
• Pihak yang berelasi	321.251,16	185.535,70	73,15%	Relation Party •
• Pihak Ketiga	52.763,25	28.013,94	88,35%	third-party •
Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga	6.459,10	1.268,04	409,38%	Other Receivables - Third Parties
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	220.148,17	75.022,35	193,44%	Gross bill to Employer
• Pihak yang berelasi	148.975,71	53.025,10	180,95%	Relation Party •
• Pihak Ketiga	71.172,46	21.997,24	223,55%	third-party •
Persediaan	39.936,17	37.474,61	6,57%	Stock
Uang Muka	46.440,85	29.004,24	60,12%	Advance
Beban Dibayar Dimuka	21.252,86	19.770,39	7,49%	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	86.968,06	30.216,70	187,81%	Prepaid Taxes
Jaminan	775,99	10.750,83	(92,78%)	guarantee
Total Aset Lancar	1.253.456,31	858.224,43	46,05%	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Long-Term Assets
Properti Investasi	-	-	-	Investment Property
Aset Tetap – Net	358.533,22	279.591,75	28,23%	Property and Equipment - Net
Aset Lain-lain	-	-	-	Other Assets
Beban Tangguhan	24.131,32	10.612,37	127,39%	Deferred Charges
Total Aset Tidak Lancar	382.664,54	290.204,12	31,86%	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset	1.636.120,84	1.148.428,55	42,47%	Total Assets

Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

Kas dan setara kas Perseroan pada tahun 2014 sebesar Rp457,46 miliar dimana terjadi kenaikan sebesar 3,69% atau setara dengan Rp16,29 miliar dibandingkan posisi

Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and bank. Cash equivalents are all short-term investments that are highly liquid and are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three months or less from the date of placement and are not used as collateral and are not restricted.

Cash and cash equivalents of the Company in 2014 amounted to IDR457.46 billion, where an increase of 3.69%, equivalent to IDR16.29 billion compared to the

tahun 2013 sebesar Rp441,17 miliar. Peningkatan kas dan setara kas tersebut terutama disebabkan karena pada akhir tahun pencairan tagihan termin proyek-proyek pemerintah yang sumber dananya berasal anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penerimaan uang muka dari pemberi kerja untuk beberapa proyek.

Piutang Usaha

Piutang usaha Perseroan tahun 2014 sebesar Rp374,01 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 75,14% atau setara dengan Rp160,46 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp213,55 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dari pihak yang berelasi sebesar 73,15% atau setara dengan Rp135,71 miliar yang disebabkan oleh ketersediaan anggaran Pemerintah yang terbatas (DIPA) sehingga pendapatan usaha belum seluruhnya bisa ditagih dan bisa cair pada tahun berjalan.

Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan prestasi fisik pekerjaan yang telah disetujui oleh pemberi kerja, akan tetapi belum ditagihkan karena perbedaan tanggal antara berita acara prestasi fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja Perseroan tahun 2014 sebesar Rp220,15 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 193,44% atau setara dengan Rp145,13 miliar dibanding posisi tahun 2013 sebesar Rp75,02 miliar. Peningkatan tagihan bruto kepada pemberi kerja dikarenakan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha dan berita acara tagihan baru dapat dibuat pada periode bulan berikutnya.

Uang Muka

Uang muka Perseroan tahun 2014 sebesar Rp46,44 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 60,12% atau setara dengan Rp17,44 miliar dibanding posisi tahun 2013 sebesar Rp29 miliar. Peningkatan uang muka disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan barang untuk konstruksi dan pekerjaan subkontraktor di proyek akibat dari jumlah penanganan proyek yang meningkat dan antisipasi kebutuhan atas barang untuk konstruksi proyek dan jasa

year 2013 amounting to IDR441.17 billion. Increase in cash and cash equivalents was primarily due to the year-end bill disbursement terms of government projects of which funds originated from income and expenses of the State budget or regional budget and the of receipt advance payment from the employer for some projects.

Accounts Receivable

The Company's trade receivables in 2014 amounted to IDR374.01 billion, where an increase of 75.14%, equivalent to IDR160.46 billion compared to the year 2013 amounted to IDR213.55 billion. This increase was due to higher trade receivables from related parties amounted to 73.15%, equivalent to IDR135.71 billion due to the limited availability of government budget (DIPA) so that revenues can not entirely be billed and liquidated in the current year.

Gross Bills to Employer

Gross invoice to the employer is a physical feat of work that has been approved by the employer, but has not been charged because of the difference between the date of the minutes of physical accomplishments with billing on the date of filing of statement of financial position.

Gross invoice to the employer of the Company in 2014 amounted to IDR220.15 billion, where an increase of 193.44%, equivalent to IDR145.13 billion compared to the position in 2013 amounting to IDR75.02 billion. Increased gross invoice to the employer due to the increase in total operating revenues and minutes of the new bill can be made in the period of the next month.

Down Payment

Advances for the Company in 2014 amounted to IDR46.44 billion, where an increase of 60.12%, equivalent to IDR17.44 billion compared to the position in 2013 amounting to IDR29 billion. Increase in advances due to the growing need for goods for construction and subcontractor work on the project as a result of the increased number of handling projects and the anticipated demand for goods and services for project construction subcontractors and

subkontraktor dan terdapat uang muka operasional untuk mendukung proyek yang sedang dikerjakan sehingga jumlah uang muka secara total juga mengalami peningkatan.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka Perseroan tahun 2014 sebesar Rp86,97 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 187,81% atau setara dengan Rp56,75 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp30,22 miliar. Peningkatan pajak dibayar dimuka disebabkan oleh kenaikan PPN masa pajak Oktober-Desember 2013 dan masa pajak Januari-Desember 2014 sedang dalam proses restitusi sampai dengan 31 Desember 2014 dan kenaikan uang muka PPh final konstruksi yang disebabkan kenaikan potongan PPh final konstruksi atas penerimaan uang muka dari pemberi kerja.

Jaminan

Jaminan Perseroan tahun 2014 sebesar Rp0,78 miliar, dimana terjadi penurunan sebesar (92,78%) atau setara Rp9,97 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp10,75 miliar. Penurunan jaminan disebabkan oleh adanya jaminan yang telah jatuh tempo oleh lembaga keuangan telah dikembalikan kepada Perseroan dan juga disebabkan oleh adanya penerbitan jaminan menggunakan fasilitas non cash loan yang dimiliki oleh Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Total aset tidak lancar Perseroan tahun 2014 sebesar Rp382,66 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 31,86% atau setara dengan Rp92,46 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp290,20 miliar. Kenaikan aset tidak lancar ini disebabkan terutama oleh meningkatnya aset tetap-net sebesar 28,23% atau setara dengan Rp78,94 miliar yang disebabkan oleh adanya penambahan aset berupa pengadaan peralatan proyek untuk mendukung proses produksi dan meningkatkan pendapatan usaha.

advances are operational to support the project that is being done so that the total amount of advance payment also increased.

Prepaid Taxes

The Company's prepaid taxes in 2014 amounted to IDR86.97 billion, where an increase of 187.81%, equivalent to IDR56.75 billion compared to the year 2013 amounting to IDR30.22 billion. Increased prepaid taxes due to higher VAT tax period October to December 2013, and the tax period from January to December 2014 is in the process of restitution of up to December 31, 2014 and an increase in advance income tax due to increase in the final construction of the final withholding taxes on receipt of advance construction of the employer.

Guarantee

The Company guarantees in 2014 amounted to IDR 0.78 billion, which decreased by (92.78%), equivalent to IDR9.97 billion compared to the year 2013 amounting to IDR10.75 billion. A decline caused by the assurance guarantees that have been matured by financial institutions has been returned to the Company and is also caused by the issuance of guarantees use of non-cash loan facility owned by the Company.

Long-Term Assets

Total Long-Term assets of the Company in 2014 amounted to IDR382.66 billion, where an increase of 31.86%, equivalent to IDR92.46 billion compared to the year 2013 amounting to IDR290.20 billion. The increase in long-term assets is due primarily to increased net fixed assets amounted to 28.23%, equivalent to IDR78.94 billion due to the addition of assets such as equipment procurement project to support the production process and increase revenues.

Liabilitas

Liabilities

Komposisi Liabilitas

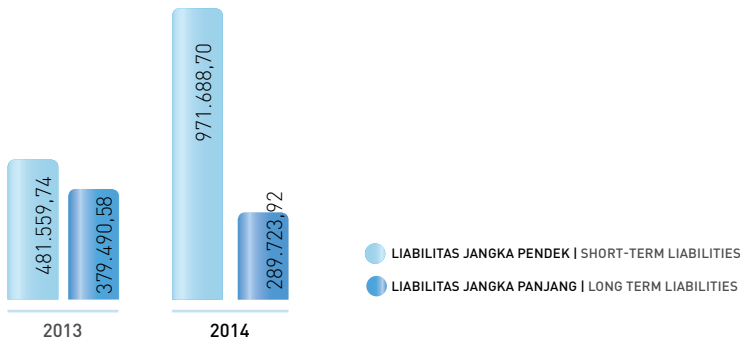
Composition of Liabilities

dalam jutaan Rp

in million IDR

Uraian Description	2014	2013	Perubahan Alteration [%]
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities			
Utang Usaha Accounts Payable	697.530,27	323.110,04	115,88%
• Pihak-pihak berelasi Related parties	-	-	-
• Pihak ketiga Third Parties	697.530,27	323.110,04	115,88%
Utang bank – jatuh tempo satu tahun Bank loans - one year maturity	-	1.345,15	-
Utang Non Bank Non-Bank Debt	-	-	-
Utang Lain-lain Pihak Yang Berelasi Other Debt with Related Party	2.040,00	-	-
Utang Lain-lain Pihak Ketiga Other Third Parties Debt	32.802,00	-	-
Utang Pajak Taxes Payable	21.855,82	7.770,61	181,27%
Utang Muka Pemberi Kerja – Jatuh Tempo Satu Tahun Advances Employer Debt - One Year Maturity	49.962,01	71.826,73	(30,44%)
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	-	17.274,11	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Accrued Cost	53.111,86	42.294,36	25,58%
Utang Sewa Pembiayaan – Jatuh Tempo Satu Tahun Lease Financing Debt - One Year Maturity	14.386,74	17.938,75	(19,80%)
Surat Berharga Jangka Menengah - Jatuh Tempo Satu Tahun Medium Term Securities - One Year Maturity	100.000,00	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	971.688,70	481.559,74	101,78%
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities			
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Estimated Liabilities Top Employee Benefits	9.060,10	7.574,83	19,61%
Utang Non Bank Non-bank debt	101.800,00	144.300	(29,45%)
Utang Bank – Setelah Dikurangi Bagian Bank Loans - Net of			
• Yang Jatuh Tempo Satu Tahun Maturities One Year	44.703,47	-	-
Uang Muka Pemberi Kerja – Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun That part Maturity One Year Advances Employer - Net	96.011,25	146.498,27	(34,46%)
Utang Sewa Pembiayaan – Setelah Dikurangi Bagian Uang Jatuh Tempo Satu Tahun Lease Financing Debt - Net Part of Money Maturity One Year	38.149,10	6.117,48	523,61%
Surat Berharga Jangka Menengah Medium Term Securities	-	75.000,00	-
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Long Term Liabilities	289.723,92	379.490,58	(23,65%)
Total Liabilitas Total Liabilities	1.261.412,62	861.050,33	46,50%

LIABILITAS JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG
SHORT-TERM AND LONG-TERM LIABILITIES



Total liabilitas Perseroan tahun 2014 sebesar Rp1.261,41 miliar, dimana terjadi peningkatan sebesar 46,50% setara dengan Rp400,36 miliar dibanding dengan total liabilitas Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp861,05 miliar. Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 101,78% setara dengan Rp490,13 miliar, dari Rp481,56 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp971,69 miliar pada tahun 2014. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan antara lain oleh kenaikan utang usaha pada pihak ketiga sebesar Rp374,42 miliar atau 115,88% dari Rp323,11 miliar di tahun 2013 menjadi Rp697,53 miliar di tahun 2014.

Utang Usaha

Utang usaha Perseroan tahun 2014 sebesar Rp697,53 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 115,88% atau setara dengan Rp374,42 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp323,11 miliar. Peningkatan utang usaha dikarenakan oleh hutang usaha pada pihak ketiga ditunda pembayarannya karena penggunaan fasilitas *supply chain financing* atau *open accounting financing*, dan juga peningkatan hutang usaha akibat dari meningkatnya pendapatan Perseroan.

Utang Pajak

Utang pajak Perseroan tahun 2014 sebesar Rp21,86 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 181,27% atau setara dengan Rp14,06 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp7,77 miliar. Peningkatan utang pajak dikarenakan oleh adanya kenaikan utang pajak penghasilan final konstruksi sehubungan dengan pengakuan PPh final atas pendapatan jasa konstruksi, dimana hutang PPh final

Total liabilities of the Company in 2014 amounted to IDR1261.41 billion, an increase of 46.50% or equivalent to IDR400.36 billion compared to total liabilities of the Company in 2013 amounted to IDR861.05 billion. Short-term liabilities of the Company increased by 101.78%, equivalent to IDR490.13 billion from IDR481.56 billion in 2013 to IDR971.69 billion in 2014. The increase of current liabilities is due to, among others, the increase of payables to the third parties amounting to IDR374.42 billion or 115.88% from IDR323.11 billion in 2013 to IDR697.53 billion in 2014.

Accounts Payable

The Company's operating debt in 2014 amounted to IDR697.53 billion, where an increase of 115.88%, equivalent to IDR374.42 billion compared to the year 2013 amounting to IDR323.11 billion. An increase in accounts payable due to trade payables to third parties deferred payment for the use of supply chain financing facilities or Open Accounting Financing, and also an increase in trade payables as a result of the increased revenues of the Company.

Taxes Payable

Company taxes payable liability in 2014 amounted to IDR21.86 billion, where an increase of 181.27%, equivalent to IDR14.06 billion compared to the year 2013 amounting to IDR7.77 billion. Increased tax liability due to the increase in income tax liabilities in connection with the final construction of the final income tax on revenue recognition of construction services, which the

kontribusi tersebut belum dipotong dengan potongan PPh final karena masih dalam proses penagihan termin dan terdapat pungutan PPN karena sampai dengan 31 Desember 2014 Perseroan sebagai wajib pungut belum menyetorkan ke kas negara.

Uang Muka Pemberi Kerja – Jatuh Tempo Satu Tahun

Uang muka pemberi kerja-jatuh tempo satu tahun Perseroan tahun 2014 sebesar Rp49,96 miliar dimana terjadi penurunan sebesar (30,44%) atau setara dengan Rp21,86 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp71,83 miliar. Penurunan uang muka pemberi kerja-jatuh tempo satu tahun disebabkan oleh meningkatnya nilai angsuran uang muka yang diperhitungkan dalam tagihan termijn, sehingga menyebabkan menurunnya saldo hutang uang muka pemberi kerja.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar Perseroan tahun 2014 sebesar Rp53,11 miliar dimana terjadi kenaikan sebesar 25,58% atau setara dengan Rp10,82 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp42,29 miliar. Peningkatan beban yang masih harus dibayar tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah bonus pegawai yang dicadangkan pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2013 pembayaran bonus direalisasikan pada tahun berikutnya, sehingga mengakibatkan jumlah beban yang masih harus dibayar mengalami peningkatan.

Utang Sewa Pembiayaan – Jatuh Tempo Satu Tahun

Utang sewa pembiayaan-jatuh tempo satu tahun Perseroan tahun 2014 sebesar Rp14,39 miliar dimana terjadi penurunan sebesar 19,80% atau setara dengan Rp3,55 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp17,94 miliar. Penurunan utang sewa pembiayaan-jatuh tempo satu tahun dikarenakan oleh jumlah pembayaran utang sewa pembiayaan untuk porsi jangka pendek lebih besar dari penambahan utang jangka pendek pada periode 31 Desember 2014.

Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perseroan tahun 2014 sebesar Rp9,06 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 19,61% atau setara dengan Rp1,49 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp7,57 miliar. Peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan

construction of the final income tax payable has not been cut by withholding final because it is still in the process of billing terms and there is a levy of VAT due until December 31, 2014 The Company as the deposit has not been required to pay to the state treasury.

Advances from Employer - One Year Maturity

Advances from employers - One Year Maturity of the Company in 2014 amounted to IDR49.96 billion, which decreased by (30.44%), equivalent to IDR21.86 billion compared to the year 2013 amounting to IDR71.83 billion. Decrease in advances from employer - One Year Maturity due to the increasing value of installment advances are taken into account in the bill termijn, resulting in a lowering debt balance employer advance.

Accrued Cost

The Company accrued expenses in 2014 amounted to IDR53.11 billion, where an increase of 25.58%, equivalent to IDR10.82 billion compared to the year 2013 amounting to IDR42.29 billion. An increase in accrued expenses was caused by the increasing number of employee bonuses were reserved in 2014 than in 2013 bonus payments realized in the next year, resulting in the amount of accrued expenses increased.

Lease Financing Debt - One Year Maturity

Finance lease debt - One Year Maturity of the Company in 2014 amounted to IDR14.39 billion, which decreased by 19.80%, equivalent to IDR3.55 billion compared to the year 2013 amounting to IDR17.94 billion. Decrease in Lease Financing Debt - One Year Maturity due to the amount of finance lease debt payments for short-term portion is greater than the addition of short-term debt in the period from December 31, 2014.

Estimated Liabilities Top Employee Benefits

The liabilities is estimated on the benefits of the Company in 2014 amounted to IDR9.06 billion, where an increase of 19.61%, equivalent to IDR1.49 billion compared to the year 2013 amounting to IDR7.57 billion. Increase in estimated liabilities for employee benefits

kerja dikarenakan oleh adanya peningkatan jumlah karyawan dan terjadi kenaikan gaji sehingga terjadi kenaikan imbalan kerja.

Uang Muka Pemberi Kerja Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun

Uang muka pemberi kerja setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun, sebesar Rp96,01 miliar tahun 2014, dimana terjadi penurunan sebesar 34,46% atau setara dengan Rp50,49 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp146,50 miliar. Penurunan uang muka pemberi kerja setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai angsuran uang muka yang diperhitungkan dalam tagihan termijn, sehingga menyebabkan menurunnya saldo hutang uang muka pemberi kerja dalam tahun 2014.

Uang Sewa Pembiayaan Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun

Uang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun Perseroan tahun 2014 sebesar Rp38,15 miliar dimana terjadi peningkatan sebesar 523,61% atau setara dengan Rp32,03 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar Rp6,12 miliar. Peningkatan uang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun dikarenakan oleh adanya peningkatan perolehan alat-alat untuk kebutuhan proyek melalui sewa pembiayaan dalam periode sampai dengan 31 Desember 2014, dimana jumlah penambahan hutang sewa pembiayaan jatuh tempo lebih dari satu tahun atau jangka panjang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang direklasifikasi ke porsi jangka pendek atau jatuh tempo dalam satu tahun sesuai dengan skedul pembayaran yang telah disepakati.

Analisa Laporan Arus Kas

Kas dan setara kas tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3,69% dibanding tahun 2013. Besarnya kas dan setara kas tahun 2014 Rp457,46 miliar sedangkan tahun 2013 sebesar Rp441,17 miliar. Kenaikan kas dan setara kas disebabkan antara lain digunakan untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

due to an increase in the number of employees and an increase in salaries resulting increase in employee benefits.

Advances from Employer Minus Net Current One Year Maturity

Advances from employers Minus Net Current One Year Maturity amounted to IDR96.01 billion in 2014, which decreased by 34.46% or equivalent to IDR50.49 compared to the position in 2013 amounted to IDR146.50 billion. Decrease in advances from employer minus net current one year maturity was mainly caused by the increasing value of installment advances are taken into account in the bill termijn, resulting in a lowering debt balance employer advance in 2014.

Lease Financing Minus Net Current One Year Maturity

Lease Financing Minus Net Current One Year Maturity of the Company in 2014 amounted to IDR38.15 billion, where an increase of 523.61%, equivalent to IDR32.03 billion compared to the year 2013 amounted to IDR6.12 billion. Increased Lease Financing Minus Net Current One Year Maturity is due to an increase in the acquisition of equipment for the project through lease financing needs in the period up to December 31, 2014, where the amount of additional debt finance lease maturities of more than one year or long-term greater than the amount that was reclassified to short-term portion or maturing within one year in accordance with the payment schedule agreed.

Statement of Cash Flow Analysis

Cash and cash equivalents in 2014 increased by 3.69% compared to 2013. The amount of cash and cash equivalents in 2014 to IDR457.46 billion, while in 2013 amounted to IDR441.17 billion. The increase in cash and cash equivalents due to, among others, are used for operating activities, investing activities and financing activities.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Perseroan

Summary of Cash Flow Statement of the Company

dalam jutaan Rp

in million IDR

Uraian Description	2014	2013	Perubahan (%)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows derived from the activity operation	57.221,85	317.355,06	(81,97%)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash used for activities investment	(91.620,80)	(22.092,62)	(314,71%)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flows derived from the activity Funding	50.692,01	(49.274,15)	(202,88)
Kenaikan bersih kas dan setara kas Net increase in cash and cash equivalents	16.293,06	245.988,29	(93,38%)
Kas dan bank pada awal tahun Cash and bank at the beginning of the year	441.167,64	195.179,35	126,03%
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at end of year	457.460,70	441.167,64	3,69%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp260,13 miliar atau (81,97%) dibanding tahun 2013. Kas yang digunakan untuk kegiatan operasi tahun 2014 sebesar Rp57,22 miliar, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp317,36 miliar. Penurunan penggunaan arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran kepada Pemasok, subkontraktor, Direksi, karyawan, JO dan pihak ketiga serta pembayaran pajak penghasilan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Dibandingkan tahun 2013, aktivitas investasi mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar Rp69,53 miliar atau 314,71%. Kenaikan ini disebabkan Perseroan selama tahun 2014 melakukan investasi yang cukup agresif yaitu pengadaan peralatan konstruksi, tanah untuk pabrik beton *precast* dan penyertaan pada Brantas Energi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari investasi pendanaan tahun 2014 sebesar Rp50,69 miliar meningkat Rp99,97 miliar dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan utang bank dan surat berharga jangka menengah.

Cash Flows from Operating Activities

Cash flow from operating activities in 2014 decreased by IDR260.13 billion (81.97%) compared to 2013. Cash used for operating activities in 2014 amounted to IDR57.22 billion, whereas in 2013 amounted to IDR317.36 billion. Decreased use of cash flow from operating activities is mainly due to higher payments to suppliers, subcontractors, directors, employees, JO and third parties as well as the payment of income tax.

Cash Flows from Investing Activities

Compared to the year 2013, cash flow from investing activities decreased significantly, amounting to IDR69.53 billion or 314.71%. This decrease is due to the company during 2014 invested fairly aggressively in order to increase production capacity, namely the procurement of equipment and investment for the Brantas Energi and Precast concrete plant as well as the payment of deferred charges.

Cash Flows from Financing Activities

Cash flows from financing investments in 2014 amounted to IDR50.69 billion, an increase of IDR99.97 billion compared with cash flow from financing activities in 2013. This increase is due to the repayment of bank debt, the addition of non-bank debt, finance lease debt receipts.

Kolektabilitas Piutang

Pada tahun 2014, tingkat kolektabilitas piutang Perseroan tercatat sebanyak 95,09 hari, lamanya periode perputaran piutang Perseroan tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 47,15 hari. Kenaikan tingkat kolektabilitas tersebut disebabkan beberapa tagihan atas project in progress mengalami keterlambatan pembayaran sebagai akibat dari perubahan jadwal pembayaran oleh pihak pemberi kerja.

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang Perseroan ditunjukkan dengan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang dapat dihitung dengan rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dapat dihitung dengan cara membandingkan kas yang dimiliki oleh Perseroan dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Likuiditas

Uraian	2014	2013	Perubahan Alteration (%)	Description
Rasio Kas	47,08%	91,61%	(48,61%)	Cash Ratio
Rasio Lancar	1,29 x	1,78 x	(27,53%)	Current Ratio

Rasio likuiditas 2014 mengalami penurunan dibanding 2013, baik diukur dengan menggunakan Rasio Kas maupun Rasio Lancar. Besarnya rasio lancar Perseroan melebihi 1x, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang persero relatif baik.

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban yang dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu: (1) rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan (2) rasio utang bersih terhadap ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dikurangi kas dan setara kas dengan jumlah ekuitas.

Receivables Collectibility

In 2014, the Company Receivable Collectibility level recorded at 95.09 days, the length of turnover period of the Company's accounts receivable increased compared to previous year which recorded 47.15 days. The Collectibility rate increase was due to several ongoing project bills commenced a payments delay as a result of changes in the schedule of payments by the employer.

Solvability

The Company's Solvability is indicated by the ratio of liquidity and solvency ratios. Liquidity demonstrate our ability to meet short-term liabilities, which can be calculated by the cash ratio and current ratio. Cash ratio can be calculated by comparing the cash held by the Company with the amount of short-term liabilities, while the current ratio is calculated by comparing the amount of current assets with a number of short-term liabilities.

Liquidity

Liquidity ratio in 2014 decreased compared to 2013, both measured using the Cash Ratio and Current Ratio. The magnitude of the current ratio of the Company exceeds 1x, this suggests that the ability to pay debts owned relatively good.

Solvability shows the Company's ability to pay obligations that can be measured in several ways, namely: (1) the ratio of liabilities to equity, which is calculated by comparing the total liabilities to total equity, and (2) the ratio of net debt to equity, which is calculated by comparing the total liabilities minus cash and cash equivalents to total equity.

Solvabilitas

dalam X (kali)

Solvability

in X (times)

Uraian	2014	2013	Perubahan / Alteration [%]	Description
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	3,37	3	12,33%	Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio Utang Bersih terhadap Ekuitas	2,15	1,46	47,26%	Net Debt to Equity Ratio (N-DER)

Secara umum, solvabilitas Perseroan di tahun 2014 masih cukup baik meski ada kenaikan. Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas tahun 2014 sebesar 3,37 kali, sedangkan di tahun 2013 sebesar 3 kali, mengalami peningkatan sebesar 12,33%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan investasi yang dibiayai dengan pinjaman. Sedangkan jika diukur dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas, terlihat bahwa solvabilitas Perseroan cenderung naik. Namun solvabilitas Perseroan masih cukup baik dilihat dari Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas yang nilainya kurang dari 3,5 kali yang merupakan persyaratan dari utang obligasi.

Struktur Modal

Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap resiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Konsisten dengan Perseroan lain dalam industri, Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Selama tahun 2014, strategi Perseroan tidak berubah yaitu mempertahankan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada batas bawah dari kisaran 6:53. Rasio Utang terhadap modal yang disesuaikan pada tahun 2014 dan 2013 adalah 2,15 dan 1,46.

In general, the solvency of the Company in 2014 is still quite good despite the rise. Liabilities to Equity ratio of 3.37 times in 2014, while in the year 2013 by 3 times, an increase of 12.33%. The increase was due to the increase in investments financed with loans. Meanwhile, if measured by the ratio of net debt to equity, it appears that the solvency of the Company tends to rise. However, the Company's solvency is still pretty good views of liabilities to equity ratio of less than 3.5 times which is a requirement of the bond debt.

Capital Structure

Company sets the amount of capital in proportion to risk. The Company manages the capital structure and makes adjustments by observing changes in economic conditions and the risk characteristics of the underlying assets.

Consistent with other company in the industry, the Company monitors capital on the basis of the ratio of debt to adjusted capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and cash equivalents. During 2014, the Company's strategy has not changed, namely maintaining the debt to capital ratio is adjusted to the lower limit of the range of 6:53. Debt-to-equity ratio is adjusted in 2014 and 2013 were 2.15 and 1.46.

Komposisi Struktur Modal

dalam jutaan Rp

Capital Structure

(in million IDR)

Uraian	2014	2013	Description
Total Liabilitas	1.261.412,62	861.050,32	Total liability
Dikurangi: Kas dan Setara Kas	457.460,70	441.167,64	Less: Cash and Cash Equivalent
Liabilitas Bersih	803.951,92	419.882,68	Net Liabilities
Total ekuitas	374.708,23	287.378,23	Total Equity
Rasio Utang terhadap Modal	2,15x	1,46x	Debt to Equity Ratio

Dampak Perubahan Harga

Selama 2014, tidak ada perubahan harga yang dilakukan oleh Perseroan.

The impact of price changes

During 2014, no price changes made by the Company.

Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) MTN/ PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), Tahap II sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) telah dilunasi oleh Persero tanggal 6 Januari 2015 dan Tahap III sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dilunasi tanggal 26 Januari 2015.
- Utang pembelian tanah di desa Cipendeuy Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebesar Rp32.802.000.000 telah dilunasi oleh Persero sesuai dengan berita acara pelunasan pembayaran tanah tanggal 12 Februari 2015.

Events after the Reporting Date of Financial Position

- Medium-Term Securities (Medium Term Notes / MTN) MTN/ PT Brantas Abipraya (Persero) in 2013 Series A Phase I amounting to IDR50,000,000,000 (fifty billion dollars), Phase II amounting to IDR25,000,000,000 (twenty-five billion dollars) has been repaid by the Company on January 6, 2015 and Phase III IDR25.000.000.000 (twenty-five billion dollars) paid dated January 26, 2015.
- Debt purchase of land in the village of the District Cipendeuy Cipendeuy, Subang regency, West Java, IDR32.802.000.000 been compensated by the Company in accordance with the Minutes of Settlement Payment of Land dated February 12, 2015.

Perbandingan RKAP Dan Realisasi

Comparison RKAP And Realization

Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2014

Achievement of Company Performance 2014

dalam jutaan Rp

(in million IDR)

Uraian Description	RKAP 2014		Realisasi 2014	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Usaha Operating Revenues	2.816.000,00	100%	2.838.075,06	100%
Pendapatan Usaha Non JO Non JO Operating Revenues	1.566.000,00	55,61%	2.280.607,24	80,36%
Pendapatan Usaha JO JO Operating Revenues	1.250.000,00	44,39%	557.467,82	19,64%
Beban Langsung Direct Expenses	(2.544.730,00)	90,72%	(2.571.580,41)	90,61%
Beban Lansung Non JO Non JO Direct Expenses	(1.419.486,00)	(90,64%)	(2.053.888,97)	(90,06%)
Beban Langsung JO Direct Expenses JO	(1.135.243,84)	(90,82%)	(517.691,44)	(92,86%)
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	261.270	9,28%	266.494,66	9,39%
Laba (Rugi) Kotor Non JO Non JO Gross Profit (Loss)	146.513,84	9,36%	226.718,28	9,94%
Laba (Rugi) JO JO Gross Profit (Loss)	114.756,16	9,18%	39.776,38	7,14%
Beban Usaha Operating Expenses	(70.000,00)	(2,49%)	(80.891,72)	(2,85%)
Laba Usaha Operating Profit	191.270,00	6,79%	185.602,94	6,54%
Pendapatan (Beban) Lain-lain Income (Expenses) Others	(20.000,00)	(0,71%)	(6.888,46)	(0,24%)
EBIT	171.270,00	6,08%	178.714,48	6,30%
Beban Bunga KMK Interest Expenses KMK	(44.000,00)	(1,56%)	(27.584,12)	(0,97%)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	127.270,00	4,52%	151.130,36	5,33%
PPH Final Final withholding tax	(42.000,00)	(1,49%)	(60.294,44)	(2,12%)
Laba Bersih Tahun Berjalan Current Year Net Profit	85.270,00	3,03%	90.835,92	3,20%

Realisasi Laba/ Rugi 2014 secara keseluruhan masih dapat tercapai sesuai RKAP, dimana Penjualan sebesar Rp2,84 triliun atau sebesar 100,78% dari RKAP sedangkan pencapaian laba bersih sebesar Rp90,84 miliar atau sebesar 106,53% terhadap RKAP.

Realization of profit/ loss in 2014 as a whole still can be achieved according to CBP, where sales of IDR2.84 trillion or 100.78% of RKAP while net profit amounted to IDR90,84 miliar or 106.53% against CBP.

Prospek Usaha 2015

Asumsi-asumsi yang digunakan Perseroan dalam penyusunan RKAP tahun 2015, berdasarkan surat aspirasi pemegang saham adalah sebagai berikut:

Business Prospects in 2015

The assumptions used in the preparation of the Company's CBP in 2015, based on the aspirations of shareholders is as follows:

Uraian Description	RAPBN 2015 RAPBN 2015
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	5,6
Inflasi (%) Inflation (%)	4,4
Suku Bunga SPN 3 bulan (%) SPN 3-month Interest Rate (%)	6,20
Nilai Tukar (Rp/USD) Exchange Rate (IDR/USD)	11.900

Asumsi Eksternal

1. Asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam RAPBN tahun 2015, sbb:
2. Asumsi eksternal lainnya yang mempengaruhi ekonomi makro adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini mempunyai peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan tema pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal dalam RAPBN 2015 ditetapkan sebagai berikut: **“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”**
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 menekankan pada penanganan isu strategis antara lain:
 - a. Pemantapan perekonomian nasional;
 - b. Peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik

External assumptions

1. The macro-economic assumptions set out in the Draft Budget 2015, as follows:
2. Other external assumptions that affect the macro economy is fiscal policy. This policy has a strategic role in determining the direction of national economic development policy. In line with the theme of national development, the direction of fiscal policy in the 2015 Draft Budget are set as follows: **“Strengthening Economic Growth to be Inclusive, Qualified and Sustainable through Healthy and Effective Fiscal Policy Implementation”**
3. The Government Work Plan (RKP) 2015 emphasizes the handling of strategic issues, among others:
 - a. Stabilization of the national economy;
 - b. Improving people's welfare; and
 - c. The maintenance of social and political stability.

Asumsi Internal

Berpedoman pada RJPP tahun 2014-2018 dan kinerja usaha tahun 2014, maka RKAP tahun 2015 (konsolidasi) ditargetkan sbb:

1. Nilai Kontrak sebesar Rp7,78 triliun, terdiri atas Sisa Nilai Kontrak tahun sebelumnya sebesar Rp3,23 triliun dan Nilai Kontrak Baru tahun 2015 sebesar Rp4,55 triliun.
2. Pendapatan usaha sebesar Rp3,65 triliun;
3. Beban Kontrak Rp2,51 triliun;
4. Laba KSO Rp80 miliar;
5. Beban Usaha Rp98 miliar;
6. Beban pinjaman Rp50 miliar, dan
7. Laba setelah pajak Rp120 miliar.

Internal assumptions

Guided by RJPP years 2014-2018 and business performance in 2014, the CBP 2015 (consolidated) is targeted as follows:

1. The contract value of IDR7.78 trillion, consisting of Time Value Contract previous year of IDR3.23 trillion, and the new contract value in 2015 amounted to IDR4.55 trillion.
2. The revenue of IDR3.65 trillion;
3. Expenses Contracts IDR2.51 trillion;
4. KSO Profit IDR80 billion;
5. Operating Expenses IDR98 billion;
6. Loan of IDR50 billion, and
7. Profit after tax of IDR120 billion.

RKAP 2015 VS Ri 2014

The RKAP 2015 VS Ri 2014

dalam miliar Rupiah

in billion Rupiah

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position	Realisasi 2014 Realization 2014	Proyeksi 2015 Projected 2015
ASET		
ASSETS		
Aset Lancar Current Assets	1.253,46	1.414,36
Aset Tidak Lancar Long-Term Assets	382,66	392,13
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	1.636,12	1.806,49
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilities and Equity		
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	971,69	803,15
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	289,72	482,04
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.261,41	1.285,19
Ekuitas Equity	374,71	521,30
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.636,12	1.806,49

Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2015

Consolidated Comprehensive Income Statements of the Year 2014 and Projection 2015

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Consolidated Statement of Comprehensive Income	Realisasi 2014 Realization 2014	Proyeksi 2015 Projection 2015
Pendapatan Usaha Revenues	2.280,61	2.800,00
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	2.053,89	2.510,00
Laba Bruto Gross profit	226,72	290,00
Bagian laba Joint operation Net Revenue of Construction Joint ventures	39,78	80,00
laba kotor setelah joint operation Gross Profit After Joint Venture	266,49	370,00
Beban Usaha Operating Expenses	(80,89)	(98,00)
Laba Usaha Operating Income	185,60	272,00
Pendapatan (Beban) Lainnya Other Income (Expense)	(6,89)	(30,00)
Laba sebelum bunga dan pajak Earning before interest and tax	178,71	242,00
Beban bunga Interest expense	(27,58)	(50,00)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Earning Before Tax	151,13	192,00
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(60,29)	(72,00)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	90,84	120,00

Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2015

Consolidated Statements of Cash Flows Year 2014 and Projection 2015

Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement of Cash Flows	Realisasi 2014 realization 2014	Proyeksi 2015 Projection 2015
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flows From Operating Activities	57,22	(50,83)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flows From Investing Activities	(91,62)	(45,19)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows From Financing Activities	50,69	145,12
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	16,29	49,10
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	441,17	417,98
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at End of Year	457,46	467,08

Kebijakan Dividen

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen Persero tahun 2014 akan dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.

Dividend Policy

Based on the legal provisions of Indonesia, Limited 2014 the dividend distribution will be base on the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held in 2015.

Informasi Penting

Investasi

Perseroan melakukan investasi sebesar Rp194,02 miliar. dalam bentuk:

- Penambahan aset tetap sebesar Rp124,02 miliar terdiri dari tanah sebesar Rp36,63 miliar, gedung sebesar Rp2 miliar, peralatan proyek sebesar Rp85,28 miliar, dan peralatan kantor Rp0,11 miliar.
- Penyertaan anak perusahaan sebesar Rp70 miliar.

Sumber dana untuk investasi tersebut diambil dari akumulasi penyusutan sebesar Rp44,02 miliar, kredit sebesar Rp90,30 dan leasing sebesar Rp59,70 miliar.

Ekspansi

Pada tahun 2014 Perseroan melakukan pengembangan bisnis melalui pendirian pabrik beton pracetak di Subang dan rintisan usaha properti.

Divestasi

Perseroan tidak melakukan divestasi pada tahun 2014

Akuisisi

Perseroan tidak melakukan akuisisi pada tahun 2014

Restrukturisasi Modal dan Hutang

Perseroan tidak melakukan Restrukturisasi Modal dan Hutang pada tahun 2014

Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi pemerintah, yaitu pihak yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian BUMN yang merupakan Pemegang Saham Persero.

Berikut ini adalah entitas berelasi dengan pemerintah yang merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah:

Important Information

Investment

The Company made an investment of IDR194.02 billion. in the form of:

- Addition of fixed assets amounting to IDR124.02 billion, consisting of land amounting to IDR36.63 billion from IDR2 billion building, project equipment amounting to IDR85.28 billion and IDR0,11 miliar office equipment.
- Investments in subsidiaries amounting to IDR70 billion.

Sources of funds for investment are taken from accumulated depreciation of IDR44.02 billion from IDR90.30 credit and leasing amounted to IDR59.70 billion.

Expansion

In 2014 the Company made a business development through the establishment of precast concrete factory in Subang and stub property business.

Divestment

The Company is not divested in 2014

Acquisitions

The Company does not undertake acquisitions in 2014

Capital and Debt Restructuring

The Company does not undertake to Capital and Debt Restructuring in 2014

The nature and Related Party Transactions

In conducting its business, the Company entered into transactions with related parties. Such transactions have been carried out with reasonable terms and conditions as those done with third parties.

The Company entered into transactions with related parties of government, namely the parties jointly controlled or significantly influenced by the government. Government in this case is defined within the scope of the Ministry of SOE which is a Shareholder Limited.

Here is a government entity is related to an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government:

Pihak - Pihak Berelasi Related Parties	"Sifat Berelasi Characteristic of Relationship"	Transaksi Transaction
Kementrian BUMN Republik Indonesia Pemegang Saham/ Shareholder Ministry of State Owned Enterprises of Republic of Indonesia	Pemegang Saham Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Modal Capital
Kementrian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Ministry of Civil Work of Republic of Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Dinas Pariwisata, dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya & Permuseuman, Dirjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Badan Penanggulangan Bencana Disaster Prevention Board	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Perum Perikanan Indonesia Indonesian Fisheries Public Corporation	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Pemerintah Kota Tangerang Selatan Government of South Tangerang City	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Pemerintah Kabupaten Bekasi Government of Bekasi District	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue

Pihak -Pihak Berelasi Related Parties	"Sifat Berelasi Characteristic of Relationship"	Transaksi Transaction
Pemerintah Kota Bontang Government of Bontang City	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Badan Penanggulangan Sidoarjo Sidoarjo Mud Mitigation Board	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Pemerintah DKI Jakarta Government of DKI Jakarta	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Pemerintah Kota Tarakan Government of Tarakan City	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Pemerintah Kota Depok Government of Depok City	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Pemerintah Kabupaten Gresik Government of Gresik District	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, deposito time deposit, utang bank bank loan
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, deposito time deposit, utang bank bank loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, deposito time deposit

Pihak - Pihak Berelasi Related Parties	"Sifat Berelasi Characteristic of Relationship"	Transaksi Transaction
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, utang bank bank loan
PT Bank Sumsel babel	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT Bank Lampung	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT Bank BJB, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT Bank Riau	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD Papua	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD NTB	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD Jatim	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD Sulawesi Tengah	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD Bengkulu	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT PLN (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue

Pihak -Pihak Berelasi Related Parties	"Sifat Berelasi Characteristic of Relationship"	Transaksi Transaction
BPJS Kesehatan Drvisi Regional X	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
FT Angkasa Pura I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
PT Perhutani	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Tagihan bruto pemberi kerja Gross amount due to employers
PT Sanghyang Seri (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Utang non bank non bank loan
Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo State University	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Revenue
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pembagian Laba JO Profit Sharing
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pembagian Laba JO Profit Sharing
PT Sinergi Perkebunan Nusantara	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pembagian Laba JO Profit Sharing
PT Brantas Energi	Anak Perusahaan Subsidiary	Penyertaan Modal Equity Capital





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Brantas Abipraya menerapkan Good Corporate Governance (GCG) melalui prinsip-prinsip: kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggung-jawaban yang saling berhubungan satu sama lain. Dan secara konsisten diterapkan guna mendorong kesaling pahaman diantara stakeholders mengenai hak, kewajiban serta nilai-nilai yang mengaturnya yang memungkinkan perusahaan untuk bersinergi dan fokus pada pencapaian kinerja yang maksimal.

Brantas Abipraya implement Good Corporate Governance (GCG) through principles: fairness, transparency, accountability, and accountability that are interconnected to one another. And consistently applied to encourage interrelatedness of unfamiliarity among stakeholders about the rights, obligations and values that govern that allows companies to work together and focus on achieving maximum performance.

Perseroan merupakan badan usaha milik negara yang menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam bidang industri konstruksi.

Proses bisnis Perseroan ditentukan oleh pegawai berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi, serta sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Di dalam proses bisnis ini para pegawai bekerja secara profesional dan telah digariskan oleh organ perusahaan, yaitu RUPS, komisaris, Komite, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

Peningkatan Kinerja Perseroan dapat ditumpukan pada perbaikan pelaksanaan prinsip-prinsip Transparansi dan Pertanggung-jawaban. Transparansi merupakan variabel dominan bagi pencapaian Kinerja maupun ROI, sedangkan Pertanggung-jawaban merupakan variabel dominan terhadap ROE

Dasar-Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan atau GCG diterapkan Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Dan Permen 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Permen PER-01/MBU/2011. Prosedur di bidang tata kelola perusahaan dan prosedur di bidang etika dan perilaku (*code of conduct*) telah diterbitkan Perseroan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan memiliki persepsi yang sama dalam menerapkan GCG di seluruh aspek operasional Perseroan. Selain itu dibuat berbagai kebijakan dan standar etika untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing. Komitmen untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan dan standar etika yang tercantum dalam kedua prosedur tersebut dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh seluruh pegawai.

The Company is a state-owned enterprise that applies the principles of limited liability company to conduct and support for policies and programs the Government of the Republic of Indonesia, particularly in the field of construction industry.

The Company's business processes is determined by the employee based on the decision of the Board of Commissioners and Board of Directors, and in accordance with applicable laws, government regulations and ministerial decrees. In the process of this business employees work in a professional manner and have been outlined by the organs of the company, namely the AGM, chairman, Committee, Board of Directors, Corporate Secretary and Internal Audit.

Performance improvement of the Company can be pinned on the implementation of the principles of Transparency and Accountability. Transparency is the dominant variable for the achievement of performance and ROI, while Accountability is the dominant variable on ROE

Basics Corporate Governance Implementation

Corporate governance or GCG applied to the Company refers to the Minister of State Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Governance (GCG) in SOEs. And ministerial regulation 09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on the Amendment of ministerial regulation PER-01/MBU/2011. Procedures in the field of Corporate governance and procedures in the field of ethics and conduct (code of conduct) has issued the Company with the aim of ensuring that all Commissioners, Directors and employees of the Company have the same perception in implementing GCG in all aspects of the Company's operations. Additionally made various policies and ethical standards for the Commissioners, Directors and all employees in carrying out their respective duties. Commitment to follow and adhere to policies and ethical standards set forth in the procedure are set forth in the prescribed form signed by all employees.

Dewan Komisaris mendorong terciptanya etika perilaku di Perseroan, memperjuangkan kepentingan Perseroan, mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi perihal kebijakan dan pengurusan Perseroan, memantau efektifitas penerapan dan menetapkan ukuran untuk penilaian tersebut.

Pedoman Implementasi GCG

Pedoman *Good Corporate Governance* (disingkat dengan Pedoman GCG) Perseroan merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* (GCG), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Perseroan (yang perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-57022.AH.01.02 Tahun 2012), Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik dalam GCG.

Pedoman GCG ini merupakan dasar dan acuan dalam pengelolaan Perseroan. Diharapkan seluruh aktivitas Perseroan akan selaras dengan standar GCG. Pedoman GCG memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Perseroan akan secara konsisten menginformasikan Pedoman GCG ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan GCG.

Pedoman GCG ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detil sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam Perseroan. Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, maka Perseroan akan selalu mengkaji Pedoman GCG ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan.

Keberhasilan penerapan GCG ini bukan hanya karena tersedianya sarana atau acuan tata kelola Perseroan seperti Pedoman GCG, Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), Piagam Komite Audit (*Audit Committee*

BOC encourage the creation of ethical behavior in the Company, the interests of the Company, overseeing and providing advice to the Board of Directors regarding the policy and the management of the company, monitoring the effectiveness of the application and specify the size of the assessment.

GCG Implementation Guidelines

The Company's Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Guideline in brief) constitutes an elaboration of rules of Good Corporate Governance (GCG), Law No. 19 of 2003 about State-Owned Enterprises, Government law no. 40 2007 about Limited Enterprises and Ministry Regulation of the Minister of State Owned Enterprises : PER-01/MBU/2011 about the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Statutes Company (the amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights by Decree No. AHU-57022.AH.01.02 2012), The Company's vision and mission as well as best practices in Corporate governance.

GCG is a basic guideline and reference in the management of the Company. All activities of the Company are expected to be in harmony with good Corporate governance standards. GCG Code sets out principles that apply to all activities of the Company. PT Brantas Abipraya be consistently informed that this Code to all interested parties so that they can understand and tolerate labor standards in accordance with the Company's Corporate governance.

This Code is a reference for a more detailed regulation of the Company in accordance with the needs of organizational units within the Company. Given the dynamic business environment, the PT Brantas Abipraya will always be reviewing this Code on an ongoing basis as an effort to achieve the best working standards for the Company.

Successful implementation of GCG is not only because of the availability of / reference to the Company's governance such as GCG Guidelines, Code of Ethics and Conduct (Code of Conduct), the Charter of the Audit

Charter), Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*), dan sebagainya, melainkan terletak pada komitmen dari pimpinan tertinggi Perseroan yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan serta didukung oleh Dewan Komisaris. Pedoman GCG ini merupakan acuan langkah awal dalam pengelolaan Perseroan yang sehat dan beretika serta memberikan gambaran yang obyektif dan transparan kepada stakeholders Perseroan.

Prinsip-Prinsip GCG

Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip good corporate governance sebagai berikut:

In each activity, The Company always refers to the principles of good corporate governance as follows:

Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Transparansi ini diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan Perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik *good corporate governance*.

Committee (Audit Committee Charter), the Charter of Internal Audit (Internal Audit Charter), and so on, but rather lies in the commitment of the highest leadership of the Company, followed by all the staff and employees as well as supported by the BOC. This Code is an initial step reference of the Company in managing healthy and ethical as well as providing an objective and transparent overview of the stakeholders of the Company.

Principles GCG



Transparency

Transparency is openness in expressing material and relevant information regarding the Company. This transparency is realized by the Company by always trying to spearhead the disclosure of financial and non-financial information to various stakeholders as well as the disclosure is not limited to information that is mandatory. Disclosure of such information by the company still comply with the legislation in force and suggested by best practices of good Corporate governance.

Implementasi prinsip transparansi yang dilakukan Perseroan antara lain:

1. Laporan Tahunan PT Brantas Abipraya memuat informasi penting dalam pengelolaan Perseroan, antara lain tetapi tidak terbatas kepada:
 - a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perseroan;
 - b. Kondisi keuangan hasil audit oleh eksternal auditor
 - c. Susunan pengurus (Direksi dan Komisaris)
 - d. Informasi Pemegang Saham Pengendali
 - e. Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dan Perseroan lainnya yang memiliki benturan kepentingan
 - f. Sistem manajemen risiko
 - g. Sistem pengawasan dan pengendalian internal
 - h. Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya
 - i. Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi
 - j. Biodata anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
 - k. Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
 - l. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2. Perseroan akan mengungkapkan informasi penting kepada stakeholder antara lain:
 - a. Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemegang Saham
 - b. Prosedur pengadaan dan hubungan dengan rekanan;
 - c. Ketaatan dalam pembayaran pajak;
 - d. Mekanisme manajemen SDM, sesuai dengan PKB.

Kewajaran

Kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menjamin bahwa

Implementation of the transparency principle applied by the Company among others are:

1. PT Brantas Abipraya Annual Report that contain important information in the management of the Company, including but not limited to:
 - a. Vision, Mission, Goals, Objectives of Business, and Strategy of the Company;
 - b. Financial condition of audit result conducted by the external auditors
 - c. The composition of the Board of Directors and Commissioners
 - d. Information of Controlling Shareholder
 - e. Stock ownership by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their family members and other Company with conflict of interest
 - f. The risk management system
 - g. Supervision and internal control system
 - h. GCG systems and implementation and level of compliance
 - i. Important events that may affect the condition
 - j. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners biodata
 - k. Remuneration of Directors and the Board of Commissioners
 - l. Meetings held by the Board of Directors and Board of Commissioners
2. The Company will disclose important information to stakeholders include:
 - a. Quarterly report contains management routine report, submitted to the Shareholders
 - b. Procurement procedures and relationships with partners;
 - c. Obedience in the payment of taxes;
 - d. Human resource management mechanism, in accordance with the CBA.

Fairness

Fairness is justice and equality in the fulfillment of stakeholder rights arising under the agreement and the legislation in force. The Company ensure that any

setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Implementasi Perseroan pada prinsip kewajaran antara lain:

1. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perseroan akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
3. Perseroan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Perseroan akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ dan seluruh jajaran Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara Organ Perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi). RUPS sebagai organ tertinggi yang memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ yang lain. Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan. Sedangkan akuntabilitas seluruh jajaran Perseroan berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.

interested parties receive fair treatment in accordance with applicable laws and regulations.

Implementation the Company on the principle of fairness, among others:

1. Shareholders entitled to attend and vote at the AGM in accordance with applicable regulations;
2. The Company will treat all partners fairly and transparently;
3. The Company will provide good working conditions and safe for each employee according to the ability of the Company and applicable laws and regulations.
4. The Company will treat each employee fairly and free from bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender, or other things that have nothing to do with performance.

Accountability

Accountability is the clarity of function, implementation and accountability of the organs and the whole range of the Company so that the Company's management are effective. The Company believes that accountability associated with the existence of the system that controls the relationship between the individual and / or organs in the Company as well as the relationship between the company with interested parties. The Company apply the principle of accountability as one of the solutions to overcome agency problems that arise as a logical consequence of differences in individual interests with the interests of the Company or the Company's interests with interested parties. Accountability can be achieved through effective supervision are based on the balance of power between the organs of the Company (General Meeting, Board of Commissioners and Board of Directors). GMS as the highest organ that holds all powers not given to other organs. Commissioners perform its supervisory and advisory duties. The Board of Directors is responsible for the management of the Company. While the whole range of the Company's accountability means that each person is responsible for each task mandated to him.

Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Perseroan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Implementasi Perseroan pada prinsip Akuntabilitas adalah:

1. Perseroan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan (Direksi, Dewan Komisaris, SPI, SEKPER dan Organ Struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perseroan (*corporate values*), dan strategi Perseroan.
2. Perseroan terus berupaya agar semua organ Perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perseroan menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan.
4. RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan deviden yang dibayarkan.
5. Rincian tugas Dewan Komisaris sebagaimana butir 1 sekurang-kurangnya mencakup pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS.
6. Rincian tugas Direksi sebagaimana butir 1 meliputi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan bertanggungjawab untuk

The Company implement accountability by encouraging all individuals and or organs of the Company aware of their rights and obligations, duties and responsibilities as well as authority.

Implementation the Company on Accountability principle is:

1. The Company shall establish details of the duties and responsibilities of each organ of the Company (the Board of Directors, Board of Commissioners, SPI, Corporate Secretary and other structural organs) and all employees that are in line with the vision, mission, values the Company (Corporate values), and the Company's strategy.
2. The Company continues to strive in order that all the organs of the Company and all employees have the ability in accordance with the duties, responsibilities, and roles in the implementation of GCG.
3. The Company creates an effective system of internal control in the management of the Company.
4. GMS, among others, the authority to authorize the long-term plan, the annual budget plan, approve the annual report, determine the distribution of profits and dividends paid.
5. Details of the Board of Commissioners as point 1 shall include at least the supervision of the management of the Company are conducted by the Board of Directors and advise the Board of Directors, including the development plan, long-term plans, annual work plan and budget of the Company, the implementation of the provisions of the Articles of Association and the follow-up to decisions of Shareholders.
6. Details of the task of the Board of Directors as point 1 includes management of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and continuously strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company to control, maintain and manage the Company's assets.

Responsibility

Responsibility means the accountability in the management of the Company conforming with the legislation in force and the principles of healthy

mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Implementasi Perseroan pada prinsip Pertanggungjawaban adalah:

1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik;
2. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.
4. Melaksanakan Undang-Undang Tenaga Kerja (UU No.13 tahun 2003), UU Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya. Pedoman *Good Corporate Governance*.
5. Community Development (0,3% anggarannya) Kepedulian terhadap masyarakat dalam meningkatkan kehidupan (pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan) bagi masyarakat tidak mampu.
6. Melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang menyangkut kegiatan Perseroan serta seluruh peraturan Perseroan yang berlaku.

Kemandirian

Kemandirian adalah sesuatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Kemandirian ini oleh Perseroan diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangan atau masing-masing Organ Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perseroan.

Implementasi Perseroan pada prinsip kemandirian antara lain:

1. Diantara organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing, tidak saling mendominasi satu sama lain.

Corporate. the Company responsibility to comply with the laws and regulations in force, including the provisions relating to employment, taxation, unfair competition, health and safety, and so forth. Implementation the Company on the principle of accountability is:

1. Implement tax obligations properly;
2. Comply with the provisions of law occupational safety and health and the environment;
3. Implement obligations surrounding community development, for example by contributing to fostering small businesses and cooperatives.
4. Implement the Labour Act (Act 13 of 2003), Construction Services Act 18 of 1999 and its implementing regulations. Guidelines for Good Corporate Governance.
5. Community Development (0.3% of its budget) Concern for the community in improving the life (education, health, religious facilities) for the community can not afford.
6. Implement laws and other government regulations concerning the activities of the Company as well as all applicable regulations of the Company.

Independency

Independence is a condition in which the Company is managed in a professional manner without any conflict of interest and influence/ pressure from any party that is not in accordance with the legislation in force and the principles of healthy Corporate.

This independence by the Company implemented by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities as well as the authority of or each Organ Company. The Company believe that with the implementation of the principle of independence optimally, all organs of the Company can be served well and maximal in making the best decisions and management for the Company.

Implementation the Company on the principle of independence, among others:

1. Among the Company organs respect the rights, obligations, duties, powers and responsibilities of each, not dominate one another.

- Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan;
- Komisaris, Direksi serta pegawai perseroan dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

A. Pemegang Saham Dan RUPS

Pengertian:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pemegang Saham PT Brantas Abipraya adalah Negara Republik Indonesia.

Menteri Negara BUMN bertindak selaku RUPS dan Pemegang Saham PT Brantas Abipraya.

Umum:

- RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham.
- RUPS menyetujui/ mengesahkan Laporan Tahunan, RKAP, dan RJPP dengan tepat waktu.
- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata (tergambar) dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Saham memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi.

- In addition to the Company organs should not interfere in the management of the Company;
- Commissioners, Directors and employees of the company in decision-making is always to avoid conflicts of interest.

Corporate Governance Structure

A. Shareholders And Rups

Definition

General Meeting of Shareholders (AGM) is the organ of the Company which holds the highest authority in the Company and holds all powers that are not submitted to the Board or the Commissioner.

Shareholders of PT Brantas Abipraya is the Republic of Indonesia.

Minister of State Enterprises acts as AGM and Shareholders PT Brantas Abipraya.

General:

- The General Meeting of the Company consists of the Annual Meeting and other AGM called Extraordinary General Meeting to be held at any time according to need.
- The AGM is a forum for Commissioners and the Board of Directors to report and account for the implementation of tasks and performance to shareholders.
- The AGM approved/ endorsed the Annual Report, CBP, and RJPP a timely manner.
- Approval of the Annual Report including financial laporan approval by the AGM, means providing release and discharge (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the management and supervision that have been implemented during the last financial year, to the extent such action turns (illustrated) in the annual report including financial statements and in accordance with applicable regulations.
- Shareholder has a mechanism of appointment and dismissal of the Commissioner and Director.

6. Pemegang Saham memiliki mekanisme penilaian kinerja Perseroan dan penilaian kinerja masing-masing Komisaris dan Direksi.
7. Pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Hak – Hak:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan
3. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur.
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

B. Komisaris

Pengertian:

Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

Umum:

1. Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah- masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris berasal dari luar Perseroan yang bebas sehingga diharapkan dapat membangun peningkatan profesionalisme di Perseroan.
3. Komposisi Dewan Komisaris seyogyanya mencerminkan berbagai keahlian yang saling mendukung pelaksanaan tugas Komisaris. Apabila diperlukan, Komisaris dapat membentuk komite-komite atau mendatangkan staf ahli yang diperlukan untuk membantu tugasnya atas beban Perseroan.

6. Shareholders have the Company's performance assessment mechanism and assessment of the performance of each of the Commissioners and the Board of Directors.
7. The shareholders are not allowed to interfere in the operational activities of the Company are the responsibility of the Board of Directors.

Rights:

1. Attending and voting at the AGM.
2. Getting a full explanation and accurate information regarding the implementation of the
3. Obtaining material information regarding the Company in a timely and orderly manner.
4. Accept the distribution of profits of the Company in the form of dividends and other profit sharing.

B. Commissioner

Definition:

The Commissioner is the organ of the Company which is in charge of supervising and advising the Board of Directors in carrying out maintenance activities Limited.

General:

1. Members of the Board of Commissioners appointed by considerations of integrity, dedication, understanding the issues related to the management of the Company that one of the functions of management, have adequate knowledge in the field of business of the Company, and can provide sufficient time to perform their duties.
2. At least 20% (twenty percent) of the Commissioners from outside the Company that is free which is expected to build on the Company's increased professionalism.
3. Composition of the Board of Commissioners should reflect the range of expertise to support the implementation of tasks each Commissioner. If necessary, the Commissioner may establish committees or bring in skilled staff needed to assist duties at the expense of the Company.

4. Komisaris memiliki Sekretaris Komisaris yang dapat menjalankan fungsi kesekretariatan secara memadai.
5. Untuk membantu tugas-tugas pengawasan Perseroan, Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

4. The Commissioner has the Commissioner Secretary to carry out secretarial functions adequately.
5. To help supervisory duties of the Company, the Commissioner shall establish the Audit Committee.

Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) yang ditunjuk hingga terbitnya Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners

Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero) appointed until the publication of financial statements is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Surat Keputusan Decree
Ir. Hedyanto W. Husaini MSCE.,MSi	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-247 MBU 2012 tanggal 16 Mei 2013 / SOE Ministerial Decree No. SK 247 / MBU 2012 dated May 16, 2013
Ramli Ibrahim, SE, MM	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-141 / MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 / SOE Minister's decision No.: SK-141 / MBU / 2011 dated June 20, 2011
Ir. HR. Adhy Duriat Soemono, Dipl.HE	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-141 / MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 / SOE Minister's decision No.: SK-141 / MBU / 2011 stairs! June 20, 2011
Ir. Eko Subekti, Dipl.HE	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-373 / MBU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 / SOE Ministerial Decree No. SK 373 / MBU / 2012 dated October 24, 2012

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
2. Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
4. Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.

Duties and responsibilities:

1. The Commissioner shall in good faith and full responsibility and duty for the benefit of the Company's business.
2. The Commissioner is entitled to obtain information, the Company timely and complete.
3. In performing its duties, the Commissioner must comply with the Articles of Association and legislation and shall implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
4. The Commissioner shall monitor the effectiveness of the implementation of the Company's GCG applied.

Pembagian Tugas & Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Dewan Komisaris bekerja secara kolektif kolegial dan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, telah melakukan pembagian tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor: U/DK/KPTS/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang pembagian tugas Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Komisaris Utama, Ir.Hedyanto W Husaini, MSCE, MSi, bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
 - b. Memimpin pelaksanaan rapat komisaris dan/ atau Rapat Gabungan;
 - c. Menandatangani keputusan rapat Dewan Komisaris, risalah rapat Dewan Komisaris dan/ atau rapat gabungan;
 - d. Melakukan pembinaan organisasi Perseroan;
 - e. Melakukan pembinaan bidang pemasaran dan Jejaring;
 - f. Melakukan pembahasan permasalahan Perseroan dengan anggota Komisaris, sebelum menandatangani surat keluar;
 - g. Menandatangani dan mempertanggung-jawabkan surat-surat keluar dari Dewan Komisaris.
2. Komisaris Ramli Ibrahim, SE, MM, bertugas:
 - a. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Bidang Keuangan, Perbankan dan Investasi, Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan, Bidang Audit (baik Intern maupun Ekstern);
 - b. Melakukan pembinaan Bidang Pemasaran dan Jejaring;
 - c. Menandatangani Keputusan Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan atau Rapat Gabungan;
 - d. Memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris secara keseluruhan;
 - e. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pembahasan permasalahan dibidangnya.
3. Komisaris Ir. Adhy Duriat Soemono, Dipl. HE, bertugas:

Division of Tasks & Responsibilities

In carrying out the task of supervision of the Board of Commissioners work collectively collegial and guided by the Articles of Association and regulations, has made the division of tasks as set out in the Decision of the Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero) No. U/DK/KPTS/V/ 2013 dated 30 May 2013 on the division of BOC, as follows:

1. President Commissioner, Ir.Hedyanto W Husaini, MSCE, MSi., In charge of:
 - a. Doing Coordination of the implementation of the Board of Commissioners;
 - b. Leading the implementation of the Board of Commissioners and / or the Joint Meeting;
 - c. Decision signed BOC Meeting, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and or the Joint Meeting;
 - d. Fostering Organization;
 - e. Conduct training of Marketing and Networking;
 - f. Company's discussions with the Commissioner issues, before signing outgoing mail;
 - g. Signed and account for outgoing letters of BOC.
2. Commissioner Ramli Ibrahim, SE, MM, in charge of:
 - a. Conducting Supervision and Development Finance, Banking and Investment, Partnership and Community Development Division, Audit Division (both Internal and External);
 - b. Conduct training of Marketing and Networking;
 - c. Decision signed BOC Meeting, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and or the Joint Meeting;
 - d. Provide advice and input relating to the duties of the Board of Commissioners as a whole;
 - e. Held discussions in their field problems together with President Commissioner
3. Commissioner Ir. Adhy Duriat Soemono, Dipl. HE, duty:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Manajemen Risiko, Bidang Produksi; b. Melakukan pembinaan Bidang Pemasaran dan Jejaring; c. Menandatangani Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan atau Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Gabungan; d. Memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris secara keseluruhan; e. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pembahasan permasalahan dibidangnya <p>4. Komisaris, Ir. Eko Subekti Dipl. HE, bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Bidang Operasional dan Hukum, Bidang Penelitian dan Pengembangan Usaha, Bidang Manajemen Mutu dan Sistem Informasi; b. Melakukan pembinaan Bidang Pemasaran dan Jejaring; c. Menandatangani Keputusan Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan atau Rapat Gabungan; d. Memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris secara keseluruhan; e. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pembahasan permasalahan dibidangnya. | <ul style="list-style-type: none"> a. Conducting Supervision and Development of Human Resources, Risk Management Division, Production Division; b. Conduct training of Marketing and Networking; c. Signed Resolution of the Board of Commissioners and or Board of Commissioners Meeting Minutes, the Minutes of the Joint Meeting; d. Provide advice and input relating to the duties of the Board of Commissioners as a whole; e. Held discussions in their field problems together with President Commissioner <p>4. Commissioner, Ir. Eko Subekti Dipl. HE, duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Conducting Supervision and Development Operations and Legal Affairs, Division of Research and Business Development, Division of Quality Management and Information Systems; b. Conduct training of Marketing and Networking; c. Decision signed BOC Meeting, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and or the Joint Meeting; d. Provide advice and input relating to the duties of the Board of Commissioners as a whole; e. Held discussions in their field problems together with President Commissioner. |
|---|---|

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Pada tahun 2014 Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu: melakukan pengawasan umum terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, menyampaikan nasihat [*advice*] kepada Direksi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mendorong tercapainya tujuan Perseroan, serta menjaga agar pengelolaan Perseroan dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, selama tahun 2014 Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada RUPS maupun Stake Holders lainnya sebagai berikut:

Supervision Duties

In 2014 the Board of Commissioners of the Company has been carrying out its duties and responsibilities, namely: the general supervision of the company's management policy implemented by the Board of Directors, offered advice [*advice*] to the Board of Directors with due regard to the precautionary principle, encouraging the achievement of Company goals, as well as keep the management of the Company carried out effectively, efficiently and economically. As the accountability of duty, during 2014, the BOC has submitted a report-statements in accordance with laws and regulations applicable to the GMS and Stake Holders, as follows:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Tahunan kegiatan pengawasan tahun 2014; 2) Laporan pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit; 3) Laporan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko; 4) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Audited PTBAP (Persero) tahun 2014; 5) Usulan Penunjukan KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai Auditor Independen yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahun 2014; 6) Laporan Perkembangan Realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Triwulanan tahun 2014; 7) Usulan Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya Dewan Komisaris Tahun 2015; 8) Tanggapan dan Telaahan Dewan Komisaris terhadap rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015; 9) Memberikan persetujuan kepada Direksi tentang Pengajuan Fasilitas Kredit Cash Loan dan Non Cash Loan, tambahan plafond kredit KMK dari Lembaga Bank dan Non Bank, Kredit dari Pusat Investasi Pemerintah, dan penerbitan Obligasi; 10) Memberikan usulan bakal calon Direktur PT Brantas Abipraya (Persero) kepada Pemegang Saham; 11) Memberikan persetujuan tentang investasi pada Unit Usaha Precast Beton dan tambahan penyertaan modal pada Anak Perusahaan PT Brantas Energi; 12) Memberikan persetujuan usulan penghapusan aset Alat Berat non produktif milik Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Annual activities monitoring report 2014; 2) Appointment of Chairman and Member of the Audit Committee Reports; 3) Appointment of Chairman and Member of the Risk Management Oversight Committee Reports; 4) Audit Reports on Audited Financial Statements PTBAP (Persero) in 2014; 5) Proposed Appointment of KAP Hadori Sugiarto Adi & Partners as an independent auditor conduct an audit of the Financial Statements 2014; 6) Realization Progress Report Performance Indicators The Board of Commissioners of the Company Quarterly 2014; 7) Proposed Work Program and Budget Plan Board of Commissioners in 2015; 8) Responses and Findings of the Board of Commissioners on the draft Work Plan and Budget (CBP) 2015; 9) Giving approval to the Board of Directors of Credit Cash Loan Facility Submission and Non Cash Loan, additional working capital credit limit of Bank and Non-Bank Institutions, Credit from the Government Investment Center, and the issuance of bonds; 10) Provide the proposed candidates Director of PT Brantas Abipraya (Persero) to the Shareholders; 11) Approval of the investment on Precast Concrete Business Unit and an additional equity investment in Subsidiary PT Brantas Energi; 12) Giving approval proposed abolition of non-productive assets the Company's Heavy Equipment. |
|---|---|

Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan

Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2014 mencakup seluruh kegiatan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP]. Seluruh kegiatan yang direncanakan tersebut ternyata dapat terlaksana atau tercapai 100% dengan biaya sebesar Rp637,69 juta atau 50,37%% dari RKAP sebesar Rp266 juta. Kegiatan Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Dewan Komisaris.
Kegiatan yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun 2014 sesuai dengan pencapaian nilai indikator Kinerja Utama (KPI) tercapai 96,67 tersaji dalam Laporan Perkembangan Realisasi Indikator

Implementation of Monitoring Work Program

Monitoring the implementation of the Work Program Activity BOC 2014 include all the activities of the Board of Commissioners and Organ Support BOC set out in the Work Plan and Budget [CBP]. The planned activities it can be done or achieved 100% at a cost of IDR637,69 million or 50.37 %% of RKAP of IDR266 million. Activities of BOC and BOC Organs include the following:

1. The activities of the Board of Commissioners.
BOC activities undertaken during 2014 in accordance with the achievement of Key Performance indicator values (KPI) reached 96.67 presented in the Progress Report on the Realization of Key Performance

- Pencapaian Kinerja Kegiatan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya [Persero] Triwulan IV tahun 2014 [Lampiran II]. Adapun kegiatannya antara lain mengikuti:
- a. Kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS],
 - b. Rapat Kerja dengan Pemegang Saham,
 - c. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris,
 - d. Kunjungan kerja ke Wilayah Pemasaran dan Proyek,
 - e. Peningkatan kapasitas Komisaris.
2. Kegiatan RUPS dan Rapat Kerja dengan Pemegang Saham. Kegiatan RUPS dan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN antara lain:
- a. Menghadiri RUPS PT Brantas Abipraya [Persero] tentang Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2013 yang diselenggarakan pada tanggal tanggal 27Maret2014;
 - b. Menghadiri Penyerahan SK Pergantian dan Pengangkatan Direksi PT Brantas Abipraya [Persero].
3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Dewan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya [Persero] selama tahun 2014 melaksanakan Rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan bersama Direksi, dalam Rapat Komisaris dilakukan evaluasi kegiatan Komisaris dan membahas hal-hal yang telah diagendakan dalam Rapat, sedangkan dalam Rapat Gabungan secara interaktif meminta penjelasan kepada Direksi tentang kebijakan pengelolaan perseroan dan perkembangan kinerja Perseroan yang dilakukan setiap bulan, sebagai berikut:
- a. Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi diselenggarakan setiap akhir bulan sebanyak 12 [dua belas] kali. Materi rapat yang dibahas meliputi: kinerja dan progres produksi, kinerja bidang pemasaran, kinerja keuangan, hambatan pelaksanaan proyek, pelaksanaan sistem pengendalian intern, serta kebijakan Perseroan menyangkut antara lain tentang
- Indicators Activities Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya [Limited] Fourth Quarter 2014 [Annex II]. The activities include the following:
- a. General Meeting of Shareholders [AGM] Activity,
 - b. Meeting with Shareholders,
 - c. Joint Meeting of the Board of Commissioners to the Board of Directors, and the Board of Commissioners,
 - d. Visit to Regional Marketing and Projects,
 - e. Increased Commissioner capacity.
2. Activities AGM and meeting with shareholders. GMS activities and meeting with the Ministry of SOEs, among others:
- a. Attending the AGM PT Brantas Abipraya [Persero] regarding the approval of the Annual Report, Annual Calculation Approval and Use of Net Income for Fiscal Year 2013, which was held on the date of 27Maret2014;
 - b. Delivery attend SK Substitution and Appointment of Directors PT Brantas Abipraya [Persero].
3. The Joint Meeting of BoC-BoD and Board of Commissioners meeting.
Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya [Persero] during 2014 to implement an internal meeting of the Board of Commissioners and the Joint Meeting together with the Board of Directors, the Board of Commissioners to evaluate the activities of Commissioners and discuss the things that have been scheduled in the meeting, while the Joint Meeting interactively ask for clarification to the Board of Directors about the company's management policy and the performance of companies that carried out every month, as follows:
- a. Joint Meeting of BoC-Directors held every end of the month by 12 [twelve] times. The meeting Content discussed include: the performance and progress of production, performance marketing, financial performance, barriers to implementation of the project, the implementation of the internal control system, as well as company policies regarding, among

Anak perusahaan, SDM, peralatan, dan kebijakan Perseroan lainnya. Dalam Rapat Gabungan tersebut, Dewan Komisaris juga mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan persetujuan hal-hal yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris seperti Usulan perubahan investasi, perpanjangan plafon KMK, perpanjangan fasilitas *cash Loan* dan *Non cash Loan*, penerbitan obligasi, pinjaman jangka panjang kepada Pusat Investasi Pemerintah. Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat sedangkan Rapat Gabungan dengan Dewan Direksi di tuangkan dalam Keputusan Rapat Gabungan dan Risalah Rapat yang sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, dokumennya disimpan oleh Sekretaris Perusahaan serta Sekretariat Dewan Komisaris. Selain melakukan kegiatan tersebut diatas pengawasan kebijakan oleh Dewan Komisaris juga dilakukan dengan melakukan penelitian dan penelaahan laporan-laporan Perseroan, mengikuti perkembangan usaha perseroan, melakukan rapat-rapat teknis dengan pihak terkait serta melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan Perseroan.

- b. Rapat Komisaris dilaksanakan sebanyak 5 [lima] kali rapat, antara lain membahas Rancangan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2014, Pembagian Tugas Dewan Komisaris, Persiapan Ragab Dewan Komisaris-Direksi, Persetujuan usulan Direktur PT Brantas Abipraya [Persero] pada Pemegang Saham, Persetujuan Permohonan Perpanjangan dan Penambahan plafon *cash Lon* dan *Non Cash Loan*, Persetujuan pinjaman dari Pusat Investasi pemerintah, Persetujuan Penerbitan Obligasi, Persetujuan Investasi Pabrik Beton, Persetujuan Usulan Penghapusan aset alat Berat, Hasil Evaluasi Hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2014, Usulan Penunjukan KAP.

others, Son of companies, human resources, equipment, and other company policies. In the Joint Meeting, the Board also took the decision to approve or reject the application for approval of matters that require the BoC's decision as proposed changes to the investment, KMK ceiling extension, the extension of cash facilities Loan and non-cash loan, the issuance of bonds, long-term loans to the Government Investment Center. The results set forth in the Board of Commissioners Meeting Minutes of Meeting while the Joint Meeting of the Board of Directors at the Joint Meeting's decision to pour in and Minutes of the Meeting in accordance with the articles of association of the Company, documents deposited with the Secretary The Company and the Secretariat of the Board of Commissioners. In addition to the activities mentioned above policy oversight by the Board of Commissioners also be done through research and review of reports of the Company, following the company's business development, conduct technical meetings with stakeholders and carry out monitoring visits and evaluation of the implementation of the project in order to obtain a picture of the company's activities.

- b. Commissioners meeting held by 5 [five] meetings, among others, discussed the Draft Work Programme BOC 2014, Division of Labor BOC, the BOC-Preparation joint meeting of Directors, Approval of the proposed Director of PT Brantas Abipraya [Persero] to shareholders, request Agreement Extension and the addition of cash ceiling Lon and Non Cash Loan, a loan approval from the government Investment Center, Bond Issuance Agreement, Investment Agreement Concrete Factory, Agreement Proposed Removal of Heavy assets, results of evaluation results of the audit of Financial Statements Year 2014, the Proposed Appointment of KAP.

c. Kehadiran Komisaris

Kehadiran Komisaris dalam Rapat-rapat Gabungan maupun Rapat Komisaris sebagai berikut:

c. The presence of Commissioner

The presence of Commissioners in meetings and the Joint Meeting of the Commissioner as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Gabungan Joint Meetings		Rapat Komisaris Meeting Commissioner	
		Rapat Meeting	Hadir Attended	Rapat Meeting	Hadir Attended
Hediyanto W. Husaini	Komisaris Utama President Commissioner	12	11	5	5
Ramli Ibrahim	Komisaris Commissioner	12	12	5	5
Adhy Duriat Sumono	Komisaris Commissioner	12	12	5	5
Eko Subekti	Komisaris Commissioner	12	8	5	4

4. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisaris.

Kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komisaris PT Brantas Abiparaya (Persero) dalam tahun 2014, antara lain ke Proyek Rehabilitation of The Raibere Timor Leste, Kantor Regional Medan, Lampung, Samarinda, Ujung Pandang, Bali, dan Surabaya. Sedangkan Anggota Komisaris yang secara *ex officio* juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko, melakukan kunjungan kerja ke Proyek-Proyek sesuai dengan jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing komite.

4. Activities Working Visit Commissioner.

Working visit conducted by the Commissioner of PT Brantas Abiparaya (Persero) in 2014, among others, to project Rehabilitation of The Raibere Timor Leste, Regional Office of Medan, Lampung, Samarinda, Makassar, Bali, and Surabaya. While the Commissioner who is *ex officio* also serves as Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Risk Management Monitoring Committee, a working visit to Projects in accordance with the schedule of activities performed by each committee.

5. Peningkatan Kapasitas Komisaris.

Kegiatan peningkatan kapasitas Komisaris pada tahun 2014 antara lain: Komisaris mengikuti *Workshop Executive & Komisaris/Pengawas BUMN* dari *BUMN Executive Club*, *Kursus Membuat & Mengembangkan Audit Program Untuk Menguji Kecukupan Penerapan Manajemen Risiko* yang diselenggarakan Lembaga *Risk Advisory and Performance (RAP)*, dan *workshop Mengoptimalkan Peran dan Tanggungjawab Komisaris Perusahaan* penyelenggara Inti Pesan, Dewan Komisaris mengikutkan Komite Dewan dalam *Workshop* yang sama yang diselenggarakan RAP.

5. Capacity Building Commissioner.

Commissioner of capacity building activities in 2014 include: Commissioners Workshop follows the Executive and Commissioner Supervisory SOE from SOE Executive Club, Course Creating and Developing Audit Program To Test Adequacy of Risk Management organized by the Risk Advisory Institution and Performance (RAP), and Optimizing workshop Roles and Responsibilities Commissioner organizer Company Core Message, BOC Board Committee to include the same in the workshop organized by the RAP.

C. Direksi

Pengertian:

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Umum:

1. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
2. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
3. Paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar Perseroan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Pendalaman pengetahuan sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi bagi tiap anggota Direksi sangat penting untuk menjamin agar Direksi tetap mengikuti perkembangan baru dalam industri jasa konstruksi.

C. Board of Directors

Definition:

The Company's Board of Directors is the organ responsible for the maintenance of the Company's interests and objectives of the Company, as well as represent the Company both in and out of court.

General:

1. Members of the Board of Directors appointed by considerations of expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good conduct, as well as high dedication to advance and develop the Company.
2. Composition of the Board of Directors should be such that it enables effective decision making, precise and quick and can act independently in the sense of not having interests that may interfere with their ability to perform their duties independently and critically.
3. At least 20% (twenty percent) of the number of Board members must come from outside of the Company that is free from the influence of Commissioners and other members of the Board of Directors and Shareholders.
4. The division of tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors determined by the AGM. In the case of the AGM did not specify the roles and responsibilities, the division of tasks and responsibilities between the Board of Directors determined by the Board's decision.
5. Deepening knowledge as part of a program for improving the competence of each member of the Board of Directors is very important to ensure that the Board of Directors stay abreast of new developments in the construction industry.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertugas untuk mengelola Perseroan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.
2. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundangan- undangan dan/atau Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keputusan Direksi.
6. Direksi wajib membantu dan memberi dukungan sepenuhnya kepada SPI dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan SPI.

D. Komite Audit

Pengertian:

Komite Audit adalah organ pendukung yang dibentuk Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan. Salah seorang anggota Komite adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.

Duties and responsibilities:

1. The Directors assignment is to manage the Company and shall be accountable for the implementation of its duties to shareholders.
2. The Company's Board of Directors in the care of carrying out the instructions given by the AGM is not contrary to the law perundangan- regulations and / or statutes.
3. Each member of the Board of Directors shall in good faith and responsibly perform their duties in the interests of the Company and subject to the laws and regulations in force.
4. In performing their duties, members of the Board of Directors shall devote energy, thoughts and attention fully on the duties, obligations, and achieving the objectives of the Company.
5. Each member of the Board of Directors personally take full responsibility if the concerned fault or negligent in performing his duties and jointly and severally responsible for the decision of the Board of Directors.
6. The Board of Directors shall assist and provide full support to the SPI in performing their duties, as well as to follow up on the findings of SPI.

D. Audit Committee

Definition:

The Audit Committee is formed by the supporting organ Commissioner to assist in carrying out the functions of supervision of the management of the Company. One member of the Committee is a member of Commissioner who also serves as Chairman of the Committee.

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
2. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal (SPI).
3. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris.
4. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan di bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
5. Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit akan diuraikan lebih rinci dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

Main Duties and Functions:

1. The Audit Committee work collectively and helps the Commissioner in carrying out their duties.
2. The Audit Committee assist the Board in ensuring the effectiveness of internal control systems and the effectiveness of the implementation of the tasks of the External Auditor and Internal Auditor (SPI).
3. The Audit Committee is independent both in the execution of their duties and in reporting, and accountable directly to the Commissioner.
4. The Audit Committee members must have good integrity, knowledge and work experience are sufficient in the field of supervision / inspection and in other areas as may be necessary so that it can carry out its function optimally.
5. The scope of duties, powers, and responsibilities of the Audit Committee will be described in more detail in the Charter of the Audit Committee (Audit Committee Charter).

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Ramli Ibrahim

Ketua Komite Audit | Head of Audit Committee

Diangkat kembali sebagai Ketua Komite Audit pada tahun 2015 dengan masa jabatan 1 (satu) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Pengawasan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh & Nias (BPR NAD-Nias) (2007-2009), Pembina Utama IVE pada Depnakertrans (2008), Sekretaris Jenderal BRR NAD-Nias (2005-2007), Inspektur Itjen Depnakertrans (2003-2005), Direktur Investasi dan Kemitraan Dep. Transmigrasi (2000-2003), Kepala Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi & PPH Propinsi Nusa Tenggara Barat (1997-2000), Direktur PT Bintang Aceh Motor (1978-1980), Komisaris Utama PT Jampee Tujoh (1985-1980).

Reappointed as Chairman of the Audit Committee in 2015 with a term of 1 (one) year. He previously served as Deputy Supervision Agency for the Rehabilitation and Reconstruction of Aceh and Nias (BPR NAD-Nias) (2007-2009), the Ministry of Trustees Main IVE (2008), the Secretary General of the BRR (2005-2007), Inspector IG Depnakertrans (2003-2005), Director of Investment and Partnership Dep. Transmigration (2000-2003), Head of Regional Office Dep. Transmigration and PPH Nusa Tenggara Barat (1997-2000), Director of PT Bintang Aceh Motor (1978-1980), Commissioner of PT Jampee Tujoh (1985-1980).

Ir. Bakuh Nindyo Suripno

Anggota | Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2011 – sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Pengadaan barang dan Jasa (2011-2014), Tenaga Ahli Pendukung Sekretaris Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bidang Pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum (2007-2014), Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (2005-2007), Kepala Bidang Rencana dan Evaluasi, Pusat Penilaian Pengadaan Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin) Kementerian Pekerjaan Umum (2001-2005), Kepala Sub Direktorat Penilaian Barang Direktorat Penilaian Pengadaan, Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum pada Kementerian Pekerjaan Umum (2000-2001), Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir dan PKSDA Sub Direktorat III Direktorat III Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah Direktorat Jenderal Air pada Kementerian Pekerjaan Umum (2000), Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Wilayah Tengah III Direktorat Jenderal Air Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (1998-2000), Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Direktorat Jenderal Air Kementerian Pekerjaan Umum (1997-1998), Pelaksana Harian Kepala Staf Pelaksanaan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo Kementerian Pekerjaan Umum (1995), Yang Melaksanakan Tugas Kepala Staf Pelaksanaan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo Kementerian Pekerjaan Umum (1991), Asisten Bina Pelaksanaan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo Kementerian Pekerjaan Umum (1990-1997), Kepala Urusan Pengawasan dan Pengendalian Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo Kementerian Pekerjaan Umum (1988-1990), Staf Proyek Pengembangan dan Konservasi Bengawan Solo Kementerian Pekerjaan Umum (1995-1998), the Canadian International Development Agency – Proyek Bengawan Solo, Counterpart Kementerian Pekerjaan Umum (1984-1985), Project Manager di PT Wijaya Karya (Persero) (1979-1984), Staf Komersil Teknik Cabang Semarang pada PT Barata M&E (1977-1979).

Served as a Member of the Audit Committee since 2011 - now. Experts previously served as Minister of Public Works for procurement of goods and services (2011-2014), Expert Support Secretary Steering Board Sidoarjo Mud Mitigation Agency for Supervision of the Ministry of Public Works (2007-2014), Inspector of Region I, the Inspectorate General of the Ministry of Public Works (2005-2007), Head of Planning and Evaluation, Assessment Center Construction Procurement and Investment Development Agency (Bapekin) Ministry of Public Works (2001-2005), Deputy Director of the Directorate of Goods Rate Rate Determination and Control Agency Procurement Infrastructure Provision Public Works on Ministry of Public Works (2000-2001), Section Head of Water Resources Management and Flood Control and PKSDA III Sub Directorate General of Directorate III Implementation of the Central Region Directorate General of Water at the Ministry of Public Works (2000), Section Head of Water Resources Management and Flood Control Central Region III Directorate General of Water of the Ministry of Public Works Ministry of Public Works (1998-2000), Acting Section Head of Water Resources Management and Flood Control Directorate General of Water of the Ministry of Public Works (1997-1998), Chief Executive Daily Parent Project Implementation Bengawan Solo Area river Development Ministry Public Works (1995), Chief of Staff Duties Conducting Parent Project Implementation Bengawan Solo river Area Development Ministry of Public Works (1991), Assistant Community Development Project Implementation Development Master Bengawan Solo river Regional Ministry of Public Works (1990-1997), Head of Monitoring and Control Project Development Master Solo River Regional Ministry of Public Works (1988-1990), Staff Development and Conservation Project Bengawan Solo river Ministry of Public Works (1995-1998), the Canadian International Development Agency - Project Bengawan Solo river, Counterpart Ministry of Public Works (1984-1985), Project Manager at PT Wijaya Karya (Persero) (1979-1984), Staff Commercial Engineering Branch Semarang PT Barata M & E (1977-1979).

Umardin

Anggota | Member

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2015 dengan masa jabatan 1 (satu) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (2012-2013), Auditor pada Kantor Akuntan Publik Joachim Sulisty & Rekan (2012), Ketua Tim Audit pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah (1998-2012), Anggota Tim Audit pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah, Anggota Tim Audit pada Tim Gabungan Pajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (1989-1990), Anggota Tim Audit pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah (1983-1989), Anggota Tim Audit pada Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (1981-1983).

Served as a Member of the Audit Committee since 2015 with a term of 1 (one) year. Previously served as Auditor in Public Accountant Office Heliantono & Partners (2012-2013), Auditor in Public Accountant Office Joachim Sulisty & Partners (2012), the Chairman of the Audit Team Representatives Financial and Development Supervisory Agency Central Java (1998-2012), Team Member Legislative audit on Financial and Development Supervisory Agency of Central Java, audit team Members on Joint Tax team Financial and Development Supervisory Agency (1989-1990), Member of the Legislative audit team Financial and Development Supervisory Agency Central Java (1983-1989), Member of the audit team the Directorate of Financial Supervision Djendral State (1981-1983).

E. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Pengertian:

Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas intern Perseroan yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. SPI bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional Perseroan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perseroan serta memberikan saran-saran perbaikan.
2. SPI memberdayakan diri sebagai strategic business partner bagi Direksi dengan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis yang dihadapi Perseroan.
3. SPI didukung oleh personil dengan kualitas, kompetensi, dan kuantitas yang memadai untuk pelaksanaan tugasnya.
4. Untuk menjaga kualitas hasil audit, SPI bekerja secara independen sesuai dengan Standar Profesi Auditor Internal dan Pedoman Kerja SPI.
5. SPI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit/Komisaris dan pihak-pihak lain yang dianggap tepat.
6. Personil SPI senantiasa mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna menjamin kualitas auditnya.
7. Kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban SPI dituangkan dalam internal Audit Charter (Piagam Audit SPI).

E. Internal Control Unit

Definition:

Internal Control Unit is an internal supervisory officer of the Company who is responsible to the Managing Director.

Main Duties and Functions:

1. SPI assigned to assist the Director in carrying out the internal audit of financial and operational audit of the Company and assess the control, management and implementation of the Company as well as provide suggestions for improvement.
2. SPI empower yourself as a strategic business partner for the Board of Directors by providing inputs and consideration of strategic issues faced by the Company.
3. SPI is supported by personnel with quality, competence, and a sufficient quantity for the execution of their duties.
4. To maintain the quality of the audit results, SPI work independently in accordance with the Professional Standards and Internal Control Work Guidelines SPI.
5. SPI shall submit a report of inspection and other work to the President Director and copied to the Audit Committee / Commissioner and other parties deemed appropriate.
6. SPI Personnel continues to develop skills and knowledge in order to ensure the quality of the audit.
7. Position, authorities, responsibilities, and obligations set forth in SPI Internal Audit Charter (Charter Audit SPI).

Profil Ketua SPI**Head of Internal Control Unit Profile****Ir. H. Subardjono, MT**

Ketua SPI | Head of SPI

Lulus Universitas Gadjahmada, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geodesi, Yogyakarta, tahun 1986, dan melanjutkan Pasca Sarjana, Magister Teknik, Jakarta, 2007. Tahun 1983-1996 menjadi Kepala Seksi Survey, Topography, dan Hidrometri di beberapa Proyek: Kali Serayu, Dam Manggar Balikpapan, Irigasi Way Rarem Lampung, Bendung Grak Waru. Tahun 1996 diangkat menjadi Kabag Pengawasan & Pelaksanaan Biro Operasi Malang. 1998 Kabag Pengawasan dan Pengendalian Operasi di Biro Pengawasan. 1999 diangkat menjadi Kabiro Pengawasan Pengendalian Operasi & Anggaran di Kantor Pusat Jakarta. Selanjutnya tahun 2004 menjadi Kabiro Operasi & Peralatan (OP-1) di Kantor Pusat, Jakarta. Di tahun yang sama diangkat menjadi Kepala Biro Anggaran Kantor Pusat. Tahun 2009 menjabat Kepala Biro Administrasi & SDM, Kantor Pusat, Jakarta, merangkap Sekertaris Perusahaan di tahun 2008 dan tahun 2012. Bulan Oktober 2012 diangkat menjadi Kepala Satuan Pengawasan Intern sampai sekarang.

Graduated University of Gajah Mada, Faculty of Engineering, Department of Geodesy, Yogyakarta, 1986, and continued postgraduate, Master of Engineering, Jakarta, 2007. In 1983-1996 became Section Head Survey, Topography, and Hidrometri in several projects: Serayu river, Manggar Dam Balikpapan, Irrigation Way Rarem Lampung, Grak Waru Weir. In 1996 was appointed Head of Operations Monitoring and Implementation Bureau Malang. 1998 Head of Monitoring and Control Operations Control Bureau. 1999 was appointed Head of Operations Control & Budget Supervision at the Central Office in Jakarta. Furthermore, in 2004 became Head of Operations & Equipment (OP-1) at Headquarters, Jakarta. In the same year was appointed as Head of the Budget Bureau Central Office. In 2009 the Head of Administration and Human Resources Bureau, Headquarters, Jakarta, cum Corporate Secretary in 2008 and 2012. In October 2012 was appointed Head of Internal Control Unit until now.

F. Auditor Eksternal

Pengertian:

Auditor Eksternal adalah pihak yang independen dan profesional yang melakukan audit keuangan atas laporan keuangan Perseroan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Auditor Eksternal dapat juga melakukan audit non keuangan, seperti audit khusus, audit mutu, audit investigasi, dsb.
2. Untuk menjaga independensinya, maka:

F. External Auditor

Definition:

External auditors are independent parties and the professionals who perform the financial audit of the financial statements of the Company to give an opinion on the fairness, obedience and suitability of the Company's financial statements by the Indonesian Financial Accounting Standards and legislation in force.

Main Duties and Functions:

1. The External Auditor may also conduct an audit non-financial, such as the special audit, quality audit, audit investigation, etc.
2. To maintain its independence, then:

- Auditor Eksternal bertanggung jawab kepada Pemegang Saham
 - Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan (*stakeholders*).
 - Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit.
 - Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang material baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan Perseroan.
3. Audit oleh Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi.
 4. Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran di dalam Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Memberitahukan kepada Pemegang Saham dan atau instansi pemerintah sebagai regulator/ pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja jika ditemukan adanya pelanggaran dan hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan Perseroan dan kepentingan publik lainnya.
 6. Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- External auditors accountable to Shareholders
 - External Auditor should be free from the influence and has no conflict of interest with the Commissioner, the Board of Directors, and interested parties in the Company (*stakeholders*).
 - External Auditor may not provide other services beyond the audit during the audit period.
 - External Auditor should not have a material financial interest, either directly or indirectly and business relationship with the Company.
3. Audit by the External Auditor conducted in accordance with auditing standards and professional code of ethics.
 4. The External Auditor shall notify the Board of Directors and the Audit Committee or Board of Commissioners through when finding events or indications of violations in the Company to the legislation in force.
 5. To inform the Shareholders and or government agency as a regulator / supervisor no later than three (3) working days if the violation found and things that can harm the financial condition of the Company and other public interests.
 6. Unless required by the statutes and regulations in force, External Auditors must keep confidential the information collected while performing their duties.

Profil Kantor Akuntan Publik**Public Accountant Firm Profile****Hadori Sugiarto Adi & Rekan**

Akuntan Publik | Public Accountant

Hadori & Rekan adalah akuntan publik dan penasihat bisnis perusahaan yang terdaftar. Kami telah berdiri sejak tahun 1973, dengan kantor yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Perseroan mewakili sekelompok spesialis yang menyediakan saran dan layanan bisnis untuk berbagai organisasi bisnis, termasuk swasta, publik, Badan Usaha Milik Negara dan Bukan untuk Profit Organisasi. Sejak tahun 1988, Hadori & Rekan bergabung HLB International, sebuah perusahaan akuntansi di seluruh dunia dan penasihat bisnis. Setelah keanggotaan ini setiap perusahaan anggota memiliki hak untuk menggunakan HLB nama mereka untuk menyajikan perpaduan dari nama lokal dan internasional. Ini menekankan kekuatan dari kedua organisasi internasional dan perusahaan lokal sementara, pada saat yang sama, menunjukkan ikatan erat antara keduanya. Dengan demikian, merek nama Hadori & Rekan berubah menjadi HLB Hadori & Rekan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Sebagai anggota HLB International, HLB Hadori & Rekan merupakan bagian dari jaringan di seluruh dunia perusahaan akuntansi dan konsultasi bisnis publik dihormati di lebih dari 100 negara menghasilkan lebih dari US \$ 972.000.000 di tagihan tahunan dari lebih dari 1.430 mitra dan 9.900 staf di lebih dari 400 kantor. Peringkat di atas 12 kelompok akuntansi dan konsultasi bisnis.

Hadori & Rekan is a registered public accounting and business advisers firm. We have been established since 1973, with offices located in Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, and Semarang. The firm represents a group of specialist providing business advices and services to a wide range of business organizations, including Private, Public, State Owned Enterprises and Not for Profit Organizations. Since 1988, Hadori & Rekan joined HLB International, a worldwide accounting firms and business advisers. Having this membership each member firms has the right to use HLB in their name to present a blend of international and local name. It emphasizes the strength of both the international organization and the local firm whilst, at the same time, demonstrating the close bond between the two. Accordingly, the brand name Hadori & Rekan change to HLB Hadori & Rekan. Such change has been approved by the Ministry of Finance. As a member of HLB International, HLB Hadori & Rekan is part of a worldwide network of respected public accounting and business advisory firms in over 100 countries generating in excess of US\$972 million in annual billings from more than 1,430 partners and 9,900 staffs in over 400 offices. Ranked in the top 12 accounting and business advisory groups.

HLB Hadori Consulting

Wisma Staco 3rd Floor, Suite C, Jl. Casablanca kav. 18, Jakarta 12870

G. Sekretaris Perseroan

Pengertian:

Sekretaris Perseroan merupakan penghubung (*liaison officer*) antara Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perseroan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perseroan.

1. Sekretaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggungjawab kepada Direksi.
2. Sekretaris Perseroan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
3. Sekretaris Perseroan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan fungsinya.
4. Sekretaris Perseroan mempunyai tugas menata-usahakan serta menyimpan dokumen

G. Corporate Secretary

Definition:

The Corporate Secretary is the link (liaison officer) between the Board of Directors, Commissioners and shareholders as well as representatives of the Company in dealings with regulators, agencies or other associations related to the Company.

1. The Corporate Secretary shall be appointed and dismissed by the Board of Directors and is responsible to the Board.
2. The Secretary of the Company should have sufficient academic qualifications in order to carry out its duties and responsibilities well.
3. The Corporate Secretary of the Company shall have the experience and knowledge that support the implementation of its functions.
4. The Corporate Secretary has the task of organizing and save documents of the Company, including

Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi maupun RUPS.

5. Sekretaris Perseroan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi.
6. Sekretaris Perseroan bertanggung jawab atas pengelolaan informasi Perseroan.

but not limited to the Shareholder Register, Special Register and the minutes of meetings of the Board of Directors and the AGM.

5. The Corporate Secretary shall ensure that the Company comply with the applicable disclosure requirements in line with the application of the principles of good Corporate governance and are required to provide information relating to the duties to the Board of Directors.
6. The Corporate Secretary is responsible for managing the Company's information.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary

Prawinto Aji

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Lulus Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Medan, Tahun 2003, dan melanjutkan Pasca Sarjana, Magister Manajemen, jurusan Manajemen Strategik di Presetya Mulya, Jakarta, 2014. Masuk PT Brantas Abipraya Tahun 1989 sebagai staf Administrasi & Keuangan Proyek PDAM Surabaya hingga 1990. Tahun 1990-1991 menjadi koordinator Administrasi & Keuangan Proyek Irigasi Sungai Ular OF-3 Deli Serdang, Sumatera Utara. Diangkat menjadi staf Teknik Cabang Utama Medan Tahun 1991 sampai 1995. Tahun 1995-1996 menjadi Pjs. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pengendalian di Cabang Utama Medan. Dipercaya untuk menjadi Staf Pengawasan Dan Pengendalian Cabang Utama Medan Tahun 1996-1997. Setelah itu di Tahun 1997-1998 memperkuat tim untuk memperoleh ISO-9000 di Cabang I Medan sebagai Full Timer. Pada tahun yang sama merangkap sebagai PPSM dan PHPPSM Cabang I Medan. Tahun 1998-2000 diangkat menjadi Kepala Satuan Sistem Mutu Cabang I Medan merangkap PSSM Cabang I Medan, di tahun 2000 juga merangkap sebagai staf Administrasi & Keuangan Cabang I Medan. Selanjutnya diangkat menjadi Kepala Bagian Administrasi & Keuangan Proyek Fly Over Yos sudarso Medan hingga November 2000. Tahun 2000-2004 menjadi Kepala Bagian Administrasi & Keuangan Cabang I Medan. Pada tahun 2004 merangkap menjadi Kepala Kepegawaian, Biro Administrasi & SDM Kantor Pusat, Jakarta. Tahun 2004-2006 memegang Kepala Bagian Administrasi & Keuangan Divisi Produksi II Kantor Pusat, Jakarta. Selanjutnya diangkat menjadi Kepala Bagian Pengembangan & Pemberdayaan SDM, Biro Administrasi & SDM Kantor Pusat, Jakarta, dari Tahun 2006 hingga 2/2009. Pada Februari 2009 sampai Januari 2012 menjabat sebagai Pjs. Kepala Biro SDM Kantor Pusat, Jakarta. Setelah itu diangkat menjadi General Manager Sumber Daya Manusia Kantor Pusat, Jakarta hingga Oktober 2012. Selanjutnya menjabat Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat, Jakarta, hingga sekarang.

Graduated from Medan Area University the Faculty of Economics, Department of Accounting, Medan in 2003, and continued to graduate Master of Management, majoring in Strategic Management in Presetya Mulya at Jakarta in 2014. Joined PT Brantas Abipraya in 1989 as a staff Administration & Finance Project PDAM Surabaya until 1990. In 1990-1991 became the coordinator of Administration & Finance Irrigation Project Sungai Ular OF-3 Deli Serdang, North Sumatera. Appointed Technical staff of Medan Main Branch 1991 until 1995. In 1995 to 1996 became Acting. Head of Sub Division of Planning & Control in Medan Main Branch. Trusted to be the staff Supervision and Control Branch of Medan Year 1996-1997. After that in the year 1997-1998 strengthening the team to obtain ISO-9000 in Branch I Medan as Full Timer. In the same year doubled as PPSM and PHPPSM Branch I Medan. In 1998-2000 was appointed as Head of Quality Systems Branch I Medan concurrently PSSM Branch I Medan, in 2000, also serves as staff Administration & Finance Branch I Medan. Appointed subsequently to become Head of Administration & Finance Project Fly Over Yos Sudarso Medan until November 2000. In 2000-2004 became Head of Administration & Finance Branch I Medan. In 2004 concurrently as Head of Human Resources, Bureau of Administration and Human Resources Office, Jakarta. In 2004-2006 held the Head of Administration & Finance Division of Production II Headquarters, Jakarta. Furthermore appointed Head of Human Resources Development and Empowerment, Administration and Human Resources Bureau at Head Office, Jakarta, from 2006 until February 2009. From February 2009 to January 2012 served as Acting. Head of Human Resources Bureau at Head Office, Jakarta. Appointed General Manager of the Human Resources at Head Office, Jakarta until October 2012. Subsequently served as Corporate Secretary at the Head Office, Jakarta, until now.



Proses Tata Kelola

A. Pengangkatan Dan Pemberhentian Komisaris Dan Direksi

1. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi dilakukan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
2. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Governance Process

A. Appointment and Dismissal of Commissioners and Board of Directors

1. The appointment and dismissal of Commissioners and the Board of Directors made by the AGM through a transparent process.
2. Mechanisms fit and proper test conducted in a transparent, professional, independent, and accountable.
3. Candidates for the Board of Directors who have passed the fit and proper test (*fit and proper test*) is required to sign a management contract before the set appointment as member of the Board of Directors.

4. Komisaris dan Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.
5. Komisaris yang diangkat harus menyusun *Term of Reference* (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham.
6. Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
7. Bagi anggota Komisaris dan atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah masa jabatannya berakhir harus menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham RUPS untuk dimintakan pengesahannya.

B. Program Pengenalan Perseroan

1. Komisaris dan atau Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Komisaris yang baru berada pada Komisaris Utama.
3. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Direksi yang baru berada pada Direktur Utama.
4. Program pengenalan meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.
 - Gambaran mengenai Perseroan.
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
 - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

C. RJPP, RKAP, dan SCI

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dengan disetujui Komisaris, dan disahkan oleh RUPS.

4. Commissioners and Directors who have completed their term of office may be considered to be reappointed for 1 (one) term based on the assessment of performance in the previous period.
5. Commissioner appointed should prepare Term of Reference (TOR), which contains the work plan, objectives / targets to be achieved and communicating it to the shareholders.
6. Commissioners and the Board of Directors at any time be dismissed by the GMS decision stating the reasons.
7. For Commissioners and or Directors who quit before or after his term ends must develop accountability of its work and submit it to the Shareholders AGM for approval is requested.

B. Company Introduction Program

1. The Commissioner and or the new Board of Directors shall be given an introduction program regarding the Company are concerned.
2. The responsibility for the conduct of Commissioners introduction of new programs are in the Commissioner.
3. The responsibility for the introduction of the Board of Directors held a new program is the Managing Director.
4. The introduction of the program include:
 - The implementation of the principles of good Corporate governance by the Company.
 - A description of the Company.
 - Information relating to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
 - Description of the duties and responsibilities of Commissioners and the Board of Directors.

C. RJPP, CBP, and SCI

1. The Board of Directors shall prepare the work plan and budget of the Company (CBP) and the Long Term Plan of the Company (RJPP) with Commissioners approved and ratified by the

2. Direksi wajib mengirimkan usulan RKAP kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan kepada RUPS Tahunan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku.
3. Komisaris memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJPP dan RKAP, serta melakukan pembahasan bersama-sama dengan Direksi sebelum memberikan persetujuannya.
4. RUPS Tahunan mengesahkan RKAP tahun buku berikutnya yang diadakan selambat-lambatnya pada hari ke-30 (tiga puluh) bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai.
5. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan RJPP dan RKAP serta melaksanakan evaluasi dan pengendaliannya.
6. Setiap perubahan RKAP harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS.
7. Komisaris memantau pelaksanaan RKAP dan kesesuaiannya dengan RJPP, serta memberikan masukan-masukan dalam upaya pencapaiannya.
8. Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (Statement of Corporate Intent/SCI) ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa Pemegang Saham pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggung jawab.

D. Konflik Kepentingan

1. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. Konflik kepentingan menimbulkan adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan.
2. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai

AGM.

2. The Board of Directors shall send the proposal to the Commissioner of CBP and the Shareholders to request approval to the Annual General Meeting not later than 60 (sixty) days before the new fiscal year comes into force.
3. The Commissioner provided input during the drafting RJPP and CBP, as well as a discussion together with the Board of Directors prior to giving consent.
4. Annual General Meeting authorize RKAP next book which is held at the latest on day 30 (thirty) the first month after the new fiscal year begins.
5. The Board of Directors is responsible for the implementation and CBP RJPP and implement evaluation and control .
6. Any changes must be approved by the AGM CBP, unless otherwise provided in the resolution of the GMS.
7. Commissioner to monitor implementation and compliance with RJPP CBP, and provide inputs in an effort to achieve them.
8. Agreement Appointment of Directors (Statement of Corporate Intent / SCI) signed by the members of the Board of Directors is concerned and the power of Shareholders at the time of the relevant appointment as a member of the Board of Directors, which includes the requirements of the appointment and dismissal, including roles and responsibilities.

D. Conflicts of Interest

1. Conflict of interest is a situation where a person because of their position or authority held in the Company, has a personal interest that could affect the implementation of the tasks mandated by the Company objectively. Conflict of interest raises the difference between personal or family economic interest with the economic interests of the Company.
2. Shareholders are not allowed to interfere in the operational activities of the Company are the responsibility of the Board of Directors in accordance

- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 4. Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
 5. Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.
 6. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali persetujuan RUPS.
 7. Komisaris dan Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Direksi dan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.
 8. Antara para anggota Direksi maupun anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
 9. Jajaran Karyawan PT Brantas Abipraya tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan.
 10. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- with the provisions of Articles of Association and regulations applicable to law in force.
3. Commissioners are prohibited to hold another position as a member of the Board of Directors on the state, Enterprises, private enterprise, and other positions that may pose a conflict of interest.
 4. Commissioners and the Board of Directors shall report to the Company regarding its ownership and or family on the Company and other Company.
 5. The Commissioner may not have interests that may impair the ability to perform tasks independently and critically in relation to each other and to the Board of Directors.
 6. The Board of Directors may hold another position as a member of the Board of Directors on the state, Enterprises, private enterprise, other structural and functional positions at agencies/ central and local government agencies, as well as other positions that may pose a conflict of interest, unless the approval of the AGM. Law 19/2003 Article 25 Code of Good Corporate Governance 20
 7. Commissioners and Directors are prohibited from making any transactions that have conflict of interest and take personal advantage of the activities of the Company are concerned, in addition to salaries and facilities received as Directors and Commissioners, which is determined by the AGM.
 8. Among the members of the Board of Directors and Commissioners and between the Commissioners with members of the Board of Directors should not be related by blood to the third degree, either vertically or horizontally to the side or relationship by marriage (son-in-law).
 9. Employees PT Brantas Abipraya ranks should not assume a concurrent position on private businesses that may cause a conflict of interest directly or indirectly with the interests of the Company.
 10. If there is something that interests collide with the interests of the Company's Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, it is entitled to represent the Company are:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan Perseroan dengan Perseroan.
11. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

E. Manajemen Risiko

1. Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Pedoman *Good Corporate Governance* 21
2. Proses analisis risiko meliputi estimasi atas signifikansi dampak yang akan timbul, penilaian mengenai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan penetapan langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut.
3. Direksi melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
4. Direksi menetapkan strategi dan kebijakan penanganan pengelolaan risiko serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
5. Direksi mengungkapkan kebijakan yang diterapkan Perseroan menyangkut pengelolaan risiko dalam Laporan Tahunan.
6. Direksi menyusun pedoman penanganan masalah dengan stakeholders yang berkaitan dengan pengelolaan jasa konstruksi dan jasa lainnya, misalnya proses tender dan hubungan dengan mitra kerja.

- a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company's Board of Directors appointed by the other members who did not have a conflict of interest.
 - b. BOC in cases where the members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
 - c. Other parties appointed by the General Meeting of Shareholders in the Board of Directors or Board of Commissioners of the Company has a conflict of interest with the Company.
11. In the event that all of the Directors have a conflict of interest with the Company and none of the members of the Board of Commissioners, the Company is represented by another party appointed by the AGM.

E. Risk Management

1. Risk assessment is a series of actions taken Directors in order to identify, analyze, and assess the risks faced by the Company to achieve defined business objectives. Guidelines for Good Corporate Governance 21
2. The process of risk analysis includes an estimate of the significance of the impact that would arise, assessment of the likelihood of the risk level and the determination of the steps needed to address those risks.
3. Directors conducts identification and assessment of the potential risks faced by the Company.
4. Directors sets the strategy and policy on risk management and supervision over its implementation.
5. Directors expresses the Company's policies regarding risk management applied in the Annual Report.
6. Directors draw up guidelines for the handling of problems with stakeholders related to the management of construction services and other services, such as tender processes and relationships with partners.

7. Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan kepada Komisaris sesuai dengan tingkat kebutuhan.
8. Komisaris memantau pelaksanaan pengelolaan risiko Perseroan dan memberikan masukan untuk perbaikan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya SPI juga melakukan kajian terhadap kecukupan pengelolaan risiko yang diterapkan Perseroan sebagai bahan kajian risiko kepada Direksi.

F. Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak dicapai kata sepakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting.
2. Jika terdapat pendapat yang berbeda dalam rapat (*dissenting opinion*) harus didokumentasikan dalam notulen rapat.
3. Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* Perseroan, risiko yang melekat, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan.
4. Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya memberikan masukan peningkatan kinerja Perseroan.
5. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Komisaris/Direksi, sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
6. Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi harus konsisten dalam menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

G. Media Komunikasi dan Informasi

1. Pemegang Saham, Komisaris, dan *stakeholders* lainnya berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai Perseroan secara proporsional.
2. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

7. Directors provides information about the results of the risk analysis carried out to the Commissioner in accordance with the level of need.
8. Commissioner to monitor the implementation of the Company's risk management and provide feedback for improvement.
9. In carrying out its duties SPI also review the adequacy of the risk management that is applied to the Company as a risk assessment to the Directors.

F. Decision

1. All decisions in meetings conducted by deliberation and consensus, and if not reached an agreement, the decision was taken by majority vote or voting.
2. If there are different opinions in the meeting (*dissenting opinion*) should be documented in the minutes.
3. Any decision taken must consider the interests of stakeholders of the Company, inherent risks, and the authority possessed by every decision maker.
4. The right to express opinions upheld in an effort to provide input increase the Company's performance.
5. The decisions which bind may also be taken without a meeting held Commissioners/Directors, along the entire members of the Board of Directors agreed on the procedure and material to be decided.
6. Stockholders, Commissioners and Directors must be consistent in carrying out the decisions that have been set.

G. Communication and Information Media

1. Shareholders, Commissioners, and other stakeholders are entitled to information that is complete, accurate and timely regarding the Company proportionately.
2. Directors is responsible for ensuring that the information provided to the Commissioner regarding the Company and the Shareholders are complete, accurate, and timely.

3. Direksi melakukan komunikasi secara efektif dengan unit kerja, sesama Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham melalui media komunikasi yang tepat dan efisien.
4. Direksi menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan informasi termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi.
5. Sekretaris Perseroan memastikan informasi yang dikelola *valid*, lengkap, akurat, tepat waktu dan relevan dalam membantu pengambilan keputusan.
6. Perseroan senantiasa mengoptimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi yang tersedia.

H. Pendelegasian Wewenang

1. Direksi mendelegasikan sebagian wewenang pengelolaan Perseroan kepada jajaran dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan untuk menunjang kelancaran tugas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2. Kepala unit kerja harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan tersebut dengan penuh tanggungjawab dan memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Direksi.
3. Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan Perseroan.
4. Pendelegasian wewenang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung jawab Direksi.

I. Pengelolaan Keuangan

1. Keuangan Perseroan harus dikelola secara Professional dengan mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Direksi bertanggung jawab untuk:
 - Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
 - Meningkatkan pendapatan bersih Perseroan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, meminimalkan biaya dan meningkatkan penjualan jasa Perseroan.
3. Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi antar unit untuk mensinergikan usulan anggaran setiap unit.

3. Directors to communicate effectively with work units, fellow directors, commissioners, and shareholders through appropriate communication media and efficient.
4. Directors established a policy regarding the management of confidential information, including classified information.
5. The Corporate Secretary ensures that information is managed valid, complete, accurate, timely and relevant in helping decision-making.
6. The Company continues to optimize the use of communication media and information available.

H. Delegation of Authority

1. Directors of the Company delegate some management authority to the ranks below in accordance with the applicable provisions with a view to support the tasks and improve efficiency and effectiveness.
2. The head unit should implement delegated authority with full responsibility and provide implementation reports regularly to the Board of Directors.
3. Delegation of authority be reviewed periodically to suit the demands of the development of the Company.
4. Delegation of authority who do not relinquish the responsibility of the Board of Directors.

I. Financial Management

1. The Company's Financial Professional to be managed by considering the risks and using the precautionary principle.
2. The Board of Directors is responsible for:
 - Prepare financial statements in accordance with accounting standards applicable in Indonesia.
 - Increase the Company's net income by increasing the efficiency of fund utilization, minimize costs and increase sales of services Company.
3. Preparation of the budget is done through coordination between the units to synergize the budget proposals of each unit.

4. Penetapan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya Perseroan, keterbatasan keterbatasan, serta analisis peluang pasar terhadap kemungkinan pencapaiannya (realistis).
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap variasi yang terjadi dilakukan secara berkala di masing-masing unit dan atau Perseroan secara menyeluruh.
6. Perseroan menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pelimpahan wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang.
7. Kegiatan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan.
8. Kegiatan Perseroan diluar anggaran yang telah ditetapkan harus dilaporkan kepada Komisaris.
9. Setiap unit kerja harus mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan di unit kerjanya masing-masing.
10. Pemantauan pengelolaan keuangan oleh Direksi dilakukan oleh Komisaris.

J. Suksesi Manajemen

1. Direksi menetapkan persyaratan jabatan dan proses seleksi Senior Manajer/General Manajer dan jabatan lain dibawahnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam menjalankan strategi.
2. Penetapan untuk jabatan satu tingkat dibawah Direksi harus dilaporkan kepada Komisaris.
3. Direksi menetapkan program pengembangan kemampuan karyawan Perseroan baik fungsional maupun struktural secara transparan.
4. Komisaris memantau pengisian formasi jabatan satu tingkat dibawah Direksi dalam upaya menjaring dan mengusulkan calon anggota Direksi kepada RUPS.
5. Penempatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja dan syarat-syarat obyektif.

K. Tanggung Jawab Sosial Perseroan

1. Direksi menetapkan dan menjalankan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab

4. Determination of the budget should take into account the needs, the Company's resources, the limitations of limitations, as well as the analysis of market opportunities to the possibility of achievement (realistic).
5. Evaluation of the implementation of the budget and analysis of variance happens conducted periodically in each unit and or the Company as a whole.
6. The Company established a policy that is clear in the case of delegation of authority granting authorization to the expenditure of money.
7. The Company's activities carried out by reference to a set budget.
8. The Company's activities outside the budget that has been set must be reported to the Commissioner.
9. Each unit must take responsibility for financial management in each work unit.
10. Monitoring financial management by the Board of Directors carried out by the Commissioner.

J. Management Succession

1. Directors establishes requirements and selection process for the Senior Manager/ General Manager and other positions below it in accordance with the needs of the Company in implementing the strategy.
2. Determination for the post of one level below the Board of Directors must be reported to the Commissioner.
3. Directors establishes the Company's employees abilities development program both functionally and structurally transparent manner.
4. The Commissioner monitors the charging formation positions one level below the Board of Directors in an effort to capture and prospective members of the Board of Directors proposes to the AGM.
5. The placement of the positions held by the principles of professionalism according to its competence, work performance and objective criteria.

K. Corporate Social Responsibility

1. The Board of Directors of the Company establish and run a program associated with the social

sosial Perseroan secara periodik dan melaporkannya kepada Komisaris serta Pemegang Saham.

2. Direksi harus memastikan bahwa Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisaris memantau dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan.
4. Pelaksanaan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
5. Direksi wajib memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

L. Pengendalian Internal

1. Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
2. SPI melakukan penelaahan terhadap kecukupan sistem pengendalian internal Perseroan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan Perseroan.
3. Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Lingkungan pengendalian internal.
 - Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
 - Aktivitas pengendalian.
 - Sistem informasi dan komunikasi.
 - Monitoring.
4. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Komisaris.
5. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal.
6. Komisaris memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit, ruang lingkup audit.

responsibility of the Company periodically and report to the Commissioner as well as the Shareholders.

2. The Board of Directors must ensure that the Company implement its social responsibility in accordance with the provisions of the applicable legislation.
3. Commissioner to monitor and provide feedback on the implementation of the program associated with the corporate social responsibility of the Company.
4. Implementation of the program associated with the Company's social responsibility of the Company contained in the Company's Annual Report.
5. Directors shall ensure that the assets and business premises as well as other Company facilities, meet the laws and regulations applicable to the preservation of the environment, health, and safety.

L. Internal Control

1. The Board of Directors shall establish an effective internal control system to safeguard the Company's investments and assets.
2. SPI conduct a review of the adequacy of the Company's internal control system including the preparation of the financial statements of the Company.
3. Internal Control Systems include among other things the following:
 - Internal control environment.
 - Assessment and management of business risks.
 - Control activities.
 - Information systems and communication.
 - Monitoring.
4. Directors following up audit reports carried out SPI and the External Auditor and the follow-up progress report to the Commissioner.
5. Commissioner monitor the follow-up progress on the audit report and the External Auditor SPI.
6. Commissioner provide assessment and input to the SPI audit reports and the External Auditor report that includes material, audit objectives, scope of the audit.

7. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

M. Pelaporan

1. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
2. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan KEP-117/MMBU/ 2002 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.
3. Laporan Tahunan disamping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan dan upaya Perseroan dalam penerapan *Good Corporate Governance*.
4. Komisaris wajib membahas laporan tahunan secara bersama-sama dengan Direksi, sebelum menyetujui dan menyampaikannya kepada RUPS.
5. Dengan ditandatangani bersama laporan tahunan, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggungjawab atas isi laporan tahunan dimaksud.
6. Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Komisaris yang telah dilakukan dan program kerja Komisaris untuk periode selanjutnya kepada Pemegang Saham.
7. Komisaris menyampaikan laporan penilaian kinerja masing-masing Direksi kepada Pemegang Saham.
8. Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris dan Pemegang Saham setiap ada kejadian penting dan atau atas permintaan Komisaris/ Pemegang Saham.
9. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen setiap triwulan kepada Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir.
10. Direksi menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam suatu sistem pengendalian internal yang memadai.

7. Commissioners supervise and monitor compliance of the Board of Directors and management team in implementing the legislation.

M. Reporting

1. Within five (5) months after the fiscal year of the Company is closed, the Board of Directors shall submit an annual report which has been signed by all the members of the Board of Directors and Commissioners to the General Meeting of Shareholders to obtain approval.
2. Directors must disclose important information in the Annual Report and Financial Report KEP-117/MMBU/2002 in accordance with the legislation in force in a timely, accurate, clear and objective way.
3. The Annual Report contains in addition to the things that have been determined by the legislation, also contains the Company's efforts in the development and implementation of Good Corporate Governance.
4. The Commissioner shall discuss the annual report together with the Board of Directors, prior to approving and present it to the AGM.
5. With a signed joint annual report, all members of the Board of Directors and the Commissioner responsible for the content of the annual report in question.
6. Commissioner to submit a report execution Commissioners work that has been done and the Commissioner work program for the next period to shareholders.
7. Commissioner to submit a report each performance assessment of Directors to the Shareholders.
8. Directors submit a special report to the Commissioner and Shareholders every important events and or at the request of Commissioner | Shareholders.
9. Directors submit quarterly Management Report to the Commissioner no later than 1 (one) month after the quarter ended.
10. The Board of Directors establishes mechanisms of accountability reports each unit of work an adequate internal control system.

N. RUPS, Rapat Lainnya dan Risalah Rapat

1. RUPS Tahunan diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu selambat-lambatnya pada hari ketiga puluh bulan pertama dan dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku.
2. RUPS Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan atau Komisaris dan atau Pemegang Saham.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan Perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
4. Rapat Komisaris dan Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
5. Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 3 bulan sekali. Dalam kondisi tertentu, Rapat Gabungan dapat diadakan diluar jadwal tersebut untuk membahas hal-hal penting dan mendesak yang memerlukan persetujuan Komisaris. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
6. Risalah rapat harus dibuat untuk setiap rapat dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada).
7. Sekretaris Perseroan mendokumentasikan risalah Rapat Direksi maupun RUPS dan menyediakannya bila diminta oleh Pemegang Saham, Komisaris dan atau Direksi.

O. Penilaian Kinerja

1. Pemegang Saham menilai kinerja Perseroan, Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.
2. Komisaris menetapkan indikator penilaian kinerja untuk masing-masing Direksi dan menginformasikannya kepada Direksi yang bersangkutan dan Pemegang Saham.
3. Komisaris menyusun rencana kerja dan target kerja setiap awal tahun, melakukan evaluasi sendiri (*self assessment*) atas pencapaiannya.
4. Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala kemunduran kinerja Perseroan.

N. AGM, Other Meetings and Minutes of Meeting

1. The Annual General Meeting held 2 (two) times, ie no later than the thirtieth day of the first month and in June after the close of the fiscal year.
2. The Extraordinary General Meeting held at any time, if deemed perlu by the Board of Directors and or the Commissioner and or shareholders.
3. Directors hold the Annual General Meeting authorized the Company and for the benefit of other GMS.
4. The Board of Commissioners and Board of Directors meetings should be held regularly, ie at least once a month.
5. Joint Meeting of Commissioners and Directors held 3 months. Under certain conditions, the Joint Meeting may be held outside of the schedule to discuss matters of importance and urgency that require the approval of the Commissioner. Minutes of the meeting made by the Secretary of the Board of Commissioners.
6. The minutes of the meeting must be made for each meeting and the minutes of the meeting must be included different opinion (*dissenting comments*) with what is decided in a meeting (if any).
7. The Secretary of the Company to document the minutes of meeting of the Board of Directors and the General Meeting and provide them if requested by the Shareholder, Board of Commissioners and or Board of Directors.

O. Performance Assessment

1. Assess the performance of the Company's Shareholders, Commissioners and Board of Directors through the AGM mechanism.
2. The Commissioner set of performance assessment indicators for each of the Directors and inform the concerned Directors and Shareholders.
3. Commissioner prepare a work plan and employment targets beginning of each year, an evaluation (*self-assessment*) on their achievements.
4. Commissioner to report to shareholders in the event of withdrawal symptoms performance of the Company.

5. Direksi menetapkan tolak ukur kinerja masing-masing unit kerja untuk mendukung kinerja Perseroan.
6. Penilaian kinerja terhadap seluruh pegawai dilakukan setiap tahun dan secara transparan berdasarkan prosedur penilaian pekerja No. 2-000-55-03/06.
7. Komisaris meminta/mendapatkan laporan kinerja teknologi informasi dari Direksi.
8. Komisaris menilai pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko.

P. Proses Penunjukan Dan Peran Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Komisaris.
2. Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS menyangkut alasan pencalonan dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal Perseroan.
3. Direksi dapat mengusulkan calon-calon Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.
4. Auditor Eksternal melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan secara independen dan profesional.
5. Perseroan harus menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan.
6. Auditor Eksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Komisaris secara tepat waktu.

Q. Mekanisme Kerja Komite Audit, SPI dan Auditor Eksternal

1. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internall (SPI).
2. Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi

5. Directors set a benchmark of the performance of each business unit to support the Company's performance.
6. Assessment of performance against all employees do every year and in a transparent manner based on worker assessment procedures No. 2-000-55-03 / 06.
7. Commissioner requesting / getting information technology performance report of the Board of Directors.
8. Commissioner assess the accountability of the Board on the implementation of risk management.

P. Appointment Process And The Role of External Auditor

1. External auditors should be appointed by the AGM of the candidates nominated by the Commissioner.
2. Commissioner shall submit to the AGM regarding the reasons for nominating and the honorarium / compensation proposed for the External Auditor of the Company.
3. Directors may propose candidates for the External Auditor to the Shareholders through the Commissioner.
4. The External Auditor audit the Company's financial statements to give an opinion on the fairness of presentation of financial statements independently and professionally.
5. The Company shall provide the External Auditor of all accounting records and supporting data required.
6. External Auditor submit the audit report to the Board and the Commissioner in a timely manner.

Q. Mechanism of the Audit Committee, SPI, and the External Auditor

1. The Audit Committee assist the Board in ensuring the effectiveness of internal control systems and the effectiveness of the implementation of the tasks of the External Auditor and Auditor internall (SPI).
2. The External Auditor shall notify the Board of Directors and the Audit Committee or Board of Commissioners through when finding events

pelanggaran di dalam Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal.
4. Komite Audit melakukan penilaian atas proses penunjukan pemenang tender Auditor Eksternal yang dilakukan oleh panitia tender.

R. Budaya dan Etika Kerja

1. Direksi wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis (code of conduct) yang memuat nilai-nilai etika berusaha.
2. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh Perseroan harus mendukung visi, misi, tujuan dan strategi Perseroan serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan Perseroan untuk selanjutnya meresap kedalam jajaran Perseroan.
3. Setiap insan Perseroan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang dibangun dalam Perseroan.
4. Budaya kerja dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan Perseroan serta kepentingan pihak *stakeholders*.
5. Budaya kerja dikembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja.
6. Seluruh insan Perseroan harus menerapkan budaya kerja dan sikap mental dasar Perseroan secara konsisten dan melakukan evaluasi secara periodik.
7. Anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dilarang untuk memberikan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberian atau penerimaan suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau *entertainment* tidak boleh

or indications of violations in the Company to the legislation in force.

3. The Commissioner monitor the follow-up progress on the audit report and the External Auditor SPI.
4. The Audit Committee assesses the winner of the tender process of the appointment of the External Auditor conducted by the tender committee.

R. Culture and Work Ethics

1. Directors shall create a guideline of ethical conduct (code of conduct), which contains the values of business ethics.
2. Cultural values embraced by the Company should support the vision, mission, goals and strategies of the Company and should be applied in advance by the senior leaders of the Company for the next seep into the ranks of the Company.
3. Every human being is obliged to uphold the Company's ethical values built into the Company.
4. The work culture built to maintain ongoing professional working environment, to be honest, open, caring, and responsive to every activity of the Company and the interests of stakeholders.
5. The work culture developed to motivate employees to work.
6. All human beings have to apply the Company's work culture and the mental attitude of the Company consistently and perform periodic evaluations.
7. Members of Commissioners, Directors, and employees of the Company are prohibited to give, or receive, directly or indirectly, anything of value to a customer or government official to influence or as a reward for what he had done and other measures in accordance legislation in force.
8. Giving or receiving a token of gratitude in business activities, such as a gift, contribution or entertainment should not be done in a situation

dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

9. Direksi menetapkan kebijakan tentang batas maksimal suatu tanda terima kasih yang diterimanya sebagaimana tersebut pada butir 8 di atas.

S. Pemantauan Ketaatan GCG

1. Perseroan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan masalah yang dihadapi.
2. Pemegang Saham berpartisipasi dalam melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance* sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran.
4. TIM CG yang dibentuk Direksi memastikan ketaatan terhadap aturan *Good Corporate Governance* dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Komisaris
5. SPI melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Komisaris.
6. Komisaris memantau efektivitas pelaksanaan praktik-praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

Organ Persero

A. Hubungan Antar Organ Perseroan

Perseroan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perseroan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perseroan dan implementasi *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, Perseroan secara tegas memisahkan fungsi dan tugas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

that can be considered as an act of yang tidak worth.

9. The Board of Directors establish a policy on the maximum limit of a sign of gratitude he received as mentioned in item 8 above.

S. GCG Compliance Monitoring

1. The Company shall actively disclose the extent of implementation of good Corporate governance principles and problems encountered.
2. Shareholders participating in carrying out the implementation of good Corporate governance in accordance with the authority and responsibility.
3. Directors in carrying out its duties are required to apply the principles of professionalism, efficiency, and good Corporate governance principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
4. TIM CG formed Board of Directors ensure compliance with the rules of Good Corporate Governance and regularly report to the Board of Directors and Commissioners
5. SPI conduct an assessment of the implementation of Good Corporate Governance periodically and report the results to the Board of Directors and Commissioners.
6. Commissioners monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance practices applied Company and report to shareholders.

Company Units

A. Relationship between the Company Units

PT Brantas Abipraya reasonable to believe that the relationship between the organs of the Company are very positive effect on the Company's successful management and implementation of good Corporate governance. Thus, the Company explicitly separates the functions and duties of the General Meeting of

Komisaris dan Direksi sebagai Organ Perseroan. Perseroan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) maupun pelestarian lingkungan. Perseroan akan mendorong hubungan yang wajar antar Organ Perseroan. Masing-masing Organ Perseroan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

B. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi Perseroan. RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Agenda yang dibahas didalam RUPS antara lain adalah:

1. Penetapan arah dan strategi jangka pendek, jangka panjang Perseroan,
2. Pertanggungjawaban Direksi / Komisaris
3. Penilaian kinerja operasional dan keuangan,
4. Penetapan anggota Komisaris dan Direksi
5. Penetapan remunerasi Komisaris dan Direksi
6. Agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham/Dekom/Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Perseroan berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat kepada setiap Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS:

1. Perseroan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usulan yang diajukan oleh Direksi;

Shareholders (AGM), Commissioners and Directors as Company units. The Company's encourage its units in order to make decisions and perform tasks based on the good faith and in compliance with the legislation in force, as well as an awareness of the responsibility of the company to the interested parties (*stakeholders*) as well as environmental conservation. The Company will encourage the reasonable relationship between Units. Each Company unit always respect and act according to the function and role of each, relate on the basis of the principle of equality and mutual respect.

B. General Meeting of Shareholders

AGM is a forum for shareholders to influence the Company. AGM is a forum for Commissioners and Directors in the report and is responsible for the implementation of tasks and performance to shareholders. Discussed in the AGM agenda include:

1. Determination of the direction and strategy of short-term, long-term Company,
2. Responsibility of Directors/ Commissioners
3. Reviewing operational and financial performance,
4. Determination of Commissioners and Board of Directors
5. Determination of the remuneration of Commissioners and Board of Directors
6. Other agenda proposed by the Shareholders/ BoC/Directors.

General Meeting of Shareholders consists of the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting. The Company's obliged to give a full explanation and accurate information to all shareholders with respect to the implementation of the AGM. With regard to the implementation of the AGM:

1. The Company gave a call to the Shareholders, providing information on the AGM agenda, including the proposal submitted by the Board of Directors;

2. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal lain dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;
3. Perseroan menjamin keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
4. Perseroan memberikan risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat;
5. Perseroan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi.

C. Komisaris

Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:

- Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham saat RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk segera mendapat perhatian Pemegang Saham.
- Selalu berpegang teguh kepada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan/ atau membentuk Komite Khusus atas biaya Perseroan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Komisaris sendiri.

Implementasi pelaksanaan tugas Komisaris PT Brantas Abipraya antara lain:

1. Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi

2. Shareholders get an explanation about other things on the agenda of the AGM were given before and or during the AGM takes place;
3. The Company guarantees AGM decisions are taken through a transparent and fair procedure;
4. The Company gives the minutes of the AGM for all shareholders if requested. Minutes of the AGM are made will load opinion supporting or not supporting the decisions made;
5. The Company disclose to shareholders pay determination system and facilities for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as details regarding the salaries and benefits received by the Commissioner and Directors.

C. Commissioner

In carrying out duties, the Commissioner shall:

- Advise the General Meeting of Shareholders when the Company's Work Plan and Budget proposed Directors
- Follow the development of the Company's activities, report immediately to the Shareholders in case of symptoms of the decline in performance of the Company or other matters deemed necessary to immediately get the attention of the Shareholders.
- Always cling to the Articles of Association and the legislation in force. The Commissioner may use independent professional advice and/ or establish the Special Committee on the cost of the Company in accordance with the procedures specified by the Commissioner himself.

Implementation of execution of tasks Commissioner of PT Brantas Abipraya among others:

1. Commissioner duty to supervise the management of the Company are conducted by the Board of Directors and advise the Board of

nasehat kepada Direksi terhadap rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Komisaris melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
3. Komisaris bertugas melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Komisaris bertugas meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut (sepanjang Pedoman *Good Corporate Governance* 33 Komisaris setuju terhadap isi materi laporan tahunan);
5. Komisaris memantau ketaatan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku (compliance);
6. Komisaris melakukan evaluasi terhadap kemajuan penerapan praktek *Good Corporate Governance*.

1. Kriteria Anggota Komisaris

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Komisaris. Namun demikian, untuk menjamin efektifitas tugas Dewan maupun anggota Komisaris, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Komisaris yang sesuai kebutuhan.

Perseroan menetapkan kriteria komisaris antara lain sbb:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;

Directors of the Company's development plans, annual work plan and budget of the Company, the implementation of the provisions of the Articles of Association and decisions of the AGM and the legislation in force;

2. Commissioners perform duties, powers and responsibilities in accordance with the provisions of Association of the Company and decision anggaran AGM;
3. The Commissioner in charge of implementing the interests of the company with regard to the interests of the shareholders and is responsible to the AGM;
4. Commissioner in charge of researching and examining the annual report prepared by the Board of Directors and signed the report (along Guidelines for Good Corporate Governance 33 Commissioners agreed to the contents of the annual report material);
5. Commissioner of the Company to monitor compliance with regulations (compliance);
6. Commissioners to evaluate the progress of implementation of Good Corporate Governance practices.

1. The Criteria of Commissioner

PT Brantas Abipraya fully aware that shareholders have full authority to appoint the Commissioner. However, to ensure the effectiveness of the Board as well as members of Commissioners, the Company needs to establish a policy on the criteria Commissioners as needed.

The Company set criteria of commissioners include the following:

1. Able to perform legal acts and never declared bankrupt or become a member of the Board of Directors or Commissioners found at fault for causing a company to go bankrupt;
2. Never convicted of a criminal act detrimental to state finance within a period of 5 (five) years prior to his appointment;

3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota komisaris lain dan atau dengan anggota direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar);
4. Tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan, kecuali dengan ijin dari RUPS dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki integritas pribadi dan dedikasi;
6. Memahami manajemen Perseroan yang berkaitan dengan strategi bisnis usaha Perseroan;
7. Memiliki pemahaman mengenai industri konstruksi;
8. Memiliki latar belakang pendidikan formal dan informal yang relevan dengan bisnis perseroan;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Mampu bekerja sama sebagai dewan. Komisaris Perseroan harus dapat bekerja sama dengan anggota Komisaris lainnya dan dengan Direksi dengan tetap berpedoman pada tanggung jawab masing-masing. Bagi anggota Komisaris yang baru diangkat perlu diberikan program pengenalan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor wilayah dan kantor cabang atau program lainnya. Pengadaan program pengenalan ini merupakan tanggung jawab Komisaris Utama. Perseroan akan secara teratur mengadakan program Pedoman *Good Corporate Governance* 34 pembelajaran yang berkelanjutan bagi Komisaris dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Komisaris.

2. Komisaris Independen

Meskipun Perseroan belum menetapkan Komisaris Independen, namun Perseroan menyadari pentingnya keberadaan Komisaris dari kalangan di luar yang independen. Selain persyaratan umum Komisaris tersebut di atas, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria sbb.

3. Not having a family relationship with the other commissioners and members or with members of the board of directors until third degree either vertically or horizontally to the side or relationship by marriage (son-in-law);
4. There should be other concurrent positions in private Enterprises that can give rise to conflicts of interest directly or indirectly with the interests of the Company, except with the permission of the AGM and based on the applicable legislation;
5. Have personal integrity and dedication;
6. Understand the Company's management relating to the business strategy of the Company;
7. Have an understanding of the construction industry;
8. Has a background of formal and informal education that are relevant to the company's business;
9. Provide sufficient time to perform their duties;
10. Being able to work together as a board. Commissioners must be able to work together with members of other Commissioners and the Board of Directors by referring to the responsibilities of each. For members of the newly appointed Commissioner should be given recognition program in the form of presentations, meetings, visits to the Company's facilities, visits to regional offices and branch offices or other programs. Procurement of this recognition program is the responsibility of Commissioner. The Company will regularly hold courses Code of Good Corporate Governance 34 continuous learning for the Commissioner with the agenda and materials according to the needs of Commissioners.

2. Independent Commissioner

Although the Company Independent Commissioner has not been set, but the the Company aware of the importance of the Commissioner of the outside independent. In addition to the general requirements of the above-mentioned Commissioner, Independent Commissioner should meet the following criteria.

- a. Tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan yang menyediakan jasa dan produk kepada PT Brantas Abipraya dan afiliasinya;
- b. Tidak bekerja kepada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- c. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan yang terafiliasi dengan PT Brantas Abipraya;
- d. Tidak bekerja di PT Brantas Abipraya atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- e. Bebas dari kepentingan dan aktifitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan anggota Komisaris independen untuk bertindak atau berfikir secara bebas.

3. Rapat Komisaris

Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan. Rapat Komisaris terdiri dari rapat internal Komisaris dan atau rapat koordinasi dengan Direksi. Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Komisaris atau atas permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham minimal 10% dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat Komisaris membicarakan berbagai permasalahan bisnis Perseroan serta evaluasi terhadap kinerja Perseroan, atau pengelolaan Perseroan. Undangan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum terselenggaranya rapat. Undangan rapat dibuat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta disertai bahan-bahan rapat.

Undangan tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota hadir dalam rapat. Rapat Komisaris adalah sah apabila dilakukan di wilayah Indonesia dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½

- a. Does not have a financial relationship, either directly or indirectly by the Company or the Company which provide services and products to PT Brantas Abipraya and its affiliates;
- b. Does not work for the government, including departments, agencies and the military within the last three years;
- c. Not serving as Directors of the Company that is affiliated with the PT Brantas Abipraya;
- d. Did not work in PT Brantas Abipraya or its affiliates within the past three years;
- e. Free of interest and business activity or other relationship that could hinder or interfere with the ability of members of an independent commissioner to act or think freely.

3. The Board of Commissioners Meeting

Commissioners held a meeting at least 1 (one) month. Meetings of Commissioners consists of an internal meeting or a meeting of Commissioners and coordination with the Board of Directors. Commissioners can also hold meetings at any time if deemed necessary by the Commissioner or on the proposal of at least 1/3 (one third) of the members at the request of the Commissioner or the Board of Directors or upon written request of shareholders who have shares at least 10% by saying things that will be discussed. Commissioners meeting to discuss various business issues of the Company as well as an evaluation of the performance of the Company, or the Company management. Commissioner meeting invitation made by the President Commissioner or one Commissioner designated by the Commissioner in writing no later than 7 (seven) days prior to the implementation of the meeting. Meeting invitation was made to include the event, date, time and place of the meeting and accompanied the meeting materials.

The invitation is not required if all members are present in meeting. Commissioners meeting is valid if it is done in Indonesia and can take binding decisions if attended or represented by more than ½ (one half) the number of Commissioners. A member can be

(satu per dua) jumlah anggota Komisaris. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Komisaris lainnya. Pedoman *Good Corporate Governance*³⁵ berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Kuasa tersebut diartikan mempunyai semua wewenang pemberi kuasa kecuali disebutkan lain. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya. Seluruh Rapat Komisaris dibuatkan risalah rapat mencakup catatan atas segala sesuatu yang dibicarakan, argumentasi yang dikemukakan, keputusan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap keputusan tersebut bila ada. Risalah tersebut ditandatangani oleh Ketua Rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Salinan risalah tersebut berhak diterima oleh seluruh anggota Komisaris, walaupun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat.

Risalah rapat yang telah selesai dibuat harus dikirimkan selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat. Revisi dan keberatan oleh peserta rapat atas risalah dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka disimpulkan risalah rapat tersebut sudah disetujui seluruh anggota Komisaris. PT Brantas Abipraya mengikuti prinsip *Good Corporate Governance* dalam praktik rapat Komisaris yang meliputi antara lain:

1. Setiap anggota Komisaris memiliki kesepakatan dan hak suara yang sama dalam mengemukakan pendapat. Tidak ada pihak yang mendominasi jalannya rapat;
2. Keputusan Rapat Komisaris diambil atas dasar musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Seorang anggota Komisaris berhak mengeluarkan satu suara untuk anggota Komisaris lain yang diwakilinya, apabila pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak;
4. Rapat Komisaris dapat mengundang Direksi dan/ atau pegawai Perseroan untuk memintai keterangan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

represented at a meeting of Commissioners only by members of other Commissioners Code of Good Corporate Governance 35 by written authorization granted for that purpose. The power means having all the authorizing authority unless otherwise stated. A Commissioner may only represent a Commissioner others. The whole Board of Commissioners meeting minutes include a note made on all matters discussed, the arguments put forward, the decision was taken, as well as the objection against the decision if any. The paper is signed by the Chairman of the Board of Commissioners and by a member of the Commissioner appointed by and from among those present. A copy of the treatise entitled accepted by all members of the Commissioner, although concerned is not present in the meeting.

Minutes of the meeting that has been created must be submitted no later than one week after the meeting. Revisions and objections by the meeting participants on the treatise done within 14 (fourteen) days from the date of shipment. If within that time there was no response, it is concluded that the minutes of the meeting has been approved by all members of Commissioners. PT Brantas Abipraya follow the principles of Good Corporate Governance practice of Commissioners meeting that includes, among others:

1. Each member of the agreement and the Commissioner have equal voting rights in expressing opinions. No parties dominate the proceedings;
2. The decision taken on the basis of Commissioners Meeting deliberation, if not achieved, the decisions are taken by majority vote;
3. A member of the Commissioner is entitled to cast one vote for a member of another Commissioner who represents, if the decision made by majority vote;
4. Meeting Commissioner may invite the Board of Directors and/ or employees of the Company to memintai information relating to the issues to be discussed.

4. Kinerja Komisaris

Kinerja Komisaris dan anggota Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kinerja Komisaris ditentukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Komisaris sejak pengangkatannya. Pedoman *Good Corporate Governance* 36 Hasil evaluasi terhadap kinerja Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk menunjuk kembali anggota Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektifitas Komisaris.

Kriteria Kinerja Komisaris dinilai oleh Rapat umum Pemegang Saham, Kriteria evaluasi kinerja individu Komisaris antara lain meliputi:

1. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan, misal mengenai benturan kepentingan;
2. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan;
3. Kehadiran dalam rapat-rapat Komisaris maupun Komite;
4. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus;
5. Hubungan kerja Komisaris dengan Direksi Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris menyelenggarakan pertemuan secara teratur dengan Direksi (rapat koordinasi) untuk membicarakan masalah Perseroan. Diluar pertemuan rutin tersebut, Komisaris berhak mengadakan pertemuan dengan Direksi apabila dibutuhkan Dalam setiap pertemuan, informasi bagi Komisaris disiapkan dan diberikan secara tertulis oleh Direksi sebelum pertemuan sehingga

4. Performance of Commissioner

Performance of Commissioner and the Commissioners will be evaluated annually by the Shareholders in the General Meeting of Shareholders (AGM).

Commissioner performance determined based on duties, powers and obligations contained in the applicable legislation and the Articles of Association of the Company. Formal evaluation criteria communicated openly to the Commissioner since his appointment. Guidelines for Good Corporate Governance 36 The results of an evaluation of the overall performance of the Commissioner and the performance of each individual member of the Commissioner will be an integral part in the scheme of compensation and incentives for the Commissioner. Results of the evaluation of the performance of each individual member of the Commissioner is one of the basic balance of the Shareholders to reappoint Commissioners concerned. The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners and individuals both as a means of assessment and increasing the effectiveness of the Commissioner.

Commissioner performance criteria assessed by the general meeting of shareholders, Criteria evaluation of the performance of individual Commissioners include the following:

1. Compliance with legislation and regulations, and Corporate policies, for example regarding conflicts of interest;
2. The commitment in advancing the interests of the Company;
3. Attendance at meetings of the Commissioner and the Committee;
4. Contributions in the execution of specific tasks;
5. The working relationship with the Commissioner of the Board of Directors in order to carry out the task of supervision, the Commissioner held regular meetings with the Board of Directors (coordination meeting) to discuss the Company. Beyond the regular meetings, the Commissioner is entitled to hold a meeting with the Board of Directors if required In every meeting, the Commissioner information prepared and provided in writing by the Board of Directors prior

memungkinkan Komisaris untuk mendalami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi dapat membantu membuat ringkasan permasalahan yang akan dibahas sepanjang tidak mempengaruhi esensi informasi. Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. Komisaris berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa dokumen untuk keperluan verifikasi. Pelaksanaan hak Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.

6. Komite-komite di bawah Komisaris
Komisaris berhak mendapatkan saran profesional yang independen atas beban perseroan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab profesional Komisaris agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Apabila diperlukan Komisaris berhak membentuk komite-komite sebagai alat bantu dalam menjalankan tugasnya. Komite-komite tersebut bertanggungjawab membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta membantu merumuskan kebijakan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan.

Penetapan kebijakan tetap menjadi kewenangan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang didelegasikan dalam Surat Keputusan Komisaris. Komite-komite tersebut diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris.

Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Komisaris antara lain Komite Audit, Komite Risiko Usaha, Komite Nomisani serta Komite Remunerasi. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan audit internal.

Komite Risiko Usaha/ Asuransi bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi

to the meeting so as to enable the Commissioner to explore the issues to be discussed. If necessary the Board of Directors can help make a summary of the issues to be discussed to the extent not affect the essence of the information. Commissioner entitled to ask for an explanation of all the things asked of the Board of Directors and the Board of Directors is obliged to provide an explanation. Commissioner entitled to enter the buildings and pages or other places used or controlled by the Company and the right to inspect the document for verification purposes. The exercise of the Commissioner is done such that it should not interfere with the implementation of the operational activities of the Company.

6. Committees under Commissioner
Commissioners are entitled to independent professional advice at the expense of the company for the things that are the responsibility of the Commissioner professionals in order to perform their duties effectively. If necessary the Commissioner has the right to form committees as an aid in carrying out its duties. These committees responsible for assisting the Commissioner in carrying out its duties and its obligations, and help formulate policy Commissioner under the scope of the task of the committee is concerned.

Setting policy remains under the authority of the Commissioner except for things that are delegated to the Decree of the Commissioner. These committees chaired by a member of the Commissioner.

The committees can be formed by the Commissioner include the Audit Committee, Business Risk, Nomisani Committee and the Remuneration Committee. The Audit Committee assist the Board in ensuring the effectiveness of internal control systems and the effectiveness of the implementation of the tasks of external auditors and internal audit.

Business Risk Committee/ Insurance regularly assigned to conduct the assessment and provide recommendations on the business risks and the type

yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha. Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi serta eksekutif puncak lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.

Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Komisaris, Direksi dan pegawai serta rekomendasi tentang:

1. Penilaian terhadap sistem remunerasi bagi Komisaris, Direksi dan pegawai tersebut;
2. Sistem pensiun; dan
3. Sistem kompensasi serta manfaat-manfaat lain yang didapatkan pegawai apabila Perseroan melakukan perampingan pegawai.

Komite-komite tersebut atau komite-komite lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta disahkan dengan Surat Keputusan Komisaris. Komite ini dapat bersifat permanen atau sementara tergantung kebutuhan.

D. Direksi

Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan demi sebesar-besarnya kepentingan Perseroan. Direksi akan mengelola bisnis dan urusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Direksi memiliki tugas dan wewenang antara lain memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan

and amount of insurance that is covered by the Company in connection with business risks. The Nomination Committee task of formulating selection criteria and nomination procedures for Commissioners, Directors and other top executives, make the assessment system and provide recommendations on the number of Commissioners and the Board of Directors.

Remuneration committee in charge of preparing the payroll system and allowance for Commissioners, Directors and employees as well as recommendations on:

1. Assessment of the system of remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors and the employees;
2. The pension system; and
3. The system of compensation and other benefits obtained downsizing employees if the Company's employees.

These committees or other committees can be formed in accordance with the needs of the Company and approved by the Decree of the Commissioner. These committees can be permanent or temporary depending on needs.

D. Directors

The Board of Directors shall in good faith and full responsibility of running the management of the Company for the sake of maximum interest of the Company. The Board of Directors shall manage the business and affairs of the company with regard to the balance of interests of all parties concerned with the activities of the Company. The Board of Directors will act diligently, carefully and with consideration of various important aspects that are relevant in the performance of its duties. The Board of Directors will use the authority held solely for the benefit of the Company.

The Board of Directors has the duty and authority among other lead and manage the company in accordance with the purposes and objectives of the Company and continuously try to improve the efficiency and effectiveness of the Company. Directors are fully responsible in performing their duties for Company in achieving its purposes and objectives, control, maintain and manage the Company's assets.

Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi antara lain akan selalu:

1. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Menyiapkan secara tepat waktu rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan;
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
5. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
6. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham;
8. Menyiapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
9. Menjaga dan meningkatkan citra Perseroan.

1. Kriteria Anggota Direksi

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk menjamin Dewan maupun anggota Direksi yang memiliki kinerja sesuai yang diharapkan, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi sesuai kebutuhan.

In performing its duties the Board of Directors, among others, will always be:

1. Comply with the Articles of Association and the applicable legislation;
2. Ensuring and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the purposes and objectives of the Company;
3. Prepare a timely manner the Company's long-term plans, annual work plan and budget of the Company, including other plans relating to the implementation of the Company's business and activities and menyampaikannya to the Commissioner for further submitted to the General Meeting of Shareholders in order to obtain authorization;
4. Establish and maintain bookkeeping and administration of the Company in accordance with the standards in force for one of the Company;
5. Compile accounting system in accordance with the Financial Accounting standards and based on the principles of internal control, especially the maintenance function, recording, storage and supervision;
6. Provide accountability and any information about the circumstances and the course of the Company in the form of an annual report including the annual accounts to the General Meeting of Shareholders;
7. Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations as well as other reports whenever requested by the Shareholders;
8. Prepare the Company's organizational structure complete with details of their duties;
9. Maintain and enhance the company image.

1. Criteria of Directors Member

The Company fully aware that the Shareholders General Meeting of Shareholders has full authority to appoint the Board of Directors. However, to ensure the Board of Directors as well as members who have performed as expected, then the Company needs to establish a policy on the criteria for members of the Board of Directors as needed.

Perseroan menerapkan kriteria Direksi Perseroan diantaranya meliputi:

1. Seseorang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Komisaris;
3. Memiliki integritas yang baik yang ditunjukkan dengan *track record*;
4. Memahami dan memiliki pengalaman dalam bisnis yang digeluti Perseroan dan atau pengalaman yang relevan dengan Kebutuhan Perseroan;
5. Memiliki kualitas kepemimpinan yang baik;
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk Peraturan Perseroan dan arahan Pemegang Saham;
7. Mampu mewakili Perseroan dihadapan publik, Pemegang saham dan *Stakeholders* lainnya;
8. Memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan Perseroan;
9. Memiliki watak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi, antara lain meliputi:

1. Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Direksi yang baru berada pada Direktur Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi;
4. Program pengenalan meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.
 - Gambaran mengenai Perseroan.

The Company applying criteria of Directors include, among others:

1. A person who is able to perform legal acts and never declared bankrupt or never become a member of the Board of Directors or Commissioners found at fault for causing a company to go bankrupt, or people who never convicted of a criminal offense that is detrimental to the State finances within 5 (five) years prior to his appointment.
2. Not having a family relationship to the degree to three, either vertically or laterally or relationship by marriage (son-in-law) with other members of the Board of Directors and Commissioners;
3. Have good integrity demonstrated by a track record;
4. Understand and have experience in the business of which the Company engaged and or experience relevant to the Needs of the Company;
5. Have good leadership qualities;
6. Have a commitment to comply with applicable laws and regulations including the Regulations of the Company and Shareholders directives;
7. Able to represent the Company before the public, shareholders and other stakeholders;
8. Have a dedication to advancing the Company;
9. Have a good character and has the ability to perform the task as well as possible in accordance with the position it occupied.

Program recognition given to members of the Board of Directors, among others, include:

1. New Board must be given recognition program regarding the Company are concerned.
2. Responsibility of Directors to convene the new recognition program is the Managing Director.
3. The duties and responsibilities of Commissioners and the Board of Directors;
4. The introduction of the program include:
 - The implementation of the principles of good Corporate governance by the Company.
 - A description of the Company.

- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

2. Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali atau apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham minimal 10% dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam rapat Direksi dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan sesuai dengan tugas, kewenangan serta kewajibannya, pembuatan keputusan yang dianggap perlu dan juga membuat evaluasi bisnis.

Perseroan. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

Rapat Direksi adalah sah apabila dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

- Information relating to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
- Description of the duties and responsibilities of Commissioners and the Board of Directors.

2. Directors Meeting

Board of Directors Meeting held at least 1 (one) month or when deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or at the written request of one or more members of Commissioners or shareholders who have shares of at least 10% by mentioning the things that will be discussed. In the Board of Directors meeting discussed matters relating to the Company in accordance with the duties, powers and obligations, making decisions that may be necessary and also make business evaluation.

Company. Board of Directors meeting calls made in writing by the members of the Board of Directors is entitled to represent the Company and delivered within a period of at least 3 (three) days before the meeting is held. In the call must include the agenda, date, time and place of the meeting. The conference call is not required if all members of the Board of Directors present at the meeting.

Board of Directors meeting is valid if performed in the territory of the Republic of Indonesia and the right to make decisions binding, if attended by more than ½ (one half) the number of members of the Board of Directors or his deputy. A member of the Board of Directors may be represented at the meeting by members of the Board of Directors other only by written authorization granted for that purpose. A member of the Board of Directors may only represent a member of the Board of Directors.

All decisions taken in the meeting of the Board of Directors with deliberation. If it can not be implemented, then the decisions are taken by majority vote. Each member of the Board of Directors is entitled to issue one (1) vote and an additional 1 (one) vote for members of the Board

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan jalannya rapat secara utuh, argumentasi yang dikemukakan kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan pendapat jika ada. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut. Keberatan dan usul revisi terhadap risalah rapat disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka risalah rapat tersebut sudah disetujui seluruh anggota Direksi.

3. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional

Perseroan memiliki kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar direksi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kepentingan Perseroan, Perseroan memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional atas beban Perseroan.

E. Sekretaris Perusahaan

Perseroan menyadari sepenuhnya pentingnya hubungan yang baik antara organ perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dan hubungan antara Perseroan dengan stakeholders. Untuk melaksanakan tugas tersebut Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan. Secara struktural Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang memadai.

Tugas Sekretaris Perusahaan antara lain adalah:

1. Memastikan bahwa perseroan taat terhadap berbagai peraturan yang berlaku dan melaksanakan good corporate governance.

of Directors that represents. If the number of votes agree and disagree as much, then the proposal is considered rejected unless the people themselves will be determined by the ballot closed. Sound blank or invalid votes are considered non-existent and not counted in determining the number of votes cast at the meeting.

In each meeting of the Board of Directors made the minutes of a meeting that can describe the proceedings as a whole, the arguments put forward the conclusions drawn and the opinion statement of objections if any. Each member of the Board of Directors is entitled to receive a copy of the minutes of meetings of the Board of Directors, although concerned is not present in the meeting. Objections and proposals submitted revisions to the minutes of the meeting no later than within 14 (fourteen) days from the date of shipment. If within that time there was no response, then the minutes of the meeting has been approved by the Board of Directors.

3. The Policy of Using Professionals Advisory

The Company's has a policy that allows the Directors to obtain independent professional advice in carrying out its duties and responsibilities in accordance with the legislation in force. So that directors can carry out their duties properly for the benefit of the Company, PT Brantas Abipraya allow the Directors to obtain professional advice at the expense of the Company.

E. Corporate Secretary

The Company is fully aware of the importance of a good relationship between the company organs (AGM, Commissioners and Directors) and the relationship between the Company and stakeholders. To carry out these tasks the Company appointed a Corporate Secretary. Structurally, the Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and has sufficient authority.

Corporate Secretary duties include:

1. Ensure that the company's compliance with the various regulations and implementing good Corporate governance.

2. Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investor, saham, bursa, pasar modal dan Anak Perseroan.
3. Menangani fungsi hubungan investor dan publikasi Perseroan.
4. Menjalankan fungsi corporate legal affair atau legal council Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku dan memastikan Perseroan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Komisaris apabila diminta.

2. Dealing with activities related to the investor, shares, stock exchange, capital markets and Son Company.
3. Handle the investor relations function and the publication of the Company.
4. Running legal affair corporate functions or legal counsel Corporate Secretary must always keep abreast of regulations and ensuring the Company to meet and comply with these regulations. The Corporate Secretary will provide information relating to the performance of its duties to the Board regularly and to the Commissioner if requested.

Standar Akuntansi, Pengendalian Internal dan Eksternal

A. Standar Akuntansi

Perseroan memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu merujuk dan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK tersebut mewajibkan Perseroan menyajikan Laporan Keuangan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas dan pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PSAK, pengungkapan yang dilakukan Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek relevansinya terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan dan dapat diandalkan. Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku, dilakukan Perseroan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Perseroan memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut secara adil dan transparan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi semua prinsip di atas, Perseroan memiliki kebijakan yang menjamin keberadaan suatu sistem akuntansi dan kebenaran pencatatannya. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan telah dibukukan dengan benar. Laporan Keuangan

Accounting Standards, Internal and External Controls

A. Accounting Standards

The Company ensure that all policies and regulations related to accounting always refer to and comply with the provisions in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). The GAAP financial statements requires the Company present fairly the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows and other disclosures in the notes to the financial statements. For things that have not been regulated in IAS, the disclosure of which is conducted by the Company continues to consider aspects of relevance to the needs of users of financial statements and reliable. Presentation of financial statements (balance sheet, income statement, cash flow statement, statement of changes in equity) in each fiscal year, do the Company to meet the interests of all parties related to the Company. The Company committed to disclose the report in a fair and transparent by applicable provision. To meet all the above principles, the Company has a policy that guarantees the existence of a system of accounting and recording truth. Transactions are recorded in the accounting system at least have been approved by management which has the authority for this purpose and have been recorded correctly. Financial Statements of the Company fairly and accurately describe the actual transactions without the

Perseroan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun bermaksud mengelabui pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi dan Pegawai yang bertanggungjawab atas fungsi-fungsi tersebut wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi Perseroan.

B. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta kepatuhan kepada perundang-undangan yang terkait. Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;
3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset Perseroan;
4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perseroan;
5. *Monitoring* yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk

slightest intention to fool the readers. All parties, both Directors and employees are responsible for the functions that are required to understand and implement the internal control system of financial policies and procedures for the accounting records of the Company.

B. Internal Control System

Financial Internal Pengendalian system put in place to guarantee correctness of financial information, the effectiveness and efficiency Company management processes as well as compliance with relevant legislation. Company continues to maintain an internal control system in question include the following:

1. The internal control environment within the Company's disciplined and structured, which consists of:
 - Integrity, ethical values and competence of the employees
 - How to be taken in implementing the management authority and responsibility;
 - Organizing and development of human resources;
 - Attention and referrals made by the Board of Directors
2. Assessment and management of business risks is a process for identifying, analyzing, assessing and managing business risks relevant;
3. Control activities are the actions undertaken within a control process of the Company's activities at every level and unit in the organizational structure of the Company, among others, authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of job performance, the division of tasks and the security of the assets of the Company ;
4. The information and communication system that is a process of preparing a report on the operations, financial, and observance of rules and regulations that apply to the Company;
5. Monitoring the process of assessment of the quality of the internal control system including

fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit. Sedangkan menyangkut hubungan kerja antara SPI (Satuan Pengawas Intern) dengan Komite Audit antara lain meliputi:

1. Komite Audit mengevaluasi independensi, objektivitas dan efektivitas SPI
2. Komite Audit memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor
3. Komite Audit memberi pertimbangan kepada Komisaris tentang perubahan / pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI

C. Audit Eksternal

Dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal, Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk Auditor Eksternal dari calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
2. Komite Audit melalui Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan Auditor Eksternal tersebut;
3. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perseroan;
4. Perseroan wajib menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaataazasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia;
5. Penunjukan Auditor Eksternal dibatasi untuk maksimum 3 tahun buku berturut-turut oleh KAP & Partner yang sama.

Pedoman Etika dan Perilaku

A. Integritas dalam Aktivitas Bisnis dan Pekerjaan

Perseroan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan

internal audit function at every level and unit organizational structure of the Company, so that it can be implemented optimally, with the proviso that deviations are reported to the Board and a copy submitted to the Audit Committee. While concerns the working relationship between SPI (Internal Control Unit) with the Audit Committee include the following:

1. The Audit Committee evaluates the independence, objectivity and effectiveness SPI
2. The Audit Committee monitors the adherence to the Code of Professional Auditors
3. The Audit Committee gave consideration to the Commissioner of changes | appointment and dismissal of the Head of Internal Audit

C. External Audit

In conjunction with the External Auditor, the Company set the following policies:

1. It is the authority of the AGM to appoint the External Auditor of candidates submitted by the Commissioner on the recommendation of the Audit Committee;
2. The Audit Committee through the Commissioner shall submit to the AGM reason the nomination of the External Auditors;
3. The External Auditor must be free from the influence of Commissioners, Directors and interested parties in the Company;
4. The Company shall provide the External Auditor of all accounting records and supporting data necessary to allow the External Auditor gave his opinion on the fairness, ketaatazasan, and the suitability of the Company's financial statements by the Indonesian financial accounting standards;
5. Appointment of the External Auditor are limited to a maximum of 3 years in a row book by the same PAF & Partners

Code of Conduct

A. Integrity in Business Activities and Work

The Company implements ethical standards in conducting all business activities based on the

prinsip-prinsip good corporate governance. Perseroan menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan usaha utama dibidang konstruksi dan rancang bangun antara lain meliputi: (1) pekerjaan sipil umum; (2) pekerjaan bangunan gedung; (3) pekerjaan mekanikal dan elektrikal dan lain-lain. Perseroan juga melakukan diversifikasi usaha meliputi bidang lain yang terkait erat dengan core bisnis perusahaan. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, kantor Wilayah, Kantor Cabang, Proyek, Depo Alat dan unit kerja lain diwajibkan untuk melakukan sosialisasi Panduan Good Corporate Governance ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing. Perseroan melarang seluruh jajaran yang terdiri atas Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Proyek, Depo Alat dan unit kerja lain dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Perseroan menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai saksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan Perseroan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan antara lain:

1. Seluruh individu dan atau organ Perseroan di lingkungan PT Brantas Abipraya senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di manapun operasional Perseroan dijalankan;
2. Perseroan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku;
3. Perseroan berketetapan tidak mentolerir tindakan ilegal, penggunaan praktek yang tidak adil dan perilaku yang tidak jujur dalam meraih laba.
4. Segenap jajaran Perseroan harus menghindari benturan kepentingan dan mengutamakan kepentingan Perseroan.

principles of good Corporate governance. PT Brantas Abipraya run deploying operational with the main scope of business activities in the field of construction and design, among others, include: (1) general civil works; (2) the work of the building; (3) mechanical and electrical works and others. The Company also diversified businesses covering other fields closely related to the core business of the company. All work units at the Head Office, Regional Office, Branch Office, Project, Depo Tools and other working units are required to disseminate this Guide of Good Corporate Governance for maintaining honesty, integrity and fairness in all business activities in their respective working environments. The Company prohibit all levels of the Company consisting of Commissioners, Board of Directors, all units of the Head Office, Regional Office, Branch Office, Project, Depo Tools and other working units and related party transactions contrary to the laws and principles of good Corporate governance.

The Company implement supervisory function using the audit based on the correct principles and generally accepted and constantly strive for violation of the norms and regulations may subject the witness as applicable, both administrative and legal. Each unit is obliged to always follow up any audit findings submitted by the supervisory function.

The Company policy in maintaining integrity in business activity and employment, among others:

1. All individual and organ of the Company or within the PT Brantas Abipraya always obliged to comply with the law and regulations in any of the Company's operations are run;
2. The Company continue to pursue the acquisition of information through legitimate means and store and use it in accordance with the principles of business ethics applicable;
3. The Company determined not to tolerate illegal actions, the use of unfair practices and behaviors that are not honest in profit.
4. The personnel of the Company must avoid conflicts of interest and the interests of the Company.

B. Manajemen Risiko

Perseroan menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu Perseroan menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko Perseroan secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perseroan secara terintegrasi dan kontinyu untuk mewujudkan operasional Perseroan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal pada batas toleransi risiko yang ditetapkan. Perseroan berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko, misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara hukum Perseroan terlindungi dari risiko yang tidak perlu PT Brantas Abipraya selalu memantau dan mengkaji risiko secara berkala sehingga diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara signifikan. Namun demikian, Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal.

Perseroan membentuk forum atau tim manajemen risiko yang memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perseroan sebelumnya. Perseroan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dapat menghitung risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

B. Risk Management

The Company aware its operations can not be separated from a variety of risks, both risks are under control and the risks that are beyond the Company's control. Therefore the Company aware of the importance of the Company's risk management in an integrated, optimized and sustainable.

The Company always held the risk control and management of corporate policies in an integrated and continuous operation of the Company to realize the healthy and able to generate optimal profit on risk tolerance limits specified. The Company obliged to identify the possible emergence of risks both external and internal. On the basis of that identification, the Company will make the necessary efforts to minimize the risk, for example by closing the relevant insurance, or a contract to design such that the Company is legally protected from unnecessary risks PT Brantas Abipraya constantly monitor and assess risks periodically so expect these risks can be controlled in a way that does not reduce the value of the Company significantly. However, the Company is also aware of the risks that are beyond the control that can not be eliminated entirely by internal efforts.

The Company form a forum or a team of risk management in decision keputusam give consideration, in order to handle the new job that has not been done by the company previously. The Company have a commitment to transparently reveal the risks that could significantly affect the value of the Company. Thus the parties with an interest in The Company can calculate the relevant risks when doing business transactions with the Company.

Manajemen Risiko di PT Brantas Abipraya antar lain meliputi:

1. Perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang berada di bawah kendali Perseroan maupun risiko yang berada diluar kendali Perseroan;
2. Perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki;
3. Perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam Laporan Tahunan.

C. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan akan memperlakukan pemegang saham secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan, kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

Perseroan melarang pemegang saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mempertegas kemandirian Perseroan sebagai badan hukum yang profesional sehingga dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya.

Perseroan akan berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi

Risk Management in PT Brantas Abipraya among others, include:

1. The Company conducts thorough risk identification with both the risk that is under the control of the Company as well as risks that are beyond the control of the Company;
2. The Company's handling of various risks based on priorities and resources owned;
3. The Company disclose the risks and treatment in the Annual Report.

C. Relations with Shareholders

The Company will treat shareholders fairly in accordance legislation in force. Shareholders who own shares with the same classification will receive equal treatment and be able to exercise their rights in accordance Statutes and regulations are applicable. Each Shareholder is entitled to cast vote according to the classification and the number of shares owned. Each shareholder is entitled to obtain information that is complete and accurate material regarding the Company, except for information which the Directors have a justifiable reason for not giving it.

Shareholders of the Company prohibits interference in the operational activities of the Company are the responsibility of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association and the legislation in force. Including the definition of the intervention is the act or leads directly to influence the management of the Company or the action against the decision Direksi. Ketentuan authority is intended to reinforce the independence of the Company as a legal entity so that it can thrive professionally in accordance with its business objectives.

The Company will strive hard to ensure that the Company experienced continuous growth thereby contributing optimal for shareholders. Determination

Pemegang Saham. Penetapan deviden dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian deviden didasarkan pada kepentingan Perseroan, dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi.

D. Hubungan dengan Pemberi Pekerjaan (Klien)

Perseroan menempatkan Pemberi Pekerjaan (klien) sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja Perseroan. Kebijakan yang dijalankan Perseroan menjamin hubungan kerja sama secara umum dengan Pemilik Pekerjaan dilakukan secara profesional dan memenuhi prinsip kesetaraan. Perseroan menyediakan informasi material yang diperlukan tentang Perseroan secara benar, akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon Pemberi Pekerjaan (klien) dalam berhubungan dengan Perseroan. Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan dan kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) sejak dari perencanaan pekerjaan sampai pekerjaan selesai.

Perseroan melakukan survei kepuasan yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali pada Pemberi Pekerjaan (Klien) pada proyek-proyek yang telah selesai untuk mengetahui kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) dari tahun ke tahun.

E. Sistem Pemasaran

Perseroan melakukan pemasaran secara konsisten dengan program peningkatan kepuasan Pemberi Pekerjaan (klien) dari tahun ke tahun. Perseroan selalu berupaya memberikan alternatif solusi kepada Pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Perseroan memiliki sistem informasi yang tangguh yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan Berbagai informasi pasar dari berbagai sumber daya (departemen/instansi, konsultan,

of dividend made by the Shareholders in the General Meeting of Shareholders. Dividend distribution is based on the interest of the Company, by looking at a variety of things such as business continuity, a strategy that will and are being implemented as well as investment plans.

D. The relationship with the Job Employer (Client)

The Company put the employer (client) as a business partner that will help achieve the Company's performance. A policy which guarantees the Company executed a cooperative relationship in general with the owner Work done professionally and fulfill the principle of equality. The Company provides the necessary material information about the Company is true, accurate and timely information as a basis for decision making for candidate Giving Works (clients) in touch with the Company. Company in conducting its business activities always put the quality of work and job satisfaction Giver (Client) from planning work until the work is completed.

Company conducts satisfaction surveys conducted at least 1 (one) year once the job giver (client) on projects that have been completed to determine the job employer satisfaction (clients) from year to year.

E. Marketing System

The Company do marketing consistently with increased satisfaction Giving Works program (client) from year to year. The Company always working to provide alternative solutions to customers based on the principle of mutual benefit. The Company have a strong information systems that enable decisions accurately and quickly, so the opportunity to obtain various types of jobs or projects that benefit can be done in an integrated manner at the level of the Company's range of market information from various resources (departments/agencies, consultants, relationship individual and others)

hubungan individual dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang saling menguntungkan dapat dilakukan secara teintegrasi pada tingkat Perseroan. PT Brantas Abipraya menyadari bahwa persaingan dalam Jasa Konstruksi cukup tajam dengan banyaknya perusahaan sejenis dan masuknya kontraktor asing akibat globalisasi, maka PT Brantas Abipraya selalu melihat kemampuan perusahaan pesaing dan melihat pertumbuhan usaha dengan membandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Perseroan menghargai prinsip-prinsip persaingan yang sehat dalam aktivitas bisnis.

F. Hubungan dengan Pengguna Akhir

Perseroan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna akhir produk Perseroan. Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan kualitas produknya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 (yang merupakan peningkatan dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:1994 dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:1994), ISO 18001:2007 (OHSAS), SMK3, ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) . Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna, Perseroan melakukan berbagai pendekatan seperti:

1. Perseroan melakukan sertifikasi ISO 9001: 2000 untuk sistem manajemen mutu; ISO 18001:2007 (OHSAS); SMK3; ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan)
2. Perseroan memberikan layanan purna jual yang sesuai.

G. Hubungan dengan Rekanan

Perseroan menjalin kerjasama dengan mitra kerja dilandasi etikat baik dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis, serta mematuhi setiap kesepakatan yang telah di tuangkan dalam kontrak kerjasama. Perseroan bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan didasarkan atas kriteria yang antara lain meliputi:

managed optimally by the Company in obtaining various types of work or projects of mutual benefit teintegrasi can be done at the level of the Company. PT Brantas Abipraya realize that competition in the Construction Services quite sharply with many of its peers and the influx of foreign contractors as a result of globalization, Brantas Abipraya always see the ability of the company's competitors and see the growth of the business by comparing the performance of previous years. PT Brantas Abipraya respect the principles of fair competition in business activity.

F. Relationship with End Users

The Company always strive to provide the best quality service to end users of the Company's products. The Company will always strive to improve the quality of its products, by applying the Quality Management System ISO 9001: 2000 (which is an improvement of the Quality Management System ISO 9001: 1994 and Quality Management System ISO 9002: 1994), ISO 18001: 2007 (OHSAS), SMK3 , ISO 14001: 2004 (Environmental Management System). To provide the best service to users, the Company made various approaches such as:

1. The Company has ISO 9001: 2000 for quality management systems; ISO 18001: 2007 (OHSAS); SMK3; ISO 14001: 2004 (Environmental Management System)
2. The Company provides after-sales service accordingly.

G. Relations with Partner

The Company cooperation with partners based etiket good and mutual benefit are set forth in a written agreement, as well as adhere to any agreement that has been showcased in the contract. The Company act fairly by providing equal opportunity for all partners who have the same qualifications without discrimination. Consideration of employment based on criteria that include the following:

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;
2. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Memiliki catatan perjalanan bisnis yang baik;
4. Tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya;
5. Kerjasama yang saling menguntungkan.

Namun Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai *good corporate citizen* mempunyai komitmen untuk membina rekanan ekonomi lemah untuk berkembang secara bertahap melalui proses kualifikasi yang ditentukan oleh Perseroan.

H. Sistem Pengadaan dan Kontrak Pekerjaan

Perseroan menerapkan proses pengadaan sesuai *good corporate governance* dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, *fairness* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mematuhi etika proses pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung jawab
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Tidak mencampuri tugas dan kewenangan yang diberikan kepada tim pengadaan baik langsung maupun tidak langsung.

Kontrak Pekerjaan antara Perseroan dengan rekaman memuat kesanggupan rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan hak rekanan mendapatkan seluruh haknya berdasar kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam kontrak serta sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing-masing.

1. Having the expertise, experience, ability and managerial taknis in business fields can be evidenced by the qualifications issued by the relevant association;
2. Have the necessary resources in the implementation of the work;
3. It has a good track record;
4. Never make untrue statements about its qualification;
5. Cooperation is mutually beneficial.

However The Company in carrying out its function as a good Corporate citizen is committed to fostering partnerships weak economy to grow gradually through the process of qualification as determined by the Company.

H. System Procurement and Contract Work

The Company apply the procurement process in accordance with good Corporate governance uphold the principles of transparency, cost efficiency, competitiveness, fairness in accordance with the legislation in force. The Company adhere to ethical procurement process in the procurement of goods and services, among others:

1. Carry out the task of procurement of goods and services in an orderly manner and with responsibilities
2. Work professionally, independently on the basis of honesty, as well as maintain the confidentiality of documents procurement of goods and services that should be kept secret in order to prevent the occurrence of irregularities in the procurement of goods and services.
3. Do not interfere with the duties and authority given to the procurement team, either directly or indirectly.

Employment contracts between the Company and the ability to load recordings partner to implement its obligations in accordance with the agreed terms, and the right partners to get all of his rights based on the obligations that have been implemented as agreed in the contract as well as sanctions for non-compliance with their respective obligations.

I. Hubungan dengan Pegawai (Hubungan Industrial)

Pegawai Perseroan terdiri atas Pegawai tetap (KKWT) yang dikelompokkan Tenaga Organik (TO), Tenaga Bulanan (TB) dan Pegawai Tidak Tetap (KKWTT) yang terdiri dari Tenaga Harian (TH) dan Tenaga Honorer (TR). Terhadap klasifikasi pegawai tersebut, Perseroan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Karyawan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan karyawan dibuat secara tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas. Perusahaan mempunyai wewenang dalam menerima, mengangkat, menempatkan dan memberhentikan karyawan serta memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan menerapkan sistem manajemen human assets berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perseroan juga mengakui hak pegawai untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawai yang merupakan aset utama pada Perseroan dengan cara merealisasikan "*Human Asset Development*". Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam Perseroan merupakan hal yang penting. Perseroan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai yang berpedoman pada Budaya Perseroan. Kebijakan Perseroan di bidang kepegawaian, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok Organisasi. Perseroan juga menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar good corporate governance.

I. Relationship with Employees (Industrial Relations)

The Company's employees consists of fixed Employees (KKWT) are grouped Organic Energy (TO), Power Monthly (TB) and Non-Permanent Employees (KKWTT) consisting of Power Daily (TH), and Honorary Power (TR). To the classification of the employee, the Company is committed to treating all employees in accordance with the rights and obligations set out in the legislation in force. The appointment, dismissal, status, rights and obligations of employees is determined based on the collective labor agreement in accordance with the legislation in the field of employment. Contract or agreement between the company and the employees made in writing to indicate the rights and obligations of each party clearly. The Company has the authority to accept, lifting, placing and dismiss employees as well as disciplinary sanctions in accordance with applicable regulations.

The Company implement human assets management system based on the principles of openness, fair, motivating and free of bias due to differences in ethnicity, origin, sex, religion and origin, birth, and things that are not related to performance. The Company also recognizes the right of employees to associate in accordance with statutory provisions in force. The Company always develop and improve the quality of employees is a major asset to the Company by way of realizing "*Human Asset Development*". Therefore, the development and improvement of the quality of human resources in the company is essential. The Company always conduct training and development of employees are guided by the Culture Company. Company policy in the field of personnel, Principal Personnel Rules and Principal Organization Regulations. The Company also ensures that the rules mentioned above in accordance with the standards of good Corporate governance.

Perseroan mempunyai Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang beroperasi diberbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat kondisi pegawai serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, Perseroan tetap menerapkan praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Perseroan menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial antara lain:

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pegawai;
2. Mengusahakan agar remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan perseroan;
4. Meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan pegawai;
6. Memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Menempatkan PKB sebagai komitmen Perseroan
8. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai
9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk itu segenap jajaran Perseroan baik Komisaris, Direksi, dan pegawai akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pegawai sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perseroan. Kewajiban Pegawai terhadap Perseroan antara lain:

The Company has Head Office, Regional Offices and Branch Offices that operate in various areas with religion, culture, traditions, customs employee conditions and local regulations are different. Although sensitive to these differences, The Company continue to apply practices that are based on the principles of Good Corporate Governance.

The Company set some policies regarding employee and labor relations, among others:

1. Restructuring the job so well that motivate and empower employees;
2. Ensuring that the remuneration received by an employee, generally follow the rules as well as the comparable and competitive with similar industries;
3. Provide opportunities for employees to participate in education and training in line with the competencies and needs of the company;
4. Improving discipline in order to comply with the rules and policies that have been established;
5. Apply a fair reward and punishment according achievements or employee error rate;
6. Giving employees the right to organize according to applicable laws and regulations;
7. Placing PKB as the Company's commitment
8. Provide good working conditions and safe for employees
9. Provide full rights consecrated in accordance with prevailing regulations.

The Company realize fully the dynamic changes in the business environment. For that all ranks of the Company good Commissioners, Directors, and employees will always seek to establish partnerships in order to support each other in achieving the goals and progress together. The Company will always strive to improve the quality of management and quality of employees that can work efficiently and effectively.

Employees also have various obligations that must be met for the Company. Employees of the Company's liabilities include:

1. Setiap pegawai wajib mentaati PKB, nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perseroan;
2. Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perseroan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya;
3. Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya;
4. Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perseroan;
5. Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungannya.

J. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai

Perseroan senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Perseroan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu Perseroan akan memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai diusahakan Perseroan dengan cara antara lain:

1. Melaksanakan berbagai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten dalam upaya memberikan perlindungan optimal pada pegawai Perseroan dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pegawai;
2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan K3;
3. Memperoleh beberapa sertifikasi yang berhubungan dengan K3 (SMK-3 untuk beberapa proyek, Zero Accident Award);
4. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

1. Every employee shall obey the PKB, the values of the Company and all regulations issued by The Company;
2. Each employee shall put the interests of the Company that relate directly or indirectly to its responsibilities;
3. Every employee shall mobilize all resources and efforts in implementing the tasks entrusted to her work;
4. Each employee shall maintain the property and good name of the Company;
5. Any employee who became supervisor shall establish and set an example to employees on the environment.

J. Health and Safety Officer

The Company always put safety and health. The Company realizes that managing health and safety is very important for the optimal long-term success. The Company provide a work environment that is safe and healthy. Therefore, the Company will ensure that the business premises and facilities, other facilities and infrastructure company, fulfill the applicable laws and regulations with respect to occupational health and safety.

Health and Safety Officer of the Company cultivated in a way, among others:

1. Implement Management System Occupational Health and Safety (SMK-3) in accordance with applicable regulations consistently in order to provide optimal protection to the employees of the Company of the things that can threaten the safety and health of employees;
2. Striving for continuous improvement on a variety of infrastructure related to the K3;
3. Obtain several certifications related to K3 (SMK-3 for several projects, Zero Accident Award);
4. Include Employee participation as part of an effort to improve the implementation of occupational health and safety.

K. Pengelolaan Lingkungan

Perseroan menjalankan operasinya dengan mematuhi hukum maupun praktik standar industri konstruksi yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian lingkungan. Perseroan selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan. Dalam menjalankan pekerjaan setiap pegawai melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi limbah. Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan.

L. Hubungan dengan Masyarakat

Perseroan sangat menyadari bahwa di manapun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu Perseroan mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Perseroan akan senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain:

1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
2. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perseroan.

M. Keterlibatan dalam Politik

Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik. Perseroan mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu Perseroan tidak memperbolehkan seorangpun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

K. Environmental Management

The Company operations of the Company in compliance with the laws and practices of the construction industry standards and regulations, and policies and environmental management systems standards within the framework of its attention to the protection of the environment. The Company always evaluate policies on the environment. In carrying out the work of each employee to identify, control and avoiding or minimizing the use of materials that have a negative impact on the environment and reduce environmental waste management system will be increased in a sustainable manner.

L. Community Relations

PT Brantas Abipraya very aware that wherever the Company operates always in touch with the surrounding communities that have different characteristics. Therefore The Company have a commitment that the good relations and the development of local communities is a basic foundation for long-term success of the Company.

In relationships and partnerships with surrounding communities, The Company will continue to implement the various principles, among others:

1. Adapt to the development of the noble cultural values of the surrounding community.
2. Participate actively in assisting the development of society as a sense of social responsibility of the Company.

M. Involvement in Politics

The Company has a policy that requires the Commissioners, Directors and Employees that represent the Company in any government and political affairs, to comply with laws and regulations governing the Company's involvement in public affairs. The Company recognize the right of every person to channel their political aspirations in accordance with their beliefs. Therefore, the Company did not let anyone coercing others limiting the rights of the individual concerned to channel their political aspirations.

Perseroan memiliki kebijakan untuk meminta agar pegawai yang aktif dalam politik sebagai pengurus politik dan atau menjadi calon legeslatip salah satu partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari Perseroan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Surat Edaran Kementerian BUMN nomor: SE-15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008.

Perseroan melarang pemberian sumbangan untuk partai politik manapun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Praktik yang diterapkan Perseroan dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik diantaranya menyatakan Perseroan tidak akan memberikan dana, aset atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legeslatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

N. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi

Setiap pihak di dalam Perseroan, yang berkaitan dengan proyek mulai penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian serta penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan (lisan maupun tertulis) yang akurat dan klaim yang benar kepada Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah maupun pihak lain. Adanya kesengajaan dalam menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan Perseroan dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif atau bahkan tuntutan pidana bagi yang terlibat, baik Komisaris, Direksi dan Pegawai maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktik yang dikategorikan dalam Pernyataan Palsu adalah:

1. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok serta merugikan perusahaan;

The Company have a policy to require that an employee who is active in politics as a political organizer and or be a candidate legeslatip one political party in the elections to resign from the company as to which provisions of the legislation in force, in accordance Letter Circular of the Ministry of SOEs numbers: SE-15/MBU/2008 dated July 31, 2008.

The Company prohibit donations to any political party as stipulated by law. Practices applied by The Company in relation to involvement with politics among states Company will not provide the funds, assets or facilities of the Company for the benefit of a political party, a candidate or member legeslatif, executive and judicial unless carried out in accordance with the provisions of applicable legislation.

N. Statement False, False Claims and Conspiracy

Each party in the Company, related to the project began to prepare proposals, negotiation and administration, including accounting for costs and liabilities, assessment and report writing, must realize the importance of making a statement (oral or written) are accurate and true claim to the Board of Directors, Commissioners, Shareholders, Government and other parties. Their intent in delivering statements or claims that are not true or misleading or that involves a conspiracy with others to the detriment of the Company may result in administrative penalties or even criminal charges for those involved, both Commissioners, Directors and employees and other parties in accordance with regulations applicable law. Practices that fall within the False Statement is:

1. An act consciously made to perform engineering events, acts consciously planned to trick certain parties with the purposes of personal benefit as well as harm to the company or group;

2. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses evaluasi, atau audit sehingga menyesatkan/merugikan perusahaan;
3. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadwal kerja yang telah ditetapkan;
4. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memalsukan dokumen dan sertifikat untuk mengambil manfaat pribadi/merugikan perusahaan. Praktik yang dikategorikan dalam Klaim Palsu adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, tagihan rekanan atau sub-kontraktor, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim kepada perusahaan.

Praktik yang dikategorikan dalam Konspirasi adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya merencanakan dan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum dan atau peraturan Perseroan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari perusahaan.

0. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan menjadi good corporate citizen, PT Brantas Abipraya mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu PT Brantas Abipraya akan senantiasa berupaya untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum.

Dalam melaksanakan prinsip tersebut di atas, PT Brantas Abipraya melarang anggota Komisaris,

2. Actions consciously done to make misleading claims and are not actually in the process of evaluation, or audit, thereby misleading | harm to the company;
3. Actions consciously done to make false statements with the intent to commit fraud, for example hides serious technical problems or do not report any delays in work schedules that have been established;
4. Actions consciously done to falsify documents and certificates for personal benefit | harm to the company. Practices are categorized in False Claims act consciously done in an attempt to enter billing or payment request is based on data known to be false. Application of the above criteria, including data relating to shipping documents, billing partner or sub-contractors, and others which are the basis for making a claim to the company.

Practices that fall within Conspiracy is an action that is consciously done in an effort to plan and carry out cooperation or collusion with certain parties to commit fraud, fraud and violations of the laws or regulations of the Company with the intention of taking personal advantage or group of companies.

0. Ethics and Anti-Corruption

In order to realize the company's commitment to be a good Corporate citizen, The Company support the efforts made by all parties in creating a business climate that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN). Therefore The Company will constantly strive to apply business ethics that are based nilai-noble values and business principles that apply in general.

In carrying out the above prinsip, The Company prohibit Commissioners, Directors and employees

Direksi dan Pegawai untuk menerima sesuatu yang berharga baik langsung maupun tidak langsung, yang patut diduga merupakan penyuapan atas tugas / jabatan yang menjadi kewenangannya. PT Brantas Abipraya membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai-nilai etika berusaha.

P. Hubungan dengan Pejabat Negara

Adalah kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif dan wajar (armslength) dan harus dihindari terjadinya penyimpangan. Perlakuan terhadap pejabat negara harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya. PT Brantas Abipraya memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, Komite Audit dan Pegawai mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi. Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik pemberi pekerjaan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus dijaga oleh Perseroan. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa

to accept anything of value, either directly or indirectly, which is reasonably suspected of bribery on tasks / positions of authority. The Company create a guideline of ethical conduct, which contains the values of business ethics.

P. Relationship with State officials

Is the Company's policy to develop and maintain good relationships and effective communication with any state officials who have authority in the field of operation of the Company within the tolerance limits allowed by law. Any contact with government officials must be maintained as a relationship that is both objective and reasonable (armslength) and should be avoided deviation. Treatment of state officials must be done within the law in force, in an ethical manner and not contrary to the legislation in force.

Q. Company Data and Information Confidentiality

Any officer who has the authority must submit the relevant information to cooperate fully with the auditor and the internal auditor and the external auditor in the audit process compliance or other investigation. The Company has a policy to prohibit any member of the Commissioner, members of the Board of Directors, the Internal Auditor, the External Auditor, Audit Committee and Employees disclose confidential information regarding the Company or the Company's customers outside either during the period of employment or thereafter. Given that the disclosure of the confidential information would be detrimental to the Company or its customers and provide benefits to other parties, the disclosure of confidential information in accordance with its requirements provision must go through the approval of the Board of Directors. The company also works with special data belonging to employers, associates and joint venture partners. This is a very important trust and must be maintained by the Company. Therefore, no person may disclose such confidential information to outside parties without

persetujuan Direksi, atau tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali diwajibkan oleh hukum.

R. Keterbukaan Informasi

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Semesteran dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori dan mengambil inisiatif dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan penting bagi pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh PT Brantas Abipraya dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu.

Disamping informasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal dll.), Perseroan juga mengungkapkan berbagai informasi penting dalam Laporan Tahunan meliputi:

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan selama tidak merugikan kepentingan Perseroan;
2. Penilaian Perseroan oleh Komite Audit, Auditor Eksternal, Pencapaian Kesehatan, KPI;
3. Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi, serta gaji dan tunjangan mereka;
4. Jumlah rapat Komisaris dan Direksi beserta tingkat kehadirannya;
5. Sistem pemberian honorarium Auditor Eksternal;
6. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Komisaris, Direksi;
7. Faktor risiko yang material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
8. Informasi material mengenai pegawai dan pihak yang berkepentingan
9. Klaim menyangkut nilai yang material yang diajukan oleh Perseroan atau terhadap Perseroan, serta perkara yang substansial yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan.

persetujuan Directors, or no person may disclose such confidential information to others unless required by law.

R. Disclosure

The Company will disclose the relevant important information in the report to the authorities (Annual Report, Reports Semester and others) in accordance with the legislation in force with timely, accurate, clear and objective. The Company will always strive to spearhead and take the initiative in revealing financial and non-financial information is important for decision-making capital owners, creditors and other interested parties both mandatory disclosure and voluntary. Disclosure of such information, by the Company done through the Annual Report and other media deemed necessary.

Besides the information as required by applicable laws and regulations (balance sheet, profit and loss, cash flows, changes in capital etc.), The Company also mengungkapkan important information in the Annual Report include:

1. The goals, objectives and strategies of the Company's business for not detrimental to the interests of the Company;
2. Assessment of the Company by the Audit Committee, the External Auditor, Achieving Health, IBC;
3. CVs of the Commissioners, the Board of Directors, as well as their salaries and allowances;
4. The number of Commissioners and Directors meetings as well as the level of its presence;
5. The system of the External Auditor honorarium;
6. Payroll system and allowance for members of Commissioners, Board of Directors;
7. The material risk factors that can be anticipated, including management's assessment on business climate and risk factors;
8. Material information regarding employees and stakeholders
9. Claims regarding the value of the materials submitted by the Company or to the Company, as well as the substantial matter in judicial or arbitration body involving the Company.

10. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan atau yang sedang berlangsung; dan
11. Pelaksanaan good corporate governance.

S. Penyelewengan

Perseroan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan.

Menurut Perseroan yang termasuk dengan penyelewengan adalah:

1. Ketidakhujuran;
2. Penggelapan;
3. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perseroan;
4. Penyalahgunaan asset yang dimiliki oleh Perseroan, Pegawai, Mitra Usaha atau Rekanan;
5. Pengalihan kas, surat berharga atau asset Perseroan lain untuk penggunaan pribadi;
6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perseroan.

T. Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi

Perseroan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap Panduan ini. Perseroan membentuk Tim yang diketuai oleh Sekretaris Korporat yang bertanggungjawab terhadap program sosialisasi, implementasi dan evaluasi Panduan Good Corporate Governance.

U. Pelaporan Pelanggaran Panduan Good Corporate Governance

Setiap anggota Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Panduan Good Corporate Governance ini kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat. Tim sebagai mana disebut butir T di atas akan menindaklanjuti informasi

10. Conflicts of interest that might occur and | or ongoing; and
11. The implementation of good Corporate governance.

S. Fraud

The Company established a policy to prohibit any form of fraud and constantly implement procedures to be followed with regard to the findings, recognition, reporting, inquiry and investigation on suspicion of fraud.

According to the Company, including the misappropriation are:

1. Dishonesty;
2. Embezzlement;
3. Forgery or alteration of the Company's securities such as checks;
4. Any use of assets owned by the Company, Employee, Business Partner or Partner;
5. The transfer of cash, securities or other Company assets for personal use;
6. Handling and reporting of transactions that do not fit the Company's procedures and regulations;
7. Forgery of the accounting records or financial statements of the Company for personal gain or other adverse interests of the Company.

T. Dissemination, Implementation and Evaluation

Company information dissemination, implementation and evaluation of this guide. The Company formed a team headed by the Corporate Secretary responsible for the socialization program, implementation and evaluation of Good Corporate Governance Guide.

U. Reporting Violations Guide of Good Corporate Governance

Each member of the Board of Commissioners, Board of Directors, the existing Committees and Employees may submit reports regarding alleged violations of good Corporate governance to the Company in person, by mail. Where the team as referred to above point T will follow up on the information this code

pelanggaran kode ini. Tim tersebut akan menyediakan Kotak Pengaduan untuk keperluan tersebut.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

1. Secara Umum, pada prinsipnya semua Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak-lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan.
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran Panduan Good Corporate Governance ini. Dalam hal ini pengungkapan hal tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.
4. Tim tersebut akan berpegang teguh pada azas praduga tak bersalah.
5. Kerahasiaan tetap dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:
 - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah,
 - b. Sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan Panduan Good Corporate Governance ini,
 - c. Diperlukan oleh Bagian Hukum untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan Hukum.

Kotak Panduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.

violations. The team will provide Complaint Box for that purpose.

Some important things to note:

1. In general, in principle, all Rapporteur must reveal his identity clear.
2. The use of unmarked letter (anonymous letter) will be treated merely as an initial information where follow-up depends on the confidence level for the correctness of substance Tim problems reported.
3. No punishment meted out to the complainant when the breach does occur, except if the person concerned is also involved in the offense's Guide of Good Corporate Governance. In this case the disclosure it may constitute a mitigating factor. If the violation did take place and the complainant was not involved in it, then the complainant will be given the appropriate award.
4. The team will hold fast to the principle of presumption of innocence.
5. Confidentiality is maintained unless disclosure is:
 - a. Required in connection with reports or investigations conducted by the Government,
 - b. In line with the interests of the Company and in line with the objectives of this Guide of Good Corporate Governance,
 - c. Required by the Law Department to maintain its position in front of the law.

Grid Guide is not intended as a mechanism for delivering personal grievances.



PLTMH NDUNGA

Terletak di Nusa Tenggara Timur. Proyek ini mulai dikerjakan pada 17 November 2009 dan selesai pada 30 September 2013.

Located in East Nusa Tenggara. Began working on November 17, 2009 and completed on September 30, 2013





TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan oleh Perseroan didasari oleh tiga prinsip yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines*, atau dikenal dengan 3P (*People, Profit, Planet*) yaitu Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) agar keberadaan Perseroan dapat tumbuh dan berkelanjutan.

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) which is applied by the Company is based on three principles known as the Triple Bottom Lines, or known as 3P (People, Profit, Planet) that realize the company concern which set aside some of their profits (*profit*) for the benefit of human development (*people*) and the environment (*planet*) so that the existence of the Company can grow and sustainable.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan oleh Brantas Abipraya didasari oleh tiga prinsip yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, atau dikenal dengan 3P (*People, Profit, Planet*) yaitu Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (planet) agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan.

- Merupakan suatu konsep bahwa organisasi Brantas Abipraya memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.
- Memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.

Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka menjalin kemitraan dan membina lingkungan. Kementerian telah memberikan arahan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang pada intinya bertujuan untuk memandu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN. Brantas Abipraya telah mengembangkan PKBL menjadi Program Kemitraan dengan bantuan Pinjaman Modal Kerja, Hibah dan Biaya Operasional, serta Program Bina Lingkungan.

Landasan hukum mengenai kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan diatur oleh kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No: PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.

Sumber Dana

Dalam pencatatan sesuai hasil laporan keuangan unit PKBL tahun 2014 jumlah sumber dana program kemitraan sebesar Rp879,63 juta dan penyalurannya adalah sebesar Rp825,00 juta sehingga dari proporsi dana tersebut, penyerapan alokasinya mencapai 94%.

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) which is applied by the Brantas Abipraya based on three principles known as the Triple Bottom Lines, known as 3P (*People, Profit, Planet*) that concern the company which set aside some of their profits (profit) for the benefit of human development (people) and the environment (planet) so that the existence of the company can grow and sustainable.

- It is a concept that Abipraya Brantas organization has a social responsibility to shareholders, employees, consumers, communities and the environment in all aspects of company operations.
- To contribute to the economic development of the local community or society at large, along with an increase in the living standards of workers and the whole family.

Companies implement Corporate social responsibility in order to establish partnerships and foster the environment. The Ministry has provided direction Partnership Program and Community Development (CSR), which essentially aimed to guide the implementation of Corporate social responsibility SOE. Abipraya Brantas CSR has developed into a Partnership Program with the help of Working Capital Loans, Grants and Operating Costs, and Community Development Program.

The legal basis of the activities related to Corporate social responsibility policies set by the government through the Decree of the Minister of State Enterprises No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013.

Source of Funds

In accordance with recorded unit PKBL financial results in 2014 the total resource of partnership program amounted to IDR879.63 million with total distribution of IDR825.00 million so that the proportion of these funds, the absorption of allocations reached 94%.

Realisasi Program Kemitraan

Perseroan peduli pada perekonomian masyarakat kecil yang terwujud dalam usaha kecil dan menengah. Perseroan telah melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap usaha-usaha kecil dengan memberikan bimbingan usaha serta permodalan. Dalam pelaksanaannya, perseroan juga memonitor dengan mewajibkan bagi usaha binaannya untuk membuat pelaporan keuangan secara terperinci.

Alokasi dana tersebut didistribusi ke beberapa sektor yaitu: Perdagangan Rp50.000.000 dengan jumlah mitra binaan 8, Jasa Rp625.000.000 dengan mitra binaan, dan sektor usaha lainnya Rp150.000.000 dengan jumlah mitra binaan 5.

Penyebaran alokasi dana kemitraan ke beberapa wilayah sebagai berikut:

DKI Jakarta, 10 mitra binaan, Rp575 juta
Jawa Timur, 3 mitra binaan, Rp200 juta
Jawa Barat, 1 mitra binaan, Rp50 juta

Partnership Program Realization

The Company cares about the economy of small communities which manifested itself in small and medium enterprises. The Company has made steps towards fostering small businesses by providing business guidance and capital. In doing so, the company also monitors for businesses by requiring surrogate to make financial reporting in detail.

The allocation of these funds in the distribution to several sectors: trade IDR50,000,000 the number of trained partners 8, Services IDR625 million to the partners, and other business sectors IDR150,000,000 with the number of trained partners 5.

The spread of the partnership fund allocation to several areas as follows:

Jakarta, 10 trained partners, USD 575 million
East Java, three trained partners, USD 200 million
West Java, one trained partners, IDR50 million





Realisasi Program Kemasyarakatan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, Perusahaan, bekerja sama dengan PMI telah menyelenggarakan donor darah di lingkungan perusahaan pada tanggal 4 November 2014. Program donor darah ini juga mengundang para tamu yang pada saat kegiatan tersebut berada di lokasi. Acara tersebut di Kegiatan donor darah ini berhasil mengumpulkan 80 kantong darah untuk disumbangkan kepada masyarakat melalui PMI.

Disamping itu, Perusahaan juga telah menyelenggarakan Sunatan Masal di lokasi Kantor Pusat tanggal 21 Desember 2014 dan di Malang. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan secara langsung dan nyata bentuk kepedulian Perusahaan dengan masyarakat sekitar. Sumber dananya diambil dari dana bina lingkungan sebesar Rp297.165.190.

Community Program Realization

As a form of concern for humanity, the Company, in cooperation with the Red Cross has organized blood donation in the company on November 4, 2014. The blood donor program also invites guests during the activity at the scene. The event at the blood donation activity was able to collect 80 bags of blood to be donated to the community through PMI.

In addition, the Company also has organized a Mass Circumcision in Headquarters dated December 21, 2014 and in Malang. The aim of this activity so that people can feel the direct and tangible form of caring Company with the surrounding community. Source of funds drawn from community development funds amounting to IDR297,165,190.



Perseroan juga memperhatikan aspek kerohanian masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan pun memprogram dan merealisasikan dalam bentuk dana sumbangan pembangunan tempat-tempat ibadah. Di Tahun 2014 ini, Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar Rp69.613.275. Sedangkan realisasi penyebaran penyaluran dana bina lingkungan adalah ke wilayah DKI Jakarta, Rp348.353.465, Jawa Timur Rp317.425.000, Jawa Tengah Rp57.000.000, Jawa Barat Rp198.000.000, Sumatera Utara Rp6.500.000

The Company also pay attention to the spiritual aspects of society. Therefore, the Company was reprogrammed and realize in the form of donations, the construction of places of worship. In 2014, the Company has allocated IDR69,613,275. Whereas the actual spread of the distribution of funds for environmental development is to the area of Jakarta, IDR348 353 465, USD 317 425 000 East Java, Central Java, IDR57 million, IDR198 million West Java, North Sumatra IDR6,500,000





SUMBERDAYA MANUSIA

Human Resources

Perseroan terus menerus melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung perkembangan/pertumbuhan perusahaan dalam menjawab tantangan persaingan global. Kualitas mutu pelayanan menjadi hal utama yang mendasari perencanaan pengembangan dan pelatihan karyawan di seluruh lini. Dalam pengelolaan SDM sebagai aset, Perseroan menerapkan standar penilaian pegawai yang diatur dalam prosedur yang telah dibakukan dengan SK Direksi.

The Company dedicated to continuous improvement of human resources to support the development/growth of the company in responding to the challenges of global competition. Quality of service quality becomes a major underlying development planning and training of employees in the entire line. In human resource management as an asset, the Company implements employee assessment standards set out in the procedures that have been standardized by the decree of Directors.

PROFIL SUMBERDAYA MANUSIA

Profile Human Resources

Peraturan Kerja Bersama (PKB) Perseroan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 72/PHIJSK-PKKAD/PKB/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Braya, yang mana mengatur mengenai hak dan kewajiban pihak Perseroan dan pihak karyawan dengan tujuan untuk memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis antara karyawan dengan Perseroan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan usaha Perseroan. PKB tersebut mulai berlaku terhitung sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 9 Maret 2012. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa:

- (1) PKB mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam PKB tersebut.
- (2) PKB yang ditandatangani oleh pihak yang membuat PKB selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Perseroan telah mendaftarkan PKB Perseroan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana termuat dalam Tanda Terima tanggal 3 Februari 2015, mengingat PKB tersebut telah berakhir jangka waktunya.

Profil Karyawan

Demografi karyawan Perseroan yang dicatat dalam 4 tahun terakhir hingga tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

The Company's Work Regulations (CLA) has been approved by the Director General of Industrial Relations Labor And Social Security as set out in the Decree of the Director General of Industrial Relations Labor and Social Security No. Kep. 72/PHIJSK-PKKAD/PKB/V/2010 dated May 31, 2010 between the Company and Braya Workers Union, which regulates the rights and obligations of the Company and the employees with the aim of maintaining a good working relationship and harmony between employees and the Company's business together to improve the welfare of employees and the continuity of the Company's business. The Agreement shall take effect as from March 10, 2010 until March 9, 2012. Under the provisions of Article 132 of Law No. 13 of 2003 on Labour, determined that:

- (1) The Agreement shall enter into force on the day penandatanganan unless otherwise provided in the Agreement.
- (2) Agreement signed by the party making the next CBA registered by employers on the responsible agency in the field of employment.

The Company has registered the Company PKB at Dept. of Manpower and Transmigration East Jakarta Municipality, as contained in the Receipt dated February 3, 2015, considering the CLA has expired.

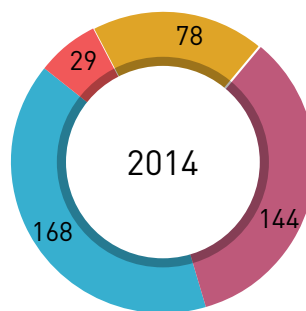
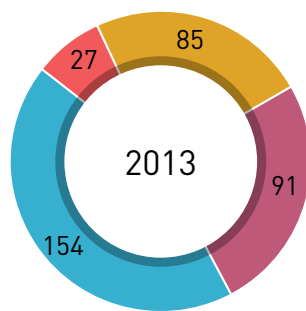
Employee Profiles

The employee demographics of the Company are recorded in the last 4 years up to the date of December 31, 2014 are as follows:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Composition of Employee Based on Position

Tingkat Jabatan	2013	2014	Levels
General/Senior Manager	27	29	General Manager
Manager	85	78	Manager
Supervisor	91	144	Supervisor
Staf	154	168	Staf
Jumlah	357	419	Total

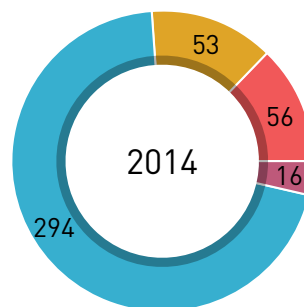
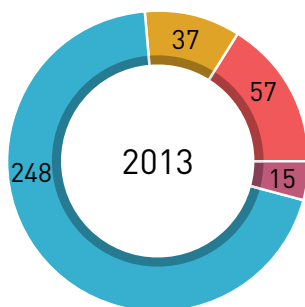


- General Manager
- Supervisor
- Manager
- Staff

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Employee Composition Based on Education

Tingkatan	2013	2014	Levels
Pasca Sarjana	15	16	Strata 2 & 3
Sarjana	248	294	Strata 1
Diploma	37	56	Diploma 3
SLTA	57	53	Senior High School
Jumlah	357	419	Total



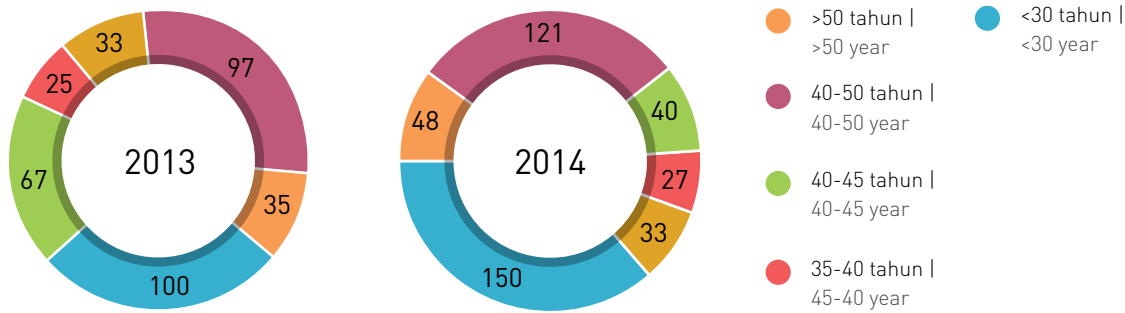
- Pasca Sarjana Master Degree
- Diploma
- Sarjana Bachelor
- SLTA Senior Highschool

Menurut Jenjang Usia

According to Study Age

Keterangan	2011	2012	2013	2014	Information
> 50 tahun	46	44	35	48	> 50 year
45 - 50 tahun	91	95	97	121	45 - 50
40 - 45 tahun	62	65	67	40	40 - 45 year
35 - 40 tahun	23	24	25	27	35 - 40 year
30 - 35 tahun	26	30	33	33	30 - 35 year
< 30 tahun	46	64	100	150	< 30 year
Jumlah	294	322	357	419	Total

Menurut jenjang usia | According to Study Age



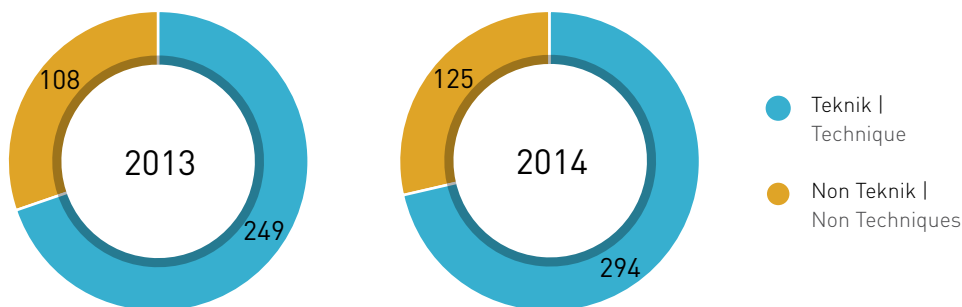
Menurut Status Kompetensi

According to Study Age

Keterangan	2013	2014	Information
Teknik	249	294	Technique
Non Teknik	108	125	Non Techniques
Jumlah	357	419	Total

Catatan: Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
 Note: Employees of Engineering is an employee whose educational background is engineering, such as civil engineering, architecture or machine.

Menurut Status Kompetensi | According to Study Age



Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

Non technique employee is an employee whose educational background is non-engineering for example management, legal, accounting, or K3LM.

Menurut Status Kontrak

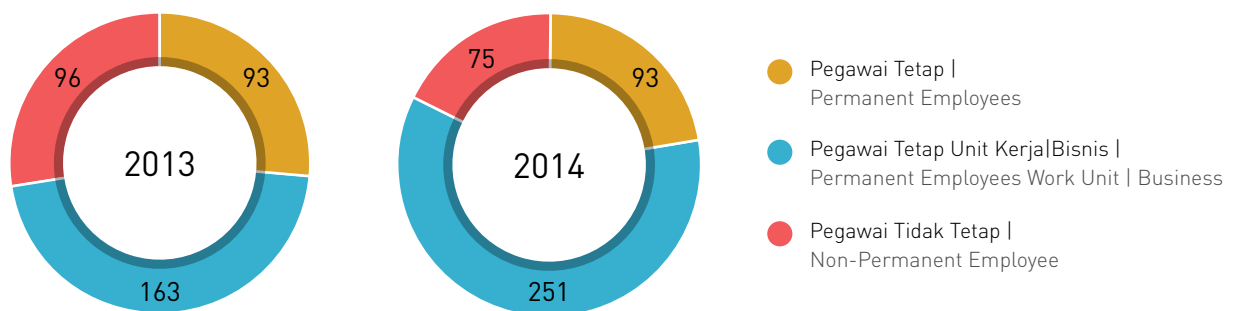
According to the Contract Status

Keterangan	2011	2012	2013	2014	Information
Pegawai Tetap	108	93	93	93	Permanent Employee
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	111	122	163	251	Keep Employees Working Unit / Business
Pegawai Tidak Tetap	75	107	96	75	Temporary Employees
Jumlah	294	322	357	419	Total

Catatan: Pegawai Tetap (PT), adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat. Sedangkan Pegawai Tetap Unit (PTU), adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

Note: Permanently (PT), is an employee who is appointed and dismissed by the Board of Directors, the management and coaching are directly carried out by the Head Office. While Permanently Unit (PTU), is an employee who is appointed and dismissed by the Head of Business Unit, which is managing and coaching is done directly by the Business Unit.

Menurut Status Kontrak | According to the Contract Status



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat dimasa mendatang.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi, meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan profesionalisme kerja serta membangun sikap mental positif dan mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan,

Human Resource Development

One of the Company's assets are valuable human resources (HR), therefore the Company will realize the strategic position of human resources in the face of increasing competition in the future.

To improve the competence of the human resources in a sustainable manner, the Company has made various efforts through education, training and development. The materials given aims to improve the productivity and quality of the organization, improving leadership skills and professionalism of the work as well as build a positive mental attitude and develop a personal intellectual power. In general education, training and

pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan "technical and behavioral competencies".

1. Pendidikan

Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan bergelar (S1, S2 dan S3) didalam negeri maupun luar negeri dengan beasiswa dari Perseroan maupun biaya sendiri. Selama tahun 2014 Perseroan telah mengirimkan 11 orang pegawai untuk menyelesaikan program pendidikan bergelar (S2) didalam negeri dan luar negeri.

2. Sertifikasi

Merupakan proses standarisasi kompetensi secara profesional untuk para pegawai dibidangnya masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Perseroan (sertifikasi internal) dan Organisasi Profesi Non Pemerintah (sertifikasi external). Sertifikasi internal yang dilakukan Perseroan untuk tahun 2014 dilakukan untuk bidang-bidang keuangan, proyek dan pelaksana. Sedangkan sertifikasi external diikuti sebanyak 125 pegawai untuk perpanjangan dan pembuatan baru 12 jenis Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Keterampilan yang dikeluarkan oleh: HAMKI, HAKI, HATTI, HATHI, KNIBB, K3 KONSTRUKSI, ISI, BNSP, AKLI, HPJI dan lain-lain.

3. Pelatihan

Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Pelatihan-pelatihan tersebut terdiri dari: orientasi pegawai,

Project Management Body of Knowledge, manajemen Konstruksi, Micro Soft Project, Value Engineering, Construction Drawing, Scaffolding, Power Plant, Power Plant Construction, Pipeline construction, Prosedur-prosedur Perseroan, Human Capital Management, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan, PSAK 50 & 55, Pajak, FIDIC, Construction Contract Management, Financial Management, Contractor Risk Management, Lead Auditor, ISO 9001:2008;

development of the Company conducted aims to improve "technical and behavioral competencies".

1. Education

A learning activity to improve the competence of employees through education degree (S1, S2 and S3) in the country and abroad with a scholarship from the Company as well as its own costs. During 2014 the Company has sent 11 employees to complete the education program degree (S2) in the country and abroad.

2. Certification

A process of standardization of professional competence for employees in their respective fields which are managed and supervised by the Company (internal certification) and Non-Governmental Professional Organization (external certification). Internal certification conducted by the Company for the year 2014 carried out for the fields of finance, and project implementers. While the external certification was attended by 125 employees to the new extension and manufacture of 12 types of Expertise and Certification of Skills Certification issued by: HAMKI, IPR, Hatti, Hathhi, Knibb, K3 CONSTRUCTION, ISI, BNSP, AKLI, HPJI and others.

3. Training

A series of activities designed to improve the competence of employees to be able to carry out its responsibilities in accordance competencies required. The trainings consist of: employee orientation,

Project Management Body of Knowledge, construction management, Micro Soft Project, Value Engineering, Construction Drawing, Scaffolding, Power Plant, Power Plant Construction, Pipeline construction, procedures of the Company, Human Capital Management, Occupational Health and Safety, Environment, Quality and Security, IAS 50 & 55, Tax, FIDIC, Construction Contract Management, Financial Management, Risk Management Contractor, Lead Auditor, ISO 9001: 2008; ISO

ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, Effectice Supervisory

Management, Coaching and Counseling, Treasury Management, Good Corporate Governance, Pasar Modal, Negotiation Skill, Marketing Plan for Sustainable Competitive, Comprehensive Enterprise Risk Management, Company Strategic Planning, Business Strategic, Customer Relationship Management, Effective Presentation. Pada tahun 2014 telah diselenggarakan 8 jenis pelatihan bidang teknik, 17 jenis pelatihan bidang non teknik dan 3 kali program pengembangan kepemimpinan untuk berbagai jenjang jabatan dengan total jumlah peserta sebanyak 245 orang.

Berikut ini adalah program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh SDM bekerjasama dengan unit-unit terkait dan data jumlah peserta training di tahun 2014:

14001: 2004; OHSAS 18001: 2007, Procurement Management, Supervisory Effectice

Management, Coaching and Counseling, Treasury Management, Good Corporate Governance, Capital Markets, Negotiation Skills, Marketing Plan for Sustainable Competitive, Comprehensive Enterprise Risk Management, Company Strategic Planning, Strategic Business, Customer Relationship Management, Effective Presentation. In 2014 has held eight types of training in engineering, 17 types of training non-technical fields and three times a leadership development program for various hierarchy with the total number of participants as many as 245 people.

Here is a training program organized by the HR in cooperation with related units and data on the number of participants training in 2014:

Jenis Pelatihan Type of Training	Judul Pelatihan Title Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Anggaran Budget
Pelatihan Intern 	Training Intern	100	235,000,000
1	Pelatihan Manajemen K3L & OSHAS K3L & OSHAS Management Training	30	
2	Pelatihan Manajemen Resiko Risk Management Training	30	
3	Pelatihan Manajemen Kontrak & Klaim Training Contracts & Claims Management	30	
4	Pelatihan Lainnya Other training	10	
Diklat Untuk Pengembangan 	Training for Development	192	1,233,500,000
1	Development Center For CEO	10	
2	Executive Development Program	32	
3	Supervisory Management	15	
4	Leadership For Middle Manager	15	
5	Achiement Orientation	50	
6	Business Presentation Skill	5	
7	Effective Leadership	20	
8	Problem Solving and Decision Making	15	
9	Effective Business Communication	15	
10	Pelatihan Lainnya Other training	15	
Diklat untuk Peningkatan Kompetensi 	Training for Competence Enhancement	219	801,300,000
1	Succesful Project Management (PMBOK)	25	
2	FINON	25	

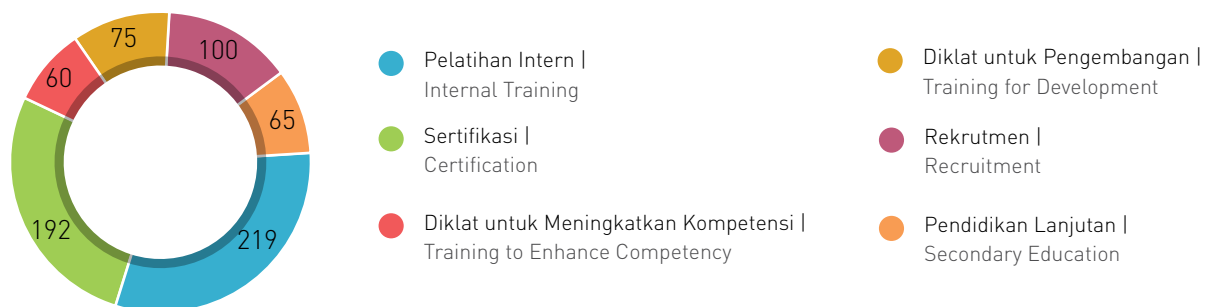
Jenis Pelatihan Type of Training	Judul Pelatihan Title Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Anggaran Budget
3	Budgeting	3	
4	Financial Analysis fo Strategi Business	5	
5	Heavy Equipment Management	5	
6	Audit Operasional Audit Operations	1	
7	Komunikasi & Psikologi Audit Communications & Psychology Audit	1	
8	Risk Based Audit	1	
9	Perpajakan Taxation	2	
10	Audit Internal Internal Audit	1	
11	Audit SMK2L	3	
12	Pelatihan Tanggap Darurat Emergency Response Training	10	
13	Quality Control For Civil Work	15	
14	Managing People: Personality Perspective	15	
15	Coaching, Counselling And Monitoring	15	
16	Negotiation Skill in Business	10	
17	Integrated Marketing Communication	5	
18	Operation Strategy For Business Competitiveness	5	
19	Supply Chain Management	3	
20	Strategic Business Analysis	6	
21	Innovative Marteking Strategy	5	
22	Financial Statement Analysis	5	
23	Management For Professional Secretary	3	
24	Human Resources Management	3	
25	Talent Management	3	
26	Marketing Plan For Sustainable Cempetitive Advantage	5	
27	Marketing Channel Management	5	
28	Managing Organization Change	5	
29	Corporate Parenting	5	
30	Treasury Management	3	
31	Integrated Risk Management	3	
32	Introducing to Value Investing	3	
33	Pelatihan Lainnya Other training	15	
Pendidikan Lanjutan Secondary Education		75	3,300,000,000
1	Program Magister Dalam Negeri Master Program of Domestic	32	
2	Program Magister Luar Negeri Overseas Program Master	3	
3	Pendidikan Pra Purnabakti Education Pre-Retirement	40	
4	Pendidikan Sarjana Degree Education	11	

Jenis Pelatihan Type of Training	Judul Pelatihan Title Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Anggaran Budget
Rekrutmen Recruitment		60	1,455,000,000
1	Rekrutmen Pegawai S1 (45 Orang) Employee Recruitment S1 (45 people)	45	
2	Rekrutmen Pegawai D3 (10 ORANG) Employee recruitment D3 (10 PEOPLE)	15	
Sertifikat Certificate		65	260,000,000
1	Sertifikasi Bendungan Besar Certification of Large Dams	10	
2	Sertifikasi Pelaksana SDA Implementing SDA certification	10	
3	Sertifikasi Pelaksana Jalan Implementing Certification Path	10	
4	Sertifikasi Pelaksana Jembatan Implementing Bridge Certification	10	
5	Sertifikasi K3 Konstruksi Certification K3 Construction	10	
6	Sertifikasi Bangunan Gedung Building Certification	5	
7	Sertifikasi Quality Surveyor Certification Quality Surveyor	5	
8	Sertifikasi Lainnya Other Certification	5	
Total Biaya Training Total Cost of Training			7,284,800,000
Total Peserta Training Participants Total Training			711

Untuk menjawab tantangan global dan kesiapan menghadapi initial public offering, Perusahaan menitikberatkan pada peningkatan keahlian, hal ini dituangkan pada program pelatihan yang memberikan peningkatan keahlian atau kompetensi.

To answer the global and preparedness tantangan public initial offering, the Company focused on improving skills, it is poured on a training program which provides enhanced skills or competencies.

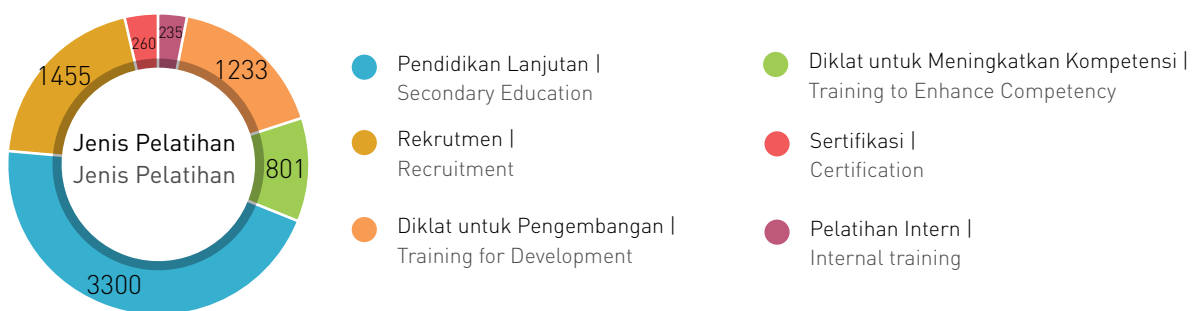
Jumlah Peserta | Number of Participants



Dari segi anggaran, prosentase biaya terbesar ada pada training pendidikan lanjutan. Hal tersebut disebabkan biaya training untuk tingkat lanjutan memang besar. Namun, unit SDM menyadari bahwa untuk memenuhi tuntutan bisnis di era global ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembagian prosentasi besarnya anggaran bisa dilihat pada graphic pie di bawah ini:

In terms of budget, the largest percentage of the cost is in further education training. This is due to the cost of training for advanced level is great. However, be aware that the HR unit to meet the demands of this global era Business needed quality human resources. The percentage distribution of the magnitude of the budget pie can be seen on the graphic below:

Anggaran (dalam juta) | Budget (in million)



4. Pengembangan

Merupakan rangkaian program pembelajaran bagi pertumbuhan individu untuk membantu pegawai tumbuh dan berkembang sehingga organisasi selalu siap dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi dan pandangan-pandangan yang baru dalam mempersiapkan pegawai pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya. Program pengembangan yang dilakukan Perseroan meliputi Leadership Development Program for Superintendent, Project manager, Junior manager, Middle Manager and Directorship program. Materi didalam pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan kepada para peserta mengenai praktek-praktek kepemimpinan. Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai seorang pemimpin yang efektif.

Pada tahun 2014, jumlah pegawai yang mengikuti program ini sebanyak 35 orang.

4. Development

Is a series of learning programs for individual growth to help employees grow and develop so that the organization is always ready in a competitive business environment. Learning is done by providing insights, technologies and new perspectives in preparing employees in positions that will be projected on him. Development programs conducted by the Company include the Leadership Development Program for Superintendent, Project Manager, Junior Manager, Middle Manager and Directorship program. The material in this training aims to improve the skills of the participants about leadership practices. With this training, the participants are expected to be able to demonstrate attitudes and behaviors as an effective leader.

In 2014, the number of employees who participated in this program as many as 35 people.

Program Management Trainee

Kemajuan organisasi Perseroan semakin hari semakin meningkat, hal ini tentu saja perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dalam jumlah yang memadai. Sejak tahun 2008, Perseroan telah memulai program Management Trainee (MT) yang diselenggarakan secara terpusat dan dikoordinasikan oleh Departemen SDM, Sistem dan Teknologi Informasi. Sasaran program MT yaitu tersedianya pegawai berkualitas dalam memenuhi kebutuhan perkembangan organisasi serta untuk melanjutkan regenerasi dalam organisasi.

Dalam pelaksanaannya peserta akan menempuh tahapan-tahapan orientasi dan on the job training. Total waktu yang diperlukan dalam orientasi dan *on the job training* adalah 6 bulan. Di tahun 2014 telah direkrut sebanyak 65 pegawai MT.

Serikat Pekerja

Tenaga kerja Perseroan tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Perseroan, yang telah didaftarkan sebagaimana ternyata dalam Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur dengan No. 557/IV/SP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 dan telah ditandatangani tanggal 10 Maret 2010. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki pembatasan atas tenaga kerja asing.

Dengan semakin meningkatnya kualitas pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produktivitas Perseroan. Perseroan senantiasa menempatkan SDM sebagai faktor utama dalam menggerakkan organisasi, oleh karena itu berbagai macam kegiatan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan telah dilaksanakan dalam upaya menjaga dan meningkatkan semangat serta motivasi yang tinggi.

Disamping meningkatkan kemampuan pegawai, Perseroan juga melengkapi peralatan kerja yang semakin baik agar dalam melaksanakan tugas-tugas penting organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien, sesuai tuntutan dalam sistem yang diadopsi, yaitu mempergunakan semua sumber daya sesuai dengan peruntukannya dan menjaganya agar dapat memproduksi secara optimal.

Management Trainee Programs

The progress of the Company's organization is increasingly rising, it is of course needs to be balanced with human resources more qualified in adequate amounts. Since 2008, the Company has initiated a program Management Trainee (MT) held by Teeparty and coordinated by the Department of Human Resources, Information Systems and Technology. MT program objectives is the availability of qualified employees to meet the developmental needs of the organization and to continue the regeneration of the organization.

In the execution of the participants will take steps orientation and on the job training. Total time spent in orientation and on the job training is 6 months. In 2014 has recruited as many as 65 employees MT.

Labor Union

The Company's workforce are members of trade unions (SP) which was established by the Statutes and bylaws Union Company, which was registered as evident in the Dept. of Manpower and Transmigration East Jakarta Municipality with No. 557/IV/SP/III/2006 dated March 24, 2006 and was signed on March 10, 2010. As of the publication of this Prospectus, the Company has no restrictions on foreign labor.

With the increasing quality of employees is expected to contribute significantly to the increased productivity of the Company. Company always put the human resources as the main factor dalam menggerakkan organization, therefore, various activities, education, training and development has been conducted in an effort to maintain and improve morale and motivation high.

Besides improving the ability of employees, the Company also completed work better equipment in order to carry out the important tasks the organization can be achieved effectively and efficiently, as demanded by the system adopted, namely the use of all resources according to its purpose and keeping can produce optimally

PENGHARKATAN TERHADAP KARYAWAN

Prestige of Employees

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Perseroan selalu melakukan monitoring dalam penerapan system Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007. Secara internal, system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga telah dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Brantas Abipraya dengan Serikat Pekerja Braya periode tahun 2013 – 2015 Bab XV, Pasal 64 tentang Mutu dan Produktivitas yaitu, "Perusahaan dalam hal ini Manajemen bersama-sama Pegawai akan selalu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan produktivitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Perusahaan." Juga pada Bab XVI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 65 mengenai Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berbunyi,

1. "Perusahaan menyelenggarakan program keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh daerah operasi Perusahaan secara terarah, terorganisasi, dan terencana guna mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan Pegawai serta lingkungan kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. "Pegawai berhak mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. "Setiap Unit Kerja dan Pegawai diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberlakukan Perusahaan."
4. "Dalam rangka pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perusahaan membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas menyusun Peraturan dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sekaligus pengawasan pelaksanaannya."

Dan Pasal 66 mengenai Alat dan Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. "Sesuai dengan sifat pekerjaannya, Perusahaan menyediakan alat dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi Pegawai yang harus dipatuhi penggunaannya selama Pegawai melaksanakan pekerjaannya."

Application of Occupational Safety and Health Management System (SMK3)

Company always monitor the implementation of the Quality Management System Standard ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007. Internally, the system management of occupational safety and health have also been formulated in the Collective Labour Agreement (CLA) between PT Brantas Abipraya with Union Braya year period from 2013 to 2015 Chapter XV, Article 64 of the Quality and Productivity ie, "in this case the Management Company together -Same Employees will always make efforts to improve the quality and productivity in order to enhance the growth of the Company. "Also in Chapter XVI of the Occupational Health and Safety, Article 65 of the Implementation of Occupational Safety and Health, which reads,

1. "The company maintains health and safety programs across the Company's operating area in a focused, organized, and planned to prevent and mitigate the likelihood of accidents and maintain employee health and work environment based on the legislation in force."
2. "Employees are entitled to a periodic health examination facility in accordance legislation in force."
3. "Every Unit of Work and Employees are required to comply with safety regulations and health Corporate imposed."
4. "In order to develop occupational safety and health, the Company formed a Committee for Occupational Safety and Health Guidance Work (P2K3) which develops the Regulation and Occupational Safety and Health Program, as well as supervision of the implementation."

And Article 66 of the Equipment and Supplies Safety and Health at Work, namely:

1. "In accordance with the nature of their work, the Company provides tools and occupational health and safety equipment for the employee who must be obeyed use during employee carrying out his job."

2. "Segala bentuk alat dan perlengkapan keselamatan kerja harus dijaga dan dirawat oleh Pegawai serta hanya digunakan sewaktu bekerja."
3. "Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja sehingga perlu dilakukan penggantian, maka Pegawai wajib menunjukkan alat kerja lama yang rusak kepada petugas yang ditunjuk Perusahaan, untuk mendapatkan penggantian."

Tingkat Kecelakaan Kerja

Perusahaan selalu berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip SMK3 dalam berbagai aspek kegiatannya. SMK3 Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan ini mengatur sistem manajemen Perusahaan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Perseroan selalu melakukan monitoring dalam penerapan system Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007. Secara internal, system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga telah dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Brantas Abipraya dengan Serikat Pekerja Braya periode tahun 2013 - 2015 Bab XV, Pasal 64 tentang Mutu dan Produktivitas.

"Perusahaan dalam hal ini Manajemen bersama-sama Pegawai akan selalu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan produktivitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Perusahaan."

Juga pada Bab XVI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 65 mengenai Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berbunyi,

1. "Perusahaan menyelenggarakan program keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh daerah operasi Perusahaan secara terarah, terorganisasi,

2. "All forms of tools and safety equipment must be maintained and cared for by the employee and is only used at work."
3. "In the event of damage to equipment replacement work that needs to be done, then the employee must indicate the damaged old work tools to the officer appointed by the Company, to get a replacement."

Work Accidents level

The Company is committed to continue to promote the principles SMK3 in various aspects of its activities. SMK3 Company refers to the Regulation of the Minister of Manpower No. 5 of 1996 on the Safety Management System and Occupational Health that have been enhanced by Government Regulation No. 50 of 2012 on Occupational Safety and Health Management System (SMK3). This regulation provides that the Company's management system in order to control the risks associated with work activities in order to create a workplace that is safe, efficient and productive as the prevention of occupational accidents and occupational diseases.

Company always monitor the implementation of the Quality Management System Standard ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007. Internally, the system management of occupational safety and health have also been formulated in the Collective Labour Agreement (CLA) between PT Brantas Abipraya with Union Braya year period from 2013 to 2015 Chapter XV, Article 64 of the Quality and Productivity.

"Companies in this case jointly Management Employees will always make efforts to improve the quality and productivity in order to enhance the Company's growth."

Also in Chapter XVI of the Occupational Health and Safety, Article 65 of the Implementation of Occupational Safety and Health, which reads,

1. "The company maintains health and safety programs across the Company's operating area in a focused, organized, and planned to prevent and

dan terencana guna mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan Pegawai serta lingkungan kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. “Pegawai berhak mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
3. “Setiap Unit Kerja dan Pegawai diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberlakukan Perusahaan.”
4. “Dalam rangka pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perusahaan membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas menyusun Peraturan dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sekaligus pengawasan pelaksanaannya.”

Dan Pasal 66 mengenai Alat dan Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. “Sesuai dengan sifat pekerjaannya, Perusahaan menyediakan alat dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi Pegawai yang harus dipatuhi penggunaannya selama Pegawai melaksanakan pekerjaannya.”
2. “Segala bentuk alat dan perlengkapan keselamatan kerja harus dijaga dan dirawat oleh Pegawai serta hanya digunakan sewaktu bekerja.”
3. “Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja sehingga perlu dilakukan penggantian, maka Pegawai wajib menunjukkan alat kerja lama yang rusak kepada petugas yang ditunjuk Perusahaan, untuk mendapatkan penggantian.”

Biaya Pemeliharaan Kesehatan Karyawan

Kesejahteraan pegawai merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian Perusahaan. Hal ini dilakukan agar pegawai dapat merasa aman dan nyaman dalam bekerja, yang selanjutnya dapat

mitigate the likelihood of accidents and maintain employee health and work environment based on the legislation in force.”

2. “Employees are entitled to a periodic health examination facility in accordance legislation in force.”
3. “Every Unit of Work and Employees are required to comply with safety regulations and health Corporate imposed.”
4. “In order to develop occupational safety and health, the Company formed a Committee for Occupational Safety and Health Guidance Work (P2K3) which develops the Regulation and Occupational Safety and Health Program, as well as supervision of the implementation.”

And Article 66 of the Equipment and Supplies Safety and Health at Work, namely:

1. “In accordance with the nature of their work, the Company provides tools and occupational health and safety equipment for the employee who must be obeyed use during employee carrying out his job.”
2. “All forms of tools and safety equipment must be maintained and cared for by the employee and is only used at work.”
3. “In the event of damage to equipment replacement work that needs to be done, then the employee must indicate the damaged old work tools to the officer appointed by the Company, to get a replacement.”

Employee Health Care Costs

Welfare of employees is one of the important things that concern the Company. This is done so that employees can feel safe and comfortable in the work, which in turn can motivate them to continue to improve the

memotivasi mereka agar terus meningkatkan prestasi dan produktifitas kerja guna mencapai keunggulan kompetitif.

Selain penghasilan bulanan berupa gaji dan tunjangan transportasi, pegawai juga memperoleh berbagai tunjangan lain seperti tunjangan hari raya (THR), tunjangan cuti, dan bantuan uang duka bila pegawai atau keluarganya mengalami musibah meninggal dunia. Bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan berupa fasilitas pegawai PT Brantas Abipraya:

- Program Jaminan Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Program Pensiun
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- Perlengkapan Kerja
- Pakaian Kerja
- Pelayanan Medis dan BPJS kesehatan
- Perlindungan dan bantuan hukum
- Olahraga dan kesenian
- Sumbangan sosial (suka dan duka)
- Makan siang
- Rekreasi
- Kendaraan untuk Eselon I
- Transportasi untuk Eselon II
- Telekomunikasi bagi pejabat

Selama tahun 2014, Perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar Rp1.019,09 miliar untuk biaya rumah sakit pegawai kantor pusat. Selain itu, Perusahaan juga telah mengalokasikan dana untuk klaim kesehatan Rp1.299,16 miliar selama tahun 2014.2013 – 2015 Bab XV, Pasal 64 tentang Mutu dan Produktivitas yaitu:

“Perusahaan dalam hal ini Manajemen bersama-sama Pegawai akan selalu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan produktivitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.”

performance and productivity of work in order to achieve a competitive advantage.

In addition to a monthly income in the form of salaries and transport allowances, employees also received other benefits such as holiday allowance (THR), leave allowance and relief money when an employee or family grief of the unfortunate death. Welfare forms granted to employees in the form of employees of PT Brantas Abipraya facilities:

- Employment Guarantee Programme (BPJS Employment)
- Retirement Program
- Religious holiday allowance
- Work equipment
- Work Uniform
- Medical Services and health BPJS
- Protection and legal assistance
- Sports and arts
- Social Contribution (ups and downs)
- Lunch
- Recreation
- Vehicles for Echelon I
- Transport for Echelon II
- Telecommunications for officials

During 2014, the Company has spent IDR1019.09 billion for the cost of hospital employees of the central office. In addition, the Company has also allocated funds for health claims IDR1299.16 billion during the year 2014.2013 - 2015 Chapter XV, Article 64 of the Quality and Productivity, namely:

“Companies in this case jointly Management Employees will always make efforts to improve the quality and productivity in order to enhance the Company’s growth.”



**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK /
AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDSIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN-TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL /
FOR THE YEARS ENDED**

**31 DESEMBER 2014, 2013 AND 2012 /
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**

DAN / AND

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**



Hadori Sugiarto Adi & Rekan
C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

	<u>HALAMAN /</u> <u>PAGES</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS STATEMENTS' LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
* LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	1 - 2	STATEMENTS OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION *
* LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	3	STATEMENTS OF CONSOLIDATED COMPREHENSIVE *
* LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN	4 - 5	STATEMENTS OF CONSOLIDATED CHANGES IN EQUITY *
* LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	6	STATEMENTS OF CONSOLIDATED CASH FLOWS *
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
* UMUM	7 - 9	GENERAL *
* KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA ENTITAS ANAK	9 - 11	SHARE OWNERSHIP TO SUBSIDIARIES *
* KEBIJAKAN AKUNTANSI	11 - 19	THE ACCOUNTING POLICIES *
* PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	20 - 49	EXPLANATION ITEMS ON CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION *
* PENJELASAN POS-POS LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	49 - 63	EXPLANATION ITEMS CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME *
* TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN BERELASI	63 - 67	TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *
* INFORMASI SEGMENT	68	SEGMENT INFORMATION *
* PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN	68 - 69	SUBSEQUENT EVENT *
* PERIKATAN DAN KONTIJENSI	69	COMMITMENT AND CONTINGENCY *
* PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	69 - 71	RESTATEMENT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS *
* TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	71	MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS *
LAMPIRAN		APPENDIX
* LAPORAN KEUANGAN AUDITED (INDUK PERUSAHAAN SAJA) UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012	LAMPIRAN / APPENDIX 1 - 5	AUDITED FINANCIAL STATEMENTS (HOLDING COMPANY ONLY) FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012 *

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
DIRECTORS STATEMENT



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI / DIRECTORS' STATEMENT LETTER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012/
FOR THE YEARS ENDED ON DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK /
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**

Nama / Name : **Bambang E. Marsono**
Alamat kantor / Office Address : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur
Alamat domisili / sesuai KTP
atau Kartu Identitas Lain /
Domicile address / ID card
or Other Identity Card : Jl. Cipinang Cempedak II No. 17/3 RT. 011 RW 006
Cipinang - Cempedak - Jatinegara - Jakarta Timur
Jabatan / Position : Direktur Utama / Managing Director
Nama / Name : **Sudi Wantoko**
Alamat kantor / Office Address : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur
Alamat domisili / sesuai KTP
atau Kartu Identitas Lain /
Domicile address / ID card
or Other Identity Card : Tirta Akasia No.132 RT 001/014 Kureksari
Waru Sidoarjo- Jawa Timur
Jabatan / Position : Direktur Keuangan & SDM / Director of Finance & Human Resources

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak.
 2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern atas PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak.
- Declare that :
1. Responsible for the preparation and presentation of Consolidated Financial Statements of PT Brantas Abipraya (Persero) and Subsidiaries.
2. Consolidated Financial Statements of PT Brantas Abipraya (Persero) and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia.
3. a. All informations in the Consolidated of PT Brantas Abipraya (Persero) and Subsidiaries financial statements are complete and correct.
b. The financial statements of PT Brantas Abipraya (Persero) and Subsidiaries do not contain material information or facts that are not true, and do not omit material informations and facts.
4. Responsible for the system of internal control within PT Brantas Abipraya (Persero) and Subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made in good faith.

Jakarta, 13 Maret 2015 / March 13, 2015



Bambang E. Marsono
Direktur Utama / Managing Director

Sudi Wantoko
Direktur Keuangan & SDM / Director of Finance
& Human Resources

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Jakarta, 13 Maret 2015
No. 025/LAI-BAP/JKT2/III/15

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth:
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Brantas Abipraya (Persero)

Laporan Auditor Independen

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggungjawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggungjawab Auditor

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Brantas Abipraya (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 28 Februari 2013.

Kantor Cabang Jakarta Dua Nomor Ijin Usaha KAP: KEP-443/KM.1/2009
Jl. Ciledug Raya 36A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, Indonesia
Tel: +62 21 7261212, Fax: +62 21 7261313 email: hlb_jkt2@yahoo.com

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan is a member of  International. A world-wide organization of accounting firms and business advisers

Jakarta, March 13, 2015
No. 025/LAI-BAP/JKT2/III/15

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To:
Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors
PT Brantas Abipraya (Persero)

Independent Auditors' Report

We have audited the accompanying consolidated statements of financial position of PT Brantas Abipraya (Persero) and its Subsidiary as of December 31, 2014 and 2013 as well as the related consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the periods then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility of Consolidated Financial Statements

Responsibility of management for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and on internal control as deemed necessary by management to enable the preparation of financial statements and that are free from material misstatement, whether caused by fraud or error.

The Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and Standards Audit of Financial State established by Financial Audit Board of Republic of Indonesia. Those standards require that we compliance with ethical standards and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement.

Audit reports involve implementation of procedures to obtain audit evidence regarding the numbers and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of risks of material misstatements in the financial statements; whether due to fraud or error. In conducting the risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements of the entity to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of stating an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

We are confident that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Brantas Abipraya (Persero) and its Subsidiary dated December 31, 2014 and December 31, 2013 as well as financial performance and its cash flows for periods ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

Consolidated financial report of the Company on December 31, 2012 for the year ended on that date, were audited by other independent auditor, which expressed unqualified opinions on such financial statements on February 28, 2013.

PT Brantas Abipraya (Persero)
No. 025/LAI-BAP/JKT2/III/15
Halaman 2

Selanjutnya, Perseroan kemudian telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, sebagaimana telah diungkapkan dalam catatan 39 terkait dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan dalam paragraf diatas. Perseroan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang disajikan guna mencerminkan dampak dari penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut. Penerapan ini sesuai dengan ketentuan di dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" manakala terdapat penyajian kembali ataupun reklasifikasi atas pos-pos dalam laporan keuangan.

Kami telah mengaudit penyesuaian-penyesuaian yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 seperti yang telah disebutkan pada paragraf ke delapan di atas dan, menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut wajar serta telah diterapkan dengan semestinya. Namun kami tidak mengadakan perikatan untuk melaksanakan audit, review atau prosedur apapun terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 secara keseluruhan, kecuali atas penyesuaian-penyesuaian yang terkait, sehingga kami tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan yang lain atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah disajikan kembali secara keseluruhan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 010/LAI-BA/JKT2/II/14 tanggal 14 Februari 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan yang prinsip dan material antara laporan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali koreksi akun piutang lain-lain pihak berelasi dan perubahan laporan arus kas pada penerimaan dari pelanggan dengan pembayaran kepada pemasok, sub kontraktor, direksi, karyawan, JO dan pihak ketiga, dan koreksi atas transaksi kepentingan non pengendali sebagaimana dijelaskan dalam catatan 39 atas laporan keuangan.

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendaliannya internalnya. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggungjawab manajemen Perseroan. Tanggungjawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Audit No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, disampaikan secara terpisah kepada manajemen masing-masing dalam laporan kami No. 025A/LK-UU/BAP/JKT2/III/15 dan No. 025B/LK-IC/BAP/JKT2/III/15.

PT Brantas Abipraya (Persero)
No. 025/LAI-BAP/JKT2/III/15
Page 2

Furthermore, the Company has restated its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2013 and 2012, as already disclosed in note 39 related to the representation of the consolidated financial statements as described in the paragraph above. The Company restate the consolidated financial statements for the years ended on December 31, 2013 and 2012 which are presented in order to reflect the impact of the restatement of the consolidated financial statements. The application of these provisions is in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 1 (Revised 2009) regarding "Presentation of Financial Statements" when there is a representation or reclassification of accounts in the financial statements.

We have audited the adjustments applied to the restate consolidated financial statements of the Company for the years ended on December 31, 2012 as stated at eight paragraph above, in our opinion, such adjustments are reasonable and have been applied properly. However, we did not convene the alliance to carry out an audit, review or any procedures against the Company's consolidated financial statements for the years ended on December 31, 2012 as a whole, except for adjustments that are linked, so we are not stating an opinion or other beliefs that shape the consolidated financial statements for the years ended on December 31, 2012 which have been restated as a whole.

Before this report, we have issued independent auditor's report No. 010/LAI-BA/JKT2/II/14 dated February 14, 2014 on consolidated financial statements of PT Brantas Abipraya (Persero) for year ended on December 31, 2013 by unqualified statements. Company has reissued financial statements for years ended December 31, 2013 and 2012 to be adapted to the prevailing capital market regulation. There is no principal and material differences between the last financial statements and the reissued financial statements, except for correction of others receivable related party and changes in the statement of cash flows on receipt from subscribed with payment to suppliers, sub contractors, directors, employee, JO and third party, and correction of non controlling interest transaction as described in note 39 of financial statements.

We also have tested on the Company's compliance with certain laws and regulation and internal control. The compliance with certain laws and regulation and internal controls are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulation and internal controls that we performed where in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Standards of Auditing No. 62 (Section 801) established by the Indonesians Institute of Certified Public Accountant.

The compliance of certain regulation and internal controls, are submitted separately to the management, in our reports No. 025A/LK-UU/BAP/JKT2/III/15 and No. 025B/LK-IC/BAP/JKT2/III/15.



Drs. Jimmy Jansen, Ak.CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0201 / Registered public Accountant Number AP. 0201

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENT

	Catatan / Notes	2014	2013	2012	
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	3c,3f,4	457.460.697.057	441.167.637.947	195.179.346.012	CURRENT ASSETS Cash and cash equivalent
Piutang usaha	3d, 3e,3g,5a,18,35	321.251.158.874	185.535.696.879	129.131.247.423	Account receivable
- Pihak-pihak berelasi					Related parties -
- Pihak ketiga	3e,3g,5b,33	52.763.251.793	28.013.944.681	5.026.100.564	Third party -
Piutang lain-lain - pihak ketiga	3e,3g,6,35	6.459.102.426	1.268.036.460	10.874.165.155	Others receivable - third party
Tagihan bruto kepada pemberi kerja					Gross amount due to employer
- Pihak-pihak berelasi	3d,3e,7a,35	148.975.710.870	53.025.102.486	194.421.124.709	Related parties -
- Pihak ketiga	3e,7b,35	71.172.461.499	21.997.244.130	35.474.430.282	Third party -
Persediaan	3h, 8	39.936.168.845	37.474.611.083	24.201.265.150	Inventories
Uang muka	9	46.440.854.813	29.004.241.037	14.282.579.354	Advance
Beban dibayar dimuka	3m,10	21.252.859.604	19.770.385.689	15.049.295.883	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	3n, 11a	86.968.056.606	30.216.699.650	11.408.534.886	Prepaid taxes
Jaminan	12	775.985.186	10.750.831.648	7.681.578.007	Guarantee
Jumlah Aset Lancar		1.253.456.307.574	858.224.431.689	642.729.667.425	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 154.317.019.460,- Rp 107.636.147.505,-, dan Rp 78.487.691.891,- pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012	3j,13, 17, 23, 30, 31	358.533.221.228	279.591.747.851	263.511.693.278	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 154.317.019.460,- Rp 107.636.147.505,-, and Rp 78.487.691.891,- on December 31, 2014, 2013 and 2012
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.791.022.652,- pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012	3e,3j,3k,14	-	-	-	Others assets - net of accumulated depreciation of Rp 3.791.022.652,- on December 31, 2014, 2013 and 2012
Beban tangguhan	3p,15	24.131.315.433	10.612.371.300	3.733.552.271	Deferred expense
Jumlah Aset Tidak Lancar		382.664.536.661	290.204.119.151	267.245.245.549	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		1.636.120.844.234	1.148.428.550.840	909.974.912.974	TOTAL ASSETS

	Catatan / Notes	2014	2013	2012	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					SHORT TERM LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	3d, 16	897.530.272.932	323.110.037.443	235.288.094.565	Account payable - third party
Utang bank - jatuh tempo satu tahun	17	-	1.345.145.427	55.854.216.551	Bank loan - one year maturity
Utang lain-lain					Others payable
- Pihak-pihak berelasi	3d, 18, 35a	2.040.000.000	-	78.161.100	Related parties -
- Pihak ketiga	18, 35b	32.802.000.000	-	-	Third party -
Utang pajak	3n, 11b	21.855.815.764	7.770.606.510	7.515.762.705	Taxes payable
Uang muka pemberi kerja - jatuh tempo satu tahun	19	49.962.008.498	71.826.728.150	85.401.031.535	Employers advance - one year maturity
Pendapatan diterima dimuka	3i, 20	-	17.274.108.777	6.477.679.344	Unearned revenue
Biaya yang masih harus dibayar	3m, 21	53.111.857.611	42.294.360.791	24.499.783.993	Accrued expense
Utang sewa pembiayaan - jatuh tempo satu tahun	3j, 13, 22	14.386.742.983	17.938.751.264	9.433.066.341	Lease payable - one year maturity
Surat berharga jangka menengah - jatuh tempo satu tahun	23	100.000.000.000	-	-	Medium term securities one year maturity
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		971.688.697.788	481.559.738.362	424.547.796.134	Total Short Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					LONG TERM LIABILITIES
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	3o, 24	9.060.100.002	7.574.832.371	10.968.966.747	Estimated liabilities on employee benefits
Utang non bank	25	101.800.000.000	144.300.000.000	-	Non bank loan
Utang bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	13, 17	44.703.473.678	-	221.090.729.604	Bank loan - net of one year maturity portion
Uang muka pemberi kerja - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	19	96.011.248.681	146.498.269.497	31.235.638.551	Employers advance - net of one year maturity portion
Utang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	3j, 13, 22	38.149.098.134	6.117.482.546	7.597.512.067	Lease payable - net of one year maturity portion
Surat berharga jangka menengah	23	-	75.000.000.000	-	Medium term loan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		289.723.920.495	379.490.584.414	270.892.846.969	Total Long Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1.261.412.618.282	861.050.322.776	695.440.643.103	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham -					Capital stock -
Nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham					Par value of Rp 1.000.000,- per share
Modal dasar - 600.000 lembar saham					Authorized capital - 600.000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 161.555 lembar saham	26	161.555.000.000	161.555.000.000	161.555.000.000	Subscribed and fully paid capital - 161.555 shares
Cadangan					Reverse
Saldo laba					Retained earning
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		372.439.860.295	284.711.472.307	211.792.949.026	Total equity attributable to the holding entity
Kepentingan non pengendali	3b, 27	2.268.365.657	2.666.755.757	2.741.320.845	Non controlling interest
Jumlah Ekuitas		374.708.225.952	287.378.228.064	214.534.269.871	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.636.120.844.234	1.148.428.550.840	909.974.912.974	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See notes to the consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

	Catatan / Notes	2014	2013	2012	
PENDAPATAN USAHA	3i,28	2.280.607.235.482	1.441.255.406.449	923.407.084.230	OPERATING REVENUE
BEBAN LANGSUNG	3m,29	(2.053.888.973.177)	(1.285.793.923.335)	(830.607.255.337)	DIRECT EXPENSES
LABA KOTOR - SEBELUM BAGIAN LABA JOINT OPERATION		226.718.262.305	155.461.483.114	92.799.828.893	GROSS PROFIT - BEFORE PROFIT PART OF JOINT OPERATION
Bagian laba <i>joint operation</i>	3i,30	39.776.397.788	74.171.434.256	79.163.771.888	Profit part of joint operation
LABA KOTOR		266.494.660.093	229.632.917.371	171.963.600.781	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	3m,31				OPERATING EXPENSES
Pegawai		51.529.333.486	41.986.444.976	34.477.233.655	Employee
Umum dan administrasi		22.552.273.574	19.022.398.569	12.961.755.596	General and administration
Penyusutan		2.530.562.347	2.498.757.105	2.550.745.340	Depreciation
Penjualan		4.279.545.722	4.844.548.768	2.299.506.290	Sales
Pengembangan Usaha		-	-	596.181.418	Business development
JUMLAH BEBAN USAHA		80.891.715.129	68.352.149.417	52.885.422.299	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) USAHA		185.602.944.964	161.280.767.953	119.078.178.482	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHERS INCOME (LOSS)
Pendapatan lain-lain	3i,32	19.064.098.059	5.300.954.262	10.845.967.735	Business development
Beban lain-lain	3m,33	(25.952.556.504)	(24.607.750.843)	(17.673.594.798)	Others expense
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		(6.888.458.445)	(19.306.796.681)	(6.827.627.063)	Total Others Income (Expenses)
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN		178.714.486.519	141.973.971.273	112.250.551.419	PROFIT BEFORE INTEREST EXPENSE AND INCOME TAX
Beban bunga	3m,34	(27.584.117.983)	(32.632.812.963)	(39.953.492.170)	Interest income
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		151.130.368.536	109.341.158.310	72.297.059.249	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Pajak final	3n,11c	(60.294.444.648)	(36.557.200.116)	(21.459.618.217)	Final tax
Pajak kini		-	-	-	Current tax
Pajak tangguhan		-	-	-	Deferred tax
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(60.294.444.648)	(36.557.200.116)	(21.459.618.217)	Total Income Tax Expenses
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		90.835.923.888	72.783.958.193	50.837.441.032	CURRENT YEAR COMPREHENSIF INCOME
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		90.835.923.888	72.783.958.193	50.837.441.032	CURRENT YEAR COMPREHENSIF INCOME
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					CURRENT YEAR INCOME ATTRIBUTABLE TO :
Pemilik entitas induk		91.363.010.514	72.604.134.838	50.816.120.301	Holding entity
Kepentingan non pengendali	3b,27	(527.086.626)	179.823.355	21.320.731	Non controlling interest
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		90.835.923.888	72.783.958.193	50.837.441.032	CURRENT YEAR COMPREHENSIF INCOME

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See notes to the consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK / PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 / AS OF DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Modal Saham / Capital Stock	Penyertaan Modal Negara / Stated Capital Participation	Cadangan / Reverse	Saldo Laba / Retained Earning	Jumlah Ekuitas Pemegang Saham / Total of Shareholders Equity	Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak / Non- controlling Interest of Subsidiaries Net Asset	Jumlah Ekuitas / Total Equity
Saldo Per 1 Januari 2012 / Balance on January 1, 2012	10.000.000.000	151.554.480.000	7.585.411.200	(7.642.807.897)	161.497.083.303	520.000.113	162.017.083.416
Setoran modal / Paid in capital	151.555.000.000	-	-	-	151.555.000.000	-	151.555.000.000
Penyertaan modal negara / State capital participation	-	(151.554.480.000)	-	-	(151.554.480.000)	-	(151.554.480.000)
Cadangan / Reverse	-	-	(520.000)	-	(520.000)	-	(520.000)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Environment development and partnersih program	-	-	-	(520.254.578)	(520.254.578)	-	(520.254.578)
Labanya komprehensif tahun 2012 / Comprehensive income in 2012	-	-	-	50.816.120.301	50.816.120.301	21.320.731	50.837.441.032
Kepentingan non pengendali / Non- controlling Interest	-	-	-	-	-	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo 31 Desember 2012 / Balance on December 31, 2012	161.555.000.000	-	7.584.891.200	42.653.057.826	211.792.949.026	2.741.320.844	214.534.269.871
Cadangan / Reverse	-	-	24.726.108.800	(24.726.108.800)	-	-	-
Labanya komprehensif tahun 2013 / Comprehensive income in 2013	-	-	-	72.918.523.281	72.918.523.281	(134.565.088)	72.783.958.193
Kepentingan non pengendali / Non- controlling interest	-	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000
Saldo 31 Desember 2013 / Balance on December 31, 2013	161.555.000.000	-	32.311.000.000	90.845.472.307	284.711.472.308	2.666.755.757	287.378.228.064

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK / PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 / AS OF DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Penyerahan Modal Negara / Stated Capital / Participation	Cadangan / Reverse	Saldo Laba / Retained Earning	Jumlah Ekuitas Pemegang Saham / Total of Shareholders Equity	Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak / Non- controlling Interest of Subsidiaries Net Asset	Jumlah Ekuitas / Total Equity
Pembentukan cadangan	-	69.272.597.281	(69.272.597.281)	-	-	-
Pembayaran deviden / dividend payment	-	-	(3.645.926.000)	(3.645.926.000)	-	(3.645.926.000)
Koreksi saldo laba non pengendali / Correction of non-interest retained earning	-	-	11.303.474	11.303.474	(11.303.474)	-
Labanya komprehensif tahun 2014 / Comprehensive income in 2014	-	-	91.363.010.514	91.363.010.514	(527.086.626)	90.835.923.888
Kepentingan non pengendali / Non- controlling Interest	-	-	-	-	140.000.000	140.000.000
Saldo 31 Desember 2014 / Balance on December 31, 2014	161.555.000.000	101.583.597.281	109.301.263.013	372.439.860.295	2.268.365.657	374.708.225.952

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian /
See notes to the consolidated financial statements which are integral part of these consolidated financial statements

	2014	2013	2012	
Arus Kas dari aktivitas operasi				<i>Cash Flows from Operating Activities</i>
Penerimaan dari pelanggan	1.925.167.189.165	1.703.392.512.501	842.527.828.783	<i>Receipt from customers</i>
Pembayaran kepada :				<i>Payment to :</i>
Pemasok, Subkontraktor, Direksi, Karyawan, JO dan Pihak Ketiga	(1.729.812.553.324)	(1.276.181.070.921)	(753.119.313.333)	<i>Suppliers, sub contractor, Director, employee, Jo and third parties</i>
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	195.354.635.841	425.211.441.580	89.408.515.450	<i>Cash in from operating activities</i>
Bunga deposito dan jasa giro	15.686.267.956	2.039.923.003	1.593.644.256	<i>Time deposit and current services interests</i>
Pembayaran denda pajak	(227.335.399)	-	(35.649.470)	<i>Tax penalty payment</i>
Pembayaran bunga	(27.584.117.983)	(32.632.812.963)	(39.953.492.170)	<i>Interest payment</i>
Pembayaran pajak	(120.459.813.718)	(86.125.696.237)	(17.974.154.973)	<i>Tax payment</i>
Penerimaan restitusi pajak	17.499.221.368	31.015.175.162	23.644.827.842	<i>Receipt from tax restitution</i>
Hasil klaim dan penerimaan (pengeluaran) lainnya	(23.047.006.052)	(22.152.973.191)	(8.385.621.849)	<i>Claim result and others receipt (payment)</i>
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	57.221.852.013	317.355.057.354	48.298.069.086	<i>Net Cash Flows Provided by Operating Activities</i>
Arus kas dari aktivitas investasi				<i>Cash Flows from Investing Activities</i>
Penambahan aset tetap	(78.941.473.377)	(16.080.054.573)	(178.459.251.600)	<i>Addition of fixed assets</i>
Penjualan aset tetap	699.615.050	806.253.508	-	<i>Sales of fixed assets</i>
Pengurangan property investasi	-	-	151.989.480.000	<i>Deduction of property investment</i>
Beban ditangguhkan	(13.518.944.133)	(6.878.819.029)	(3.733.552.271)	<i>Accrued expenses</i>
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	(520.254.578)	<i>Partnership program and Environment development</i>
Kepentingan non-pengendali	140.000.000	60.000.001	2.221.320.732	<i>Non-controlling interest</i>
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(91.620.802.460)	(22.092.620.093)	(28.502.257.717)	<i>Net Cash Flows used for Investing Activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan				<i>Cash Flows from Investing Activities</i>
(Pembayaran) penambahan utang bank	43.358.328.251	(275.599.800.728)	139.833.414.944	<i>(Payment) Addition of bank loan</i>
(Pembayaran) penambahan utang non bank	(42.500.000.000)	144.300.000.000	(100.560.000.000)	<i>(Payment) Addition of non bank payable</i>
Penambahan surat berharga jangka menengah	25.000.000.000	75.000.000.000	-	<i>Addition of medium-term note</i>
Pembayaran deviden	(3.645.926.000)	-	-	<i>Dividend payment</i>
Penerimaan utang sewa pembiayaan	28.479.607.307	7.025.655.402	5.932.363.795	<i>Addition of lease payable</i>
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	50.692.009.558	(49.274.145.326)	45.205.778.739	<i>Net Cash Flows Provided by (Used for) Financing Activities</i>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	16.293.059.110	245.988.291.935	65.001.590.108	<i>INCREASE IN CASH AND AND CASH EQUIVALENTS</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	441.167.637.947	195.179.346.012	130.177.755.904	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	457.460.697.057	441.167.637.947	195.179.346.012	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See notes to the consolidated financial statements an integral part of these consolidated financial statements

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Brantas Abipraya (Persero) didirikan sebagai hasil pemekaran dari Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Brantas, berdasarkan akta notaris No. 88 tanggal 12 Nopember 1980 Kartini Muljadi, S.H., di Jakarta. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya adalah :

- Perubahan anggaran dasar perseroan dengan akta No.15 tanggal 12 Agustus 2008 notaris Tjipto -Pranowo, S.H., di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM sesuai Surat Kepmen No.AHU.62129.AH.01.02. tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, notaris Retno Santi Prasetyati, SH di Jakarta No. 32 tanggal 15 Agustus 2012 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-57022.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 November 2012.

b. Kegiatan Perusahaan

Kegiatan utama Perusahaan adalah kontraktor umum dan bidang usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan utama tersebut. Perusahaan mempunyai Kantor Wilayah dan Divisi sebagai berikut :

- Divisi I
- Divisi II
- Divisi III
- Kantor Wilayah I Medan
- Kantor Wilayah II Jakarta
- Kantor Wilayah III Surabaya
- Kantor Wilayah IV Makassar
- Kantor Wilayah V Samarinda

Proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) sampai dengan September 2014 sebagian besar merupakan proyek-proyek pemerintah, bidang pengairan hampir 70%, sisanya jalan, jembatan, gedung dan proyek kelistrikan.

Dalam rangka mengembangkan usaha konstruksi, perusahaan melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan mitra Nasional dalam menangani proyek – proyek skala besar dan proyek – proyek yang padat teknologi.

Berdasarkan Akta No 15 tanggal 12 Agustus 2008 notaris Tjipto Pranowo, S.H, maksud & tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha dibidang konstruksi, industri pabrikasi, jasa persewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan bidang konstruksi, teknologi informasi, dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan pelaksanaan konstruksi pekerjaan sipil (seluruh sektor pembangunan), pekerjaan mekanikal elektrik termasuk jaringan, radio, telekomunikasi dan instrumentasi, jaringan telekomunikasi serta perbaikan / pemeliharaan / renovasi bangunan.
- 2) Perencanaan dan pengawasan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil dan pekerjaan mekanikal, elektrik termasuk jaringannya.
- 3) Pelayanan jasa konsultasi (konsultan manajemen dan rekayasa industri).
- 4) Building manajemen.
- 5) Pabrikasi bahan dan komponen bangunan.
- 6) Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
- 7) Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik.
- 8) Penyewaan peralatan konstruksi.
- 9) Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi.
- 10) Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana, sarana dasar (infrastruktur), industri.
- 11) Melakukan usaha di bidang agro industri.
- 12) Ekspor impor.
- 13) Perdagangan umum.
- 14) Pengelolaan kawasan.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Brantas Abipraya (Persero) was established as expansion result of the Holding Expansion Project of Brantas River Development, better known as the Brantas Project, based on notarial deed No. 88 dated November 12, 1980 Kartini Muljadi, S.H., in Jakarta. The Company's articles have been amended several times, which are :

- Changes in the company's articles of association by deed No. 15 dated August 12, 2008 Notary of Tjipto-Pranowo, S.H., in Jakarta, which has approval from the Ministry of Justice and Human Rights based on its Decree Letter No. AHU.62129.AH.01.02. year 2008 on Approval of Company's Amendment Articles of Association.
- The latest amendment of the Company's Extraordinary Shareholders articles of association deed of PT Brantas Abipraya (Persero), notary Retno Prasetyati Santi, SH in Jakarta No. 32 dated August 15, 2012 which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-57022.AH.01.02.year 2012 dated November 7, 2012.

b. The Company's Activities

The main activity of the Company is the general contractor and other business sectors that can support the main activities. The Company has Regional Offices and Divisions as follows :

- Division I
- Division II
- Division III
- Medan Regional Office I
- Jakarta Regional Office II
- Surabaya Regional Office III
- Makassar Regional Office IV
- Samarinda Regional Office V

The projects undertaken by PT Brantas Abipraya (Persero) until 2014 are mostly the government projects, 70% are in irrigation field, the remaining are roads, bridges, buildings and electricity projects.

In order to develop construction business, Companies do Joint Operation (JO) with national partners in addressing the large scale projects and technology-intensive projects.

Based on Deed No. 15 dated August 12, 2008 notary Tjipto Pranowo, SH, purpose and objectives of the Company is doing business in the construction, industrial manufacturing, rental services, agency services, investment, agro industry, trade, area management, capacity building construction services, information technology, and development to produce the high quality and strong competitiveness goods and services, as well as the pursuit of profit in order to increase the value of the Company.

To achieve its goals and objectives, the Company carries on business as follows:

- 1) The work of civil works construction (all sectors of construction), mechanical electrical jobs, including network, radio, telecommunications and instrumentation, telecommunications networks and repairs / maintenance / renovation of buildings.
- 2) Planning and controlling construction of civil works and includes mechanical, electrical work, including its network.
- 3) Consultancy services (management consulting and engineering industries).
- 4) Building management.
- 5) Manufacturing materials and building components.
- 6) Fabrication of components and construction equipment.
- 7) Manufacture of metal goods, wood, rubber and plastic.
- 8) Rental of construction equipment.
- 9) Agency services of building materials and components as well as the construction equipment.
- 10) Investment and / or business management in the field of infrastructure, basic services (infrastructure), industry.
- 11) Doing business in the field of agro industri.
- 12) Exports and imports.
- 13) General trading
- 14) Area management.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Kegiatan Perusahaan (Lanjutan)

- 15) Sistem development.
- 16) Layanan jasa di bidang teknologi informasi.
- 17) Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi.
- 18) Pengembang yang meliputi properti dan realty.

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-245/MBU/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-373/MBU/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-247/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Nomor : 10 notaris Retno Santi Prasetyati, SH tanggal 27 Mei 2013, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Hedyanto W. Husaini	:	Managing Commissioner
Komisaris	:	Eko Subekti	:	Commissioner
Komisaris	:	Ramly Ibrahim	:	Commissioner
Komisaris	:	Adhy Duriat Soemono	:	Commissioner

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-245/MBU/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-373/MBU/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Nomor: 28 notaris Retno Santi Prasetyati, SH tanggal 20 Nopember 2012, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Djoko Murjanto	:	Managing Commissioner
Komisaris	:	Eko Subekti	:	Commissioner
Komisaris	:	Ramly Ibrahim	:	Commissioner
Komisaris	:	Adhy Duriat Soemono	:	Commissioner

Sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-189/MBU/09/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serta Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan, dan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan PT Brantas Abipraya No. 23 tanggal 30 September 2014 Notaris Retno Santi Prasetyati, S.H. di Jakarta, susunan direksi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Bambang E Marsono	:	Managing Director
Direktur	:	Sudi Wantoko	:	Director
Direktur	:	M Basir	:	Director
Direktur	:	Ekodjati Tunggulgeni	:	Director

Sesuai dengan Keputusan Direksi Persero PT Brantas Abipraya tentang Pembagian Tugas Pokok dan Wewenang Direksi Persero PT Brantas Abipraya Nomor : 375/D/KPTS/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014, susunan direksi berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Bambang E Marsono	:	Managing Director
Direktur Operasi I	:	Ekodjati Tunggulgeni	:	Director
Direktur Operasi II	:	M Basir	:	Director
Direktur Keuangan dan SDM	:	Sudi Wantoko	:	Director

1. GENERAL (Continued)

b. The Company's Activities (Continued)

- 15) System development.
- 16) Services in the field of information technology.
- 17) Services of upgrading in the field of construction services.
- 18) Development in property and realty.

c. Composition of Commissioner and Director

Based on the Decision of Company's Shareholders of PT Brantas Abipraya (Persero) Outside of The General Meeting of Shareholders Number : SK-245/MBU/2012 dated July 2, 2012 and the Decision of Minister of State-Owned Enterprises as a General Meeting of Shareholders Number : SK-373/MBU/2012 on the Termination and Appointment of Company's Members of Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero), Decree of the Minister of State-Owned Business Entities as a General Meeting of Shareholders No. : SK-247/MBU/2013 on Termination and Appointment of Company's Member of Board of Commissioners PT Brantas Abipraya (Persero) and Deed of Shareholders Decision of PT Brantas Abipraya (Persero) Number : 10 notary Retno Prasetyati Santi, S.H. dated May 27, 2013 , the Board of Commissioners on December 31, 2014 and 2013 are as follows :

Based on the Decision of Company's Shareholders of PT Brantas Abipraya (Persero) Outside of The General Meeting of Shareholders Number : SK-245/MBU/2012 dated July 2, 2012 and the Decision of Minister of State-Owned Enterprises as a General Meeting of Shareholders Number : SK-373/MBU/2012 on the Termination and Appointment of Company's Members of Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero) and Deed of Shareholders Decision of PT Brantas Abipraya (Persero) Number : 28 notary Retno Santi Prasetyati, SH dated November 20, 2012, the Board of Commissioners on December 31, 2012 are as follows :

In accordance with the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-189/MBU/09/2014 dated September 22, 2014 regarding Designation and Hiring and Nomenklatur Position Change of the Company Member, and according to the Meeting Decision Statement Deed of the Shareholder of PT Brantas Abipraya No. 23 dated September 30, 2014 of Notary Retno Santi Prasetyati, S.H in Jakarta, the composition of Director on December 31, 2014 is as follow :

In accordance with Decision of Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) regarding Main Job and Authority of Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) Number : 375/D/KPTS/X/2014 dated October 3, 2014, the structure of directors based on his job and authorities on December 31, 2014 is as follow :

1. UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-190/MBU/2009 tanggal 15 September 2009 dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-140/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan, dan sesuai dengan Akta Pernyataan Penggantian Direksi Perusahaan PT Brantas Abipraya Nomor 7 tanggal 8 Juli 2011 Notaris Tjipto-Pranowo, S.H. di Jakarta susunan Direksi per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Bambang E Mersono	:
Direktur Keuangan & SDM	:	Sukarno Jososaputro	:
Direktur Operasi I	:	C. Thomas Pangeribuan	:
Direktur Operasi II	:	Ekodjati Tunggulgeni	:

	31 Desember / December 31,		
	2014	2013	2012
Dewan Komisaris :			
Gaji / honor / tunjangan	424.662.756	215.418.756	126.731.250
Asuransi pasca kerja	1.142.550.516	293.040.000	222.000.000
Jumlah	1.567.213.272	508.458.756	348.731.250
Dewan Direktur :			
Gaji / honor / tunjangan	1.142.550.516	877.991.016	600.935.000
Asuransi pasca kerja	843.600.000	732.600.000	555.000.000
Jumlah	1.986.150.516	1.610.591.016	1.155.935.000

Jumlah pegawai pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebanyak 420, 413, dan 322 orang.

1. GENERAL (Continued)

c. Composition of Commissioner and Director (Continued)

In accordance with the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. Kep-190/MBU/2009 dated September 15, 2009 and the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-140/MBU/2011 dated June 20, 2011 on Termination and Appointment of Members - Member Board of Directors, and in accordance with the Deed of Company Directors Replacement PT Brantas Abipraya No. 7 dated July 8, 2011 Notary Tjipto-Pranowo, S.H. in Jakarta, the Board of Directors by December 31, 2013 and 2012 as follows:

Managing Director	:	Bambang E Mersono	:
Finance & HR Director	:	Sukarno Jososaputro	:
Operation I Director	:	C. Thomas Pangeribuan	:
Operation II Director	:	Ekodjati Tunggulgeni	:

	31 Desember / December 31,		
	2014	2013	2012
Board of Commissioners :			
Salary / honor / allowance	424.662.756	215.418.756	126.731.250
Employee benefit insurance	1.142.550.516	293.040.000	222.000.000
Total	1.567.213.272	508.458.756	348.731.250
Board of Directors :			
Salary / honor / allowance	1.142.550.516	877.991.016	600.935.000
Employee benefit insurance	843.600.000	732.600.000	555.000.000
Total	1.986.150.516	1.610.591.016	1.155.935.000

Total employee on December 31, 2014, 2013 and 2012 are respectively 420, 370, dan 322 people.

2. KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki penyertaan saham secara langsung kepada PT Brantas Energi sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Brantas Energi No. 06 tanggal 12 Desember 2011 notaris Suparmin, S.H., M.Kn di Bogor. Berdasarkan akta tersebut, modal dasar PT Brantas Energi berjumlah Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 52.000 (lima puluh dua ribu) masing-masing PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar Rp 51.480.000.000 dan Koperasi Karyawan Brantas Abipraya sebesar Rp 520.000.000,-. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 Desember 2011 tentang pengesahan RKAP PT Brantas Energi tahun 2012 telah disetujui penambahan setoran modal sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). PT Brantas Abipraya (Persero) telah melakukan tambahan setoran modal tersebut pada tanggal 27 Desember 2012, dan sesuai dengan akta pernyataan keputusan rapat PT Brantas Energi No. 13 notaris Suparman, S.H., M.Kn di bogor tanggal 23 Januari 2013, susunan Pemegang Saham PT Brantas Energi per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham / Shareholders	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage (%)	Jumlah / Total (Rp)
PT Brantas Abipraya (Persero)	99%	71.480.000.000
Koperasi Karyawan Brantas Abipraya	1%	520.000.000
Jumlah / Total	100%	72.000.000.000

Pada tahun 2013 Perusahaan melakukan penambahan modal disetor kepada PT Brantas Energi (entitas anak) sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Brantas Energi No.5 notaris Virly Yusriani, S.H., M.Kn tanggal 23 Desember 2013, susunan Pemegang Saham PT Brantas Energi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham / Shareholders	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage (%)	Jumlah / Total (Rp)
PT Brantas Abipraya (Persero)	99,7%	171.480.000.000
Koperasi Karyawan Brantas Abipraya	0,3%	520.000.000
Jumlah / Total	100%	172.000.000.000

Pada tahun 2014 Perusahaan melakukan penambahan modal disetor kepada PT Brantas Energi (entitas anak) sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah). Susunan Pemegang Saham PT Brantas Energi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

2. SHARE OWNERSHIP TO SUBSIDIARIES

The company has its shares directly to PT Brantas Energi according to the Deed of Establishment of the Limited Company PT. Brantas Energy No. 06 dated December 12, 2011 notary Suparmin, S.H., M.Kn in Bogor. Based on the deed, the authorized capital of PT Brantas Energi amounted to Rp 200.000.000.000 (two hundred billion rupiah) divided into 200,000 (two hundred thousand) shares, each share nominal value Rp 1,000,000 (one million rupiah). From the authorized capital has been issued and paid up amounted to 52,000 (fifty two thousand) each are PT Brantas Abipraya (Persero) amounting to Rp 51,480,000,000.- and Koperasi Karyawan Brantas Abipraya amounting to Rp 520,000,000.-. Based on General Meeting of Shareholders on December 28, 2011 on the RKAP endorsement of PT Brantas Energi year 2012 has approved the addition of paid-up capital of Rp 20,000,000,000.- (twenty billion rupiahs). PT Brantas Abipraya (Persero) has been add the paid-up capital on December 27, 2012, dan according to the Deed of Meeting Decision Statement of PT Brantas Energi No. 13 notary Suparman, S.H., M.Kn in Bogor dated January 23, 2013, the structure of shareholders of PT Brantas Energi on December 31, 2012 as follow :

In 2013, the Company increased paid in capital to PT Brantas Energi (subsidiaries) amounting to Rp 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah). Based on Deed of Statement meeting of PT Brantas Energi No. 5 Notary Virly Yusriani, S.H., M.Kn dated December 23, 2013, composition of Shareholders of PT Brantas Energi on December 31, 2013 as follows :

In 2014, Company has added paid in capital to PT Brantas Energi (subsidiary) amounting to Rp 70,000,000,000.- (seventy billion rupiah). The structure of shareholders of PT Brantas Energi on December 31, 2014 are as follow :

2. KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA ENTITAS ANAK (Lanjutan)

2. SHARE OWNERSHIP TO SUBSIDIARIES (Continued)

Pemegang Saham / Shareholders	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage (%)	Jumlah / Total (Rp)
PT Brantas Abipraya (Persero)	99,8%	241.480.000.000
Koperasi Karyawan Brantas Abipraya	0,2%	520.000.000
Jumlah / Total	100%	242.000.000.000

Maksud dan tujuan PT Brantas Energi berusaha dalam bidang :

- Pembangunan untuk kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dan dermaga, pemborongan pada umumnya (general kontraktor) dan pemasangan instalasi-instalasi.
- Perindustrian untuk industri pembangkit tenaga listrik, industri energi alternatif, industri sparepart turbin dan pompa, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, industri perakitan komponen jadi (elektronika), industri peralatan teknik dan mekanikal, industri peralatan listrik, industri manufacturing dan fabrikasi, dan industri mesin listrik.
- Perdagangan untuk barang yang berkaitan dengan energi alternatif, export import dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, peralatan mekanikal / elektrikal / telekomunikasi / navigasi, distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang *engineering* (teknik), agen, grosir barang *engineering* dan export import barang-barang *engineering*.
- Jasa yang berkaitan dengan energi alternatif, jasa pemasangan dan perbaikan turbin dan pompa, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa studi kelayakan dan konsep rancangan, konsultasi bidang listrik elektronika, konsultasi bidang listrik (elektrikal) dan konsultasi bidang energi.

The purpose and objective of PT Brantas Energi is attempting in the field :

- Development for the business activities of electricity natural resource management, electricity supporting efforts, building construction, bridges, roads, airports and harbours, general contractor and installations.
- Industry for industrial power generation, alternative energy industry, industrial turbine and pump spare parts, industrial fabrication of electrical equipment and electronics, component manufacturing industry, mechanical engineering and industrial equipment, industry electrical equipment, manufacturing and fabrication industry, and the
- Trade for goods related to alternative energy, import export and trade in electrical and electronic equipments, mechanical equipment / electrical / telecommunication / navigation, distributors or representatives of the goods engineering company (technique), wholesale agents and import export of engineering goods.
- Services relating to alternative energy, installation and service improvement turbine and pumps, cost estimates services, controlling costs and planner, visible study and design concept services, consultation in field of electricity electronic, consultation in the field of electricity (electrical) and consultation in the field of energy.

PT Brantas Energi memiliki penyertaan saham pada entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut :

PT Brantas Energi (subsidiary) has investment in subsidiaries that consolidated as follows :

Entitas Anak / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Jenis Usaha / Business Characteristics	Persentase Kepemilikan / Ownership percentage	Dimulainya Kegiatan / Started Activities	2014	2013	2012
1. PT Perjaya Brafo Energi	Jakarta	Pembangkit Sumber daya Kelistrikan	60%	Berhenti Beroperasi	1.866.533.494	2.872.222.561	3.049.273.255
2. PT Sahung Brantas Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	99,999%	Dalam Tahap Investasi	38.522.678.453	8.443.526.350	1.447.500.000
3. PT Brantas Cakrawala Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	80%	Dalam Tahap Pengembangan	6.384.340.060	4.673.217.830	5.147.631.941
4. PT Brantas Hidro Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	99%	Dalam Tahap Pengembangan	2.516.880.365	1.994.783.534	-
5. PT Brantas Prospek Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	93%	Dalam Tahap Pengembangan	3.165.212.807	96.908.154	-
6. PT Minahasa Brantas Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	100%	Dalam Tahap Pengembangan	6.874.180.759	150.186.950	-
7. PT Brantas Adya surya Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	80%	Dalam Tahap Investasi	11.551.323.352	-	-
8. PT Brantas Nipajaya Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	80%	Dalam Tahap Pengembangan	660.554.377	-	-
9. PT Abipraya Nusantara Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	80%	Dalam Tahap Pengembangan	115.248.596	-	-
10. PT Brantas Mahalona Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	80%	Dalam Tahap Pengembangan	30.675.809	-	-

2. KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA ENTITAS ANAK (Lanjutan)

2. SHARE OWNERSHIP TO SUBSIDIARIES (Continued)

Entitas Anak / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Jenis Usaha / Business Character/ stctcs	Persentase Kepemilikan / Ownership percentage	Dimulainya Kegiatan / Started Activities	2014	2013	2012
11. PT Brantas Prospek Engineering	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	93%	Dalam Tahap Pengembangan	130.995.013	-	-
12. PT Brantas Prospek Mandiri	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	83%	Dalam Tahap Pengembangan	28.506.336	-	-
13. PT Brantas Energi Mandiri	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	83%	Dalam Tahap Pengembangan	239.164.250	-	-
14. PT Brantas Total Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	80%	Dalam Tahap Pengembangan	268.041.407	-	-
15. PT Limbong Hidro Energi	Jakarta	Pengelola Sumber daya Kelistrikan	93%	Dalam Tahap Pengembangan	49.886.086	-	-

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3. THE ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan yaitu terminologi baru (revisi judul laporan keuangan) dan perubahan format dan penyajian laporan keuangan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan Perusahaan, sebagai berikut :

- Laporan Neraca berubah nama menjadi Laporan Posisi Keuangan.
- Laporan Laba Rugi berubah nama menjadi Laporan Laba Rugi Komprehensif.
- Istilah kewajiban menjadi liabilitas, dan hak minoritas menjadi kepentingan non pengendali.
- Mengubah penyajian kepentingan non pengendali dari disajikan di antara liabilitas dan ekuitas menjadi disajikan sebagai bagian dari ekuitas.
- Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan dasar harga perolehan, konsep kesinambungan usaha dan prinsip akrual, kecuali akun tertentu yang dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan laporan keuangan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, kecuali entitas anak yang apabila :

- Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham Entitas Anak dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek;
- Entitas Anak dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang yang mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.

Pengendalian dianggap ada apabila induk Perusahaan memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui Entitas Anak), lebih dari 50% hak suara pada suatu Perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut :

a. Basis of Preparation of Financial Statements

In accordance with SFAS No. 1 (Revised 2009) Presentation of Financial Statements which is a new terminology (revised title of the financial statements) and changes in format and presentation of financial statements that affect the Company's financial statements, as follows :

- Balance Sheet changed its name to the Statements of Financial Position.
- Income Statement changed its name to the Statements of Comprehensive Income.
- Term liabilities become liabilities, and minority interests become non-controlling interest.
- Change the presentation of non controlling interest that before was presented between the liability and equity then be presented as part of equity.
- Statement of Financial Position at the beginning of comparative period when the entity applies an accounting policy retrospectively or makes a restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies items on its financial statements.

The consolidated financial statements have been stated in Rupiah currency and prepared according to financial accounting standard in Indonesia based on acquisition cost, concept of business sustainability and accrual principle, except for certain accounts stated by other measurements as described in each accounting policy of those accounts.

Statements of consolidated cash flows are prepared using the direct method and are grouped into operating, investing and financing activities.

Accounting policy is applied consistently unless otherwise the change in accounting policy professed.

b. The Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and the financial statements of entities controlled by the Company, unless the subsidiaries if :

- Control is intended for temporary, because the Subsidiary shares purchased with aim to be sold or dispose in the short term;
- Subsidiary is limited by a long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the holding company.

There is control if holding Company has, directly or indirectly (through the subsidiaries), more than 50% voting rights in a Company. Even the Company has 50% voting rights or less, there is still a control if there is any of this conditions as follow :

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

- Mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain;
- Mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- Mempunyai kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti mayoritas pengurus Perusahaan;
- Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Proporsi bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas ekuitas Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan dalam "Kepentingan Non Pengendali" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, sedangkan proporsi bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas laba rugi bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi, disajikan dalam "Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Perusahaan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Saldo dan transaksi, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan terkonsolidasi dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut. Apabila penyesuaian yang diperlukan tersebut tidak dapat dihitung, maka faktor tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, serta proporsi unsur tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasian.

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian kurs yang timbul dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif dalam tahun yang bersangkutan.

d. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berelasi sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2010) adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor), yaitu :

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika :
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- 2) Sesuatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu suatu kelompok usaha dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya.
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi mempunyai relasi dengan entitas pelapor.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. The Principles of Consolidation (Continued)

- Having voting right more than 50% based on an agreement with other investors;
- Having voting right to regulate the financial and operational policies of the entity under a statute or an agreement;
- Has the power to appoint or change majority of the Company's management;
- Able to dominate the majority votes in management meeting.

The proportion of the minority shareholder ownership over the consolidated Subsidiaries equity is presented in "Non controlling interest" on the consolidated statements of financial position, while the proportion of the minority shareholder ownership over net income consolidated Subsidiaries, presented in "Non controlling interest on Company's profit (loss)" on consolidated statements of comprehensive income.

Balances and transactions, including unrealized intercompany transactions profit or loss over consolidated are eliminated to reflect the financial position and results of the company's businesses and subsidiaries as a business entity.

The consolidated financial statements prepared using the same accounting policies for similar transactions and events in similar circumstances. When an entity uses accounting policies that differ from the accounting policies used in the consolidated financial statements, then made the necessary adjustments to the financial statements the Child Entity. When the necessary adjustments that cannot be calculated, then these factors should be disclosed in the notes to the consolidated financial statements, as well as the proportion of the item against a similar element in the consolidated financial statements.

c. Transaction and Balance in Foreign Currency

Company bookkeeping is done in Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah currency with exchange rate prevailing at the time of the transaction. At the statements of financial position date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using the Bank Indonesia Middle exchange rate. Gains and losses arising are charged in the related year statements of comprehensive income.

d. Transactions with Related Parties

The definition of related parties in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2010) is the person or entity associated with a particular entity in preparing its financial statements (the reporting entity), namely :

- 1) The nearest person or family members have a relationship with the entity if :
 - Has control or joint control over the reporting entity;
 - Has significant influence over the reporting entity;
 - Key management person of the reporting entity or holding entity of the reporting entity
- 2) A related entities with the reporting entity if it meets one of the following:
 - The entity and reporting entity is a member of the same business group.
 - One entity is an associate or joint venture entity to another entity or associate or joint venture of a member of a business group in which the other entity is a member of the business group, in which the other entity is a member.
 - Both entities are joint venture from the same third parties.
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified to have the relationship with the reporting entity.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)

- Orang yang diidentifikasi mempunyai relasi dengan entitas pelapor, yaitu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak hubungan berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan syarat dan kondisi normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi, telah diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan : Penyajian" yang merevisi PSAK No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran", yang merevisi PSAK No. 55 (Revisi 2006). Penerapan PSAK-PSAK revisi ini dilakukan secara prospektif.

PSAK No.50 (Revisi 2010) mengatur persyaratan tentang penyajian dari instrumen keuangan dan informasi yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan, sedangkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

Dalam rangka penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2010) dan PSAK No. 55 (Revisi 2011), Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

1) Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (untuk diperdagangkan), pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (untuk diperdagangkan).

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif adalah aset keuangan yang diperdagangkan, jika aset keuangan tersebut perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil untung dalam jangka pendek.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar investasi sehubungan dengan aset keuangan yang ditetapkan, diakui sebagai laba-rugi yang belum direalisasi diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif tahun berjalan.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan aset tersebut tidak ada di pasar bursa. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai perolehan.

(iii) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dikelompokkan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan. Manajemen yakin untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali :

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan;
- investasi yang sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Transactions with Related Parties (Continued)

- People who are identified to have a relationship with the reporting entity, ie which has significant influence over the entity or the entity key management member (or the holding of the entity).

All transactions with related parties, whether do or do not conducted with normal term and condition, as is done by those who do not have a relationship, have been disclosed in the financial statements.

e. Financial Instrument

Effective on January 1, 2012, the Company adopted SFAS No. 50 (Revised 2010) "Financial Instruments: Presentation" which revises SFAS No. 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and SFAS No. 55 (Revised 2011) "Financial Instruments: Recognition and Measurement", which revises SFAS No. 55 (Revised 2006). The application of this revised SFAS was done prospectively.

SFAS No. 50 (Revised 2010) set the requirements for the presentation of financial instruments and information that must be disclosed in the financial statements, whereas SFAS No.55 (Revised 2011) establishes principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy and sale non-financial items. This statement, among others, provide the definition and derivatives characteristics, the category of financial instruments, recognition and measurement, hedging accounting and determination of hedging relationships.

In the application of SFAS No. 50 (Revised 2010) and SFAS No. 55 (Revised 2011), the Company classifies financial instruments in the form of financial assets and financial liabilities.

1) Financial Assets

The Company classifies its financial assets in the category of financial assets at fair value through the statements of comprehensive income (held for trading), loans and receivables, financial assets held to maturity and financial assets available for sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets that are measured at fair value through the statements of comprehensive income (held for trading).

Financial assets that are measured at fair value through the statements of comprehensive income are financial assets that are traded, if the financial assets acquired principally for selling or repurchasing in the near future, and there is evidence of a tendency to take short-term profit.

Gains and losses arising from changes in fair value of investments in connection with specified financial assets, are recognized as unrealized income or losses recognized in the statements of comprehensive income for the year.

(ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and the asset does not exist in the stock market. At the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at cost.

(iii) Held to Maturity Financial Assets

Financial assets are classified as held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities. Management is confident to have the financial assets to maturity, unless:

- investments are designated upon initial recognition as financial assets at fair value through the statements of comprehensive income;
- investment that is designated by entity as available for sale, and;
- investments as loans and receivables.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(iii) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi atau ditambahkan dengan amortisasi premi (diskonto).

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga dan valuta asing.

(v) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya sampai dengan dihentikan pengakuannya, dimana laba atau rugi atas perubahannya dicatat pada laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya dicatat pada laporan perubahan ekuitas, diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila :

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir ; atau
- ii. Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan kewajiban baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

(vi) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif atau hutang dan pinjaman. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai hutang dan pinjaman.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

3. The Accounting Policies (Continued)

e. Financial Instrument (Continued)

(iii) Held to Maturity Financial Assets (Continued)

At the time of initial recognition, financial assets held to maturity are recognized at their acquisition cost net of or added by the premium (discount) amortization.

(iv) Available-for-Sale Financial Assets

Financial assets that are grouped as available for sale are non-derivative financial assets intended to be held until an unspecified period, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates and foreign exchange.

(v) Derecognition of Financial Assets

At the time of initial recognition, available-for-sale financial assets are recognized at fair value plus transaction costs. Subsequently, available-for-sale financial assets are measured at fair value through derecognition, in which the gain or loss on changes recognized in the statement of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses. If the available-for-sale financial asset is impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in the statement of changes in equity is recognized in the statements of comprehensive income.

Termination recognition of a financial asset, or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, occurs when :

- i. Contractual rights to receive cash flows from the financial asset are expire, or
- ii. The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows without material delay to a third party through a submission agreement and (a) transferred substantially all the risks and rewards of the asset , or (b) does not transfer substantially all the risks and do not have and rewards of ownership of the financial assets, but has transferred control of the assets.

At the time of derecognition of the financial asset entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) payments received, including the new acquired asset is reduced by the new liabilities incurred, and (ii) the cumulative gain or loss that had been recognized directly in equity, should be recognized in the statements of comprehensive income.

(vi) Impairment of Financial Assets

At each statements of financial position date, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment of financial assets is deemed to have occurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (an adverse event), and that loss event has an impact on estimated future cash flows of the financial assets or group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications of the borrower or group of borrowers experiencing significant difficult financial, default or delinquency in interest or principal payments, it is probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganization, and at the time of observable data indicating a measurable decrease in estimated future cash flows.

Financial liabilities within the scope of SFAS No. 55 (Revised 2011) are classified as financial liabilities at fair value through the statements of comprehensive income or loans and borrowings. At the statements of financial position date, the Company has no financial liabilities other than those classified as loans and loan.

Initial recognition of financial liabilities are carried at fair value plus transaction costs that are directly attributable.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi hutang usaha dan hutang lainnya, hutang beresasi dan liabilitas keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.

(i) Pengakuan dan Pengukuran Awal

Setelah pengakuan awal, hutang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan, atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dan pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

(iii) Saling hapus Instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto/bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank, investasi jangka pendek dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

g. Piutang dan Penyisihan Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No.50 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK No.55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Perhitungan penurunan nilai wajar piutang usaha bila terjadi indikasi tidak tertagihnya piutang usaha dan penurunan nilai wajar piutang usaha (*impairment*) diatur dengan SK Direksi No.013/D/KPTS/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, sebagai berikut:

a. Piutang pada Pemerintah dan BUMN

Umur Piutang (Bulan) / Aging Receivable (Months)
0-12
>12-15
>15-18
>18-21
>21-24
>24-27
>27-30
>30-33
>33-36

3. The Accounting Policies (Continued)

e. Financial Instrument (Continued)

2) Financial Liabilities

The Company's financial liabilities include account payables and others payables, related payables and others current and non-current financial liabilities.

(i) Initial Recognition and Measurement

After initial recognition, loans and borrowings that are charged with interest, subsequently measured at cost which are amortized by using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized in the statements of comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the effective interest method.

(ii) Derecognition of Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the liabilities specified in the contract is discharged, canceled or expired.

When a financial liabilities was changed with other financial liabilities and same lender of the terms that are substantially different, or if the terms of a financial liabilities are substantially modified, an exchange or modification of terms are stated as an initial derecognition of financial liabilities and recognition of new financial liabilities, and the difference between the carrying amount of each financial liabilities are recognized in the statements of comprehensive income.

(iii) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a legal right to offset the carrying amount of financial assets and financial liabilities, and there is the intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash, short-term investments and current deposit with three-month maturities or less and are not used as collateral. Cash and cash equivalents appropriated or that can not be used freely does not categorized as cash and cash equivalents.

g. Receivables and Allowance for Doubtful

Receivables are stated at fair value in accordance with SFAS No. 50 (Revised 2010) Financial Instruments: Presentation and SFAS No. 55 (revised 2011) Financial Instruments: Recognition and Measurement.

Calculation of the impairment value of accounts receivable if there is indication of uncollectible account receivables and impairment value of accounts receivable is set by the Board of Directors' Decree No.013/D/KPTS/XII/2010 dated December 9, 2010, as follows:

a. Receivables to the Government and State-Owned Enterprises (SOE)

Percentage / Percentage
0%
5%
10%
20%
30%
40%
60%
80%
100%

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Piutang dan Penyisihan Piutang (Lanjutan)

b. Piutang pada pihak swasta

Penurunan nilai piutang usaha dihitung masing-masing per individu setelah jatuh tempo pada tahun pertama menggunakan metode nilai kini dari arus kas masa depan (*discounted cash flow*) dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia, dan untuk tahun berikutnya menggunakan metode *discounted cash flow* dan penurunan nilai (*impairment*) sama dengan piutang pada Pemerintah dan BUMN.

c. Jika piutang pada pemerintah dan BUMN telah berumur lebih dari 1 tahun dan setelah dilakukan analisa resiko terdapat keyakinan bahwa piutang tersebut tidak dapat tertagih, maka dilakukan penurunan nilai piutang secara individu dengan menggunakan metode *discounted cash flow* dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia dan penurunan nilai.

h. Persediaan

Persediaan dibukukan atas dasar nilai perolehan (*at cost*) dan pemakaiannya menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Untuk memverifikasi nilai persediaan barang, secara berkala dilakukan *stock opname*.

Efektif tanggal 1 Januari 2009 Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 14 - Persediaan.

Perubahan mendasar pada standar yang direvisi antara lain Perusahaan harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama dan pembelian persediaan dengan persyaratan penyelesaian tangguhan (*deferred settlement terms*), perbedaan antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dan jumlah yang dibayarkan diakui sebagai beban bunga selama periode pembiayaan. Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No.14 (Revisi 2008) – Persediaan tersebut.

I. Properti Investasi

Efektif 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) – Properti Investasi. Sesuai PSAK tersebut, properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee* / penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk :

- Digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa atau tujuan administratif, atau
- Dijual dalam kegiatan sehari-hari.

Perusahaan menggunakan model harga perolehan (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansinya dan sesuai ketentuan PSAK tersebut di atas. Perusahaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan), laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode terjadinya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif saat terjadinya.

J. Aset Tetap dan Penyusutan

Kepemilikan Langsung

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) No.50.1/D/KPTS/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006, tentang Pengaturan Kembali Batasan Nilai Kapitalisasi Aset Tetap Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :

- Peralatan kantor & rumah tangga mulai dari Rp 15.000.000,- atau lebih.
- Peralatan umum mulai dari Rp 30.000.000,- atau lebih.
- Kendaraan operasional mulai dari Rp 50.000.000,- atau lebih.
- Alat berat / kendaraan konstruksi mulai dari Rp 50.000.000,- atau lebih.
- Perbaikan Gedung/Bangunan dan Pengurusan Surat-surat sampai dengan Rp 100.000.000,- atau lebih.

3. The Accounting Policies (Continued)

g. Receivables and Allowance for Doubtful (Continued)

b. Receivables in the private sector

Impairment value of account receivables are respectively calculated per individual after first year maturity held using the present value of future cash flows (*discounted cash flow*) with interest rate of Bank Indonesia, and for the next year using the *discounted cash flow* method and impairment equal to the receivables to the Government and State-Owned Enterprises (SOE).

c. If the government and SOE account receivables have been outstanding for more than 1 year after the risk analysis and there is confidence that the receivables are not collectible, it is done individually for impairment of receivables using the *discounted cash flow* interest rate of Bank Indonesia and impairment.

h. Inventories

Inventories are recorded on acquisition value (*at cost*) and using FIFO (*First In First Out*). To verify the value of stock, stock taking is done periodically.

Effective on January 1, 2009, the Company has adopted SFAS No. 14 - Inventory.

Fundamental changes in the revised standards include the Company must use the same cost formula for all inventories that have similar nature and use and purchase of inventory with deferred settlement terms, the difference between the purchase price for normal credit terms and the amount paid recognized as interest expense over the period of financing. There is no change in the accounting policy for the application of SFAS 14 (Revised 2008) - the inventory.

I. Investment Properties

Effective January 1, 2012, the Company adopted SFAS No. 13 (Revised 2011) - Investment Properties. Due to the SFAS, investment property is property (land or building or part of a building or both) are controlled (by the owner or lessee / finance lease) to earn rentals or for capital appreciation or both, and not to :

- Used for the production or supply of goods or services or administrative purposes, or
- Sold in daily activities.

The company uses a model of the acquisition cost (*cost model*) as its accounting policy and in accordance with SFAS mentioned above. Company discloses the fair value of investment property in the notes to the financial statements.

Investment property is derecognised upon disposal (sold or leased under finance lease), the gain or loss arising from the retirement or disposal are recognized in the statements of comprehensive income in the period incurred.

Maintenance and repair costs of investment property are recognized in the statements of comprehensive income as incurred.

J. Fixed Assets and Depreciation

Direct ownership

Fixed assets are recorded at cost less accumulated depreciation.

Based on the Decision of the Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) No. 50.1/D/KPTS/VIII/2006 dated August 28, 2006, on the Resetting Margin Fixed Asset Capitalization Company, determined as follows :

- Office Equipment & household ranging from Rp 15.000.000,- or more.
- General equipment ranging from Rp 30.000.000,- or more.
- Operational vehicles ranging from Rp 50.000.000,- or more.
- Heavy equipment / construction vehicles ranging from Rp 50.000.000,- or more.
- Building repair and clearance letters ranging from Rp 100.000.000,- or more.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap dan Penyusutan (Lanjutan)
Kepemilikan Langsung (Lanjutan)

Nilai perolehan atas pengadaan yang nilainya dibawah ketentuan diatas, diperlakukan sebagai barang yang habis pakai dan menjadi beban di unit usaha / proyek. Barang-barang tersebut dicatat secara *extra comptable* dan wajib dilaporkan ke kantor pusat setiap 3 (tiga) bulan. Setelah proyek selesai barang-barang tersebut dijual, dan hasil penjualannya mengurangi pos beban di unit usaha/proyek yang bersangkutan.

Biaya perbaikan besar (*recondisi / overhaul*), pemugaran yang menambah umur aset tetap dikapitalisasi menambah nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Untuk *overhaul* yang sampai dengan akhir suatu periode tahun buku belum selesai, dikelompokkan kedalam perkiraan aset lain-lain yang akan dikapitalisasi setelah pelaksanaan *overhaul* selesai.

Beban penyusutan dihitung dengan menggunakan *Declining Balance Method*, kecuali untuk biaya penyusutan golongan gedung / bangunan menggunakan *Straight Line Method* sesuai Keputusan Menteri Keuangan R.I No.826/KMK-04/1984 tanggal 9 Agustus 1984 sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan R.I No.961/KMK-04/1983 tertanggal 31 Desember 1983 tentang penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan.

Beban penyusutan setiap tahun dihitung dengan mengalikan tarif penyusutan tiap golongan harta dengan harga buku yang bersangkutan, kecuali untuk golongan IV (Bangunan/Gedung) yang didasarkan atas harga perolehannya.

Tarif penyusutan setiap golongan aset tersebut adalah sebagai berikut :

- Golongan I	:	
- Golongan II	:	
- Golongan III	:	
- Golongan IV	:	

Sehubungan dengan proyek yang memerlukan investasi peralatan proyek dengan pertimbangan tertentu (keterpencilan, peralatan khusus ataupun karena resiko penggunaan proyek lain belum pasti), sehingga perhitungan penyusutan dipercepat selama masa pelaksanaan proyek dengan nilai sisa buku sebesar Rp 1.000.000,- berdasarkan keputusan Direksi Nomor: 265/D/KPTS/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penyusutan Dipercepat Aset Tetap Perusahaan.

Aset dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Aset Sewa

Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan disajikan sejumlah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah harga opsi yang harus dibayar pada akhir periode sewa. Kewajiban yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan dan beban keuangan. Aset sewa disusutkan dengan metode yang sama seperti aset yang dimiliki langsung.

Keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditanggguhkan dan diamortisasi sepanjang masa sewa.

Efektif tanggal 1 Januari 2012 perusahaan telah menerapkan PSAK No.16 (Revisi 2011) – Aset Tetap dan PSAK No.30 (Revisi 2011) – Sewa.

Sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011) – Aset Tetap, Perusahaan diharuskan memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan harus ditetapkan secara konsisten terhadap semua aset tetap dalam kelompok yang sama. Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya, dimana setelah pengakuan sebagai aset tetap, aset tetap pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2011) – Sewa, klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada dalam *lessor* atau *lessee*. Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 revisi secara prospektif. Perlakuan akuntansi sebelumnya untuk transaksi dan saldo sewa telah diterapkan dengan benar, sehingga tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011) tersebut.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Fixed Assets and Depreciation (Continued)
Direct ownership (Continued)

Acquisition value over the value of procurement under the provisions above, are treated as consumable items and a burden on business unit / project. These items are recorded in *extra comptable* and must be reported to the central office every 3 (three) months. Once the project is completed these items are sold, and the proceeds reduce the burden on the postal business unit / project.

Major repairs cost (*reconditioning /overhaul*), which adds to the life of the restoration of fixed assets are capitalized adding the book value of the concerned fixed assets. To *overhaul* the period up to the end of a financial year that has not been completed, estimates were grouped into other assets that will be capitalized after the implementation of the *overhaul* is completed.

Depreciation expense is calculated using the *Declining Balance Method*, except for buildings that is using the *Straight Line Method* in accordance to the Decree of Minister of Finance of Indonesian Republic No.826/KMK-04/1984 dated August 9, 1984 as a refinement of the Decree of the Minister of Finance of Republic Indonesia No.961/KMK-04/1983 dated December 31, 1983 on determination of the types of property in each class of property for depreciation purposes.

Each year, the depreciation expenses are calculated by multiplying the depreciation rates for each class of assets with related book value, except for group IV (Building) which is based on the acquisition price.

Depreciation rates of each class of assets are as follows:

50 % X Harga buku	:	Group I	-
25 % X Harga buku	:	Group II	-
10 % X Harga buku	:	Group III	-
5 % X Harga buku	:	Group IV	-

When a project requires investment in equipment projects with particular consideration (*remoteness, special equipment or because the uncertain risk of use of other projects*), so the calculation of depreciation accelerated during the execution of the project with a book value of Rp 1,000,000,- based on the Board's decision No : 265 /D/KPTS/XI/2013 dated November 12, 2013 about the Accelerated Depreciation of Company's Fixed Assets.

Assets in the implementation are stated at cost. The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets when completed and ready for use.

Lease assets

Property and equipment acquired under finance leases are presented with a present value of all lease payments plus the option price to be paid at the end of the lease period. Related liabilities also recognized and each installment is allocated for settlement and finance charges. Leased assets are depreciated using the same method as assets held directly.

Gains or losses on sale and leaseback transactions are deferred and amortized over the lease term.

Effective January 1, 2012, the company has implemented SFAS No. 16 (Revised 2011) - Fixed Assets and SFAS No. 30 (Revised 2011) - Lease.

In accordance with SFAS No. 16 (Revised 2011) - Fixed Assets, the Company is required to choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy and should be set consistently to all fixed assets in the same group. The company chose to use the cost model, where after recognition as fixed assets, fixed assets at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

In accordance with SFAS No. 30 (Revised 2011) - Lease, lease classification based on the extent to which risks and rewards incidental to ownership of the leased asset lie under the lessor or lessee. The Company applies SFAS No. 30 revised prospectively. Previous accounting treatment for transactions and balances of lease have been implemented correctly, so there is no change in the application of accounting policy of SFAS No. 30 (Revised 2011).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasi bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai aset.

l. Pengakuan Pendapatan

1) Usaha Pokok

Pendapatan usaha pokok diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian pekerjaan. Persentase penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun buku dihitung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Progres Fisik yang ditandatangani oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dan pemberi kerja. Nilai pendapatan diperoleh dengan mengalikan persentase tersebut terhadap nilai kontrak, sehingga pendapatan yang diakui dalam suatu tahun buku meliputi :

- Prestasi penyelesaian pekerjaan yang sudah dibayar
- Prestasi penyelesaian pekerjaan yang sudah ditagihkan tetapi belum dibayar
- Prestasi penyelesaian pekerjaan yang sudah diakui / disetujui oleh pemberi kerja tetapi belum ditagihkan.

2) Pendapatan Joint Operation / Kerjasama Operasi

Joint Operation (JO) / Kerjasama Operasi (KSO) dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara *Integrated* dan *Job Splitting*.

- Secara *Integrated*

Dalam hal ini Perusahaan menyertakan sebagian modal berupa kas atau peralatan sesuai kesepakatan dan laba (rugi) JO dicatat sebesar persentase kontribusi Perusahaan pada JO (*intracomtable*).

- Secara *Job Splitting*

Dalam hal ini, Perusahaan bekerjasama dengan kontraktor lain untuk menyelesaikan proyek berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat sebelum tender dengan pemberi kerja.

Pendapatan diakui dan dicatat sebesar nilai porsi Perusahaan, ditambah dengan *coordination fee* yang diperoleh dari mitra KSO, dalam hal Perusahaan sebagai *leading firm*.

3) Usaha Jasa Lainnya (Sewa Peralatan)

Pendapatan usaha sewa alat diakui setelah alat dioperasikan dengan batasan jam minimum tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penetapan jam operasi alat didasarkan atas Laporan Harian Operasi (LHO) yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pendapatan usaha sewa alat dihitung dengan mengalikan jumlah jam operasi alat pada tahun berjalan terhadap tarif sewa masing-masing alat yang bersangkutan. Beban-beban usaha sewa alat diakui pada saat dikeluarkan/terjadi atau pada saat terhutang untuk menghasilkan pendapatan sewa alat dalam tahun yang bersangkutan.

m. Pengakuan Beban

Beban-beban produksi (beban langsung) dan beban usaha diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*). Khusus biaya perbaikan peralatan proyek (alat berat, peralatan umum, kendaraan) sesuai Nota Dinas Direksi No. 11/D/ND/KEU/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dibedakan atas 2 (dua) jenis/kriteria sebagai berikut :

- Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil (*maintenance & repair*) dibebankan langsung pada tahun buku yang bersangkutan.
- Biaya perbaikan besar (*overhaul / recondisi*) yang bermanfaat untuk menambah umur alat dikapitalisasi menambah nilai buku peralatan yang bersangkutan.

n. Perpajakan

Beban pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat penetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Impairment in Assets

Fixed assets and other non current assets are reviewed to find out whether there is loss on impairment if any event or change in condition that identified that the recorded value of the assets cannot be recouped. Loss caused by the impairment are recognized as much as the difference between recorded value with the recoverable value of the assets. The recoverable value is the higher value between net sale and used value assets.

l. Revenue Recognition

1) Principal business

Principal operating revenues are recognized based on the percentage of completion method. The percentage of completion of work at the end of the financial year is calculated based on the Joint Interrogation of Physical Progress signed by PT Brantas Abipraya (Persero) and employers. The revenue obtained by multiplying the percentage of the contract value, so that the recognized revenue in the fiscal year include:

- Achievement completion of the work that has been paid
- Achievement completion of the work that has been charged but not yet paid
- Achievement completion of the work that has been recognized / approved by the employer but not yet charged.

2) Joint Operation Revenue / Joint Operation

Joint Operation (JO) are carried out with 2 (two) ways, namely as an *Integrated* and *Job Splitting*.

- In *Integrated*

In this case, the Company includes some of the capital in the form of cash or equipment as agreed and JO gain (loss) are recorded at the percentage contribution to the JO (*intracomtable*).

- In *Job Splitting*

In this case, the Company cooperates with another contractor to complete the project by mutual agreement made prior to the tender with the employer.

Revenues are recognized and recorded at the value of Company's portion, added by *coordination fee* obtained from the KSO partners, in which case the Company as a *leading firm*.

3) Other Service Business (Rental Equipment)

Operating revenues are recognized after the tool rental equipment is operated with a certain minimum hours restrictions agreed by both parties. Determination of the operating hours of the tool based on the Daily Report of Operations (LHO) which was approved by both parties.

Equipment rental business revenue is calculated by multiplying the number of hours of tool operation in current year to the rental rate of each instrument in question. Expenses for equipment rental businesses are recognized when incurred or owed to generate rental income during the year.

m. Expense Recognition

The burdens of production (direct expenses) and operating expenses are recognized when incurred (*accrual basis*). Special project cost in repairing the equipment (heavy equipment, general equipment, vehicles) in accordance with Directors Official Memorandum No. 11/D/ND/KEU/X/2006 dated October 11, 2006 divided into 2 (two) types / criteria as follows:

- Maintenance cost and minor repairs (*maintenance and repair*) are charged directly to the relevant financial year.
- Major repair cost (*overhaul/reconditioning*) which are useful to increase usage life of equipment are capitalized in adding the book value of equipment.

n. Taxation

Current tax expense is calculated based on taxable income for the period based on applicable tax rates.

Correction to tax liabilities are recorded when the assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal is determined.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Perpajakan (Lanjutan)

Pada tanggal 4 Juni 2009 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang menetapkan bahwa penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi dan 4% untuk Perencanaan atau Pengawasan Konstruksi, Perusahaan tidak lagi memperhitungkan adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan karena tidak ada lagi perbedaan temporer dalam perhitungan pajak kini. Sedangkan terhadap penghasilan yang tidak final, Perusahaan juga tidak memperhitungkan adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan, karena beda temporer yang timbul tidak signifikan untuk diperhitungkan.

(1) Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan Peraturan Dana Pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) yang berkaitan dengan hak dan besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana disahkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP-053/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000. Kebijakan pendanaan terdiri dari iuran normal, iuran tambahan dan manfaat pensiun. Besaran iuran normal yang diperlukan adalah sebesar 20,56% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terakhir. Dari jumlah tersebut peserta aktif harus membayar sebesar 5% dari PhDP dan Pemberi Kerja sebesar 15,56% dari PhDP. Iuran tambahan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh aktuaris dari Pemberi Kerja untuk menutup defisit. Beban pensiun selama tahun yang bersangkutan dibebankan pada laba rugi komprehensif berjalan.

(2) Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan membukukan kewajiban atas imbalan pasca kerja bagi karyawan berdasarkan Undang-Undang No.13/2003 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan PSAK No.24 (revisi 2010) mengenai Imbalan Kerja.

Imbalan kerja yang didasarkan pada masa kerja karyawan dan penghasilan karyawan dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit* yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian.

Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan estimasi kewajiban tersebut.

p. Beban Tangguhan

Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan pengurusan dan persiapan proyek-proyek dalam pengembangan ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur proyek pada saat proyek tersebut berjalan atau dibebankan pada saat proyek yang sedang dikembangkan dipastikan tidak didapat atau tidak dapat diteruskan.

q. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

3. THE ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Taxation (Continued)

On June 4, 2009, Government Regulation (PP) No. 40 year 2009 was issued concerning Amendment to the Government Regulation (PP) No. 51 year 2008.

In accordance with Government Regulation (PP) No. 51 year 2008 dated July 23, 2008 on Income Tax of Income from Construction Services which provides that on income from construction services subject to final income tax of 3% Construction and 4% of Implementation for Planning or Construction Supervision, the Company no longer take into account existence of assets or deferred tax liabilities due to temporary differences which do not exist anymore in the current tax calculation. While the income is not final, the Company also does not take into account the existence of deferred assets or liabilities, which arise because of temporary differences are not significant to be taken into account.

(1) Pension Plan

The Company has a Defined Benefit Pension Plan by the Pension Fund Regulatory PT Brantas Abipraya (Persero) relating to the rights and magnitude of Retirement Benefits as approved by the Ministry of Finance of Republic Indonesia NO. KEP-053/KM.17/2000 dated February 14, 2000. Funding policy consists of the normal fees, additional fees and retirement benefits. The amount of the normal contribution required is equal to 20.56% of last Basic Retirement Income (PhDP). From the amount, active participants must pay for 5% of PhDP and Employer for 15.56% of PhDP. Additional Contribution Pension Fund established by the actuary of the Employer to cover the deficit. Pension expense for the year is charged to current year statements of comprehensive income.

(2) Post-Employment Benefits

The Company recorded a liability for post-employment benefits for employees based on the Act No.13/2003 on Employment in accordance with SFAS No. 24 (revised 2010) on Employee Benefits.

Employee benefits based on years of employment and employee earnings are calculated by an independent actuary using the projected unit credit method which reflects services worker at the time of assessment.

There is no funding set aside by the Company in relation with the estimated liability.

p. Deferred Expenses

Expenses occurred relating managing and preparation of projects in suspended development and amortized using straight line method along the project is running or charged when the developed project certainly can not got or forwarded.

q. The use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENT

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	2014	2013	2012	
a. Pihak-pihak Berelasi :				a. Related Parties :
Kas	6.820.830.146	5.934.896.651	2.693.264.653	Cash
Bank :				Bank :
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (termasuk USD 5,628.76; USD 105,492.18, USD 452,712.45 tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012)	81.897.732.645	101.449.089.881	106.331.888.509	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (including USD 5,628.76; USD 105,492.18 and USD 452,712.45 dated December 31, 2014 2013 and 2012)
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	12.324.406.215	15.081.655.305	5.046.581.577	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	1.801.445.556	1.822.239.424	4.989.418.729	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Sumselbabel	7.520.067	112.676.918	112.692.085	PT Bank Sumselbabel
PT Bank Lampung	-	-	1.765.000	PT Bank Lampung
PT Bank Jabar Banten	16.303.301.003	2.670.384.727	7.450.907.541	PT Bank Jabar Banten
PT Bank Riau	4.791.306	4.791.306	4.791.306	PT Bank Riau
PT BPD Papua	4.575.637.007	10.209.232.320	218.861.155	PT BPD Papua
PT BPD NTB	84.451.082	-	-	PT BPD NTB
PT BPD Jatim	556.000.000	-	-	PT BPD Jatim
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	310.759.721	368.281.803	6.889.419	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
PT Bank BPD Sulawesi Tengah	-	-	854.484	PT Bank BPD Sulawesi Tengah
PT BPD Bengkulu	5.368.408	3.511.174.738	-	PT BPD Bengkulu
Deposito :				Time deposit :
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	105.200.000.000	185.000.000.000	40.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	75.000.000.000	5.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	-	15.000.000.000	
Sub Jumlah	304.672.243.136	331.184.223.073	181.857.714.468	Sub total
b. Pihak Ketiga :				b. Third party :
Bank :				Bank :
PT Bank Bukopin, Tbk (termasuk USD 2,068.34; USD 2,090.70 and USD 2,113.04 tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012)	175.522.941	86.110.036	187.724.143	PT Bank Bukopin, Tbk (including USD 2,068.34; USD 2,090.70 and USD 2,113.04 on the date of December 31, 2014; December 31, 2013)
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	24.684.875	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank DBS Indonesia	1.667.511.394	9.330.683.479	2.055.844.910	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	851.134.321	612.253.517	3.628.056	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Permata Syariah	3.668.546	3.708.366	3.745.334	PT Permata Syariah
PT Bank UOB	90.616.719	20.659.476	1.046.204.435	PT Bank UOB
Deposito :				Time deposit :
PT Bank Muallamat	75.000.000.000	49.950.000.000	-	PT Bank Muallamat
PT Bank Mega	-	20.000.000.000	-	PT Bank Mega
PT Bank Panin Syariah	75.000.000.000	20.000.000.000	-	PT Bank Panin Syariah
PT Bank DBS Indonesia	-	10.000.000.000	10.000.000.000	PT Bank DBS Indonesia
Sub Jumlah	152.788.453.921	110.003.414.874	13.321.631.553	Sub total
Jumlah	457.460.897.057	441.167.637.947	195.179.346.012	Total

5. PIUTANG USAHA

5. ACCOUNT RECEIVABLE

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	31 Desember / December 31,			
	2014	2013	2012	
a. Pihak-Pihak Berelasi :				a. Related Parties :
Piutang Jasa Konstruksi	55.144.145.595	109.915.585.164	44.836.740.927	Construction Service Receivable
Piutang Joint Operation	166.522.496.498	20.256.778.848	43.104.671.494	Joint Operation Receivable
Piutang Retensi	96.027.401.819	55.211.446.372	41.079.294.056	Retention Receivable
Piutang Jasa Alat	89.361.496	89.361.496	110.540.946	Equipment Service Receivable
Piutang Produk Beton	3.467.753.467	62.525.000	-	Concrete Product Receivable
Sub Jumlah	321.251.158.874	185.635.696.879	129.131.247.423	Sub total
b. Pihak Ketiga :	52.763.251.793	28.013.944.681	5.026.100.564	b. Third parties :
Jumlah	374.014.410.667	213.649.641.560	134.157.347.987	Total

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian adalah sebagai berikut :

a. Pihak-Pihak Berelasi :

Piutang Jasa Konstruksi

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	<u>Construction Services Receivable</u>		
		2014	2013	2012
Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / Department of Civil Works, Government of DKI Jakarta Province	Proyek Jeda Gunung Sahari JUFMP-1 / Jeda Gunung Sahari JUFMP-1 Project	13.480.562.028	3.520.630.473	-
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga / Department of Tourism, Culture, Youth and Sport	Proyek Kolam Renang Bekasi IV / Bekasi IV Swimming Pool Project	7.827.980.146	-	-
PPK Bidang Bina Marga Dinas Binamarga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi / Highway departement and water resources implementation of Bekasi Regency	Pembangunan Overpass Tegal Danas / Tegal Danas Overpass Construction	7.424.993.864	-	-
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi / Department of Tourism, Culture, Youth and Sport of Bekasi District	Proyek Gedung Graha Pariwisata Bekasi / Graha Pariwisata Bekasi Building Project	5.712.320.124	-	-
Dep. PU Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII / Minister of Civil Work River Area Hall of Sumatera VIII	Proyek Irigasi Air Lakitan 2 / Air Lakitan 2 Irrigation Project	144.903.661	8.594.804.940	1.849.190.922
PT PLN (Persero)	Proyek MHP Ndungga-Flores / MHP Ndungga - Flores Project	6.246.046.002	3.178.589.547	3.563.693.481
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum / Directorate general of Water Resources - Department of Civil ...	Proyek Irigasi Komering Stage II / Komering Stage II Irrigation Project	-	5.362.541.054	-
Pemerintah RI yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah -3 Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / Republic of Indonesia represents by the Commitment Maker of Irrigation Area - 3, Large Hall Sumatera VIII River	Proyek Komering Paket ICB 6 / Komering Package ICB 6 Project	-	13.180.363.128	-
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi / Department of Tourism, Culture, Youth and Sport of Bekasi District	Proyek Kolam Renang Bekasi III / Bekasi III Swimming Pool Project	-	9.045.210.910	-
Dinas Bangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi / Building Department of Bekasi District Government	Proyek Gedung E2 Rumah Sakit Bekasi / Bekasi Hospital Building E2 Project	-	17.232.345.513	-
PPK Sungai Pantai II, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Brantas / PPK Beach River II, SNVT Network Implementer of Brantas Water Resources	Proyek Wonokromo Paket 3 / Wonokromo Package 3 Project	-	5.129.650.748	-
PT Perhutani	Proyek Pabrik Plywood/ Plywood Factory Project	-	1.711.147.878	14.565.648.838
PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau / PPK field of Highways of Civil Works Department of Riau Province	Proyek Jln Bunut Teluk Meranti / Bunut Teluk Meranti Road Project	-	13.845.078.984	16.403.438.467
JO BA-Waskita- Wika	Proyek Tunnel Bendung Jatibarang / Jatibarang Weir Tunnel Project	6.142.540.333	13.360.183.137	2.031.503.647
Lain-lain (di bawah Rp 5.000.000.000,-) / Others (below Rp 5.000.000.000,-)		8.164.799.437	15.755.038.854	6.423.265.572
Sub Jumlah / Sub total		55.144.145.595	109.915.585.164	44.836.740.927
<u>Piutang Joint Operation</u>		<u>Joint Operation Receivable</u>		
SNVT Pelaksanaan Jaringan SDA Serayu Opak BBWS Serayu Opak, Dirjen SDA Pekerjaan Umum / SNVT of Serayu Opak Water Resources Network Implementation Director General BBWS Serayu Opak, Department Natural Resources of Civil Works.	JO Proyek Sabodam Merapi / Sabodam Merapi JO Project	15.391.185.876	7.287.321.060	-
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		15.391.185.876	7.287.321.060	-

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

5. ACCOUNT RECEIVABLE (Continued)

a. Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan) :
Piutang Joint Operation

a. Related Parties (Continued) :
Joint Operation Receivable

<u>Pemberi Kerja / Employer</u>	<u>Proyek / Project</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Jumlah pindahan		15.391.185.876	7.287.321.060	-
Direktorat Jenderal Jalan Nasional Kementerian PU / Directorate General of National Road of PU Ministry	JO Proyek Tebas Singkawang / Tebas Singkawang JO Project	10.924.154.381	-	-
PT PLN (Persero) Jakarta	JO Proyek Bintang Bano / Bintang Bano JO Project	11.611.207.229	3.794.883.046	20.284.049.273
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I Provinsi NTB, BWS Nusa Tenggara I, Dirjen SDA, Kementerian P.U. / SNVT of Network Implementation of Southeast Nusa I Water Resources, Directorate General of Natural Resources of Ministry of Civil Works	JO Proyek Pandanduri / Pandanduri JO Project	16.371.380.349	5.751.098.145	-
PT Angkasa Pura 1 (Persero)	JO Gedung Bandara Juanda / Juanda Airport Building JO	13.813.665.274	3.423.476.597	-
PU Bengawan Solo / Bengawan Solo Civil of Works	JO Proyek Bendung Sembayat / Sembayat Weir JO Project	37.068.989.816	-	10.519.930.297
Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Sumberdaya Air, balai besar wilayah sungai Pemali Juana, SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang / Department of Civil Works, Directorate General of Water Resources, Pemali Juana Large Hall River Area, SNVT Jatibarang Reservoir Construction	JO Proyek Jatibarang Swa / Jatibarang Swa JO Project	26.986.342.401	-	12.300.691.924
Balai Besar wilayah Sungai Sumatera VIII, Bagian Pelaksana Kegiatan Penyediaan Air Baku / Large Hall River Area Sumatera VIII, part implementing the activities of raw water supply	JO Air Baku lahat / Air Baku lahat JO	7.279.724.017	-	-
PT Sinergi Perkebunan Nusantara	JO Proyek Pabrik Kelapa Sawit / Pabrik Kelapa Sawit JO Project	13.057.400.021	-	-
Lain-lain (di bawah Rp 5.000.000.000,-) / Sub Jumlah / Sub total	Others (below Rp 5.000.000.000,-)	14.018.447.134	-	-
		166.522.496.498	20.256.778.848	43.104.671.494
Piutang retensi / Retention receivable		96.027.401.819	55.211.446.372	41.079.294.056
Piutang jasa alat / Equipment services receivable		89.361.496	89.361.496	110.540.946
Piutang produk beton / Concrete product receivable		3.467.753.467	62.525.000	-
Jumlah / Total		321.251.158.874	185.535.696.879	129.131.247.423

b. Pihak Ketiga :
Piutang Jasa Konstruksi

b. Third Party :
Construction Services Receivable

PT Megapower Makmur	Proyek PLTMH Bantaeng-1 / PLTMH Bantaeng-1 Project	1.746.075.753	207.240.000	-
PT Bio Jatropa Indonesia	Proyek PLMTH Cibalapulang / PLMTH Cibalapulang Project	11.831.074.319	-	2.461.311.490
PT Pembangunan Jaya Ancol	Proyek Ancol Geotube / Ancol Geotube Project	10.575.300	7.182.717.000	-
PT Poso Energy	Proyek PLTA Poso II / PLTA Poso II Project	-	1.477.347.967	1.691.563.412
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTMH Cianten / PLTMH Cianten Project	2.843.951.750	6.995.980.614	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTMH Cianten 3 / PLTMH Cianten 3 Project	8.358.490.275	2.945.693.636	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTMH Cianten 1B / PLTMH Cianten 1B Project	6.284.923.807	-	-
KSU Perumnas-PT Bakrie Pangripta Loka	Proyek Apartemen Sentra Timur / Apartement is Sentra East Project	1.518.331.818	-	-
PT Pembangkit Pusaka	Proyek PLTM Pusaka 3 / PLTM Pusaka 3 Project	275.798.568	-	-
Cadangan kerugian penyisihan nilai / Allowance for impairment losses		-	-	(214.215.445)
Sub Jumlah / Sub total		32.869.221.590	18.808.979.217	3.938.659.457
Piutang retensi / Retention receivable		17.967.230.203	9.034.260.919	1.087.441.106
Piutang jasa konsultan / Consultant services receivable		1.926.800.000	170.704.545	-
Jumlah / Total		52.763.251.793	28.013.944.681	5.026.100.564

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

b. Pihak Ketiga (Lanjutan):
Piutang Jasa Konstruksi (Lanjutan)

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (bulan) adalah sebagai berikut :

Jenis piutang / Receivable Type	Umur Piutang (Bulan) / Aging Receivable (Months)
Piutang usaha	0-12
	>12-15
	>15-18
	>18-21
	>21-24
	>24-27
	>27-30
	>30-33
	>33-36

Piutang usaha dijamin pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai jaminan dari fasilitas kredit yang diterima. (lihat catatan No. 3d,3e,3g,18,33 dan 35)

5. ACCOUNT RECEIVABLE (Continued)

b. Third Party (Continued):
Construction Services Receivable (Continued)

Total account receivable based on its aging (months) is as follow :

	2014	2013	2012
	374.014.410.667	213.549.641.560	134.157.347.987
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Account receivables pledged in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk and PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk as collateral from the loan obtained. (see notes No. 3d,3e,3g,18,33 and 35)

6. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
Klaim CAR	5.083.273.361	-	-
Lapindo Brantas Inc.	1.088.635.000	1.188.635.000	8.288.635.000
Pegawai	142.094.265	70.210.000	33.400.000
PT Poso Energy	-	-	1.488.000.000
JO Jatibarang	-	-	1.200.306.934
Lain	145.099.800	9.191.480	52.259.902
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(188.436.881)
Jumlah	6.459.102.426	1.268.036.480	10.874.165.155

Piutang Klaim CAR per 31 Desember 2014 merupakan klaim asuransi konstruksi atas rusaknya pekerjaan jembatan akibat banjir pada Proyek Pembangunan Jalan Dekal Oksibil.

Piutang kepada Lapindo Brantas Inc. per 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 sesuai dengan akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Antara PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Lapindo Brantas, Inc. No. 02 tanggal 6 Desember 2012 notaris Wihiek Widhi Astuti, SH bahwa penyelesaian kewajiban oleh pihak Lapindo Brantas Inc. dilakukan dengan pembayaran melalui bilyet giro BNI nomor BE 347881 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bilyet giro BNI nomor BE 347894 tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diganti dengan bilet giro Bank Mega No. GJ 246141 tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), bilet giro Bank Mega No. GJ 246142 tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan bilet giro Bank Mega No. GJ 246144 tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Pada tahun 2012 telah diterima oleh Perusahaan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), tahun 2013 sebesar Rp 7.100.000.000,- (tujuh miliar seratus juta rupiah) dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Piutang lain-lain kepada PT Poso Energy per 31 Desember 2012 merupakan klaim keterlambatan pembayaran tagihan atas proyek pembangunan pekerjaan weir dan headpond PLTA Poso II. Piutang tersebut telah diterima pencairannya tahun 2013. (lihat Catatan No.3e,3g,35).

6. OTHERS RECEIVABLE - THIRD PARTY

This account consists of :

	2014	2013	2012
Klaim CAR	5.083.273.361	-	-
Lapindo Brantas Inc.	1.088.635.000	1.188.635.000	8.288.635.000
Employee	142.094.265	70.210.000	33.400.000
PT Poso Energy	-	-	1.488.000.000
JO Jatibarang	-	-	1.200.306.934
Others	145.099.800	9.191.480	52.259.902
Impairment loss	-	-	(188.436.881)
Total	6.459.102.426	1.268.036.480	10.874.165.155

CAR claims receivable as at 31 December 2014 is the construction of an insurance claim for damage caused by flooding bridge work on road construction project Dekal Oksibil.

Receivable from Lapindo Brantas Inc. on September 30, 2014 in accordance with the Deed of Settlement Agreement Between PT Brantas Abipraya (Persero) and Lapindo Brantas, Inc. No. 02 dated December 6, 2012 notary Wihiek Widhi Astuti, SH that settlement obligations by Lapindo Brantas Inc. made with payment via BNI bilyet giro number BE 347 881 dated December 20, 2012 amounted of Rp 1.500.000.000,- (one billion five hundred million rupiahs) and BNI bilyet giro number BE 347894 dated February 4, 2013 amounted of Rp 8.500.000.000,- (eight billion five hundred million rupiahs) which has been replaced with Mega Bank bilyet giro No. GJ 246141 dated February 4, 2013 amounting to Rp 1.600.000.000,- (one billion six hundred million rupiahs) Mega Bank bilyet giro No. GJ 246142 dated February 18, 2013 amounting to Rp 1.600.000.000,- (one billion six hundred million rupiahs) and Mega Bank bilyet giro No. GJ 246144 dated March 4, 2013 amounting to Rp 5.300.000.000,- (five billion three hundred million rupiahs). In 2012, Company has received total amount to Rp 1.500.000.000,- (one billion five hundred million rupiahs), in 2013 total amount to Rp 7.100.000.000,- (seven billion one hundred million rupiahs).

Others receivable from PT Poso Energy on December 31, 2012 is a claim of delay in payment billed for weir development project and headpond headpond PLTA Poso II. The receivable was received disbursements in 2013. (see Note No.3e,3g and 35).

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
Biaya konstruksi	113.265.818.469	1.356.950.066.511	896.142.454.512
Laba yang Diakui	2.152.050.550.913	85.812.318.266	56.671.253.730
Sub Jumlah	2.265.316.369.382	1.442.762.384.777	952.813.708.243
Penagihan Termin	(2.045.168.197.013)	(1.367.740.083.161)	(722.918.153.252)
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	220.148.172.369	76.022.301.616	229.895.554.991

7. GROSS AMOUNT DUE TO EMPLOYER

This account consists of :

Cost of Contract
Recognized Profit
Sub total
Progress Billing
Gross amount due to employers

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (Lanjutan)

7. GROSS AMOUNT DUE TO EMPLOYER (Continued)

Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja atas pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Details of amount due from customers for contract in progress are as follows:

a. Pihak-pihak Berelasi :

a. Related Parties :

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Dinas PU Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo / Department of public works and copyrighted work spatial Sidoarjo district	Proyek Gedung Serbaguna Kabupaten Sidoarjo / Sidoarjo district multipurpose building project	11.125.063.282	-	-
Pemerintah DKI Jakarta / Government of DKI Jakarta	Proyek Pembangunan Bendung Wariori / Wariori Weir Construction Project	25.301.483.758	-	-
PPK Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat / PPK Copyright field, Civil Works Department of the Government of West Sumbawa	Proyek Pemb. RSUD Taliwang / Taliwang hospital construction project	13.268.799.091	-	-
Balai Pelaksana Jalan Nasional XI Manado, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Provinsi Sulut PPK. 10 Buyat-Molobog-Onggunoi / Implementation Hall of Manado Road National Road XI Manado, PIU Implementation Region II National Road North Sulawesi Province KDP. 10 Buyat-Molobog-Onggunoi	Proyek Pelebaran Jalan Pinolosian / Road Widening Project Pinolosian	11.312.988.384	-	-
Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) / Head Plant and Network of Java, Bali and Nusa Tenggara of PT PLN (Persero)	Proyek Pek.Accessroad Upper Cisokan / Accessroad Work of Upper Cisokan Project Upper Cisokan	19.409.591.049	-	-
PT Adhi Karya (Persero), Tbk Cabang II Riau-Sumbar / PT Adhi Karya (Persero), Tbk Riau Branch II- West Sumatera	Pemb. Jln Dalu2, Mahato, Simp. Menggala / Dalu2, Mahato, Simp. Menggala Road Construction	3.540.563.285	6.388.876.231	7.315.263.285
JO BA-Waskita-Wika	Proyek Tunnel Bendung Jatibarang / Jatibarang Weir Tunnel Project	5.957.207.953	1.063.885.205	12.068.599.300
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Santong / MHPP Santong Project	5.500.466.810	7.275.764.084	8.143.966.350
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Prafi-Papua Barat / MHPP Prafi-Papua Barat Project	8.033.497.329	1.551.955.198	12.966.011.446
Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA / Department of Civil Works Directorate General of Water Resources	Proyek Saluran Lempuing / Lempuing Stream Project	6.250.225.720	5.595.195.596	1.723.517.702
SNVT Pelaksanaan Jaringan SDA Serayu Opak BBWS Serayu Opak, Dirjen SDA Pekerjaan Umum / SNVT Natural Resources Network Implementation of Opak BBWS Serayu Opak, Directorate General of Natural Resources of Civil Works	Proyek Tanggap Darurat Gunung Merapi Kaliworo / Merapi Kaliworo Mountain VII Project	552.847.813	10.288.726.736	-
Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta / Indonesian Fisheries Public Housing Jakarta Branch	Proyek rehab Jaringan Instalasi PDAM Perum Perikanan / Rehabilitation of network installation PDAM of Fisheries	8.827.190.400	472.602.065	-
Pemerintah RI yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Wilayah - 3 Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / Republic of Indonesia represents by the Commitment Maker of Irrigation Area - 3 Large Hall River Area Sumatera VIII	Proyek Komering Paket ICB 6 / Komering Package ICB 6 Project	1.488.747.836	2.131.195.217	14.155.595.824
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum / Water Resources Directorate General - Department of Civil Works	Proyek Irigasi Komering Stage II / Komering Stage II Irrigation Project	390.971.711	1.626.037.908	9.851.456.476
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Ndungga Flores / MHPP Ndungga Flores Project	-	561.875.001	17.050.488.566
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		120.959.644.421	36.956.113.241	83.274.898.949

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (Lanjutan)

7. GROSS AMOUNT DUE TO EMPLOYER (Continued)

a. Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan):

a. Related Parties (Continued) :

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan		120.959.644.421	36.956.113.241	83.274.898.949
SNVT PPK Pembangunan Jalan Malala-Tolitoli-Umu / SNVT PPK Malala-Tolitoli-Umu Road Construction	Proyek Jalan ESH Lakuan Buol / ESH Lakuan Buol Road Construction Project	-	1.727.188.970	12.164.280.754
Satker Non Vertikal tertentu Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Management Implementor of Brantas Water Resources	Proyek Bajulmati 2 / Bajulmati 2 Project	-	398.036.958	36.122.423.055
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) / Working Unit Implementor of Papua Province Area V National Road (Puncak Jaya)	Proyek Jalan Dekai Oksibil / Dekai Oksibil Street Project	-	-	21.577.970.000
Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kaltim Bidang SDA / Department of Civil Works of East Kalimantan Province in the field of Water Resources	Proyek Bendung Marangkayu 6 / Marangkayu 6 Weir Project	-	-	6.221.539.454
Badan Penanggulangan Bencana / Disaster Prevention Board	Proyek Merapi VI / Merapi VI Project	-	-	6.255.869.842
PT Sanghyang Seri (Persero)	Proyek Cetak Sawah Ketapang / Ketapang Print Field Project	-	-	15.995.610.361
Lain-lain (di bawah Rp 5.000.000.000,-) / Others (below Rp 5.000.000.000,-)		28.016.066.449	13.943.763.317	13.734.919.347
Cadangan kerugian penyisihan nilai / Allowance for impairment losses		-	-	(926.387.054)
Sub jumlah / Sub total		148.975.710.870	53.025.102.486	194.421.124.709

b. Pihak Ketiga :

b. Third party :

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
PT Bio Jatropha Indonesia	Proyek PLTMH Cibalapulang 2+3 / PLTMH Cibalapulang 2+3 Project	3.595.869.208	-	-
PT Bio Jatropha Indonesia	Proyek PLTMH Cibalapulang 2 (2x3,25 MW) / PLTMH Cibalapulang 2 (2x3,25 MW)	2.808.824.608	-	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Cianten 1-B / PLTM Cianten 1-B Project	8.274.907.872	-	-
PT Duta Dharma Sinarmas	Proyek Capitol Primera City / Capitol Primera City Project	3.669.929.176	-	-
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Proyek PLTM Pusaka 3 / PLTM Pusaka 3 Project	3.972.027.334	-	-
Pemerintah Republik Timur Leste / Government of Republic of Timor	Proyek Rehab Reibere / Rehabilitation Reibere Project	-	3.691.752.831	-
Pemerintah Republik Timur Leste / Government of Republic of Timor Leste	Proyek Rehab Reibere Lanjutan/ Rehabilitation Reibere Project	6.078.504.840	-	-
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Proyek PLTM Pusaka 1 & 3 / PLTM Pusaka 1 & 3 Project	8.979.809.594	5.413.617.041	-
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Proyek Ancol Geotube / Ancol Geotube Project	2.829.012	239.878.981	33.646.413.015
PT Bio Jatropha Indonesia	Proyek PLTMH Cibalapulang / PLTMH Cibalapulang Project	4.613.594.119	5.272.731.235	1.502.842.311
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Ciantem / PLTM Ciantem Project	4.905.606.972	6.245.177.123	325.174.956
PT Megapower Makmur	Proyek PLTMH Bantaeng 1 / PTMH Bantaeng 1 Project	10.134.542.649	903.346.628	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Ciantem 3 / PLTM Ciantem 3 Project	8.101.207.799	230.740.290	-
KSU Perumnas-PT Bakrie Pangripta Loka	Proyek Apartemen Sentra Timur / The project centers apartement east	2.492.160.121	-	-
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Kantor Pemasaran & Pelayanan Manyar / Manyar marketing and service offices	3.542.648.194	-	-
Sub jumlah / Sub total		71.172.461.499	21.997.244.130	35.474.430.282
Jumlah / Total		220.148.172.369	75.022.346.616	229.895.554.991

7. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (Lanjutan)

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan prestasi fisik pekerjaan yang telah disetujui oleh pemberi kerja, akan tetapi belum ditagihkan karena perbedaan tanggal antara berita acara prestasi fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan. (lihat catatan No. 3d,3e,35)

7. GROSS AMOUNT DUE TO EMPLOYER (Continued)

Gross amount due from employer is a physical accomplishment of work that has been approved by the employer, but has not been charged because of the difference between the date of the minutes of physical achievement with billing submission on the statements of financial position. (see notes No.3d,3e,35)

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Bahan untuk konstruksi	33.640.766.937	33.631.927.315	22.367.845.396	Material for construction
BBM dan pelumas	2.330.414.347	2.111.601.116	697.701.527	Fuel oil and lubricant
Suku cadang	2.713.170.109	248.712.800	252.215.260	Spare parts
Tanah	190.250.000	190.250.000	190.250.000	Land
Produk Beton	1.061.567.452	-	-	Precast Product
Lainnya	-	1.292.119.852	693.252.967	Other
Jumlah	39.936.168.845	37.474.611.083	24.201.265.150	Total

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan untuk persediaan tidak diperlukan karena tingkat perputaran persediaan yang cukup tinggi.

Persediaan tanah merupakan persediaan tanah yang berasal dari pelunasan piutang yang dibayar dengan 3 (tiga) bidang Tanah di Bekasi, sertifikat No. 02372, 02373 dan 02374 sesuai dengan akta Kuasa Menjual No. 51, 52, 53 dan 54 tanggal 28 Maret 2007. (lihat catatan no.3h)

8. INVENTORIES

This account consists of :

	2014	2013	2012	
Bahan untuk konstruksi	33.640.766.937	33.631.927.315	22.367.845.396	Material for construction
BBM dan pelumas	2.330.414.347	2.111.601.116	697.701.527	Fuel oil and lubricant
Suku cadang	2.713.170.109	248.712.800	252.215.260	Spare parts
Tanah	190.250.000	190.250.000	190.250.000	Land
Produk Beton	1.061.567.452	-	-	Precast Product
Lainnya	-	1.292.119.852	693.252.967	Other
Jumlah	39.936.168.845	37.474.611.083	24.201.265.150	Total

Based on the review of inventories' physical condition at the end of the year, the Company's management believes that the allowance for inventory is not necessary because turnover level of inventories is quite high.

Land inventory is an inventory of land which derived from the settlement of receivables paid with three (3) parcels of land in Bekasi, certificate No. 02372, 02373 and 02374 in accordance with the Deed of Authorization to Sell No. 51, 52, 53 and 54 dated March 28, 2007. (see note no.3h)

9. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Supplier / pemasok	17.245.216.997	17.906.343.830	10.548.149.521	Supplier
Subkontraktor	26.777.659.805	10.729.636.706	3.734.429.833	Subcontractor
Operasional	2.165.997.511	-	-	Operational
Konsultan	251.980.500	368.260.500	-	Consultant
Jumlah	46.440.854.813	29.004.241.037	14.282.579.354	Total

Uang muka supplier / pemasok merupakan uang muka atas pembelian dan pengadaan bahan / material untuk konstruksi sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan supplier.

Uang muka subkontraktor merupakan uang muka yang dibayarkan Perusahaan kepada subkontraktor sesuai dengan kontrak, untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan subkontraktor.

Uang muka operasional merupakan uang muka yang diberikan kepada pelaksana proyek untuk keperluan operasional proyek.

Uang muka konsultan merupakan uang muka atas kerjasama dalam pekerjaan Detailed Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Rongkong dan Baliase dengan PT Indonesia Hidro Consult.

9. ADVANCE

This account consists of :

	2014	2013	2012	
Supplier / pemasok	17.245.216.997	17.906.343.830	10.548.149.521	Supplier
Subkontraktor	26.777.659.805	10.729.636.706	3.734.429.833	Subcontractor
Operasional	2.165.997.511	-	-	Operational
Konsultan	251.980.500	368.260.500	-	Consultant
Jumlah	46.440.854.813	29.004.241.037	14.282.579.354	Total

Supplier advance represents advance on purchase and procurement of materials for construction in accordance with the purchase agreement letter which will be offset by the payment of supplier bills.

Subcontractor advance represents advance paid by Company to subcontractors in accordance with the contract, for the implementation of a project which will be offset with the payment of subcontractor bill.

Project advance represents advance given to the project operator to operate projects operational.

Consultant advance represents advance on cooperation in Detailed Engineering Design project of Rongkong and Baliase Power Plant Mini with PT Indonesia Hidro Consult.

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Pekerjaan persiapan	7.265.117.332	7.659.193.046	2.395.108.450	Preparation works
Pabrik Beton	7.407.564.743	-	-	Precast Factory
Peralatan proyek	1.314.831.705	5.939.959.262	4.473.709.201	Project equipment
Provisi bank dan jaminan	3.731.048.836	4.119.776.860	5.640.032.335	Bank provision and guarantee
Sewa rumah dan lahan	529.687.937	969.833.077	503.887.042	House and land rents
Asuransi	773.380.087	921.915.702	1.211.407.037	Insurance
Peralatan kantor/rumah tangga	231.228.965	159.707.741	325.151.818	Office equipment / household
Lain-lain	-	-	500.000.000	Others
Jumlah	21.252.859.604	19.770.385.689	15.049.295.883	Total

Beban dibayar dimuka peralatan proyek merupakan peralatan umum, kantor dan kendaraan yang akan dibiayai selama umur proyek sesuai dengan Nota Dinas Direksi No. 11/D/ND/KEU/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006. (lihat catatan No.3m)

10. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	2014	2013	2012	
Pekerjaan persiapan	7.265.117.332	7.659.193.046	2.395.108.450	Preparation works
Pabrik Beton	7.407.564.743	-	-	Precast Factory
Peralatan proyek	1.314.831.705	5.939.959.262	4.473.709.201	Project equipment
Provisi bank dan jaminan	3.731.048.836	4.119.776.860	5.640.032.335	Bank provision and guarantee
Sewa rumah dan lahan	529.687.937	969.833.077	503.887.042	House and land rents
Asuransi	773.380.087	921.915.702	1.211.407.037	Insurance
Peralatan kantor/rumah tangga	231.228.965	159.707.741	325.151.818	Office equipment / household
Lain-lain	-	-	500.000.000	Others
Jumlah	21.252.859.604	19.770.385.689	15.049.295.883	Total

Prepaid expenses of project equipment is general equipment, office and vehicles that will be charged over the project life in accordance with the Official Memorandum of Director No. 11/D/ND/KEU/X/2006 dated October 11, 2006. (see note No.3m)

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
Pajak Pertambahan Nilai	79.545.451.900	23.908.902.934	9.935.851.258
PPH final konstruksi	7.387.072.069	6.218.062.040	1.449.782.708
PPH pasal 22	24.135.363	71.824.675	22.900.920
PPH pasal 4 ayat (2)	11.397.273	17.910.000	-
Jumlah	86.968.056.606	30.216.699.650	11.408.534.886

Value Added Tax
Construction final income tax
Income tax art 22
Income tax art 4 paragraph 2
Total

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
PPH Final	16.131.553.134	6.172.325.496	5.530.072.009
PPH Pasal 23	2.349.041.051	960.690.887	976.383.271
PPH Pasal 21	892.370.385	509.003.590	372.150.106
PPH Pasal 4 ayat (2)	576.545.804	128.586.537	-
PPH Pasal 29	-	-	19.600.000
PPN Wapu	1.906.305.389	-	617.557.319
Jumlah	21.855.815.764	7.770.606.510	7.515.762.705

Final income tax
Income tax art 23
Income tax art 21
Income tax art 4 paragraph 2
Income tax art 29
Value Added Tax - Wapu
Total

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak Perusahaan dan tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo utang pajak tersebut.

Regarding the prevailing regulations, the Director General of Taxation can conduct tax audit for the Company and it is possible that the examination results differ from the tax payable balance.

c. (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
Pajak penghasilan final	(60.294.444.648)	(36.557.200.116)	(21.459.618.217)
Pajak kini	-	-	-
Pajak tangguhan	-	-	-
Jumlah	(60.294.444.648)	(36.557.200.116)	(21.459.618.217)

c. Benefit (Expenses) Income Tax

This account consists of :

Final income tax
Current tax
Deferred tax
Total

Pajak Final

Merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan konstruksi tahun 2014, 2013 dan 2012 masing - masing sebesar Rp 60.294.444.648,-, Rp 36.557.200.116,- dan Rp 21.459.618.217,- sesuai PP No. 40 Tahun 2009.

Final Tax

Is final income tax on construction income for the years of 2014, 2013 and 2012 are respectively Rp 60.294.444.648,-, Rp 36.557.200.116,- and Rp 21.459.618.217,- according to PP No. 40 Tahun 2009.

Pajak Kini

Perhitungan pajak kini sebagai berikut :

Current Tax

Current tax calculation is as follows :

	2014	2013	2012	
Laba konsolidasi sebelum beban pajak penghasilan	151.130.368.536	109.341.158.310	72.297.059.249	Consolidated profit before income tax expense
Dikurangi :				Less :
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(5.245.185.172)	(3.457.102.412)	99.086.709	Profit (loss) before income tax of subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan-Perusahaan	156.375.553.708	112.798.260.722	72.197.972.540	Profit before income tax of the holding company
Perbedaan permanen :				Permanent differences :
Laba atas pendapatan yang telah dikenakan PPh final	(156.375.553.708)	(112.798.260.722)	(72.197.972.540)	Profit from income that has charged by final income tax
Laba kena pajak	-	-	-	Taxable income
Jumlah pajak penghasilan kini	-	-	-	Total current income tax

Pada tahun 2014, 2013 dan 2012, seluruh pendapatan jasa konstruksi telah dikenakan PPh Final.

In 2014, 2013 and 2012, the entire construction services revenue has been subject to income tax Final.

Tidak terdapat (beban) manfaat pajak tangguhan dan aset (kewajiban) pajak tangguhan per 31 Desember tahun 2014, 2013 dan 2012 karena seluruh penghasilan perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak terdapat beda temporer yang akan dikompensasikan dimasa yang akan datang.

There is (expense) benefit and deferred tax assets (liabilities) as of December 31, 2014, 2013, and 2012 for the entire company income subjected to final income tax so that there are no temporary differences will be compensated in the future .

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebagai berikut :

Tahun 2014 :

- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00040/407/13/093/14 tanggal 3 Oktober 2014 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2013 sebesar Rp 7.237.458.860,-.
- Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor : KEP-00045.PPN/WPJ.19/KP.0403/2014 tanggal 16 April 2014 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2013 sebesar Rp 10.261.762.508,-.

Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan tahun 2014.

Tahun 2013 :

- Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor : KEP-00047.PPN/WPJ.19/KP.0403/2013 tanggal 7 Maret 2013 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus - Desember 2012 sebesar Rp 15.421.201.514,-.
- Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor : KEP-00130.PPN/WPJ.19/KP.0403/2013 tanggal 20 Juni 2013 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp 15.593.973.648,-.

Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan tahun 2013.

Tahun 2012 :

- Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor : KEP-00029.PPN/WPJ.19/KP.0303/2012 tanggal 8 Maret 2012 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2011 sebesar Rp 3.845.345.921,-.
- Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor : KEP-00027.PPN/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 25 Juli 2012 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012 sebesar Rp 6.130.516.789,-.
- Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor : KEP-00052.PPN/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 13 September 2012 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari-April 2012 sebesar Rp 6.040.951.338,-.
- Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Nomor : KEP-00069.PPN/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 19 November 2012 untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei-Juli 2012 sebesar Rp 7.628.013.794,-.

Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan tahun 2012. (lihat catatan No. 3n)

11. TAXATION (Continued)

The Company has received a Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) as follows:

Year 2014 :

- Tax assessments over value added tax paid for goods and services Number : 00040/407/13/093/14 dated October 3, 2014 for Value Added Tax for tax period of September 2013 amounting to Rp 7.237.458.860,-.
- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number : KEP-00045.PPN/WPJ.19/KP.0403/2014 dated April 16, 2014 for Value Added Tax for tax period of Juni 2013 amounting to Rp 10.261.762.508,-.

All of tax overpayment refund have been received by the Company in 2014.

Year 2013 :

- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number : KEP-00047.PPN/WPJ.19/KP.0403/2013 dated March 7, 2013 for Value Added Tax for tax period of August-December 2012 amounting to Rp 15.421.201.514,-.
- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number : KEP-00130.PPN/WPJ.19/KP.0403/2013 dated June 20, 2013 for Value Added Tax for tax period of March 2013 amounting to Rp 15.593.973.648,-.

All of tax overpayment refund have been received by the Company in 2013.

Year 2012 :

- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number : KEP-00029.PPN/WPJ.19/KP.0303/2012 dated March 8, 2012 for Value Added Tax for Tax Period of October 2011 amounting to Rp 3.845.345.921,-.
- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number : KEP-00027.PPN/WPJ.19/KP.0403/2012 dated July 25, 2012 for Value Added Tax for Tax Period of January 2012 amounting to Rp 6.130.516.789,-.
- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number : KEP-00052.PPN/WPJ.19/KP.0403/2012 dated September 13, 2012 for Value Added Tax for tax period of February - April 2012 amounting to Rp 6.040.951.338,-.
- Letter of Tax Refund Excess Payment (SKPKPP) Number : KEP-00069.PPN/WPJ.19/KP.0403/2012 dated November 19, 2012 for Value Added Tax for tax period of May-July 2012 amounting to Rp 7.628.013.794,-.

All of tax overpayment refund have been received by the Company in 2012. (see note No. 3n)

12. JAMINAN

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Jaminan fasilitas SKBDN	126.307.939	9.544.617.249	6.503.942.603	SKBDN facility guarantee
Jaminan pemeliharaan	-	332.009.932	413.219.647	Maintenance guarantee
Jaminan uang muka	257.495.420	816.857.347	219.857.347	Advance guarantee
Jaminan pelaksanaan	392.181.827	57.347.120	544.558.410	Implementation guarantee
Jumlah	775.985.186	10.750.831.648	7.681.578.007	Total

Merupakan saldo dana Perusahaan yang ditahan oleh pihak bank dan lembaga keuangan non bank.

Jaminan fasilitas SKBDN kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan PT Bank DBS Indonesia sedangkan jaminan pemeliharaan, uang muka dan pelaksanaan kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

12. GUARANTEE

This account consists of :

	2014	2013	2012	
Jaminan fasilitas SKBDN	126.307.939	9.544.617.249	6.503.942.603	SKBDN facility guarantee
Jaminan pemeliharaan	-	332.009.932	413.219.647	Maintenance guarantee
Jaminan uang muka	257.495.420	816.857.347	219.857.347	Advance guarantee
Jaminan pelaksanaan	392.181.827	57.347.120	544.558.410	Implementation guarantee
Jumlah	775.985.186	10.750.831.648	7.681.578.007	Total

This is the Company fund balance held by the bank and non-bank financial institutions.

SKBDN facility guarantee kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan PT Bank DBS Indonesia sedangkan jaminan pemeliharaan, uang muka dan pelaksanaan kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

13. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari :

2014	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir / Ending Balance	2014
Nilai Perolehan :					Acquisition cost :
Pemilikan langsung :					Direct own :
Hak atas tanah	179.436.580.000	36.636.697.759	-	216.073.277.759	Right on land
Bangunan	4.991.509.000	-	-	4.991.509.000	Building
Bangunan kantor pusat	43.097.780.167	-	-	43.097.780.167	Head office building
Alat besar	41.226.008.517	12.456.510.689	1.958.880.553	51.723.638.653	Heavy equipment
Kendaraan	1.359.939.431	-	-	1.359.939.431	Vehicle
Peralatan umum	28.932.134.565	1.855.591.339	-	30.787.725.904	General equipment
Peralatan kantor/ RT	1.963.392.233	106.983.000	-	2.070.375.233	Office equipment / household
Bangunan dalam pelaksanaan	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	Building in progress
Konstruksi dalam penyelesaian	-	3.562.313.372	-	3.562.313.372	Construction in completion
Sub jumlah	301.007.343.913	56.618.096.159	1.958.880.553	355.666.559.519	Sub total
Aset Sewa Pembiayaan :					Lease assets :
Alat besar	82.043.865.079	73.493.620.635	2.530.490.909	153.006.994.805	Heavy equipment
Peralatan umum	4.176.686.364	-	-	4.176.686.364	General equipment
Sub jumlah	86.220.551.443	73.493.620.635	2.530.490.909	157.183.681.169	Sub total
Jumlah	387.227.895.356	130.111.716.794	4.489.371.462	512.850.240.688	Total
Akumulasi Penyusutan :					Accumulated Depreciation :
Pemilikan langsung :					Direct own :
Bangunan	1.625.452.924	249.575.440	-	1.875.028.364	Building
Bangunan kantor pusat	5.387.222.520	2.154.889.009	-	7.542.111.529	Head office building
Alat besar	31.270.920.350	9.262.202.817	1.958.880.553	38.574.242.614	Heavy equipment
Kendaraan	1.340.929.717	19.009.632	-	1.359.939.349	Vehicle
Peralatan umum	21.764.541.816	2.111.918.119	-	23.876.459.935	General equipment
Peralatan kantor/ RT	1.816.486.386	107.088.266	-	1.923.574.652	Office equipment / household
Sub jumlah	63.205.553.713	13.904.683.283	1.958.880.553	75.151.356.443	Sub total
Aset Sewa Pembiayaan :					Lease assets :
Alat besar	41.281.419.356	36.998.682.149	2.520.490.909	75.759.610.596	Heavy equipment
Peralatan umum	3.149.174.436	256.877.985	-	3.406.052.421	General equipment
Sub jumlah	44.430.593.792	37.255.560.134	2.520.490.909	79.165.663.017	Sub total
Jumlah	107.636.147.505	51.160.243.417	4.479.371.462	154.317.019.460	Total
Nilai Buku	279.591.747.851			358.533.221.228	Book Value

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Penambahan tanah pada tahun 2014 sebesar Rp 36.636.697.759,- terdiri dari :

1. Tanah di Subang sebesar Rp 32.810.700.000,-
2. Tanah di Sunter sebesar Rp 540.600.000,-
3. Tanah milik PT Sahung Brantas Energi - entitas anak PT Brantas Energi sebesar Rp 2.281.497.759,-
4. Tanah milik PT Brantas Cakrawala Energi - entitas anak PT Brantas Energi sebesar Rp 556.400.000,-
5. Tanah milik PT Brantas Adya Surya Energi - entitas anak PT Brantas Energi sebesar Rp 447.500.000,-

Penambahan bangunan dalam pelaksanaan pada tahun 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- merupakan bangunan kantor regional Surabaya.

Penambahan konstruksi dalam penyelesaian pada tahun 2014 sebesar Rp 3.562.313.372,- merupakan progres pembangunan PLTM Padang Guci milik PT Sahung Brantas Energi - entitas anak PT Brantas Energi.

13. FIXED ASSETS (Continued)

Addition of right on land in 2014 amounting to Rp 36.636.697.759,- consists of :

1. Land on Subang amounting to Rp 32.810.700.000,-.
2. Land on Sunter amounting to Rp 540.600.000,-.
3. Land owned by PT Sahung Brantas Energi - subsidiary of PT Brantas Energi amounting to Rp 2.281.497.759,-.
4. Land owned by PT Brantas Cakrawala Energi - subsidiary of PT Brantas Energi amounting to Rp 556.400.000,-.
5. Land owned by PT Brantas Adya Surya Energi - subsidiary of PT Brantas Energi amounting to Rp 447.500.000,-.

Addition of building in progress in 2014 amounting to Rp 2.000.000.000,- is office building of Surabaya region.

Addition of construction in completion in 2014 amounting to Rp 3.562.313.372,- is construction progress of Padang Guci PLTM owned by PT Sahung Brantas Energi - subsidiary of PT Brantas Energi.

2013	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir / Ending Balance	2013
Nilai Perolehan :					Acquisition cost :
<u>Pemilikan langsung :</u>					<u>Direct own :</u>
Hak atas tanah	178.956.580.000	480.000.000	-	179.436.580.000	Right on land
Bangunan	4.991.509.000	-	-	4.991.509.000	Building
Bangunan kantor pusat	43.097.780.167	-	-	43.097.780.167	Head office building
Alat besar	37.330.036.987	6.364.062.100	2.468.090.570	41.226.008.517	Heavy equipment
Kendaraan	1.442.350.411	-	82.410.980	1.359.939.431	Vehicle
Peralatan umum	26.809.440.367	2.141.444.198	18.750.000	28.932.134.565	General equipment Office equipment / household
Peralatan kantor/ RT	1.963.392.233	-	-	1.963.392.233	
Sub jumlah	294.591.089.165	8.985.506.298	2.569.251.550	301.007.343.913	Sub total
<u>Aset Sewa Pembiayaan :</u>					<u>Lease assets :</u>
Alat besar	43.231.609.640	38.812.255.439	-	82.043.865.079	Heavy equipment
Peralatan umum	4.176.686.364	-	-	4.176.686.364	General equipment
Sub jumlah	47.408.296.004	38.812.255.439	-	86.220.551.443	Sub total
Jumlah	341.999.385.169	47.797.761.737	2.569.251.550	387.227.895.356	Total
Akumulasi Penyusutan :					Accumulated Depreciation :
<u>Pemilikan langsung :</u>					<u>Direct own :</u>
Bangunan	1.375.877.475	249.575.449	-	1.625.452.924	Building
Bangunan kantor pusat	3.232.333.512	2.154.889.008	-	5.387.222.520	Head office building
Alat besar	31.098.171.385	2.630.679.915	2.457.930.950	31.270.920.350	Heavy equipment
Kendaraan	1.416.786.398	6.554.299	82.410.980	1.340.929.717	Vehicle
Peralatan umum	19.243.601.318	2.539.690.498	18.750.000	21.764.541.816	General equipment Office equipment / household
Peralatan kantor/ RT	1.728.748.037	87.738.349	-	1.816.486.386	
Sub jumlah	58.095.518.125	7.669.127.518	2.559.091.930	63.205.553.713	Sub total
<u>Aset Sewa Pembiayaan :</u>					<u>Lease assets :</u>
Alat besar	17.585.503.306	23.695.916.050	-	41.281.419.356	Heavy equipment
Peralatan umum	2.806.670.460	342.503.976	-	3.149.174.436	General equipment
Sub jumlah	20.392.173.766	24.038.420.026	-	44.430.593.792	Sub total
Jumlah	78.487.691.891	31.707.547.544	2.559.091.930	107.636.147.505	Total
Nilai Buku	263.511.693.278			279.591.747.851	Book Value

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

For the years ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Stated in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

31 Desember 2012	Saldo Awal / Beginning	Penambahan / Addition	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir / Ending Balance	December 31, 2012
Nilai Perolehan :					Acquisition cost :
Pemilikan langsung :					Direct own :
Hak atas tanah	26.745.100.000	152.211.480.000	-	178.956.580.000	Right on land
Bangunan	12.622.036.000	-	7.630.527.000	4.991.509.000	Building
Bangunan kantor pusat	36.993.358.567	6.104.421.600	-	43.097.780.167	Head office building
Alat besar	34.107.644.487	4.000.000.000	777.607.500	37.330.036.987	Heavy equipment
Kendaraan	1.442.350.411	-	-	1.442.350.411	Vehicle
Peralatan umum	24.901.832.867	1.907.607.500	-	26.809.440.367	General equipment
					Office equipment / household
Peralatan kantor/ RT	1.608.392.233	355.000.000	-	1.963.392.233	
Sub jumlah	138.420.714.565	164.578.509.100	8.408.134.500	294.591.089.165	Sub total
Aset Sewa Pembiayaan :					Lease assets :
Alat besar	28.573.259.640	14.658.350.000	-	43.231.609.640	Heavy equipment
Peralatan umum	4.176.686.364	-	-	4.176.686.364	General equipment
Sub jumlah	32.749.946.004	14.658.350.000	-	47.408.296.004	Sub total
Jumlah	171.170.660.569	179.236.859.100	8.408.134.500	341.999.385.169	Total
Akumulasi Penyusutan :					Accumulated Depreciation :
Pemilikan langsung :					Direct own :
Bangunan	2.843.170.600	249.575.450	1.716.868.575	1.375.877.475	Building
Bangunan kantor pusat	924.833.964	2.307.499.548	-	3.232.333.512	Head office building
Alat besar	30.936.372.341	743.955.201	582.156.157	31.098.171.385	Heavy equipment
Kendaraan	1.407.829.587	8.956.811	-	1.416.786.398	Vehicle
Peralatan umum	16.327.832.143	2.915.769.175	-	19.243.601.318	General equipment
					Office equipment / household
Peralatan kantor/ RT	1.553.271.331	175.476.706	-	1.728.748.037	
Sub jumlah	53.993.309.966	6.401.232.891	2.299.024.732	58.095.518.125	Sub total
Aset Sewa Pembiayaan :					Lease assets :
Alat Besar	13.108.565.082	4.476.938.224	-	17.585.503.306	Heavy equipment
Peralatan umum	2.349.998.493	456.671.967	-	2.806.670.460	General equipment
Sub jumlah	15.458.563.575	4.933.610.191	-	20.392.173.766	Sub total
Jumlah	69.451.873.541	11.334.843.082	2.299.024.732	78.487.691.891	Total
Nilai Buku	101.718.787.028			263.511.693.278	Book Value

Aset tetap dijamin pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai jaminan dari fasilitas kredit yang diterima.

Fixed assets pledged in PT Bank Mandiri (Persero), Tbk as collateral from the loan obtained.

Aset tetap bangunan dan peralatan diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan beberapa paket polis asuransi, dengan nilai pertanggung jawaban sebagai berikut :

Fixed assets in the form of building and equipment are insured against the risk of earthquake, fire and other risks under some insurance policy package, with coverage as follows :

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

a. Berdasarkan jenis aset :

a. Based on assets :

	2014	2013	2012	
Alat-alat berat :				Heavy equipments :
- Rupiah	59.973.391.300	74.798.255.300	60.068.393.300	Rupiah -
- Dolar Amerika Serikat	819.500	-	-	United State Dollar -
- Yen Jepang	35.500.000	-	-	Japan Yen -
Bangunan	5.098.000.000	5.098.000.000	8.388.000.000	Building
Bangunan kantor pusat dan fasilitas	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000	Head office and facility
Jumlah	143.107.710.800	304.352.648.600	146.456.393.300	Total

b. Berdasarkan Perusahaan Asuransi :

b. Based on Insurers :

	2014	2013	2012	
PT Jasa Raharja Putera				PT Jasa Raharja Putera
- Rupiah	120.730.796.000	120.897.310.000	133.211.770.050	Rupiah -
- Dolar Amerika Serikat	819.500	-	-	United State Dollar -
- Yen Jepang	35.500.000	-	-	Japan Yen -
Astra Sedaya Finance (ACC)	4.836.300.000	19.494.650.000	-	Astra Sedaya Finance (ACC)
PT Sumitomo (SMFL)	17.504.295.300	17.504.295.300	-	PT Sumitomo (SMFL)
PT Asuransi Ramayana	-	-	5.543.953.250	PT Asuransi Ramayana
PT Asuransi Astra Buana	-	-	7.700.670.000	PT Asuransi Astra Buana
Jumlah	143.107.710.800	304.352.648.600	146.456.393.300	Total

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi. (lihat catatan No. 3j, 17, 23, 30 dan 31).

Management believes that the insurance on the assets of the insured is adequate to cover possible losses. (see notes No. 3j, 17, 23, 30 and 31).

14. ASET LAIN-LAIN

14. OTHER ASSETS

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	2014	2013	2012	
Aset non produktif	2.975.575.411	2.975.575.411	3.650.753.782	Non productive assets
Akumulasi penyusutan aset tetap non produktif	(2.975.575.411)	(2.975.575.411)	(3.650.753.782)	Accumulated depreciation of non productive fix assets
Material / suku cadang non produktif	489.299.332	489.299.332	489.299.332	Material / non productive spare part
Penyisihan penurunan material / suku cadang non produktif	(489.299.332)	(489.299.332)	(489.299.332)	Allowance for impairment material / non productive sparepart
Piutang ragu-ragu	326.147.909	326.147.909	326.147.909	Allowance for doubtful account
Penyisihan penurunan piutang	(326.147.909)	(326.147.909)	(326.147.909)	Allowance for impairment of receivable
Jumlah	-	-	-	Total

15. BEBAN TANGGUHAN

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Sosialisasi dan perijinan	6.476.263.135	4.109.475.955	1.609.000.000	Socialization and legalization
Survei	7.722.163.248	1.386.125.163	420.889.042	Survey
Konsultansi	6.349.214.419	3.146.450.800	1.096.000.000	Consultant
Pembebasan tanah	2.228.058.784	1.394.066.941	-	Land acquisition
Presentasi	1.355.615.847	545.092.342	576.503.130	Presentation
Perjalanan dinas	-	31.160.099	31.160.099	Official travel
Jumlah	24.131.315.433	10.612.371.300	3.733.552.271	Total

Beban pengembangan tangguhan tersebut tersebar dalam proyek-proyek yang sedang digarap entitas anak dengan rincian sebagai berikut :

PT Perjaya Brafo Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) di Bendung Gerak Perjaya.

PT Brantas Cakrawala Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Batang Pelangai Gadang Kecamatan Rana Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Batang Tapan Sei Gambar Sako Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

PT Sahung Brantas Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Desa Bungin Tambun I dan III Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

PT Brantas Hidro Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

PT Brantas Prospek Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Rongkong Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

PT Minahasa Brantas Energi yang merupakan entitas anak pada PT Brantas Energi, dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) yang berlokasi di Amorang Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
(lihat catatan No. 3p)

15. DEFERRED EXPENSES

This account consists of :

Development deferred expenses are spread in development projects being worked by subsidiaries with the following details :

PT Perjaya Brafo Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of construction of Minihydro Power Plants (PLTM) in Gerak Perjaya Weir.

PT Brantas Cakrawala Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of the construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Batang Pelangai Gadang District of Rana Pesisir, South Pesisir District and construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Batang Tapan Sei Gambar Sako Tapan, Basa Ampek Balai Tapan Sub district, South Pesisir district, West Sumatera.

PT Sahung Brantas Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Desa Bungin Tambun I and III Padang Guci Hulu Sub district, Kaur District in Bengkulu Province.

PT Brantas Hidro Energi is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of the construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Kaur Sub district, Bengkulu Province.

PT Brantas Prospek Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of the construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Rongkong, North Luwu District, South Sulawesi Province.

PT Minahasa Brantas Energi which is a subsidiary of PT Brantas Energi, in the framework of the construction of Minihydro Power Plants (PLTM) located in Amorang, South Minahasa District, North Sulawesi Province.

(see note No. 3p)

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Supplier / pemasok	253.627.374.760	166.528.511.673	102.141.333.172	Suppliers
Sub kontraktor	367.844.560.626	115.131.113.849	107.693.736.164	Subcontractors
Alat	58.462.887.492	27.276.857.217	20.273.371.869	Equipment
Mandor	17.595.450.054	14.173.554.704	5.179.653.360	Foreman
Jumlah	697.530.272.932	323.110.037.443	235.288.094.565	Total

Rincian utang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut :

The details of account payable - third party is as follow :

i. Supplier / pemasok

i. Suppliers

	2014	2013	2012	
PT Inti Sumber Baja Sakti	10.988.404.128	-	11.728.639.312	PT Adhimix Precast
PT Adhimix Precast	10.990.102.500	7.874.544.440	6.706.235.688	PT Bhirawa Steel
PT Bhirawa Steel	10.224.802.636	2.035.625.317	-	PT Wika Beton
PT Wika Beton	9.742.972.363	6.143.860.000	-	ITSA
ITSA	7.881.776.364	-	-	Kasiman
Kasiman	7.333.400.000	-	-	PT Varia Usaha Beton
PT Varia Usaha Beton	6.941.959.966	2.058.750.800	-	PT Holcim Readymix
PT Holcim Readymix	5.605.302.895	-	-	PT PPI Semen Padang
PT PPI Semen Padang	5.495.198.000	2.142.122.475	1.072.022.474	PT Bumi Pembangunan P
PT Bumi Pembangunan P	3.937.218.636	-	-	Dwi Karya Mandiri
Dwi Karya Mandiri	3.663.685.950	-	-	PT Pro Energi
PT Pro Energi	3.247.087.858	-	-	PT Citra/Intiniaga
PT Citra/Intiniaga	3.159.321.065	-	-	PT Antariksa Laksana
PT Antariksa Laksana	3.078.233.541	11.691.000.000	-	PT SGG Prima Beton
PT SGG Prima Beton	3.004.009.875	-	-	Gunung Turun
Gunung Turun	2.961.492.016	1.360.008.168	-	PT Baja Prima Lestari
PT Baja Prima Lestari	2.944.770.627	3.066.571.479	-	
Jumlah dipindahkan	101.199.738.421	36.372.482.679	19.506.897.474	The amount transferred

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

i. Supplier / pemasok (Lanjutan)

i. Suppliers (Continued)

	2014	2013	2012	
Jumlah pindahan	101.199.738.421	36.372.482.679	19.506.897.474	The amount of transfer
BioSeven/Kwangsiang S	2.552.000.000	-	-	BioSeven/Kwangsiang S
Abd.Rochim	2.266.078.600	-	-	Abd.Rochim
PT Waskita Karya Beton	2.178.879.750	1.560.550.000	-	PT Waskita Karya Beton
CV Jaya Indah	2.152.305.142	4.546.769.546	-	CV Jaya Indah
Alam Hijau	2.096.450.000	-	-	Alam Hijau
PT Citra Bakti	2.082.439.723	1.467.700.709	-	PT Citra Bakti
PT Citas Otis	2.014.740.000	1.016.400.000	-	PT Otis
PT Surya Indogreen Perkasa	2.008.031.834	-	-	PT Surya Indogreen Perkasa
JHS	1.888.640.000	-	-	JHS
PT Igaras	1.805.876.363	-	-	PT Igaras
Abipraya Beton	1.777.785.000	-	-	Abipraya Beton
Matus	1.756.225.000	-	-	Matus
Daryanto	1.730.181.557	-	-	Daryanto
PT Jongka Indonesia	1.627.350.000	-	1.658.000.000	PT Jongka Indonesia
Ujang	1.544.297.447	-	-	Ujang
PT Citra Abadi	1.509.051.842	-	-	PT Citra Abadi
Dispenda Yahuklmo	1.495.240.000	-	236.651.754	Dispenda Yahuklmo
PU Sempor	1.474.345.152	-	-	PU Sempor
PT Sinergi Bersama M	1.395.098.800	-	-	PT Sinergi Bersama M
Ony	1.391.130.000	-	-	Ony
PT Putra Manunggal	1.390.000.000	-	-	PT Putra Manunggal
Riono	1.365.102.910	-	-	Riono
UD Jaya Sentosa	1.360.349.000	-	-	UD Jaya Sentosa
Burhanudin	1.354.472.950	-	-	Burhanudin
CV Bumi Gresik	1.337.935.861	2.561.629.084	-	CV Bumi Gresik
Putra Lawanda	1.336.474.850	-	-	Putra Lawanda
Iskandar	1.295.362.815	-	-	Iskandar
Koswara	1.235.467.477	-	-	Koswara
Dasimah	1.232.584.150	-	-	Dasimah
UD Rini Wijaya	1.271.670.550	-	-	UD Rini Wijaya
PT Berkat Robohot	1.216.578.000	-	-	PT Berkat Robohot
Gcod Soil Indonesia	1.206.244.500	-	-	Good Soil Indonesia
PT Abdirejo Teknik L	1.175.235.000	-	1.700.145.000	PT Abdirejo Tehnik L
Singgaup	1.174.476.222	-	-	Singgaup
Yullanto	1.115.716.091	-	-	Yullanto
PT Sentosa Adi Saka	1.103.764.724	-	-	PT Sentosa Adi Saka
PT Partawa Adiputra	1.098.930.000	-	-	PT Partawa Adiputra
Mukti Jaya	1.097.100.000	-	-	Mukti Jaya
Jaya Beton	1.062.970.000	-	-	Jaya Beton
PT Mutiara Tunggal Sinergi	1.037.600.000	-	-	PT Mutiara Tunggal Sinergi
CV Sarana Makmur	1.025.888.547	-	-	CV Sarana Makmur
UD Jaya Raya	1.022.733.220	-	-	UD Jaya Raya
Naga Mas P	1.018.902.130	-	-	Naga Mas P
Soraya	1.010.354.570	-	-	Soraya
Redho Material Alam	1.008.620.707	-	-	Redho Material Alam
Watiri	1.005.988.487	-	-	Watiri
UD Kios	-	9.025.792.665	-	UD Kios
PT Geotechnical Sistemindo	-	7.980.390.000	18.819.013.200	PT Geotechnical Sistemindo
Sentosa Chandra	-	6.592.842.000	-	Sentosa Chandra
PT Wahana Sinar Mas	-	4.608.020.400	-	PT Wahana Sinar Mas
PT Wirabumi Sejati	-	3.411.809.440	-	PT Wirabumi Sejati
PT Hakaaston	-	3.330.751.394	-	PT Hakaaston
PT Agrapana	-	3.310.593.800	-	PT Agrapana
CV Marthania Mitra Mandiri	-	2.974.914.183	-	CV Marthania Mitra Mandiri
PT Betaconcrete Mixerindo	-	2.766.267.500	890.680.000	PT Betaconcrete Mixerindo
PT Swarna Baja Pasific	-	2.857.566.560	-	PT Swarna Beja Pasific
PT Sekasa Mitra Utama	-	2.518.348.380	-	PT Sekasa Mitra Utama
PT Niaga Insan Hidayah	-	2.185.681.866	191.987.500	PT Niaga Insan Hidayah
PT APR	-	2.082.613.000	-	PT APR
PT Barawaja Makassar	-	2.078.808.056	2.078.808.056	PT Barawaja Makassar
PT Apora	-	1.783.218.794	-	PT Apora
PT Brema Brata	-	1.691.390.000	65.725.000	PT Brema Brata
PD Oscar Putra	-	1.531.018.872	-	PD Oscar Putra
Mahendra	-	1.441.035.558	-	Mahendra
PT Sarana Aspal Nusantara	-	1.382.000.000	-	PT Sarana Aspal Nusantara
Romante	-	1.154.106.476	-	Romante
PT TAO	-	1.108.218.915	124.650.000	PT TAO
Syahril Efendi	-	1.105.758.942	-	Syahril Efendi
Jumlah dipindahkan	168.504.406.392	114.246.680.799	45.272.557.984	The amount transferred

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

i. Supplier / pemasok (Lanjutan)

i. Suppliers (Continued)

	2014	2013	2012	
Jumlah pindahan	168.504.406.392	114.246.680.799	45.272.557.984	The amount of transfer
PT Century Nusaphala	-	1.104.332.063	-	PT Century Nusaphala
PT Trimatra Bias Inti	-	1.093.988.732	-	PT Trimatra Bias Inti
PT Egyf Hotomo	-	1.092.975.200	-	PT Egyf Hotomo
UD Meranti Jaya	-	1.071.516.740	3.740.961.120	UD Meranti Jaya
PT Delima Jaya Mix	-	798.730.000	1.020.880.000	PT Delima Jaya Mix
UD Merawang Maju	-	626.389.090	1.345.329.000	UD Merawang Maju
PT Beton Kaltim	-	-	4.548.085.500	PT Beton Kaltim
PT Tri Tunggal BM	-	-	4.500.000.000	PT Tri Tunggal BM
Suhardi	-	-	2.000.000.000	Suhardi
PT Prima Karya Anugrah M	-	-	2.572.285.000	PT Prima Karya Anugrah M
PT Altrak 1978	-	-	1.876.575.000	PT Altrak 1978
KSU Hidayah	-	176.250.000	1.512.894.372	KSU Hidayah
PT Hamson Indonesia	-	-	1.480.000.000	PT Hamson Indonesia
PT Saka Baja Mulya	-	-	1.373.818.000	PT Saka Baja Mulya
PT Sarana Cipta Inti Nusa	-	-	1.040.000.000	PT Sarana Cipta Inti Nusa
Sumarto Yasper	-	-	193.953.710	Sumarto Yasper
Lain-lain (di bawah Rp 1.000.000.000,-)	85.122.968.368	46.317.649.049	29.663.993.486	Others (below Rp 1.000.000.000,-)
Sub jumlah	253.627.374.760	166.528.511.673	102.141.333.172	Sub total

ii. Subkontraktor

ii. Subcontractors

	2014	2013	2012	
PT Murti Cahaya	26.085.485.160	-	-	PT Murti Cahaya
CV Sukses Abadi	19.742.708.993	-	-	CV Sukses Abadi
PT Topas Tali Limas	18.544.542.918	4.873.953.080	1.725.500.000	Topas Tali Limas
CV Dua Pilar	14.729.555.851	-	-	CV Dua Pilar/Rosihan
CV Abadi Wijaya	14.287.331.053	-	-	CV Abadi Wijaya
PT Gardareka	13.283.559.941	-	-	PT Gardareka
PT Binatama Akr	12.408.180.000	-	-	PT Binatama Akr
CV Rajawali/Arif S	10.220.864.570	-	-	CV Rajawali/Arif S
CV Indo Bangun Timbunan	9.698.268.747	-	-	CV Indo Bangun Timbunan
KUP	9.296.990.055	-	-	KUP
Geoforce Indonesia	5.534.052.698	-	-	Geoforce Indonesia
PT Berdikari Pondasi	9.187.313.350	-	-	PT Berdikari Pondasi
CV Titian (Brian Mestiko)	8.329.082.650	987.247.800	-	CV Titian (Brian Mestiko)
PT Surya Graha	7.835.030.579	-	-	PT Surya Graha
PT ITSA	6.745.623.758	2.514.143.890	2.223.480.459	PT ITSA
CV Agung Triputra	5.944.372.421	-	-	CV Agung Triputra
PT Barata Indonesia	5.468.714.262	12.476.183.067	7.899.623.714	PT Barata Indonesia
CV Gemintang Persada	5.239.021.845	-	-	CV Gemintang Persada
CV Mukti Jaya	3.831.344.504	1.825.388.557	3.339.728.345	CV Mukti Jaya
Lubuk Minturun	4.404.948.831	-	-	Lubuk Minturun
Ananta Bumi Ind, CV	4.286.264.383	-	-	Ananta Bumi Ind, CV
PT Hasta Prajatama	3.615.997.650	1.288.450.000	-	PT Hasta Prajatama
CV Ratna Karya	3.598.673.019	-	-	CV Ratna Karya
PT Cahaya Inti Perkasa	3.562.301.345	-	-	PT Cahaya Inti Perkasa
Dinamika Sejahtera Karya	3.513.488.691	-	-	Dinamika Sejahtera Karya
CV Jadi Jaya	3.477.270.988	-	-	CV Jadi Jaya
Kharli Herman - Jedi	3.323.386.466	1.645.828.451	-	Kharli Herman - Jedi
CV Bima Putra	3.249.391.694	-	-	CV Bima Putra
CV Jaya Indah	3.142.721.260	-	-	CV Jaya Indah
Salfacon	3.244.426.036	3.441.375.000	-	Salfacon
CV Cahaya Kurnia	3.033.919.120	-	-	CV Cahaya Kurnia
PT Dipta Agung	2.995.964.283	-	-	PT Dipta Agung
CV Karya Zaitun	2.943.095.789	-	-	CV Karya Zaitun
PT Metito Indo	2.886.720.000	-	-	PT Metito Indo
PT Apora	2.834.276.553	-	-	PT Apora
Harry (Sub Kont)	2.596.948.715	-	-	Harry (Sub Kont)
Central	2.470.391.250	-	-	Central
Integra/Supardi, M/Elktrkl	2.394.791.463	-	-	Integra/Supardi, M/Elktrkl
CV Dua Cahaya	2.331.890.540	-	-	CV Dua Cahaya
Hutang Sub Joko Rinto P	2.185.574.645	-	-	Hutang Sub Joko Rinto P
CV Dua Sekawan	2.122.197.041	-	-	CV Dua Sekawan
CV Sarana Jaya	4.620.023.249	-	-	CV Sarana Jaya
PT Linico Indonesia	2.081.163.500	1.282.187.226	-	PT Linico Indonesia
PT Sapta Unggul	1.963.993.434	-	-	PT Sapta Unggul
PT Gagah Mandiri	1.955.568.401	-	-	PT Gagah Mandiri
CV Nusa Indah	1.950.290.025	-	-	CV Nusa Indah
Jumlah dipindahkan	287.197.721.727	30.334.757.071	15.188.332.518	The amount transferred

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

16. ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY (Continued)

ii. Subkontraktor (Lanjutan)

ii. Subcontractors (Continued)

	2014	2013	2012	
Jumlah pindahan	287.197.721.727	30.334.757.071	15.188.332.518	The amount of transfer
Katama	1.934.887.500	-	-	Katama
Moh Masud	1.889.388.252	-	-	Moh Masud
CV AF Jaya	1.875.386.666	-	-	CV AF Jaya
Kurnia Cipta Mandiri	1.870.010.620	-	-	Kurnia Cipta Mandiri
Bina Sejati	1.821.799.000	-	-	Bina Sejati
CV Lima Utama Teknik	1.760.747.825	-	-	CV Lima Utama Teknik
PT Ciptamega Ariefsejati	1.710.849.694	-	-	PT Ciptamega Ariefsejati
CV Buana Raya	1.630.280.694	-	-	CV Buana Raya
Tertila M B	1.383.959.655	-	-	Tertila M B
H Karnadi	1.272.106.146	-	-	H Karnadi
Graha Pratama Mandiri	1.204.185.409	-	-	Graha Pratama Mandiri
CV Pandan Jaya	1.167.239.717	-	-	CV Pandan Jaya
David	1.164.894.960	-	-	David
PT Aneka Karya Perkasa	1.151.502.088	-	-	PT Aneka Karya Perkasa
PT Adyawinsa	1.120.000.000	980.000.000	-	PT Adyawinsa
CV Dika	1.314.203.027	-	-	CV Dika, Fasade & Ekterior
Akhmad Fauzi	1.351.760.528	-	-	Akhmad Fauzi
CV Kukuh Jaya	1.082.437.713	-	-	CV Kukuh Jaya
CV Putra Bhakti	1.005.486.170	-	-	CV Putra Bhakti
PT Delta Systech Indo	203.590.799	-	5.224.621.623	PT Delta Systech Indo
PT Tri Perkasa	-	5.696.507.595	2.986.761.461	PT Tri Perkasa
PT Bukit Rante Kambola	-	5.239.461.580	-	PT Bukit Rante Kambola
PT Bumi Ayu Pertiwi	-	5.147.153.944	-	PT Bumi Ayu Pertiwi
PT Sunny Hydro E.C	-	5.135.961.795	2.015.505.468	PT Sunny Hydro E.C
PT Horison	-	4.516.605.700	-	PT Horison
PT Raja Intrayyan NTB	-	3.053.224.874	-	PT Raja Intrayyan NTB
CV Indonesia Bangun	-	2.848.222.929	-	CV Indonesia Bangun
PT Holcim	-	2.836.695.159	-	PT Holcim
CV Gema Sentosa (Bali)	-	2.602.967.850	-	CV Gema Sentosa (Bali)
PT Pradja Mulia	-	2.546.327.466	-	PT Pradja Mulia
PT Saputra Karindo	-	2.110.387.847	-	PT Saputra Karindo
PT Urip Joyo	-	2.007.419.200	-	PT Urip Joyo
PT Sumatera Unggul	-	1.792.503.316	192.027.684	PT Sumatera Unggul
Aremix	-	1.529.691.817	-	Aremix
PT Sukses Abadi	-	1.296.000.000	-	PT Sukses Abadi
Surya Graha Mandiri	-	1.248.990.351	-	Surya Graha Mandiri
PT Elpo Indonesia	-	1.091.551.210	-	PT Elpo Indonesia
CV Cetral Design	-	1.054.904.400	-	CV Cetral Design
PT Indra Karya	-	818.239.896	1.584.717.713	PT Indra Karya
PT Delarosa	-	843.650.149	8.427.499.943	PT Delarosa
CV Rahmad Sentosa	-	797.249.505	1.597.249.505	CV Rahmad Sentosa
PT Abdi Rejo	-	795.215.105	9.258.880.388	PT Abdi Rejo
CV Martania Mitra Mandiri	-	767.771.037	2.574.051.533	CV Martania Mitra Mandiri
Alrista	-	721.190.431	2.334.529.800	Alrista
Tritools	-	712.464.897	10.955.340.712	Tritools
PT Pratama Widya	-	560.737.711	3.455.407.463	PT Pratama Widya
PT Gelora Mahakam Lestari	-	418.333.278	7.857.006.349	PT Gelora Mahakam Lestari
PT MGM	-	-	13.851.624.433	PT MGM
CV Widya Kirana	-	-	2.622.108.307	CV Widya Kirana
Didin	-	-	1.834.445.275	Didin
PT A-Nam Subur	-	-	1.356.170.878	PT A-Nam Subur
PT Berdikari Pondasi	-	-	1.089.670.142	PT Berdikari Pondasi
H Sudirman	-	-	1.056.880.438	H Sudirman
CV Aneka Anugrah	-	-	1.031.078.666	CV Aneka Anugrah
Lain-lain	-	-	-	
(di bawah Rp 1.000.000.000,-)	52.732.122.435	25.626.927.735	11.199.825.865	Others (below Rp 1.000.000.000,-)
Sub jumlah	367.844.560.626	115.131.113.849	107.693.736.164	Sub total
iii. Alat	58.462.887.492	27.276.857.217	20.273.371.869	iii. Equipment
iv. Mandor	17.595.450.054	14.173.554.704	5.179.653.360	iv. Foreman
Sub jumlah	76.058.337.546	41.450.411.921	25.453.025.229	Sub Total
Jumlah	697.530.272.932	323.110.037.443	235.288.094.565	Total

17. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	44.703.473.678	-	171.090.729.604
PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk	-	1.345.145.427	4.409.945.718
PT BPD Jawa Barat & Banten,Tbk	-	-	51.385.937.500
PT Bank Negara Indonesia(Persero),Tbk	-	-	50.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	-	-	58.333.333
Jumlah	44.703.473.678	1.345.145.427	276.944.946.155
Dikurangi dengan bagian jatuh tempo 1 (satu) tahun	-	(1.345.145.427)	(55.854.216.551)
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo 1 (satu) tahun	44.703.473.678	-	221.090.729.604
Terdiri dari :			
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	44.703.473.678	-	171.090.729.604
PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	-	-	50.000.000.000
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo 1 (satu) tahun	44.703.473.678	-	221.090.729.604

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero),Tbk sebagai berikut :

- Fasilitas kredit modal kerja *revolving* dengan limit sebesar Rp 42.151.206.822,- (empat puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 011/032/97/DU/P tanggal 26 Maret 1997.
- Fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) dengan limit sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sesuai Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* Nomor : KP-COD/028/PK-NCL/2004, akta Nomor : 32 tanggal 15 Oktober 2004 notaris Haji Abu Jusuf di Jakarta.
- Kredit modal kerja *affopend* dengan limit sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah), tujuan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan modal kerja kontraktor, jangka waktu tanggal 22 Desember 2006 s/d 21 Desember 2014. Perusahaan telah melunasi kewajiban kredit modal kerja *affopend* dan tunggakan bunga yang masih harus dibayar sesuai surat PT Brantas Abipraya (Persero) No. 423/D/KU/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011.

Fasilitas kredit modal kerja *revolving* dan fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan perjanjian dan perpanjangan, terakhir adalah sebagai berikut:

Perjanjian ini mengalami beberapa kali addendum, terakhir berdasarkan Surat No. TOP.CRO/CLA.696/ADD/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Addendum XXI (ke dua puluh satu) atas Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 011/032/97/DU/P tanggal 26 Maret 1997, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit. Melalui perjanjian ini, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu kredit menjadi sejak 23 Desember 2013 sampai dengan 22 Desember 2014. Limit kredit sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) dengan suku bunga sebesar 11% dan provisi kredit sebesar 1%.

Perjanjian ini mengalami beberapa kali addendum, terakhir berdasarkan surat No. TOP.CRO/CLA.698/ADD/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Addendum IX (ke sembilan) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* Nomor : KP-COD/028/PK-NCL/2004, akta Nomor : 32 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas *Non Cash Loan*. Melalui perjanjian ini, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu kredit menjadi sejak 23 Desember 2013 sampai dengan 22 Desember 2014 dengan limit kredit sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) untuk tujuan penggunaan sebagai berikut :

- Bank Garansi dengan provisi masing-masing sebesar 0,75% per tahun untuk Bank Garansi tender dan Bank Garansi (uang muka dan pelaksanaan) proyek jangka waktu lebih dari 1 tahun dan 1% per tahun untuk Bank Garansi lainnya.

17. BANK LOAN

This account consists of :

	2014	2013	2012
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	44.703.473.678	-	171.090.729.604
PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk	-	1.345.145.427	4.409.945.718
PT BPD Jawa Barat & Banten,Tbk	-	-	51.385.937.500
PT Bank Negara Indonesia(Persero),Tbk	-	-	50.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	-	-	58.333.333
Jumlah	44.703.473.678	1.345.145.427	276.944.946.155
Dikurangi dengan bagian jatuh tempo 1 (satu) tahun	-	(1.345.145.427)	(55.854.216.551)
Long term bank loan - net of one year maturity portion	44.703.473.678	-	221.090.729.604
Terdiri dari :			
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	44.703.473.678	-	171.090.729.604
PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	-	-	50.000.000.000
Long term bank loan - net of one year maturity portion	44.703.473.678	-	221.090.729.604

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

The Company obtained credit facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk as follows :

- A revolving working capital credit facility with a limit of Rp 42.151.206.822,- (forty two billion one hundred and fifty one million two hundred and six thousand eight hundred and twenty two rupiah) in accordance with the Credit Agreement No. 011/032/97/DU/P dated March 26, 1997.
- Non Cash Loan Facility (NCL) with a limit of Rp 100,000,000,000,- (one hundred billion rupiah) according Non Cash Loan Facility Granting Agreement Number : KP-COD/028/PK-NCL/2004, Deed Number : 32 dated October 15, 2004 notary Haji Abu Jusuf In Jakarta.
- Affopend working capital credit with limit of Rp 12,000,000,000,- (twelve billion rupiah), the purpose is used to meet most of the needs of contractors working capital, term dated December 22, 2006 until December 21, 2014. The Company has paid liabilities affopend working capital loans and its accrued interest in accordance with letter of PT Brantas Abipraya (Persero) No. 423/D/KU/XII/2011, dated December 19, 2011.

Revolving working capital credit facility and Non Cash Loan (NCL) facility above have been amended and extended several times, most recently in 2013 and 2012 as follows :

- This agreement have been changed several times, latest according to Letter No. TOP.CRO/CLA.696/ADD/2013 dated December 23, 2013 regarding XXI (the twenty-one) Addendum of Extended on Credit Facility Term Loan. Through this agreement, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk agreed to extend credit time period becoming from December 23, 2013 to December 22, 2014. Credit limit of Rp 22,000,000,000,- (twenty two billion rupiah) with interest rate of 11% and credit provision of 1%.

- This agreement have been changed several times, latest according to Letter No. TOP.CRO/CLA.698/ADD/2013 dated December 23, 2013 regarding IX (the nine) Addendum of Extended on Credit Facility Term Loan. Through this agreement, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk agreed to extend credit time period becoming from December 23, 2013 to December 22, 2014 with credit limit of Rp 1,500,000,000,000,- (one trillion and five hundred billion rupiah) for the following usage :

- Bank Guarantee with each provision of 0,75% per year for Tender Bank Guarantee and more than one year project Bank Guarantee (advance and implementation) and 1% per year for other Bank Guarantee.

17. UTANG BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Lanjutan)

- ii. LC / SKBDN untuk proyek yang dibiayai/dikerjakan dan tidak boleh digunakan untuk impor barang modal serta pembukaan *Letter of Credit* antara lain *At Sight LC*, *Usance LC*, *UPAS LC* dan *SBLC*. Penerbitan SKBDN dalam valuta Rupiah dan Asing.

- iii. SCF (*Supply Chain Financing*) yaitu : pembelian tagihan supplier / subkontraktor secara *Without recourse*.

Perjanjian ini mengalami beberapa kali addendum, terakhir berdasarkan surat Nomor : TOP.CRO/CLA.697/ADD/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Addendum II (kedua) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja (Transaksional) No. CRO.KP/354/KMK/11 Akta No. 24 tanggal 21 Desember 2011 tentang perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit. Melalui perjanjian ini, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu kredit menjadi sejak 23 Desember 2013 sampai dengan 22 Desember 2014. Limit kredit sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan suku bunga 11% dan provisi sebesar 0,75% per tahun.

- Sesuai surat PT Bank mandiri (Persero), Tbk No. CBG.CB1/SPPK.072/2011 tanggal 1 Desember 2011 dan surat No. TOP.CRO/CLA.579/ADD/2011 tanggal 21 Desember 2011 bahwa menyetujui perpanjangan fasilitas kredit modal kerja *revolving* limit sebesar Rp 42.151.206.822,- (empat puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), tingkat bunga 10% dan jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember 2012.
- Sesuai Akta Addendum V (Kelima) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* Nomor: KP.COD/028/KP-NCL/2004 notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH,LLM di Jakarta Nomor 25 tanggal 21 Desember 2012 dan surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No. CBG.CB1/SPPK.072/2011 tanggal 01 Desember 2011 bahwa menyetujui tambahan plafond fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) dari semula Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) menjadi Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), biaya akseptasi 1% per tahun dan jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember 2012.
- Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (Transaksional) Nomor: CRO.KP/354/KMK/11 notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH,LLM di Jakarta Nomor 24 tanggal 21 Desember 2012 bahwa Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja transaksional dengan plafond sebesar Rp 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah), tingkat bunga 10% per tahun, provisi 0,75% per tahun dan jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Desember 2012.
- Sesuai surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No.CBG.CB1/SPPK.100/2012 tanggal 17 Desember 2012 bahwa menyetujui penurunan limit fasilitas kredit modal kerja *revolving* dari semula Rp 42.151.206.822,- (empat puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) menjadi Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar rupiah), sekaligus pemisahan menjadi kredit modal kerja *revolving* dengan limit sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) dengan tingkat bunga 10% dan kredit modal kerja *fixed* sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga 9,50%, menyetujui tambahan fasilitas KMK *Revolving* Transaksional dari semula Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga 9,50% dan menyetujui tambahan fasilitas *non cash loan* dari semula Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) menjadi Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember 2013.

17. BANK LOAN (Continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Continued)

- ii. LC / SKBDN for financed project and should not be used for capital goods import and Letter of credit issuance namely *At Sight LC*, *Usance LC*, *UPAS LC* dan *SBLC*. SKBDN issuance is in Rupiah and Foreign Exchange.

- iii. SCF (*Supply Chain Financing*) which is supplier / subcontractor bill purchase without recourse.

This agreement have been changed several times, latest according to letter of Nomor : TOP.CRO/CLA.697/ADD/2013 dated December 23, 2013 regarding II (the second) Addendum on Working Capital Credit Agreement (Transactional) No. CRO.KP/354/KMK/11 Deed No. 24 and December 21, 2011 regarding Extend on Credit Facility Term Loan. Through this agreement, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk agreed to extend the credit time becoming from Desember 23, 2013 until December 22, 2014. Credit limit of Rp 100.000.000.000,- (one hundred billion rupiah) with interest rate of 11% and provision of 0,75% per year.

- Based on letter of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No.CBG.CB1/SPPK.072/2011 dated December 1, 2011 and letter No. TOP.CRO/CLA.579/ADD/2011 dated December 21, 2011 that approved the extension of revolving working capital credit facility with limit of Rp 42.151.206.822,- (fourty two billion one hundred and fifty one million two hundred and six thousand eight hundred and twenty two rupiah), 10% interest rate and time period was extended until December 22, 2012.
- Based on the Deed of Addendum V (Fifth) on Non Cash Loan Facility Granting Agreement Number : KP.COD/028/KP-NCL/2004 notary Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH,LLM in Jakarta Number 25 dated December 21, 2012 and letter of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No. CBG.CB1/SPPK.072/2011 dated December 1, 2011 that approved an additional flafond Non Cash Loan facility (NCL) from Rp 100.000.000.000,- (one hundred billion rupiahs) to Rp 600.000.000.000,- (six hundred billion rupiah), acceptances cost 1 % per year and the term was extended until December 22, 2012.
- In accordance with the Deed of Working Capital Credit Agreement (Transactional) Number : CRO.KP/354/KMK/11 notary Lolani Kurniati Irdham Idroes,SH, LLM in Jakarta Number 24 dated December 21, 2012 that the Company obtained a transactional working capital facility with a plafond of Rp 210.000.000.000,- (two hundred and ten billion rupiah) , 10% interest rate per year, 0,75% provision provision per year and the period up to December 22, 2012.
- According to the letter of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No.CBG.CB1/SPPK.100/2012 dated December 17, 2012 that approved the limit deduction of a revolving working capital credit facility from Rp 42.151.206.822,- (forty two billion one hundred and fifty one million two hundred and six thousand eight hundred and twenty two rupiahs) to Rp 42.000.000.000,- (forty two billion rupiah), as well as separation into revolving working capital loan with a limit of Rp 22.000.000.000,- (twenty two billion rupiah) with 10 % interest rate and a fixed working capital credit amounting to Rp 20,000,000,000,- (twenty billion rupiahs) with 9,50 % interest rate, and approved the additional Transactional Revolving Working Credit facility from Rp 210.000.000.000,- (two hundred and ten billion rupiahs) to Rp 500.000.000.000,- (five hundred billion rupiah) with 9,50 % interest rate and approved the additional non-cash loan facility from Rp 600.000.000.000,- (six hundred billion rupiah) to Rp 1.500.000.000.000,- (one trillion five hundred billion rupiah) that extended until December 22, 2013.

17. UTANG BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Lanjutan)

- Sesuai dengan surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor: CBG.CB1/SPPK.002/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) bahwa fasilitas kredit modal kerja transaksional dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk semula dengan limit sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah), tingkat bunga menjadi 9,25% per tahun, provisi penerbitan BG Tender dari semula 1% menjadi 0,75% dan Perusahaan dapat memberitahukan secara tertulis dalam hal akan memperoleh fasilitas kredit baru atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain.
- Sesuai surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor : TOP.CRO/CLA.696/ADD/2013, Nomor : TOP.CRO/CLA.697/ADD/2013, dan Nomor : TOP.CRO/CLA.698/ADD/2013 tanggal 23 Desember 2013 bahwa fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah), tingkat bunga 11% per tahun, fasilitas kredit modal kerja non revolving (semula KMK revolving fixed loan) dengan limit sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), tingkat bunga 10,50%, fasilitas modal kerja transaksional dengan limit sebesar Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah), tingkat bunga 11% pertahun, fasilitas non cash loan dengan limit sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah), fasilitas trust receipt (T/R) merupakan sub limit dari LC/SKBDN dengan limit Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan fasilitas supply chain Financing (sublimit dari NCL) dengan limit menjadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember 2014.
- Sesuai surat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No.TOP.CRO/CLA.843/ADD/2014, No.TOP.CRO/CLA.844/ADD/2014, dan No.TOP.CRO/CLA.845/ADD/2014 tanggal 19 Desember 2014 bahwa fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah), tingkat bunga 11% per tahun, fasilitas kredit modal kerja non revolving dengan limit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), tingkat bunga 10,50%, fasilitas modal kerja transaksional dengan limit sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tingkat bunga 11% per tahun, fasilitas non cash loan dengan limit sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) untuk pembukaan bank garansi maksimal utilisasi sebesar limit non cash loan dan LC/SKBDN dengan limit sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dan fasilitas trust receipt (T/R) merupakan sub limit dari LC/SKBDN dengan limit Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yang diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Agunan fixed aset, terdiri dari :
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 640/Sei Sikambing B, luas 1.741 m² yang terletak di jalan Kasuari No. 8 Kelurahan Sei Kambing Kecamatan Medan Sanggul Kotamadya Medan Sumatera Utara berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah.
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 79/Gadingkasri, luas 738 m² yang terletak di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kotamadya Malang Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 95/Desa Ngoro, luas 10.674 m² yang terletak di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.

17. BANK LOAN (Continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Continued)

- In accordance with letter of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Number : CBG.CB1/SPPK.002/2013 dated January 18, 2013 concerning the Offering Credit Letter (SPPK) that transactional working capital credit facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, formerly with the limit amounting to Rp 500.000.000.000,- (five hundred billion rupiah) to Rp 210.000.000.000,- (two hundred and ten billion rupiah), the 9,25% interest rate per year, provision publication of Tender BG from 1% become 0,75% and the Company may provide a written notice in case the Company will obtain new credit facility or other loans from other financial institutions .
- According to letter of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk No. TOP.CRO/CLA.696/ADD/2013, No. TOP.CRO/CLA.697/ADD/2013, and No. TOP.CRO/CLA.698/ADD/2013 dated December 23, 2013 that the working capital revolving credit facility with a limit of Rp 22.000.000.000,- (twenty-two billion rupiah) , the interest rate of 11 % per year , working capital credit facility of non-revolving (KMK originally fixed revolving loan) with a limit of Rp 20.000.000.000,- (twenty billion rupiah) , the interest rate of 10.50%, transactional working capital facility with a limit of Rp 210.000.000.000,- (two hundred and ten billion rupiah) , the interest rate of 11% per annum , non- cash loan facility with a limit of Rp 1.500.000.000.000,- (one trillion five hundred billion rupiah), trust receipt facility (T/R) is sub- limit of LC / SKBDN with a limit of Rp 15.000.000.000,- (fifteen billion rupiah) and supply chain financing facility (sublimit of NCL) with a limit to Rp 200.000.000.000,- (two hundred billion rupiah) is extended up to December 22, 2014 .
- Accordance with the letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.TOP.CRO / CLA.843 / ADD / 2014, No.TOP.CRO / CLA.844 / ADD / 2014, and No.TOP.CRO / CLA.845 / ADD / 2014 dated December 19, 2014 that the revolving working capital credit facility with a limit of Rp22,000,000,000, - (twenty-two billion dollars), the interest rate of 11% per year, working capital credit facility with a non-revolving limit of Rp20,000,000,000, - (twenty billion dollars), the interest rate of 10.50%, the working capital facility with a limit of Rp100,000,000,000 transactional, - (one hundred billion dollars), the interest rate of 11% per year, non-cash loan facility with a limit Rp 1,500,000,000,000, - (one trillion five hundred billion dollars) for the opening of a bank guarantee maximum utilization of limit non cash loan and LC / SKBDN with a limit of Rp200,000,000,000, - (two hundred billion dollars) and facilities trust receipt (T / R) is a sub-limit of LC / SKBDN with Rp15,000,000,000 limit, - (fifteen million dollars) were extended until the date of December 22, 2015.

Collaterals for the credit facility are as follows :

- i. Collateral fixed assets , consisting of :
- A piece of land with Building Rights Certificates Number : 640/Sei Sikambing B, area of 1,741 m² located at Kasuari Street No. 8 Medan Sanggul Sub district, Municipal District of Medan, North Sumatera including buildings that were erected on the land .
 - A piece of land with Building Rights Certificates Number : 79/Gadingkasri, area of 738 m² located in the Gadingkasri District, Klojen Sub district, Malang Municipal, East Java Province including buildings that were erected on the land .
 - A piece of land with Building Rights Certificates Number : 95/Desa Ngoro, area of 10,674 m² located in the Ngoro Village, Ngoro Sub district, Mojokerto District, East Java Province including buildings that were erected on the land .

17. UTANG BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Lanjutan)

- Tiga (3) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01660/Cipinang Cempedak luas 2.915 m², Nomor: 1651/Cipinang Cempedak luas 29 m² dan Nomor:1650/Cipinang Cempedak luas 23 m² yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Kavling 14 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Ngreco, luas 27.530 m² yang terletak di Desa Ngreco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah
- Dua (2) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 339/Kejapanan luas 15.830 m² dan Nomor: 2/Karangrejo luas 345 m² yang terletak di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
- Sebidang tanah seluas 2,4 Ha yang terletak di Jalan Yos Sudarso - Jakarta Utara yang akan diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama dengan pengikatan minimal Rp 151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar rupiah).

ii. Agunan non fixed aset, terdiri dari :

- Seluruh tagihan/piutang usaha Perusahaan sehubungan dengan proyek-proyek yang biayai oleh bank yang telah diikat dengan jaminan fidusia.
- Seluruh tagihan/piutang usaha dan tuntutan-tuntutan (klaim) yang dimiliki Perusahaan yang telah diikat dengan jaminan
- Seluruh mesin dan peralatan (alat berat, kendaraan konstruksi, peralatan plant dan umum) yang dimiliki Perusahaan yang telah diikat dengan jaminan fidusia.
- Seluruh persediaan yang dimiliki Perusahaan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek yang pengerjaannya dibiayai oleh bank yang akan diikat dengan jaminan fidusia.

b. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Utang pada PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk merupakan utang atas pembelian 1 unit *Trailer Concrete Pump*, tingkat suku bunga 13.25%, jangka waktu 24 bulan sesuai dengan surat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 2491/S/KGS.I/HCLU/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan utang atas pembelian 3 Unit *Excavator*, 3 unit *Drilling Machine* dan *grouting machine*, serta 5 unit *truck mixer*, tingkat bunga 12.25%, jangka waktu 24 bulan sesuai dengan surat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 904/S/KGS.I/HCLU/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Jaminan pokok berupa alat-alat berat tersebut, pengikatan agunan dilakukan secara fidusia yang dicover dengan asuransi *all risk* sesuai syarat klausula bank PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk.

c. PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk

Utang pada PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk per 31 Desember 2012 merupakan fasilitas kredit modal kerja *non revolving* (clean up basis) sesuai dengan akta Perjanjian Kredit 107697/KRD-CUB/2012 Nomor: 19 tanggal 20 Juli 2012 notaris Popy Kuntari Sutresna, SH, MHum. dengan ketentuan sebagai berikut :

- Fasilitas *cash loan* (kredit modal kerja konstruksi *standby loan*) sebesar Rp 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) untuk tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN, tingkat bunga 9,75% per tahun, provisi 0,5% per tahun dan jangka waktu terhitung sampai dengan tanggal 20 Juli 2013.

17. BANK LOAN (Continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Continued)

- Three (3) parcels of land with Building Rights Certificates Number : 01660/Cipinang Cempedak, area of 2915 m² , Number : 1651/Cipinang Cempedak area of 29 m², and No. : 1650/Cipinang Cempedak area of 23 m² Cempedak located at D.I Panjaitan Lot 14, Cipinang Cempedak District, Jatinegara, East Jakarta including buildings that were erected on the land .
- A piece of land with Building Rights Certificates Number : 1/Ngreco, area of 27,530 m² located in Ngreco Village, Selorejo Sub district, Blitar District, East Java Province including buildings that were erected on the land .
- Two (2) parcels of land with Building Rights Certificates No : 339/Kejapanan area of 15 830 m² and Number : 2/Karangrejo, area of 345 m² located in Gempol Sub district, Pasuruan District, East Java Province including buildings that were erected on the land .
- A piece of land of 2.4 hectares located at Yos Sudarso Street - North Jakarta which will be tied to the first ranking mortgage with the binding of at least Rp 151.000.000.000,- (one hundred and fifty one billion rupiahs).

ii. Collateral non- fixed assets , consisting of :

- All bills/account receivables of the Company related to projects financed by the bank that has been tied by fiduciary .
- All bills / accounts receivable and claims owned by Company which have been tied by fiduciary.
- All machinery and equipment (heavy equipment, construction vehicles, plant and general equipment) owned by Company which has been tied by fiduciary.
- The entire inventories owned by Company relating to projects financed by bank that the process will be bound by fiduciary guarantee.

b. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Loan to PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk was loan of 1 unit of *Trailer Concrete Pump* purchase, 13.25% interest rate, 24 months term period in accordance with the letter of PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. 2491/S/KGS.I/HCLU/X/2011 dated October 28, 2011 and payable on purchase of 3 units *Excavator*, 3 units *Drilling Machine* and *grouting machine*, and 5 units *truck mixers*, 12.25% interest rate, 24 months term period in accordance with letter of PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. 904/S/KGS.I/HCLU/VII/2012 dated July 9, 2012.

Principal collateral in the form of the heavy equipments, the collateral binding is done fiduciary covered by all risks insurance as terms clause of PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk.

c. PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk

Loan on PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk on December 31, 2012 is a non revolving working capital credit facility (clean up basis) in accordance with Credit Agreement Deed 107697/KRD-CUB/2012 Number: 19 dated July 20, 2012 of notary Popy Kuntari Sutresna, SH, MHum. with the following conditions :

- Cash loan facilities (construction working capital credit of standby loan) is Rp 230.000.000.000,- (two hundred and thirty billion rupiahs) for additional working capital of construction and procurement for project, funded by the State budget / Regional budget / State-owned enterprises, 9.75% interest rate per year, 0.5% provision fee per year and up to a period of July 20, 2013.

17. UTANG BANK (Lanjutan)

c. PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk (Lanjutan)

- Fasilitas *non cash loan* sebesar Rp 270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) untuk sarana disposisi transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Letter of Credit (L/C)* dan bank garansi, provisi 1% per tahun dan jangka waktu terhitung sampai dengan tanggal 20 Juli 2013. Fasilitas *non cash loan* (bank garansi) dapat diterbitkan apabila jangka waktu bank garansi lebih dari 12 bulan namun mengikuti ketentuan umum bank garansi perihal minimum margin deposit dan kontra garansi.

Jaminan fasilitas kredit tersebut adalah segala harta milik Perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak kecuali yang sudah terlebih dahulu diagunkan kepada pihak lain, tagihan-tagihan sebesar Rp 970.000.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh miliar rupiah) yang diikat dengan akta fidusia sebesar Rp 625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah) dan jaminan pengganti yang bentuk dan nilainya sama dan dapat disetujui oleh pihak bank.

(lihat Catatan No. 5 dan 13)

d. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Utang pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk per 31 Desember 2012 merupakan fasilitas kredit modal kerja transaksional maksimum sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sebagai tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Pandanduri, tingkat bunga 10% per tahun, provisi 0.5% per tahun dan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah tagihan Proyek Pembangunan Bendungan Pandanduri sesuai dengan Perjanjian *Cessie* Nomor 2012/*Cessie*/016 tanggal 28 November 2012.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan bidang usaha yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan merger atau konsolidasi dengan perubahan lain, kecuali dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan perubahan bentuk badan hukum.
4. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagai atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit / *Plafond NCL*.
5. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang telah berjalan.
6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban hutang kepada instansi yang berwenang.
7. Menerima kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya kecuali dari pemegang saham mayoritas.

Menjaga rasio keuangan yaitu :

1. *Current Ratio* minimum sebesar 1,00 (satu) kali.
Current Ratio adalah perbandingan antara total asset lancar terhadap total utang lancar pada laporan keuangan *home statement* / audited Perusahaan.
2. *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 4,00 (empat) kali.
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan *home statement* / audited perusahaan.
3. *Debt Service Coverage* minimum sebesar 100% (seratus persen).
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada laporan keuangan *home statement* / audited Perusahaan.

e. PT Bank DBS Indonesia

Utang pada PT Bank DBS Indonesia per 31 Desember 2012 merupakan *fee* atas fasilitas SKBDN (lihat Catatan No. 5 dan 14).

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan sebagai berikut :

1. Mengubah jenis usaha Perusahaan

17. BANK LOAN (Continued)

c. PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk (Continued)

- *Non-cash loan facilities* amounting to Rp 270.000.000.000,- (two hundred and seventy billion rupiahs) in order of disposition transactions of Domestic Letter of Credit (SKBDN), Letter of Credit (L/C) and bank guarantee, 1% provision of per year and term starting July 20, 2013. *Non-cash loan facility* (bank guarantee) may be issued if bank guarantee period more than 12 months but follow the general provisions regarding the minimum deposit margins and counter-guarantee.

Collateral of credit facility is any property owned by Company either movable or immovable except those already pledged in advance to another party, receivables amounting to Rp 970.000.000.000,- (nine hundred and seventy billion rupiahs) that are tied by fiduciary deed of Rp 625.000.000.000,- (six hundred and twenty-five billion rupiahs) and a replacement guarantee that the form is equal and be approved by the bank.

(see Notes No. 5 and 13)

d. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk per December 31, 2012 is a transactional working capital credit facility maximum of Rp 50.000.000.000,- (fifty billion rupiah) as additional working capital for Pandanduri Weir Construction Project, interest rate of 10% per year, provision of 0,5% per year and the period up to August 31, 2014. Credit collateral is bill for Pandanduri Weir Construction Project in accordance with *Cessie* Agreement Number 2012/*Cessie*/016 dated November 28, 2012.

Restriction about things that should not be done by Company as follows

1. Making changes to the field of business that can lead to a result of material, unless required by legislation in force.
2. Merger or consolidate with another change, except as required by the legislation in force.
3. Making changes of the legal entity.
4. Transfer or deliver to the other party, as part of or a whole on rights and obligations arising in connection with the Credit Facility / *NCL Plafond*.
5. Binds itself as the insurer or guarantor of its debt or pledge assets to other parties, except those already running.
6. Filing for bankruptcy or request postponement of debt obligations to the relevant authorities.
7. Receive new credit from other banks or other financial institutions except to the majority shareholders.

Maintaining financial ratios of :

1. Minimum one (1.00) time current ratio.
Current Ratio is the ratio between the total current assets to total current liabilities in the financial statements of home statement / Company audited.
2. Debt to Equity Ratio of maximum four (4) times
Debt to Equity Ratio is the ratio of total debt to total equity in the home financial statements / Company audited.
3. Debt Service Coverage minimum of one hundred percent (100%)
Debt Service Coverage is the ratio of EBITDA to maturing installment liabilities and interest on home financial statements / Company audited.

e. PT Bank DBS Indonesia

Loan to PT Bank DBS Indonesia on December 31, 2012 is fee for SKBDN facility (see Notes No. 5 and 14).

Restriction about things that should not be done by Company as follows

1. Changing business type of the Company

17. UTANG BANK (Lanjutan)

e. PT Bank DBS Indonesia (Lanjutan)

- Mengubah bentuk dan/ atau status hukum Perusahaan, melikuidasi, meleburkan, membubarkan dan/ atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/ atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen
- Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau Perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.
- Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga
- Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham Perusahaan atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya.
- Menerima kredit dan/ atau pinjaman baru dan/ atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya.
- Membayar utangnya kepada para pemegang saham, Direktur, Komisaris dan/ atau induk atau anak perusahaan Perusahaan dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari.
- Menerbitkan B/G dan/ atau L/C Impor dan/ atau SKBDN kepada pihak-pihak terkait Perusahaan.

17. BANK LOAN (Continued)

e. PT Bank DBS Indonesia (Continued)

- Changing the shape and / or the legal status of the Company, liquidate, merge, dissolve and / or do other things for the benefit of its creditors (other than Bank), including issuing new shares and / or sell stocks that have been there, right options, warrants or similar instruments.
- Transfer the majority of assets or important assets (*material assets*) or Company in any form or by any name and by any means to third parties.
- Filed a petition to be declared bankrupt or request of payment postponement.
- Binds itself as guarantor (*borg*) against third parties.
- Creating and signed agreement that is material favorable for members of the Board of Directors, Commissioners or shareholders of the Company or related parties mentioned previously.
- Accept credit and / or new loans and / or additional from other banks or other third parties.
- Pay its debt to shareholders, Directors, Commissioners and / or Holding or Subsidiary Company of any kind now existing or that will arise in the future.
- Issuing B/G and / or L/C Import and / or SKBDN to related parties of Company.

18. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
a. Pihak-pihak berelasi			
PT Adyawinsa Electrical and Power	2.040.000.000	-	-
PT Cakrawala Energi Nusantara	-	-	78.161.100
Sub jumlah	2.040.000.000	-	78.161.100
b. Pihak ketiga			
Utang pembelian tanah	32.802.000.000	-	-
Jumlah	34.842.000.000	-	78.161.100

Utang kepada PT Adyawinsa Electrical and Power merupakan pinjaman dalam rangka pemenuhan jaminan rekening bersama Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE) pada anak Perusahaan PT Brantas Adya Surya Energi.

Utang kepada PT Cakrawala Energi Nusantara merupakan dana talangan operasional dari pemegang saham, PT Brantas Cakrawala Energi, anak Perusahaan PT Brantas Energi.

Utang pembelian tanah sesuai dengan Amandemen Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Tanah di Desa Cipendeuy, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp 32.802.000.000,- antara Perusahaan dan Kardi Gunawan Purwanegara.

(lihat catatan No. 3d, 35)

18. OTHERS PAYABLE

This account consists of :

	2014	2013	2012
a. Pihak-pihak berelasi			
PT Adyawinsa Electrical and Power	2.040.000.000	-	-
PT Cakrawala Energi Nusantara	-	-	78.161.100
Sub total	2.040.000.000	-	78.161.100
b. Pihak ketiga			
Utang pembelian tanah	32.802.000.000	-	-
Jumlah	34.842.000.000	-	78.161.100

Payable to PT Adyawinsa Electrical and Power is payable in accordance fullfeel joint guarantee account of Directorate General of New and Renewable (EBTKE) in PT Brantas Adya Surya Energi, subsidiary.

Payable to PT Cakrawala Energi Nusantara is operational fund from share holder, PT Brantas Cakrawala Energi, subsidiary of PT Brantas Energi.

Payable on land purchase in accordance with Agreement Cooperation Ammandment of Land Procurement in Cipendeuy Village, Cipendeuy Sub region, Subang region, West Java dated February 11, 2015 amounting to Rp 32.802.000.000,- between Company and Kardi Gunawan Purwanegara.

(see notes No. 3d, 35)

19. UANG MUKA PEMBERI KERJA

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
Jumlah uang muka pemberi pekerjaan	145.973.257.179	218.324.997.647	116.636.670.086
Dikurangi uang muka pemberi kerja - yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(49.962.008.498)	(71.626.728.150)	(85.401.031.535)
Jumlah uang muka pemberi pekerjaan - jangka panjang	96.011.248.681	146.498.269.497	31.235.638.551

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari jasa konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan akan diperhitungkan dengan pembayaran termin.

19. ADVANCE FROM EMPLOYERS

This account consists of :

	2014	2013	2012
Total of advance from employers	145.973.257.179	218.324.997.647	116.636.670.086
Net of advance from employers - with one year maturity	(49.962.008.498)	(71.626.728.150)	(85.401.031.535)
Total long term advance - from employers	96.011.248.681	146.498.269.497	31.235.638.551

Advance from employers represents advances received from construction services when the contract is signed and will be calculated with the payment terms.

19. UANG MUKA PEMBERI KERJA (Lanjutan)

19. ADVANCE FROM EMPLOYERS (Continued)

Rincian adalah sebagai berikut :

Details are as follows :

a. Jatuh tempo 1 tahun

a. One year maturities (Continued)

Pemberi Kerja / Employers	Proyek / Project	2014	2013	2012
Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman, Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Department of town planning, building and settlement, South Tangerang City government	Gedung Balai Kota Tangsel / South Tangerang city government building	2.337.320.480	-	-
PPK Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat / PPK Copyright Field, Civil works department of West Sumbawa governments.	Proyek Pemb. RSUD Taliwang / Taliwang hospital construction project	5.083.835.371	-	-
Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA / Department of Civil Works Directorate General of Water Resources	Proyek Saluran Lempuing / Lempuing Stream Project	6.250.225.720	12.213.549.036	14.789.619.300
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Cianten / PLTM Cianten Project	1.468.587.686	12.797.731.420	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Cianten 3 / PLTM Cianten 3 Project	2.577.337.559	8.334.920.737	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Cianten 1-B / PLTM Cianten 1-B Project	2.465.270.987	-	-
KSU Perumnas - PT Bakrie Pangripta Loka	Apartemen Sentra Timur	2.048.645.454	-	-
Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta	Proyek Rehab Jaringan Instalasi PDAM Perum Perikanan	5.380.200.000	-	-
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan	Proyek Lingkar Luar Pulau Mendol	3.234.118.811	-	-
Kementerian Pertahanan RI	Proyek Beaching Plate Ujung SBY	1.324.013.455	-	-
Kementerian Pertahanan RI	Proyek Dermaga Batu Poron	1.779.250.574	-	-
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana	Proyek Pemeliharaan Bendungan	1.304.100.000	-	-
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Proyek Kantor Pemasaran dan Pelayanan Manyar	3.542.648.194	-	-
PT Duta Dharma Sinarmas	Proyek Capitol Primera City	7.400.000.000	-	-
BPJS Kesehatan Divisi Regional X	Proyek Gedung BPJS Tondano	684.080.060	-	-
PT Mega Power Makmur	Proyek PLTMH Bantaeng	2.892.419.601	-	-
Satker Non Vertikal tertentu Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Management Implementer of Brantas Water Resources	Proyek Bajulmati 2 / Bajulmati 2 Project	-	2.544.125.573	5.949.250.884
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) / Working Unit Implementer of Papua Province Area V National Road (Puncak Jaya)	Proyek Jalan Dekai Oksibil / Dekai Oksibil Road Project	-	13.147.559.802	36.349.545.455
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara / SNVT Network Water Implementation Sulawesi I of North Sulawesi	Proyek Irigasi Sangkup Kiri / Sangkup Kiri Irrigation Project	-	2.209.567.341	6.935.457.300
PT Jaya Ancol, Tbk	Proyek Ancol Geotube / Ancol Geotube Project	-	1.040.076.000	-
JO Waskita-Wika	Proyek Tunnel Bendungan Jatibarang / Jatibarang Weir Tunnel Project	-	1.748.555.343	2.329.112.576
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov Sulteng / Ministry of Civil Works Directorate General of Highways of National Area II Implementation Working Unit of Southeast Sulawesi	Proyek Penggantian Jembatan Dolago / Dolago Bridges Replacement Project	-	4.323.446.402	-
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Ndungga Flores / MHPP Ndungga Flores Project	-	2.154.166.470	4.399.943.478
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Santong / MHPP Santong Project	-	1.528.909.208	2.080.435.226
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Prafi Papua Barat / MHPP Prafi Papua Barat Project	-	2.491.997.131	4.329.121.861
Pemkot Tarakan, Dinas PU dan Tata Ruang / Tarakan City Government, Department of Civil Works and Layout	Proyek Lapangan Tenis Tarakan / Tarakan Tennis Court Project	-	6.993.623.688	-
PPK Irigasi dan Rawa IV SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / PPK Irrigation and Swamp IV SNVT of Network Water Implementation of Sumatera VIII River Area	Proyek Rehab Jar. Dr. Pasut Delta Saleh / Network Rehabilitation of Dr Pasut Delta Saleh Project	-	-	8.238.545.455
Jumlah dipindahkan / amount of transferred		49.772.053.952	71.528.228.150	85.401.031.535

19. UANG MUKA PEMBERI KERJA (Lanjutan)

19. ADVANCE FROM EMPLOYERS (Continued)

a. Jatuh tempo 1 tahun (Lanjutan)		a. One year maturities (Continued)		
Pemberi Kerja / Employers	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / amount of transfer		49.772.053.952	71.528.228.150	85.401.031.535
PT Sangsaka Hidro Kasmar	Proyek PLTM Rongkong / PLTM Rongkong Project	95.454.545	150.000.000	-
PT Sangsaka Hidro Kasmar	Proyek PLTM Baliase / PLTM Baliase Project	94.500.000	148.500.000	-
Sub Jumlah / Sub total		49.962.008.498	71.826.728.150	85.401.031.535
b. Jatuh Tempo Lebih dari 1 Tahun		b. More Than One year Maturity		
Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Dep. PU, Dirjen Sumber Daya Air Satker Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane / Department of Civil Works Water Resources Large Hall of Ciliwung-Cisadane River Area	Proyek Normalisasi Kali Sunter / Sunter River Normalization Project	-	790.492.277	1.652.235.550
Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) / PT PLN (Persero) Jawa, Bali and Southeast Nusa Main Generator	Proyek Pek. Accessroad Upper Cisokan / Accessroad Upper Cisokan Construction Project	23.151.142.583	24.544.285.214	24.544.285.214
PT Bio Jatropa Indonesia	Proyek PLTMH Cibalapulung / PLTMH Cibalapulung Project	1.425.034.994	1.425.034.994	5.039.117.787
Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / Department of Civil Works, Government of DKI Jakarta	Proyek JEDI Gunung Sahari JUFMP-1/ JEDI Gunung Sahari JUFMP-1 Project	17.920.684.175	25.834.545.454	-
PPK-11 Pembangunan Jembatan Kelok-9 / PPK-11 of Kelok-9 Bridge Construction	Proyek Fly Over Bukit Tinggi / Fly Over Bukit Tinggi Project	-	12.141.436.356	-
PPK Sungai Pantai II, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Brantas / PPK Beach River II, SNVT Brantas Water Resources Network Implementer	Proyek Wonokromo Paket 3 / Wonokromo Package 3 Project	2.229.455.522	13.952.817.409	-
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Proyek PLTM Pusaka 1 & 3 / PLTM Pusaka 1 & 3 Project	10.164.548.207	13.400.000.000	-
PT Megapower Makmur	Proyek PLTMH Bantaeng 1 / PLTMH Bantaeng 1 Project	-	6.650.000.000	-
PT Sangsaka Hidro Barat	Proyek PLTMH Cibalapulung 2 & 3 / PLTMH Cibalapulung 2 & 3 Project	14.100.000.000	14.100.000.000	-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral SDA Satuan Kerja NVT Pelaksanaan Jaringan Air Papua / Ministry of Civil Works Directorate General of Natural Resources Unit Work of NVT Papua Water Network Implementation	Proyek Bendung Wariori / Wariori Reservoir Project	24.681.818.182	27.272.727.273	-
PPK Sungai Pantai SNVT PJSA Sulawesi II / PPK River Beach SNVT PJSA Sulawesi II	Proyek Bolango River Paket 5 / Bolango River Package 5 Project	2.338.565.018	6.386.930.520	-
Sub Jumlah / Sub total		96.011.248.681	146.498.269.497	31.235.638.551
Jumlah / Total		145.973.257.179	218.324.997.647	116.636.670.086

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

20. UNEARNED REVENUE

Akun ini terdiri dari :		This account consists of :		
Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov Sulteng / Ministry of Civil Works Directorate General of Bina Marga of National Street Implementation Working Unit of Area II Southeast Sulawesi	Proyek Penggantian Jembatan Dolago / Replacement of Dolago Bridges Project	-	4.417.007.137	-
Satker Non Vertikal tertentu Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Management Implementor of Brantas Natural Resources	Proyek Bajulmati 2 / Bajulmati 2 Project	-	6.963.865.810	-
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur / Department of Civil Works of East Kalimantan Province	Proyek Lanjutan Bendung Di Semurut / Continuous Di Semurut Reservoir Project	-	322.065.893	-
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Pemkot Bontang / Industrial, Trade, Koperasi UMKM of Bontang City Government	Proyek Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bontang / Bontang Gasses Transmission Network and Distribution Project	-	2.961.928.497	-
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		-	14.684.867.337	-

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (Lanjutan)

20. UNEARNED REVENUE (Continued)

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan				
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal SDA Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II / Ministry of Civil Works Directorate General of Natural Resources of Southeast Nusa II River Area	Proyek Bendung Kodl / Kodl Reversoir Project	-	14.684.867.337	-
Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University	Peralatan Penunjang ME Gedung Lanjutan UNG / ME Supporting Equipment of Advance UNG Building	-	1.256.657.302	-
Dep. PU, Dirjen Sumber Daya Air Satker Balai Besar Wilayah Sungai Cihlung-Cisadane / Department of Civil Works Water Resources Large Hall of Cihlung-Cisadane River Area	Proyek Normalisasi Kali Sunter / Sunter River Normalization Project	-	1.258.279.173	-
Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) / Jawa, Bali and Southeast Nusa Main Power Station and Networks PT PLN (Persero)	Proyek Pek. Accessroad Upper Cisokan/ Accessroad Upper Cisokan Work Project	-	-	5.566.444.319
Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University	Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University	-	-	818.930.061
Jumlah / Total		-	17.274.108.777	6.477.679.344

Akun ini merupakan pendapatan atas pekerjaan jasa konstruksi yang telah dibayar pemberi kerja sedangkan fisik belum selesai dilaksanakan. (lihat catatan No. 3f)

This account is an income above the construction work that has been paid by the employers while the physical yet completed. (see note No. 3f)

21. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

21. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	2014	2013	2012	
Kantor pusat dan wilayah	31.077.181.763	21.061.604.417	15.340.462.428	Head office
Unit / proyek	16.337.587.037	15.409.710.913	7.029.341.733	Unit / project
Unit peralatan	5.516.158.959	5.766.587.372	2.104.074.599	Equipment unit
Entitas anak	180.931.833	56.458.089	25.905.233	Subsidiaries
Jumlah	53.111.857.611	42.294.360.781	24.499.783.993	Total

Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 antara lain : biaya gaji, bunga, premi asuransi, telepon, listrik dan air yang merupakan biaya yang masih harus dibayar di kantor pusat, wilayah-wilayah dan unit/proyek. Biaya ini adalah biaya-biaya tahun berjalan yang pada akhir penutupan buku belum dibayar dan dibayarkan tahun berikutnya.

Accrued expenses on December 31, 2014, 2013 and 2012, among others : salaries expenses, interest, insurance premiums, telephone, electricity and water that are accrued in head office, regions and units /projects. These costs are the costs for the year that at the end of the book has not been paid and will be paid on the following year.

Biaya yang masih harus dibayar unit peralatan merupakan biaya-biaya perbaikan (repair).

Accrued expenses on equipment unit are repair costs.

Biaya masih harus dibayar entitas anak antara lain perjalanan dinas dan transport, jansostek, beban rapat dan sewa kendaraan. (lihat catatan No. 3m)

Accrued expenses of subsidiaries among others : official travel and transport, jansostek, meeting expense and vehicle rent. (see note No. 3m)

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

22. LEASE PAYABLE

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	2014	2013	2012	
PT Astra Sedaya Finance	3.309.682.640	10.915.856.235	12.370.328.331	PT Astra Sedaya Finance
PT ORIX Indonesia Finance	20.883.746.097	7.564.569.819	1.827.000.577	PT ORIX Indonesia Finance
PT Sumitomo (SMFL) Leasing Indonesia	10.409.772.380	5.575.807.756	2.833.249.500	PT Sumitomo (SMFL) Leasing Indonesia
PT SAN Finance	17.932.640.000	-	-	PT SAN Finance
Jumlah	52.535.841.117	24.056.233.810	17.030.578.408	Total

Bagian jangka pendek dari utang - sewa pembiayaan :

	2014	2013	2012	
PT Astra Sedaya Finance	1.166.741.974	9.053.848.042	6.462.061.490	Short-term portion from lease payable : PT Astra Sedaya Finance
PT ORIX Indonesia Finance	11.475.646.453	4.516.878.246	1.827.000.577	PT ORIX Indonesia Finance
PT Sumitomo (SMFL) Leasing Indonesia	1.744.354.556	4.368.024.976	1.144.004.274	PT Sumitomo (SMFL) Leasing Indonesia
Jumlah	14.386.742.983	17.938.751.264	9.433.066.341	Total

Utang sewa pembiayaan jangka - panjang setelah dikurangi bagian - jangka pendek :

	2014	2013	2012	
PT Astra Sedaya Finance	2.142.940.666	1.862.006.193	5.908.266.841	Long-term lease payable, net of short-term portion : PT Astra Sedaya Finance
PT ORIX Indonesia Finance	9.408.099.644	3.047.691.573	1.689.245.226	PT ORIX Indonesia Finance
PT Sumitomo (SMFL) Leasing Indonesia	8.665.417.824	1.207.782.780	-	PT Sumitomo (SMFL) Leasing Indonesia
PT SAN Finance	17.932.640.000	1.207.782.780	-	PT SAN Finance
Jumlah	38.149.098.134	6.117.482.546	7.597.512.067	Total

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Utang sewa pembiayaan kepada PT Astra Sedaya Finance merupakan utang sewa pembiayaan atas perolehan alat-alat besar proyek, jangka waktu pembiayaan 24 sampai dengan 36 bulan dengan tingkat suku bunga berkisar 8,60% - 13,57% per tahun.

Utang sewa pembiayaan kepada PT ORIX Indonesia Finance merupakan pembiayaan atas perolehan alat-alat besar proyek, jangka waktu pembiayaan rata-rata 36 bulan dengan tingkat bunga 13,3% per tahun.

Utang sewa pembiayaan kepada PT Sumitomo (SMFL) Leasing Indonesia merupakan pembiayaan atas perolehan alat-alat besar proyek, jangka waktu pembiayaan rata-rata 24 sampai dengan 36 bulan dengan tingkat bunga berkisar 8,20% - 12,75% per tahun.

Utang sewa pembiayaan kepada PT SAN Finance merupakan pembiayaan atas perolehan alat-alat besar proyek, jangka waktu pembiayaan rata-rata 24 bulan dengan tingkat bunga berkisar 8% - 14% per tahun. (lihat catatan No.3j, dan 13)

22. LEASE PAYABLE (Continued)

Lease payable to PT Astra Sedaya Finance is lease payable for the acquisition of major project equipments, the financing term of 24 to 36 months with interest rates ranging from 8,60% - 13,57% per year .

Lease payable to PT ORIX Indonesia Finance is a finance lease for the acquisition of heavy project equipments, the financing period of 36 months with interest rate of 13,30% per year.

Lease payable to PT Sumitomo (SMFL) Leasing Indonesia was used to finance the acquisition of major project equipments, the average financing period of 24 to 36 months with an interest rate ranging from 8,20% - 12,75% per years. (see notes no.3j, and 13)

Lease payable to PT SAN Finance was used to finance the acquisition of major project equipments, the average financing period of 24 months with an interest rate ranging from 8% - 14% per years. (see notes no.3j, and 13)

23. SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I	50.000.000.000	50.000.000.000	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II	25.000.000.000	25.000.000.000	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap III	25.000.000.000	-	-
Jumlah	100.000.000.000	75.000.000.000	-

Bagian jangka pendek dari surat berharga jangka menengah :

MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I	50.000.000.000	-	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II	25.000.000.000	-	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap III	25.000.000.000	-	-
Jumlah	100.000.000.000	-	-

Surat berharga jangka menengah setelah dikurangi bagian jangka pendek :

MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I	-	50.000.000.000	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II	-	25.000.000.000	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap III	-	-	-
Jumlah	-	75.000.000.000	-

23. MEDIUM TERM NOTES

This account consists of :

MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap III	-
Total	-

Short term portion of medium term notes:

MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap III	-
Total	-

Medium term notes less of Short term portion of :

MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II	-
MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap III	-
Total	-

a. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), jangka waktu 380 hari sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 7 Januari 2015 dengan bunga sebesar 9,25% per tahun. Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen Pemantau.

Issuance of Medium-Term Securities (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) of 2013 Seri A Phase I amounting to Rp 50.000.000.000,- (fifty billion rupiahs), a period of 380 days from December 18, 2013 until January 7, 2015 with an interest rate of 9.25% per year. Holders of securities and the issuer have appointed PT Bank CIMB Niaga Tbk as the Monitoring Agent.

b. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap II sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), jangka waktu 380 hari sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 9 Januari 2015 dengan bunga sebesar 9,25% per tahun. Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen Pemantau.

Issuance of Medium-Term Securities (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) of 2013 Seri A Phase II amounting to Rp 25.000.000.000,- (twenty five billion rupiahs), a period of 380 days from December 20, 2013 until January 9, 2015 with an interest rate of 9.25% per year. Holders of securities and the issuer have appointed PT Bank CIMB Niaga, Tbk as the Monitoring Agent.

c. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap III sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), jangka waktu 380 hari sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 28 Januari 2015 dengan bunga sebesar 9,25% per tahun. Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen Pemantau.

Issuance of Medium-Term Securities (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) of 2013 Seri A Phase III amounting to Rp 25.000.000.000,- (twenty five billion rupiahs), a period of 380 days from January 08, 2013 until January 28, 2015 with an interest rate of 9.25% per year. Holders of securities and the issuer have appointed PT Bank CIMB Niaga, Tbk as the Monitoring Agent.

24. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

24. ESTIMATED LIABILITIES ON EMPLOYEE BENEFIT

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	2014	2013	2012	
Liabilitas program pensiun	4.456.498.876	2.430.584.235	3.129.541.207	Pension program liabilities
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja	4.603.601.126	5.144.248.136	5.952.572.079	Estimated liabilities of employee benefit
Liabilitas iuran tambahan pensiun	-	-	1.886.853.461	Additional fees liabilities
Jumlah	9.060.100.002	7.574.832.371	10.968.966.747	Total

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) yang berkaitan dengan hak dan besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana disahkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP-053/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000. Dana pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Kebijakan pendanaan terdiri dari iuran normal, iuran tambahan dan manfaat pensiun. Besaran iuran normal yang diperlukan adalah sebesar 20,56% dari penghasilan dasar pensiun (PhDP) terakhir. Dari jumlah tersebut Peserta aktif harus membayar sebesar 5% dari PhDP dan Pemberi Kerja sebesar 15,56% dari PhDP. Iuran tambahan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Aktuaria dari Pemberi Kerja untuk menutup defisit.

Penilaian beban dan liabilitas dana pensiun dilakukan oleh PT Dian Artha Tama Aktuaria, aktuaris independen, sesuai dengan laporannya No. 113-B/PSAK/DAT/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, No. 039B/PSAK/DAT/I/2014 Tanggal 10 Januari 2014, dan No. 78-B/PSAK/DAT/I/2013 tanggal 7 Januari 2013. Asumsi yang digunakan untuk tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Usia Pensiun	: 55 tahun/Years	:	Pension Age
Tingkat Kematian	: GAM - 1971	:	Mortality rate
Tingkat cacat	: 0,1% per tahun/per year	:	Disability level
Tingkat pengunduran diri	: 0,1% per tahun/per year	:	Resign level
Selisih usia suami/istri	: 5 tahun/years	:	Difference age of husband/wife
Kenaikan PhDP	: 7,0 % per tahun/per year	:	Increase of PhDP
Tingkat bunga : Kewajiban	: 8,5 % untuk tahun 2014 dan 2013/8,5% for year 2014 and 2013, 5,5 % untuk tahun 2012/5,5% for year 2012	:	Interest rate : liabilities
Aset	: 8,5 % untuk tahun 2014 dan 2013/8,5% for year 2014 and 2013, 5,5 % untuk tahun 2012/5,5% for year 2012	:	Asset
Pajak Dibayar	: Dana Pensiun/Pension Fund	:	Paid tax
Biaya Pengelolaan	: Tidak dibebankan pada iuran/ Uncharged on fees	:	Management cost
Metode	: Projected Unit Credit	:	Method

Rekonsiliasi liabilitas program dana pensiun sebagai berikut :

Reconciliation of pension plan liabilities are as follows:

	2014	2013	2012	
Saldo awal liabilitas	2.430.584.235	3.129.541.207	2.107.402.414	Ending balance of liabilities
Beban (pendapatan)	4.147.769.520	2.906.517.593	3.916.577.975	Expenses (income)
Iuran pemberi kerja	(2.121.854.879)	(3.605.474.565)	(2.894.439.182)	Fees of employers
Saldo akhir liabilitas	4.456.498.876	2.430.584.235	3.129.541.207	Ending balance of liabilities

Penetapan beban (pendapatan) imbalan pasca kerja sebagai berikut :

Determination of post-employment benefit expenses (income) as follows :

	2014	2013	2012	
Biaya jasa kini	2.681.631.501	2.252.300.975	2.454.130.330	Current service cost
Biaya bunga	2.737.805.251	1.760.850.698	1.679.858.414	Interest cost
Hasil yang diharapkan dari asset	(1.760.040.713)	(1.648.385.400)	(697.302.411)	Expected result from assets
Laba (rugi) Aktuaria	426.771.929	480.149.768	618.290.090	Gain (loss) actuary
Biaya jasa lalu :				Past service cost :
a. Vested	-	-	-	a. Vested
b. Non vested	61.601.552	61.601.552	61.601.552	b. Non vested
c. Transisi	-	-	-	c. Transition
Beban (pendapatan) yang diakui	4.147.769.520	2.906.517.593	3.916.577.975	Recognized expense (income)

b. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit) sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan pasca kerja tersebut. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 420 karyawan.

b. Post-Employee Benefit

The Company provides employee benefit plan termination (post-retirement benefits) according to the Employment Act No. 13 of 2003 on the Settlement of Employment Termination and Severance Pay Determination. No funding is made with relating to the employee benefit programs. The number of employees who are entitled to such benefits are 420 employees.

24. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

24. ESTIMATED LIABILITIES ON EMPLOYEE BENEFIT (Continued)

b. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Penilaian beban manfaat karyawan sesuai dengan PSAK No.24 (Revisi 2010) dilakukan oleh PT Dian Artha Tama Aktuarial, aktuaris independen, sesuai dengan laporannya No. 113-A/PSAK/DAT/2015 tanggal 15 Januari 2015, No. 039A/PSAK/DAT/2014 tanggal 10 Januari 2014, dan No.78-A/PSAK/DAT/2013 tanggal 7 Januari 2013 dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut :

Usia Pensiun	:	55 tahun	:
Tingkat Kematian	:	GAM - 1971	:
Tingkat cacat	:	0,1% per tahun	:
Tingkat pengunduran diri	:	0,1% per tahun	:
Kenaikan Gaji (Upah)	:	7,0% per tahun	:
Tingkat bunga	:	8,5% tahun 2014 dan 2013	:
		5,5% tahun 2012	
Metode	:	Projected Unit Credit	:

Rekonsiliasi liabilitas manfaat karyawan diestimasi yang diakui di laporan posisi keuangan sebagai berikut :

	2014	2013	2012	
Saldo awal liabilitas	5.144.248.136	5.952.572.079	7.492.667.118	Beginning balance of liabilities
Pembayaran manfaat	(1.679.004.136)	(1.246.764.398)	(1.228.069.535)	Payment of benefit
Beban (pendapatan)	1.138.357.126	438.440.455	(312.025.504)	Expenses (income)
Saldo akhir liabilitas	4.603.601.126	5.144.248.136	5.952.572.079	Ending balance of liabilities

Penetapan beban (pendapatan) imbalan pasca kerja sebagai berikut :

Determination of post-employment benefits expenses (income) as follows :

	2014	2013	2012	
Biaya jasa kini	1.043.339.018	490.539.214	174.256.871	Current service cost
Biaya bunga	165.826.813	109.857.071	18.357.561	Interest cost
Hasil yang diharapkan dari aset	-	-	-	Expected result from assets
Laba (rugi) aktuarial	(70.808.705)	(161.955.830)	(504.639.936)	Gain (loss) actuary
Biaya jasa lalu	-	-	-	Past service cost :
a. Vested	-	-	-	a. Vested
b. Non vested	-	-	-	b. Non vested
c. Transisi	-	-	-	c. Transisi
Beban (pendapatan) yang diakui (lihat Catatan No. 3o)	1.138.357.126	438.440.455	(312.025.504)	Recognized expense (income) (see note no. 3o)

25. UTANG NON BANK

25. NON BANK LOAN

Utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 101.800.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2014 merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan maksimal total plafond sebesar Rp 200.000.000.000,- sesuai dengan Surat Penegasan Fasilitas Pembiayaan No. S-230/SM/DPI/0714 tanggal 25 Juli 2014. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 dengan suku bunga sebesar 10,5% per tahun. Selanjutnya, fasilitas ini digunakan sebagai modal kerja untuk melaksanakan / menyelesaikan pembangunan atau pekerjaan proyek-proyek sebagai berikut :

Loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounting to Rp 101.800.000.000,- on December 31, 2014 is financing working capital facility with total limit plafond of Rp 200.000.000.000,- according to Letter of Financing Affirmation Facility No. S-230/SM/DPI/0714 dated July 25, 2014. This facility has time period of (twelve) 12 months from August 6, 2014 until August 6, 2015 with 10,5% of interest rate per year. Then, this facility is used as working capital to do / finalize projects construction as follow :

1. Proyek irigasi Komerling tahap II, phase 2, di Provinsi Sumatera Selatan
2. Proyek Pembangunan Waduk Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo tahap II (lanjutan)
3. Proyek pembangunan jalan Dekai-Oksibil di Provinsi Papua
4. Proyek Pelebaran Jalan Pinolosian-Onngunoin-Molobok di Provinsi Sulawesi Utara
5. Proyek Pembangunan Fly Over Bukittinggi di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
6. Proyek Urban Flood Control System Improvement di sungai Wonokromo, Provinsi Jawa Timur
7. Proyek-proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sektornya

1. Irigasi Komerling Stage II project, phase 2, in Sumatera Selatan Province
2. Bajulmati Reservoir Construction Project in Banyuwangi District and Situbondo stage II (continued)
3. Dekai-Oksibil Road Construction Project in Papua Province
4. Pinolosian-Onngunoin-Molobok Widening Road Project in North Sulawesi Province
5. Fly Over Bukittinggi Construction Project in Bukittinggi, West Sumatera Province
6. Urban Flood Control System Improvement Project in Wonokromo River, East Java Province
7. Other infrastructure projects financed by APBN fund and sectors

25. UTANG NON BANK (Lanjutan)

Utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 144.300.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2013 merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja maksimal total plafond sebesar Rp 150.000.000.000,- untuk pembiayaan proyek infrastruktur, bunga sebesar 9% per tahun, provisi 0,5% dengan jangka waktu tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan 6 Agustus 2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 14 tanggal 31 Agustus 2013 notaris Lolani Kurniati Irdham – Idroes SH, LLM di Jakarta. Jaminan fasilitas pembiayaan tersebut adalah piutang atau tagihan atas proyek pembangunan jalan Dekai-Oksibil sesuai dengan Akta Jaminan Fiducia No. 16 tanggal 31 Juli 2013 dari notaris yang sama.

25. NON BANK LOAN (Continued)

Loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounting to Rp 144.300.000.000,- on December 31, 2013 is financing working capital facility with total limit of Rp 150.000.000.000,- to financing infrastructure projects, interest of 9% per year, provisi of 0,5% with time period from August 6, 2013 until August 6, 2014 and can be extended by both parties according to Deed of Changes Agreement on Financing Agreement Number : 14 dated August 2013 notary Lolani Kurniati Irdham – Idroes SH, LLM in Jakarta. Collateral for this facility is receivable or bill on Dekai-Oksibil Road Construction Project according to Fiducia Collateral Deed No 16 dated July 31, 2013 from the same notary.

26. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta notaris No.15 tanggal 12 Agustus 2008 Tjpto Pranowo, S.H., di Jakarta, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang dibuat di hadapan notaris Retno Santi Prasetyati, SH di Jakarta No.32 tanggal 15 Agustus 2012, menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari semula Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) menjadi Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 151.555 (seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya seharga Rp 151.555.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham tersebut sebesar Rp 151.554.480.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan. Modal saham Perusahaan per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

26. CAPITAL STOCK

According to notarial deed No. 15 dated August 12, 2008 of Tjpto Pranowo, S.H., in Jakarta, the Authorized capital is set at Rp 40.000.000.000,- (forty billion rupiah) divided into 40.000 (forty thousand) shares, each with nominal value of Rp 1.000.000,- (one million rupiahs). The authorized capital has been subscribed and fully paid by the Republic of Indonesia as many as 10,000 (ten thousand) shares or Rp 10.000.000.000,- (ten billion rupiahs).

According to Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Company of PT Brantas Abipraya (Persero) made in the presence of notary Retno Santi Prasetyati, SH in Jakarta NO. 32 dated August 15, 2012, approved the increase in authorized capital from Rp 40.000.000.000,- (forty billion rupiahs) to Rp 600.000.000.000,- (six hundred billion rupiahs), approved the expenditure / shares placement that are still in the deposits (treasury) amounted to 151.555 (one hundred and fifty one thousand five hundred and fifty five) shares with a nominal value of Rp 1.000.000,- (one million rupiahs) or entirely worth of Rp 151.555.000.000,- (one hundred and fifty one billion five hundred and fifty five million rupiahs) which is entirely taken by the Republic of Indonesia and to meet expenditure/share placement amounted to Rp 151.554.480.000,- (one hundred and fifty one billion five hundred and fifty four million four hundred and eighty thousand rupiahs) derived from the transfer of state property on the Ministry of Civil Works as stated in the Indonesian Government Regulation Nomor 63 of 2010 on the Addition of the Share Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of the Company (Persero) PT Brantas Abipraya and amounted to Rp 520.000,- (five hundred and twenty thousand rupiah) derived from the capitalization reserve of the Company. Capital stock of the Company as of December 31, 2013 and 2012 are as follows :

	2014	2013	2012	
Modal dasar :				Authorized capital :
600.000 saham				600,000 shares
per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012				on December 2014, 2013 and 2012
nilai nominal @ Rp1.000.000,-	600.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	nominal value @ Rp 1,000,000,-
Modal dalam portepel	(438.445.000.000)	(438.445.000.000)	(438.445.000.000)	Shares in treasury
Modal ditempatkan dan disetor	161.555.000.000	161.555.000.000	161.555.000.000	Subscribed and paid capitals

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Proporsi kepemilikan pemegang saham non pengendali atas ekuitas dan laba (rugi) entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut :

	2014	2013	2012	
Saldo awal	2.666.755.757	2.741.320.845	520.000.113	Beginning balance
Tambahan modal disetor	140.000.000	60.000.000	2.200.000.000	Additional paid in capital
Koreksi saldo laba non pengendali tahun lalu	(11.303.474)	-	-	Additional paid in capital
Bagian dari laba (rugi) yang diatribusikan kepada non pengendali	(527.086.626)	(134.565.088)	21.320.731	Portion of attributable gain (loss) to - non-controlling
Jumlah	2.268.365.657	2.666.755.757	2.741.320.845	Total

(Lihat catatan No. 3b)

27. NON-CONTROLLING INTERESTS

The ownership proportion of non-controlling shareholders in equity and gain (loss) of consolidated subsidiaries are as follows :

(See notes no. 3b)

28. PENDAPATAN USAHA

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Pendapatan jasa konstruksi	2.285.316.369.382	1.407.055.481.714	910.532.625.542	Construction services revenue
Pendapatan jasa peralatan	4.224.196.100	33.261.126.826	12.874.458.688	Equipment services revenue
Pendapatan produk beton	11.066.670.000	124.707.000	-	Concrete product revenue
Pendapatan jasa konsultan	-	814.090.909	-	Consultant service revenue
Jumlah	2.280.607.235.482	1.441.255.406.449	923.407.084.230	Total

28. OPERATING REVENUE

This account consists of :

(See notes no. 3b)

28. PENDAPATAN USAHA

Rincian adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Jasa konstruksi

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi / Building Departement of Bekasi	Proyek Pembangunan Overpass Tegal Danas / Tegal Danas Overpass Construction Project
Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman, Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Department of Town Planning, Building and Settlement, South Tangerang Government	Pembangunan Gedung Balaikota Tangsel / Tangsel City Hall Construction Project
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral SDA Satuan Kerja NVT Pelaksanaan Jaringan Air Papua / Ministry of Civil Works Water Resources General Directorate Papua Water Network Implementer Working Unit	Proyek Pembangunan Bendung Wariori / Wariori Weir Construction Project
PPK Pembangunan Bendungan,SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo, Dirjen. SDA Kementerian P.U. / PPK Weir Construction, SNVT Bengawan Solo Water Resources General Directorate of Working Unit	Pembangunan Waduk Tukul / Tukul Reservoir Construction
SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV Prov Kepulauan Riau PPK sungai dan pantai I / SNVT Sumatera IV Water Resources Network Implementer of Riau Land PPK River and Beach I	Proyek Pemb. Pangaman Pantai P.Nongsa / P Nongsa Pangaman Beach Construction project
Induk Pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) / PT PLN (Persero) Main Plant and Network of Jawa, Bali and Southeast Nusa	Proyek Pek. Accessroad Upper Cisokan / Accessroad upper Cisokan Construction Project
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan SDA Serayu Opak / The Ministry of Civil Work General Directorate of Water Resources, Serayu Opak Operation and Maintenance of Water Reseouces Working Unit	Proyek Bencana Banjir Kab.Purworejo Sleman / Flood Disaster in Purworejo Region, Sleman
Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman, Pemerintah Kota Depok / Departement of Town Planning, Building and Settlement, Government of Depok city	Proyek Gedung Perpustakaan Depok / Depok Library Building Project
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi / Building Departement of Bekasi Regency	Proyek Pembangunan Kolam Renang Tahap 4 / Swimming Pool Stage 4 Construction Project
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi / Building Departement of Bekasi Regency	Proyek Pemb. Gedung Pariwisata Tahap I / Tourism Building Stage I Construction Project
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bengkulu / Bengkulu District Office of Ministry of Law and Human Rights	Pemb.Lanj.Lapas Klas II A Bengkulu / Continous Development of Bengkulu Lapas Stage 2

Jumlah dipindahkan / The amount transferred

28. OPERATING REVENUE

Details are as follows :

a. Construction Services Revenue

2014	2013	2012
21.214.268.182	-	-
41.801.554.753	-	-
65.327.928.375	-	-
12.129.993.659	-	-
5.755.143.798	-	-
30.242.310.759	-	-
5.201.680.000	-	-
26.376.260.616	-	-
69.687.707.273	-	-
13.091.662.098	-	-
35.086.571.893	-	-
325.915.081.405	-	-

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUE (Continued)

a. Pendapatan Jasa konstruksi (lanjutan)

a. Construction Services Revenue (Continued)

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		325.915.081.405	-	-
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda / Department of Highways and Watering of Samarinda City	Proyek Penanggulangan Banjir P.Antasari / P. Antasari Flood Prevention Project	6.987.992.805	-	-
Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Department of Civil Work, Government of East Kalimantan	Proyek Interchange Marthadinata / Interchange Marthadinata Project	14.527.378.987	-	-
PPK Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat / PPK Copyright Field, Departement of Civil Works of West Sumbawa regency Government	Proyek Pemb. RSUD Taliwang / Taliwang RSUD Construction Project	26.537.598.182	-	-
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gresik / Departement of Civil Works of Gresik Regency Government	Proyek Pemb. Wahana Ekspresi KRT / Wahana Ekspresi KRT Construction Project	11.123.368.001	-	-
Balai Pelaksana jalan Nasional XI Manado, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Provinsi Sulut PPK. 10 Buyat-Molobog-Onggunoi / The Manado National Road XI Implementer Agency, North Sulawesi Area II Road Implementer Working Unit, PPK 10 Buyat-Molobog-Onggunoi	Proyek Pelebaran Jalan Pinolosian / Pinolosian Widening Road Project	71.439.806.566	-	-
Kementerian Perumahan Rakyat RI Deputi bidang Perumahan Formal Satker Penyediaan Perumahan / Ministry of Civil Housing RI, Deputy of Formal Housing, Housing Provision	Proyek Rusunawa Wil. II (Jateng & DIY) / Rusunawa Area (Jateng / DIY) Project	137.284.455.091	-	-
Kementerian Perumahan Rakyat RI Deputi bidang Perumahan Formal Satker Penyediaan Perumahan / Ministry of Civil Housing RI, Deputy of Formal Housing, Housing Provision Working Unit	Proyek Rusunawa Wil III (Jatim, Bali, NTB, N / Rusunawa Area III Project (Jatim, Bali, NTB, N	221.542.956.856	-	-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera V / Ministry of Civil Work, Directorate General of Water Resources, Sumatera V River Area Large Hall	Proyek Bencana Alam Pasaman Sumbar / Pasaman, West Sumatera Natural Disaster Project	14.805.107.273	-	-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Brantas / Ministry of Public Works Directorate General of Water Resources Operation Unit Works and Maintenance of Brantas Water Resources	Proyek Penanggulangan Bencana Gn.Kelud / Kelud Mount Disaster Management Project	13.379.770.465	-	-
Dep. PU Timnas Penanggulangan semburan lumpur, Sidoarjo / Department Civil Work, National team of Sidoarjo Mud Prevention	Proyek Mitigasi 7 / Mitigasi 7 Project	73.688.317.488	-	-
Pemkot Tarakan, Dinas PU dan Tata Ruang / Tarakan City Government, Department of Civil Work and Spatial	Proyek Pemb. Lapangan Tennis Outdoor / Outdoor Tennis Court Construction Project	48.812.132.232	-	-
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		966.043.965.351	-	-

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUE (Continued)

a. Pendapatan Jasa konstruksi (lanjutan)

a. Construction Services Revenue (Continued)

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		966.043.965.351	-	-
PPK Penyediaan Air Baku, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cimanuk-Cisanggarung, Dirjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum / PPK Raw Water Supply, Water Utilization Network Implementation SNVT Cimanuk-Cisanggarung, Director General of Water Resources, Ministry of Public Works	Proyek Bendung Karet Waledan (Lanjutan) / Continuous Karet Waledan Weir Project			
SNVT PPK Pembangunan Jalan Malala-Tolitoli-Umu / SNVT PPK Malala-Tolitoli-Umu Road	Proyek Jalan Lakuan Buol / Lakuan Buol Road Project	17.518.382.069	-	-
Dep. PU Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII / Department of Civil Work River Area Hall of Sumatera VIII	Proyek Air Lakitan 2 / Air Lakitan 2 Project	-	9.081.247.440	44.736.776.265
JO PT BA-Waskita-Wika	Proyek Tunnel Jatibarang / Jatibarang Tunnel Project	7.356.847.612	19.081.068.874	15.190.388.382
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum / Directorate General of Water Resources - Department of Civil	Proyek Irigasi Komerling Stage II / Komerling Irrigation Stage II Project	3.803.971.334	2.924.207.129	15.096.322.670
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Prafi - Papua Barat / MHPP Prafi Project - West Papua	7.427.584.704	21.308.129.790	42.227.666.249
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Ndungga - Flores / MHPP Ndungga - Flores Project	84.681.801	22.131.619.792	16.024.812.109
PT PLN (Persero)	Proyek MHPP Santong - NTB / MHPP Santong - NTB Project	3.812.117.674	26.440.080.915	20.355.900.605
PPK Irigasi Wilayah - 3 Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / PPK Irrigation Area - 3 Big Hall of Sumatera VIII River Area	Komerling Paket ICB 6 / Komerling Package ICB 6	-	15.342.930.710	10.823.787.159
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Bidang Sumber Daya Air / Department of Civil Works of East Kalimantan Province in the field of Natural Resources	Bendungan Marangkayu 6 / Marangkayu 6 Weir Project	7.234.304.740	22.874.598.569	50.705.598.904
PPK Sungai & Pantai SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane / PPK River & Beach SNVT of Ciliwung Cisadane Water Resources Network	Proyek Normalisasi Kali sunter / Sunter River Normalization Project	-	7.430.277.818	25.644.127.634
Satker Non Vertikal tertentu Pelaksana Pengelola SDA Brantas / Certain Non Vertical Working Unit of Brantas Water Resources Management Implementer	Proyek Bendungan Bajulmati 2 / Bajulmati 2 Weir Project	61.891.489.689	87.626.171.362	77.922.072.645
Departemen Pekerjaan Umum Dirjen SDA / Department of civil works Directorate General of Water	Proyek Saluran Lempuing / Lempuing Stream Project	88.825.063.526	70.522.760.559	66.070.942.556
PPK Irigasi dan Rawa IV SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / PPK Irrigation and Swamp IV SNVT of Network Water Implementation of Sumatera VIII River Area Large Hall	Proyek Rehab Jar. Dr. Pasut Delta Saleh / Network Rehabilitation of Dr Pasut Delta Saleh Project	46.343.094.392	27.733.134.257	1.723.517.702
		-	58.730.160.000	2.502.690.000
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		1.210.341.502.892	391.226.387.215	389.024.602.880

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUE (Continued)

a. Pendapatan Jasa konstruksi (lanjutan)

a. Construction Services Revenue (Continued)

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		1.210.341.502.892	391.226.387.215	389.024.602.880
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Proyek Cetak Sawah Ketapang / Ketapang Print Field Project	-	1.445.530.723	15.995.610.361
PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau / PPK field of Highways Department of Civil Works of Riau Province	Proyek Jl Bunut Teluk Meranti / Bunut Teluk Meranti Road Project	2.187.604.245	60.646.005.095	18.765.206.437
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) / Working Unit Implementor of Papua Province Area V National Road (Puncak Jaya)	Proyek Jalan Dekai Oxibil / Dekai Oxibil Road Project	191.583.357.543	106.449.365.044	21.577.970.000
PPK Universitas Negeri Gorontalo / PPK Gorontalo State University	Proyek Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University Project	-	816.930.061	15.990.577.939
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur / Department of Civil Works of East Kalimantan Province	Proyek Peningkatan Bendung Semurut / Semurut Weir Improvement Project	4.508.406.026	11.673.414.094	-
Dinas Bangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi / Building Department of Bekasi District Government	Proyek Gedung E2 Rumah Sakit Bekasi / Bekasi Hospital Building E2 Project	7.971.837.272	21.540.431.695	-
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur / Department of Civil Works of East Kalimantan	Proyek Longsoran Gajamada / Gajamada Landslide Project	-	12.827.272.727	-
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Pemkot Bontang / Department of Industry, Trade, Koperasi UMKM of Bontang City Government	Proyek Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bontang / Bontang Gasses Network Transmission and Distribution Project	1.581.327.157	13.762.834.794	-
Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / Department of Civil Works, Government of DKI Jakarta Province	Proyek JEDI Gunung Sahari JUFMP-1 / JEDI Gunung Sahari JUFMP -1 Project	165.543.465.535	6.487.198.233	-
PPK-11 Pembangunan Jembatan Kelok-9 / PPK-11 Kelok-9 Bridge Construction	Proyek Flyover Bukit Tinggi / Bukit Tinggi Flyover Project	78.775.586.335	8.693.454.594	-
PPK Sungai Pantai II, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Brantas / PPK Beach River II, SNVT Brantas Water Resources Network Implementor	Proyek Wonokromo Paket 3 / Wonokromo Package 3 Project	71.826.245.982	29.505.106.525	-
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara / SNVT Sulawesi I Water Network Implementation of North Sulawesi	Proyek Irigasi Sangkup Kiri / Sangkup Kiri Irrigation Project	16.055.360.212	33.462.607.788	-
SNVT Pelaksanaan Jaringan SDA Serayu Opak BBWS Serayu Opak, Dirjen SDA Pekerjaan Umum / SNVT of Serayu Opak Water Resources Network Implementation Director General BBWS Serayu Opak, Department Natural Resources of Civil Works.	Proyek Tanggap Darurat Gunung Merapi Kaliworo / Kaliworo Merapi Mount Emergency Response Project	3.502.229.128	10.288.726.736	-
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		1.753.876.922.327	708.825.265.324	461.353.967.617

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUE (Continued)

a. Pendapatan Jasa konstruksi (lanjutan)

a. Construction Services Revenue (Continued)

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		1.753.876.922.327	708.825.265.324	461.353.967.617
Kementerian Perumahan Rakyat RI Deputi Bidang Perumahan Formal Satker Penyediaan Perumahan / Ministry of Housing RI Deputy of Formal Housing Supply Working Unit	Proyek Pembangunan Rusunawa Wil.III / Rusunawa Area 3 Construction Project	74.521.824.801	20.081.711.563	-
PT Sanghyang Seri (Persero)	Proyek Cetak Sawah Ketapang 2 / Ketapang Field Print Project	-	92.246.069.012	-
Pemerintah DKI Jakarta / Government of DKI Jakarta	Proyek Pengeboran Sumur Resapan / Drilling Infiltration Well Project	-	5.807.471.896	-
Kementerian Pekerjaan Umum Satker Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV Propinsi Kepulauan Riau / Ministry of Civil Works Certain Non Vertical Working Unit of Sumatera IV Water Resources Network Implementation of Riau Island Province	Proyek Pengaman Pantai Pelampong Tahap IV / Pelampong Beach Stage IV Security Project	4.212.484.790	7.520.736.681	-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal SDA Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II / Ministry of Civil Works Directorate General of Water Resources of Southeast Nusa II River Area	Proyek Bendung Kodi / Kodi Dam Project	1.256.657.302	10.106.955.425	-
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo / Sidoarjo Mud ipurt Alleviation Board	Proyek Frontage Relokasi Jalan Arteri Porong Siring / Porong Siring Arterial Road Relocation Frontage Project	-	15.166.560.909	-
SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Jakarta / SNVT National Road Implementation of Metropolitan I Jakarta	Proyek Underpass Cibubur Lanjutan / Continous Cibubur Underpass Project	-	33.188.977.731	-
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur / Working Unit of Area I National Road Implementation of East Kalimantan Province	Proyek Jalan Sp Blusuh Thp 5 / Sp Blusuh Stage 5 Road Project	-	15.139.075.062	-
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Tengah / Area III National Road Implementation Working Unit of Central Kalimantan Province	Proyek Peningkatan Jalan Lampeong 3 / Lampeong 3 Improvement Road Project	-	34.108.146.816	-
PPK Ruas Jalan Buol - Bts Kota Tolitili / PPK of Buol Road - Boundary City of Tolitili	Proyek Peningkatan Lakuan Laulalang / Lakuan Laulalang Improvement Project	-	18.268.771.906	-
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov Sulteng / Ministry of Civil Works Directorate General of Highways of Area II National Road Implementation Working Unit of Southeast Sulawesi	Proyek Penggantian Jembatan Dolago / Replacement of Dolago Bridges Project	37.335.880.615	8.321.224.124	-
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		1.871.203.769.834	968.780.966.449	461.353.967.617

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUE (Continued)

a. Pendapatan Jasa konstruksi (lanjutan)
 Pemberi Kerja / Employer

a. Construction Services Revenue (Continued)

	Proyek / Project	2014	2013	2012
	Jumlah pindahan / Amount of transfer	1.871.203.769.834	968.780.966.449	461.353.967.617
PT Angkasa Pura 1(Persero)	Proyek Rapit Exit Taxiway Bandara Juanda / Rapit Exit Taxiway of Juanda Airport Project	3.452.305.469	14.029.658.531	-
PT PLN (Persero)	Proyek Gedung PLN Pekanbaru / PLN Pekanbaru Building Project	-	41.381.877.611	-
PT PLN (Persero)	Proyek Gedung PLN Wilayah Riau dan Riau Kepulauan / PLN Building of Riau and Riau Island Area Project	51.648.352.562	239.293.750	-
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi / Department of Tourism, Culture, Youth and Sport of Bekasi District	Proyek Kolam Renang Bekasi Tahap 3 / Bekasi Swimming Pool Stage 3 Project	1.254.884.976	26.025.223.206	-
PPK Irigasi dan Rawa-II Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV / PPK Irrigation and Swamp-II of Sulawesi IV River Area Hall	Proyek Embung Anggota / Embung Anggota Project	-	18.634.727.273	-
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi II / SNVT Water Resources Network Implementation of Sulawesi II	Proyek Bolango River Paket 5 / Bolango River Package 5 Project	17.600.853.904	722.486.653	-
PPK Universitas Negeri Gorontalo / PPK Gorontalo State University	Proyek Universitas Negeri Gorontalo - Lanjutan / Continuous Gorontalo State University Project	-	33.309.544.545	-
Dep. PU Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur, Sidoarjo / Department of Civil Works, National Team of Sidoarjo Mud Ipurat Alleviation	Proyek Mitigasi 5 / Mitigasi 5 project	-	17.800.534.590	-
Dep. PU Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur, Sidoarjo / Department of Civil Works, National team of Sidoarjo Mud Ipurat Alleviation	Proyek Mitigasi 6 / Mitigasi 6 Project	-	84.336.727.717	-
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung	Proyek Gelora Bandung Lautan Api	23.436.290.456	-	-
Kementerian Pertahanan RI	Proyek Dermaga Batu Poron	7.728.307.259	-	-
Dinas PU Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo	Proyek Gedung Serbaguna Sidoarjo	16.153.601.420	-	-
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya & Permuseuman, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Proyek Museum Islam Nusantara	7.160.890.752	-	-
Dep. PU Timnas Penanggulangan semburan lumpur, Sidoarjo / Department of Civil Work, National Team of Sidoarjo Mud Prevention	Proyek Mitigasi 3 / Mitigasi 3 Project	-	-	58.837.069.638
PPK Prop.Kaltim / PPK of East Kalimantan Province	Proyek Lampeong / Lampeong Project	-	-	20.708.181.820
	Jumlah dipindahkan / The amount transferred	1.999.639.256.633	1.205.261.040.325	540.899.219.075

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUE (Continued)

a. Pendapatan Jasa konstruksi (lanjutan)		a. Construction Services Revenue (Continued)		
Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		1.999.639.256.633	1.205.261.040.325	540.899.219.075
Dep.PU - Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Prov. Kalimantan Selatan / Department of Civil Works - Directorate General of Kalimantan II River Area Large Hall of South Kalimantan	Proyek Rehabilitasi Saluran Alabio / Alabio Stream Rehabilitation Project	-	-	19.966.054.149
Badan Penanggulangan Bencana / Disaster Prevention Board	Proyek Merapi VI / Merapi VI Project	-	-	20.439.878.933
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citanduy PPK Irigasi dan Rawa. / SNVT implementation of network utilization of irrigation water and marsh PPK of Citanduy	Proyek Rehab Sidareja Cihaur / Sidareja Cihaur Rehabilitation project	-	-	10.194.125.406
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bangka Belitung / Certain Non Vertical Working Unit of Sumatera VII Water Resource Network Implementation of Bangka Belitung Province.	Proyek Pantai Matras Bangka Belitung / Bangka Belitung Beach Mat Project	-	-	26.802.308.540
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga / Government of East Kalimantan Province, Department of Civil Work Department of Highways	Proyek Pemeliharaan Jalan Mas Mansyur / Mas Mansyur Road Maintenance Project	-	-	13.154.545.455
Balai besar pelaksana Jln nasional wilayah VII, Banjarmasin / Large Hall of Nasional Street Implementation Area II, Banjarmasin	Proyek Jln Tjong Ohang-Long pahangai / Tjong Ohang-Long pahangai Street Project	-	-	14.605.610.000
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi / Dept. of Tourism, culture, youth and sports Bekasi	Proyek Kolam Renang Bekasi Tahap 2 / Swimming pool stage II of Bekasi Project	-	-	8.288.861.021
Badan Penanggulangan Bencana Nasional / National Disaster Prevention Board	Proyek Bencana Alam Solo / Solo Natural Disaster Project	-	-	17.959.091.818
Satker NVT PJ Pemanfaatan Air SDA Nusa Tenggara II Prov. NTT / NVT PJ Unit Works of Water Natural Resources Implementation of Southeast Nusa II East Southeast Nusa Province	Proyek Jaringan Irigasi D.I Tilong / D.I Tilong Irrigation Network Project	-	-	9.181.919.092
PT Perhutani	Proyek Pabrik Plywood / Plywood Factory Project	-	-	34.222.957.525
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur / Road I National Construction Implementer Working Unit of East Kalimantan Province	Proyek Jalan Sp Blusuh thp 4 / Sp Blusuh Road Stage 4 Project	-	-	6.866.363.739
SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Jakarta / SNVT National Road Implementation of Metropolitan I Jakarta	Proyek Underpass Cibubur / Cibubur Underpass Project	-	-	43.636.250.909
Pejabat Pembuat Komitmen - 15 - Muara Teweh - Benangin - Lampeong - Batas Prov. Kaltim / Commitment Maker Authority - 15 - Muara Teweh - Benangin - Lampeong - The boundaries of East Kalimantan	Proyek Lampeong Pemeliharaan Berkala / Lampeong Periodic Maintenance Project	-	-	5.208.181.816
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		1.999.639.256.633	1.205.261.040.325	771.425.367.478

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUE (Continued)

a. Pendapatan Jasa konstruksi (lanjutan)

a. Construction Services Revenue (Continued)

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		1.999.639.256.633	1.205.261.040.325	771.425.367.478
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau PPK Sungai dan Pantai I / SNVT Water Resources Network Implementation of Riau Island Province, PPK River and Beach I	Proyek Pantai Pelampong Batam / Pelampong Batam Beach Project	-	-	12.972.778.740
Satker SNVT PJSA Pompengan Jeneberang Prov. Sulawesi Barat / Unit Works of SNVT PJSA Pompengan Jeneberang of West	Proyek Pantai Takatidung Polman / Takatidung Polman Beach Project	-	-	17.731.341.818
PPK Irigasi dan Rawa-II Balal Wilayah Sungai Sulawesi IV / PPK Irrigation and Swamp II Sulawesi IV River Area Hall	Proyek Bendung Di Lambadia Kolaka / Di Lambadia Kolaka Weir Project	-	-	20.123.070.000
Balal Wilayah Sungai Sulawesi III Palu-Sulteng / Palu Southeast Sulawesi River III Area Hall	Proyek Bencana Alam Parigi Moutong / Parigi Moutong Natural Disaster Project	-	-	10.159.998.547
PT Sahung Brantas Energi	Proyek Pemb. PLTMH Padang GUCI 1 / PLMTH Padang Gucl 1 Construction Project	3.562.313.372	-	-
Lain-lain (di bawah Rp 5.000.000.000,-) / Others (below Rp 5.000.000.000,-)		26.363.836.536	18.531.824.733	23.669.646.348
Sub jumlah / Sub total		2.029.565.406.541	1.223.792.865.058	856.082.202.932
Pihak Ketiga :		Third party :		
Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Pemerintah Republik Timor Leste	Proyek Rehab Reibere Lanjutan	6.078.504.840	-	-
Pemerintah Republik Timor Leste / Government of Republic of Timor Leste	Proyek Rehab Reibere / Reibere Rehabilitation Project	22.644.197.489	3.691.752.831	-
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	proyek PLTM Pusaka 3 / PLTM Pusaka 3 Project	6.712.013.016	-	-
PT Berkah Kawasan Banyak Sejahtera	Proyek Kantor Pemasaran & Pelayanan Banyak	3.542.648.194	-	-
PT Jaya Dinamika Geohydroenergi	Proyek PLTM Ciantem-B / Ciantem-B PLTM Project	29.392.584.399	-	-
PT Sasangka Hidro Barat	Proyek PLTM Cibalapulang 2 / PLTM Cibalapulang 2 Project	2.808.824.608	-	-
PT Sasangka Hidro Barat	Proyek PLTM Cibalapulang 2+3 / PLTM Cibalapulang 2+3 Project	4.613.594.119	-	-
PT Duta Dharma Sinarmas	Proyek Capitol Primera City / Capitol Primera City Project	3.669.929.176	-	-
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Proyek Ruko Pademangan Ancol / Pademangan Ancol Commercial House Project	-	196.770.000	12.867.170.198
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Proyek Ancol Geutube / Ancol Geotube Project	14.588.470.031	90.246.945.966	33.646.413.015
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		94.050.765.871	94.135.468.797	46.513.583.213

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. OPERATING REVENUE (Continued)

a. Pendapatan Jasa konstruksi (lanjutan)

a. Construction Services Revenue (Continued)

Pihak Ketiga (lanjutan) :

Third party (Continued):

Pemberi Kerja / Employer	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		94.050.765.871	94.135.468.797	46.513.583.213
PT Bio Jatropa Indonesia	Proyek PLTMH Cibalapulung / PLTMH Cibalapulung Project	19.578.852.317	45.009.709.148	7.611.664.441
PT Jaya Dinamika Geohidroenergi	Proyek PLTM Ciantem / PLTM Ciantem Project	18.427.536.754	20.366.546.325	325.174.956
PT Jaya Dinamika Geohidroenergi	Proyek PLTM Ciantem 3 / PLTM Ciantem 3 Project	37.071.180.036	15.863.928.717	-
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Proyek PLTM Pusaka 1 & 3 / PLTM Pusaka 1 & 3 Project	33.593.422.651	5.413.617.041	-
PT Megapower Makmur	Proyek PLTMH Bantaeng 1 / PLTMH Bantaeng 1 Project	33.029.205.212	2.473.346.628	-
Sub jumlah / Sub total		235.750.962.841	183.262.616.656	54.450.422.610
Sub Jumlah Pendapatan Konstruksi / Sub total construction services revenue		2.265.316.369.382	1.407.055.481.714	910.532.625.542
Jasa alat / Equipment services		4.224.196.100	33.261.126.826	12.874.458.688
Produk beton / Concrete product		11.066.670.000	124.707.000	-
Jasa konsultan / Consultant services		-	814.090.909	-
Jumlah / Total		2.280.607.235.482	1.441.255.406.449	923.407.084.230

(lihat catatan No. 3l)

(see note No. 3l)

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the years ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Stated in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. BEBAN LANGSUNG

29. DIRECT EXPENSES

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	2014	2013	2012	
Bahan material	632.383.031.078	451.832.635.849	304.106.303.884	Materials
Upah langsung	137.892.584.693	104.190.068.011	70.166.290.383	Direct wages
Peralatan	303.973.779.845	297.727.662.588	177.490.822.929	Equipment
Penyusutan	46.031.126.778	29.208.790.438	8.201.941.584	Depreciation
Subkontraktor	688.759.174.991	223.758.759.319	166.076.256.808	Subcontractor
Persiapan dan penyelesaian proyek	88.823.565.545	66.474.656.689	30.966.202.759	Project preparation and settlement
Beban umum proyek :				Project general expenses
Administrasi bank dan keuangan			6.605.257.767	Bank and financial administration
Pegawai	9.232.243.486	14.790.015.280		Employee
Kendaraan	83.432.387.790	52.199.273.077	37.517.256.196	Vehicle
Umum dan administrasi	14.228.880.294	9.508.000.525	6.841.739.275	General and administration
Pengembangan Usaha	46.352.079.933	36.104.061.559	22.635.383.752	Business development
Jumlah	2.680.118.744	-	-	
Jumlah	2.053.888.973.177	1.285.793.923.335	830.607.255.337	Total

(lihat catatan No. 3m)

(see note No. 3m)

30. BAGIAN LABA JOINT OPERATION

30. JOINT OPERATION PROFIT PORTION

Akun ini merupakan bagian laba yang diperoleh dari proyek-proyek yang dilaksanakan dengan Pola Kerjasama (Joint Operation) meliputi proyek-proyek Sipil Umum berupa jalan, jembatan dan bendungan dengan rincian sebagai berikut :

This account is profit portion derived from projects implemented by Pattern Cooperation (Joint Operation) includes General Civil projects such as roads, bridges and reversoir with the following details :

Nama Perusahaan Joint Operation / Company Name of Joint Operation	Proyek / Project	2014	2013	2012
PT Brantas Abipraya - PT Waskita Karya JO	Proyek Gd Bandara Juanda / Juanda Airport Building Project	3.341.147.294	-	-
PT Brantas Abipraya - PT Indah Seratama JO	Proyek Konsolidasi DAM Bawakaraeng / Bawakaraeng Weir Consolidation Project	1.237.292.440	-	-
PT Brantas Abipraya - PT Wijaya Karya JO	Proyek Bendung DI Bajayu / Bajayu DI Weir Project	(598.846.974)	-	-
PT Brantas Abipraya - PT Waskita Karya JO	Proyek Jabung Lampung / Jabung Lampung Project	2.514.525.081	-	-
PT Brantas Abipraya - PT Utama Karya - PT Nindya Karya JO	Proyek Kali Grindulu dan Kali Madiun / Grindulu and Madiun Rivers Project	-	-	(204.576.590)
Brantas - Tuah JO	Proyek Keumala Geumpang / Keumala Geumpang Project	7.308.722	2.070.518.798	-
PT Utama Karya - PT Brantas Abipraya JO	Proyek Jalan Porong Siring II Paket IV / Porong Siring II Package IV Road Project	-	1.319.973.527	2.417.240.628
PT Brantas - PT Tri Citra Perdana - PT Trifa Abadi JO	Proyek Tebas Singkawang / Tebas Singkawang Project	4.569.133.249	39.184.103	-
PT BA-Waskita - Wika JO	Proyek Bendungan Jatibarang (Porsi) / Jatibarang Weir Project (Portion)	7.503.274.204	10.531.608.275	11.592.354.279
PT BA - Waskita - Wika JO	Proyek Bendungan Jatibarang (Integrated) / Jatibarang Weir Project	214.100.649	190.270.000	55.190.000
KSO Brantas - Nindya	Proyek Normalisasi Kali Cillwung Paket 3 / Normalization of Cillwung River Stage 3 Project	3.996.737.341	1.514.856.878	-
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		18.573.832.016	13.961.284.703	13.805.018.317

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the years ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Stated in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. BAGIAN LABA JOINT OPERATION (Lanjutan)

30. JOINT OPERATION PROFIT PORTION (Continued)

Nama Perusahaan Joint Operation / Company Name of Joint Operation	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		18.573.832.016	13.961.284.703	13.805.018.317
PT Brantas - PT Waskita Karya JO	Proyek Sabodam Merapi II / Sabodam Merapi II Project	160.604.517	22.522.380.469	-
PT Brantas - PT Waskita Karya JO	Proyek Gedung Terminal Selatan Bandara / South Port of Airport Building Project	-	2.623.040.786	-
KSO Brantas – Minarta Dutahutama	Proyek Sarana Air Baku Lahat / Lahat Standard Water Facility Project	1.589.940.366	1.324.016.320	-
PT Brantas Abipraya - PT Citra Gading Asritama KSO	Proyek Bendungan Bintang Bano / Bintang Bano Weir Project	(358.754.640)	5.495.414.947	4.545.499.013
PT Brantas- PT.Hutama Karya JO	Proyek Jabung / Jabung Project	1.008.035.232	1.365.441.159	1.497.386.710
PT Brantas - PT Nindya Karya JO	Proyek Titab / Titab Project	(626.928.515)	1.127.820.000	1.206.115.300
PT Brantas - PT Bumi Karsa JO	Proyek Lakitan 3 JO / Lakitan 3 JO Project	-	65.764.325	(4.138.858.551)
PT Brantas - PT Utama JO	Proyek Citarum / Citarum Project	2.027.265.245	16.089.789.302	23.726.122.070
PT Brantas Abipraya - PT PP KSO	Proyek Waledan / Waledan Project	(240.379.676)	808.859.570	2.972.623.993
PT Brantas Abipraya - PT Waskita JO	Proyek Sembayat / Sembayat Project	2.600.283	(297.208.741)	2.514.247.442
PT Brantas - PT Wijaya Karya KSO	Proyek Jembatan Tayan / Tayan Bridges Project	-	(867.538.684)	-
PT Brantas Abipraya - PT WIKA - PT Waskita Karya KSO	Proyek Tempe Barrage (Splitting) / Tempe Barrage Project (Splitting)	4.694.215.777	10.076.615.890	5.126.047.398
BAP - PT Wijaya Karya Cipta Mandiri KSO	Proyek Pabrik Kelapa Sawit Tomato / Tomato Palm Oil Factory Project	(543.667.597)	(6.546.648.165)	(195.321.760)
PT PP - PT Brantas Abipraya KSO	Proyek Kali Madiun / Madiun River Project	-	(72.062.633)	3.164.969.078
PT Brantas Abipraya - PT Pulau Lemon KSO	Proyek Air Baku Manokwari Thp 2 / Manokwari Stage 2 Standard Water Project	16.585.800	872.360.000	-
PT Brantas Abipraya - PT Wijaya Karya KSO	Proyek Bendung Pandanduri / Pandanduri Weir Project	5.754.062.639	(4.891.990.486)	4.389.994.608
PT Brantas Abipraya - PT Pulau Biru Abadi KSO	Proyek Gedung Keuangan Manokwari / Manokwari Financial Building Project	-	1.290.185.831	631.330.000
PT Brantas Abipraya - PT Grundfoss KSO	Proyek Rumah Pompa Semarang / Semarang Pomp House Project	141.980.000	38.900.000	704.930.000
PT Brantas Abipraya - PT Waskita KSO	Proyek Klawing / Klawing Project	-	35.082	706.483.365
PT Daya Mulya Turangga - PT Brantas Abipraya JO	Proyek Jalan Wagete / Wagete Road Project	83.067.050	94.830.000	1.356.606.500
PT Brantas Abipraya - PT PP JO	Proyek Sabo Dam Merapi / Sabo Dam Merapi Project	3.541.593.493	(32.252.302)	23.410.651.601
PT Brantas Abipraya - PT Pulau Lemon KSO	Proyek Oransbari / Oransbari Project	-	(363.990.000)	745.430.000
Jumlah dipindahkan / The amount transferred		32.057.411.447	65.127.524.593	59.245.173.618

30. BAGIAN LABA JOINT OPERATION (Lanjutan)

30. JOINT OPERATION PROFIT PORTION (Continued)

Nama Perusahaan Joint Operation / Company Name of Joint Operation	Proyek / Project	2014	2013	2012
Jumlah pindahan / Amount of transfer		32.057.411.447	65.127.524.593	59.245.173.618
PT Brantas Abipraya - PT Mahir Jaya Mahakam Raya KSO	Proyek Sangkulirang / Sangkulirang Project	140.733.534	7.601.260.005	1.545.921.901
PT Brantas Abipraya - PT Mahir Jaya Mahakam Raya KSO	Proyek Tanjung Palas Sekatak/ Tanjung Palas Sekatak Project	(482.371.935)	-	-
KSO Abipraya - Penta	Proyek Rancang Bangun Gedung Indoor/ Planing Indoor Building Project	83.146.208	-	-
PT Brantas - PT Waskita Karya JO	Proyek Bendungan Sangkup / Sangkup Weir Project	-	-	(2.288.080.000)
PT Brantas - PT Waskita Karya JO	Proyek Jalan Bulukumba / Bulukumba Road Project	-	-	904.490.000
PT Brantas Abibraya - PT Pilar JO	Proyek Gedung IPB Bogor / IPB Bogor Building Project	-	-	(3.086.113.688)
PT Brantas Abipraya - PT Waskita JO	Proyek Tempe Barrage (Integrited) / Tempe Barrage Project (Integrated)	-	-	(3.660.773.614)
PT Brantas Abipraya - PT Tirta	Proyek Rumah Pompa Solo / Solo Pump House Project	-	-	(76.891.841)
PT Brantas Abipraya - PT Pulau Lemon KSO	Proyek Air Baku / Standard Water Project	-	-	1.091.280.000
PT Brantas Abibraya - PT Pilar JO	Proyek Gedung IPB Bogor Lanjutan / Continous IPB Bogor	-	-	(1.351.103.781)
PT Brantas Abipraya - PT Selaras mandiri Sejahtera KSO	Proyek Pantai Ambon / Ambon Beach Project	-	-	709.990.000
Hutama - Brantas KSO	Proyek Uper Brantas / Uper Brantas Project	-	-	(849.612.173)
Jumlah / Total		31.798.919.255	72.728.784.598	52.184.480.422
(lihat catatan No. 3i)		(see note No. 3i)		

31. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Pegawai	51.529.333.486	41.986.444.976	34.477.233.655	Employee
Umum dan administrasi	15.839.135.884	14.835.964.153	10.019.848.599	General and administration
Kendaraan	6.713.137.690	4.186.434.416	2.941.906.997	Vehicle
Penjualan	4.279.545.722	4.844.548.768	2.299.506.290	Sales
Penyusutan	2.530.562.347	2.498.757.105	2.550.745.340	Depreciation
Pengembangan usaha	-	-	596.181.418	Business development
Jumlah	80.891.715.129	68.352.149.417	52.885.422.299	Total

Beban umum dan administrasi merupakan pengeluaran untuk alat tulis kantor, listrik, telepon, pengembangan pegawai dan biaya perjalanan dinas.

Beban penyusutan merupakan biaya penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Kantor Pusat, Wilayah dan Proyek-Proyek.

Beban penjualan merupakan pengeluaran untuk biaya promosi, biaya tender dan pra tender, biaya representasi dan pengembangan usaha.
(lihat catatan No. 3m)

31. OPERATING EXPENSES

This account consists of :

	2014	2013	2012	
				Employee
				General and administration
				Vehicle
				Sales
				Depreciation
				Business development
Total	80.891.715.129	68.352.149.417	52.885.422.299	Total

General and administration expenses are expenses for office supplies, electricity, telephone, staff development and official travel expenses.

Depreciation expense is depreciation cost of fixed assets used by the Head office, Regions and Projects.

Sales expenses are expenses for promotion, tender and pre tender costs, representation and business development.
(see note No. 3m)

32. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Jasa giro	4.537.248.702	1.384.539.444	1.104.803.103	Giro services
Sewa gedung dan tanah	1.186.644.428	1.184.219.840	3.731.116.560	Building and land rental
Laba penjualan aset tetap	699.615.050	806.253.508	-	Gain on sale of fixed assets
Bunga deposito	11.149.019.254	655.383.559	488.841.153	Time deposit interest
Koreksi biaya pemeliharaan proyek	69.950.001	565.762.561	-	Correction of project maintenance cost
Penerimaan piutang yang telah dihapuskan	222.652.033	-	-	Repayment of written off-receivable
Selisih kurs- bersih	791.614.056	518.900.742	89.523.783	Net foreign exchange
Klaim asuransi	-	180.000.000	5.014.452.614	Insurance claims
Penjualan sisa material proyek	-	-	227.306.023	Sales of project material
Pendapatan ex proyek Opak	-	-	95.571.374	Income from ex Opak project
Jasa Konsultan DED	353.224.833	-	-	DED Services Consultants
Lain-lain	54.129.702	5.894.609	94.353.125	Others
Jumlah	19.064.098.059	5.300.954.262	10.845.967.735	Total

Laba penjualan aset tetap tahun 2013 merupakan laba penjualan peralatan proyek. (lihat catatan No. 3l)

Gain on sale of fixed assets in 2013 is gain on sale of project equipments.
(see note No. 3l)

33. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013	2012	
Cadangan bonus	25.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	Bonus allowance
Proyek Banyuasin	-	4.546.753.614	-	Banyuasin project
Selisih kurs	662.692.852	177.351	-	Foreign exchange
Penyisihan piutang & eskalasi	-	-	1.329.039.190	Allowance for doubtful & escalation
Pembinaan PKBL	-	-	8.000.000	PKBL maintenance
PPn atas pengembalian termin	-	-	266.525.241	VAT on term
Legalitas notaris	-	-	315.425.600	Notary legalization
Penyelesaian proyek Lamongan	-	-	350.000.000	Lamongan project completion
Denda pajak	227.335.399	-	35.649.470	Tax penalty
Denda keterlambatan proyek	-	-	196.703.500	Project delay penalty
Lainnya	62.528.253	60.819.978	172.251.797	Other
Jumlah	25.952.556.504	24.607.760.943	17.673.594.798	Total

Beban penyisihan piutang tahun 2012 merupakan penurunan nilai atas tagihan bruto untuk Proyek Pembangunan Jalan Dalu-Dalu Mahato Simpang Menggala sebesar Rp 926.387.054,-, penurunan nilai atas piutang konstruksi proyek PLTA Poso II sebesar Rp 214.215.445,- dan penurunan nilai piutang klaim PT Poso Energy sebesar Rp 188.436.681,-.(lihat catatan no. 3m)

Allowance for doubtful expense in 2012 is impairment value of gross bill for Road Construction Project for Dalu-Dalu Mahato Menggala Intersection project amounting to Rp 926.387.054,-, impairment value on receivable of PLTA Poso II construction project amounting to Rp 214.215.445,- and the impairment value of receivables claim of PT Poso Energy amounting to Rp 188.436.681,-. (see note no. 3m)

34. BEBAN BUNGA

34. INTEREST EXPENSES

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	2014	2013	2012	
Bunga Bank Mandiri	3.742.013.487	19.458.395.155	21.288.445.013	Bank Mandiri interest
Bunga PT Sarana Multi Infrastruktur	12.897.254.581	6.490.719.999	4.945.286.860	PT Sarana Multi Infrastruktur interest
Bunga Bank Negara Indonesia	124.611.825	2.950.236.400	623.376.292	Bank Negara Indonesia interest
Bunga Bank Jabar Banten	-	2.899.931.934	2.927.468.076	Bank Jabar Banten interest
Bank UOB	-	687.500.000	62.500.000	Bank UOB
Biaya Penerbitan MTN	11.020.238.090	146.029.475	-	Issuance cost of MTN
Bunga Bank Syariah Mandiri	-	-	814.234.395	Bank Syariah Mandiri interest
Bunga PT Danareksa Finance	-	-	1.906.252.062	PT Danareksa Finance interest
Bunga premi agunan alat	-	-	1.251.093.918	Interest premium of
Bunga Bank Rakyat Indonesia	-	-	1.563.341.894	Bank Rakyat Indonesia interest
Bunga SKBDN Bank DBS	-	-	4.135.852.330	SKBDN Bank DBS interest
Bunga Bank Niaga	-	-	435.641.530	Bank Niaga interest
Jumlah	27.584.117.983	32.632.812.963	39.953.492.170	Total

(lihat catatan No. 3m)

(see note No. 3m)

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN BERELASI

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak hubungan berelasi adalah sebagai berikut :

Details of the nature and type of material transactions with related parties are as follows :

- Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan sebesar 100 % sejak tahun 2012. Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui Entitas Anak) lebih dari 50% saham pada suatu perusahaan atau merupakan Entitas Asosiasi Perusahaan.
- Perusahaan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN-BUMN lain maupun anak Perusahaan BUMN serta badan-badan / lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
- Perusahaan membentuk beberapa proyek kerjasama (Joint Operation) dengan beberapa partisipan lain dalam pemberian jasa konstruksi.

- The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of State Enterprises is a shareholder of the Company at 100% since 2012. Company and other State-Owned Enterprises have affiliate relationships through equity participation of the Republic of Indonesia.
- Company owns, either directly or indirectly (through Subsidiaries) more than 50% shares in a company or an Entity Association.
- Company has set funds and loan funds to the state-owned banks with the requirements and normal interest rate as applicable to third-party customers.
- Company has made covenant in form of business with other State-Owned Enterprises and Subsidiaries of State-Owned Enterprises and government authorized Institutions.
- The company formed several cooperation projects (Joint Operation) with several other participants in the provision of construction services.

Pihak -pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Berelasi / Characteristic of Relationship	Transaksi / Transactions
Kementerian BUMN Republik Indonesia / Ministry of State Owned Enterprises of Republic of Indonesia	Pemegang Saham / Shareholder	Modal / capital stock
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia / Ministry of Civil Work of Republic of Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / Construction account receivable, tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, uang muka pemberi kerja / advance from employers, pendapatan diterima dimuka / unearned revenue, pendapatan usaha / operating revenue
Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia / Ministry of Public Housing of Republic of Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	pendapatan usaha / operating revenue
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	pendapatan usaha / operating revenue
Kementerian Pertahanan RI	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	uang muka pemberi kerja / advance from employers, pendapatan usaha / operating revenue
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Pihak -pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Berelasi / Characteristic of Relationship	Transaksi / Transactions
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	pendapatan usaha / operating revenue
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya & Permuseuman, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	pendapatan usaha / operating revenue
Badan Penanggulangan Bencana / Disaster Prevention Board	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, pendapatan usaha / operating revenue
Perum Perikanan Indonesia / Indonesian Fisheries Public Corporation	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, uang muka pemberi kerja / advance from employers
Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Government of South Tangerang City	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	uang muka pemberi kerja / advance from employers, pendapatan usaha / operating revenue
Pemerintah Kabupaten Bekasi / Government of Bekasi District	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable, tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, pendapatan usaha / operating revenue
Pemerintah Kota Bontang / Government of Bontang City	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	pendapatan diterima dimuka / unearned revenue, pendapatan usaha / operating revenue
Badan Penanggulangan Sidoarjo / Sidoarjo Mud Mitigation Board	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	pendapatan usaha / operating revenue
Pemerintah DKI Jakarta / Government of DKI Jakarta	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable, Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, pendapatan usaha / operating revenue
Pemerintah Kota Tarakan / Government of Tarakan City	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	uang muka pemberi kerja / advance from employers, pendapatan usaha / operating revenue
Pemerintah Kota Depok / Government of Depok City	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	pendapatan usaha / operating revenue
Pemerintah Kabupaten Gresik / Government of Gresik District	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan usaha / operating revenue
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Pendapatan usaha / operating revenue
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, deposito / time deposit, utang bank / bank loan
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, deposito / time deposit, utang bank / bank loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, deposito / time deposit
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, utang bank / bank loan
PT Bank Sumselbabel	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT Bank Lampung	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT Bank BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank, utang bank / bank loan
PT Bank Riau	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD Papua	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

PT BPD NTB	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD Jatim	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD Sulawesi Tengah	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT BPD Bengkulu	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Bank
PT PLN (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable, tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, uang muka pemberi kerja / advance from employers, pendapatan diterima dimuka / unearned revenue, pendapatan usaha / operating revenue
BPJS Kesehatan Divisi Regional X	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	uang muka pemberi kerja / advance from employers
PT Angkasa Pura I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable, pendapatan usaha / operating revenue
PT Perhutani	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable, pendapatan usaha / operating revenue
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers
PT Sanghyang Seri (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, pendapatan usaha / operating revenue
PT Utama Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	bagian laba joint operation / joint operation profit portion
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Utang non bank / non bank loan
Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	pendapatan diterima dimuka / unearned revenue, pendapatan usaha / operating revenue
PT Waskita Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable, tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, uang muka pemberi kerja / advance from employers, pendapatan usaha / operating revenue, bagian laba joint operation / joint operation profit portion
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable, tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers, uang muka pemberi kerja / advance from employers, pendapatan usaha / operating revenue, bagian laba joint operation / joint operation profit portion
PT Sinergi Perkebunan Nusantara	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat / Control to the Central Government of Republic of Indonesia	Piutang usaha konstruksi / construction account receivable
PT Brantas Energi	Anak Perusahaan / Subsidiary	Kas / cash, bank, piutang usaha jasa konsultan / consultant service receivable
PT Perjaya Bravo Energi	Entitas asosiasi / Association entity	Piutang usaha jasa konsultan / consultant service receivable
PT Sahung Brantas Energi	Entitas asosiasi / Association entity	Piutang usaha jasa konsultan / consultant service receivable, pendapatan usaha / operating revenue
PT Brantas Cakrawala Energi	Entitas asosiasi / Association entity	Piutang usaha jasa konsultan / consultant service receivable
PT Brantas Hidro Energi	Entitas asosiasi / Association entity	Piutang usaha jasa konsultan / consultant service receivable
PT Brantas Prospek Energi	Entitas asosiasi / Association entity	Piutang usaha jasa konsultan / consultant service receivable
PT Minahasa Brantas Energi	Entitas asosiasi / Association entity	Piutang usaha jasa konsultan / consultant service receivable

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the years ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Stated in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Saldonya dengan pihak-pihak berelasi :

Balances to the related parties :

	2014	2013	2012
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk			
Bank	81.918.031.791	101.449.089.881	106.331.888.509
Deposito	105.200.000.000	185.000.000.000	40.000.000.000
Utang bank	44.703.473.678	-	-
Sub jumlah	231.821.505.469	286.449.089.881	146.331.888.509
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk			
Bank	12.311.606.215	15.081.655.305	5.046.581.577
Deposito	-	-	15.000.000.000
Utang bank	-	-	50.000.000.000
Sub jumlah	12.311.606.215	15.081.655.305	70.046.581.577
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk			
Bank	1.601.445.556	1.622.239.424	4.989.418.729
Deposito	75.000.000.000	5.000.000.000	-
Sub jumlah	76.601.445.556	6.622.239.424	4.989.418.729
PT Bank Sumsel Babel			
Bank	7.520.067	112.676.918	112.692.085
PT Bank Lampung			
Bank	-	-	1.765.000
PT Bank Jawa Barat dan Banten			
Bank	16.303.301.003	2.870.384.727	7.450.907.541
PT Bank Riau			
Bank	4.791.306	4.791.306	4.791.306
PT BPD Papua			
Bank	4.575.637.007	10.209.232.320	218.861.155
PT BPD NTB			
Bank	64.451.062	-	-
PT BPD Jatim			
Bank	556.000.000	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk			
Bank	310.759.721	368.281.803	6.889.419
PT BPD Sulawesi Tengah			
Bank	-	-	654.484
PT BPD Bengkulu			
Bank	5.368.408	3.511.174.738	-
Kementerian BUMN Republik Indonesia / Ministry of State Owned Enterprises of Republic of Indonesia			
Piutang usaha / account receivable	161.555.000.000	161.555.000.000	161.555.000.000
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia / Ministry of Civil Work of Republic of Indonesia			
Piutang usaha / account receivable	121.604.474.384	56.406.606.142	25.042.812.973
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	42.509.924.289	31.382.305.747	104.458.052.369
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	43.818.018.624	94.982.651.989	73.914.653.944
Pendapatan diterima dimuka / unearned revenue	-	12.731.835.213	5.660.749.284
Pendapatan usaha / operating revenue	972.339.966.818	823.791.362.550	653.126.511.408
Sub jumlah	1.180.272.384.095	1.019.294.761.641	862.202.779.978
Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia / Ministry of Public Housing of Republic of Indonesia			
Pendapatan usaha / operating revenue	433.349.236.748	20.081.711.563	-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia			
Pendapatan usaha / operating revenue	35.086.571.893	-	-
Kementerian Pertahanan RI			
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	3.103.264.029	-	-
Pendapatan usaha / operating revenue	7.728.307.259	-	-
Badan Penanggulangan Bencana / Disaster Prevention Board			
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	-	-	6.751.869.842
Pendapatan usaha / operating revenue	-	-	46.645.862.061
Sub jumlah	-	-	53.397.731.903
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga			
Piutang usaha / account receivable	7.827.980.146	-	-
Perum Perikanan Indonesia / Indonesian Fisheries Public Corporation			
Piutang usaha / account receivable	-	3.812.751.190	-
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	8.827.190.400	472.602.065	-
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	5.380.200.000	-	-
Pendapatan usaha / operating revenue	746.978.231	4.285.353.255	-
Sub jumlah	14.954.368.631	8.570.706.510	-
Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Government of South Tangerang City			
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	2.337.320.480	-	-
Pendapatan usaha / operating revenue	41.801.554.753	-	-
Sub jumlah	44.138.875.233	-	-

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the years ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Stated in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Pemerintah Kabupaten Bekasi / Government of Bekasi District			
Piutang usaha / account receivable	5.712.320.124	27.343.260.737	-
Pendapatan usaha / operating revenue	113.220.359.801	26.025.223.206	8.288.861.021
Sub Jumlah	118.932.679.925	53.368.483.943	8.288.861.021
Pemerintah Kota Bontang / Government of Bontang City			
Pendapatan diterima dimuka / unearned revenue	-	2.961.928.497	-
Pendapatan usaha / operating revenue	1.581.327.157	13.762.634.794	-
Sub Jumlah	1.581.327.157	16.724.763.291	-
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya			
Pendapatan usaha / operating revenue	23.436.290.456	-	-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Government of East Kalimantan Province			
Pendapatan usaha / operating revenue	19.035.785.013	34.120.146.078	38.798.673.089
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya & Permuseuman, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
Pendapatan usaha / operating revenue	7.160.890.752	-	-
Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah / Government of Buol District, Central Sulawesi			
Pendapatan usaha / operating revenue	-	-	73.211.223
Pemerintah Kabupaten Gresik / Government of Gresik District			
Pendapatan usaha / operating revenue	11.123.368.001	-	-
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo / Sidoarjo Mud Mitigation Board			
Pendapatan usaha / operating revenue	-	15.166.580.909	-
Pemerintah Kota Tarakan / Government of Tarakan City			
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	-	6.993.623.688	-
Pendapatan usaha / operating revenue	48.812.132.232	-	-
Jumlah	48.812.132.232	6.993.623.688	-
Pemerintah Kota Depok / Government of Depok City			
Pendapatan usaha / operating revenue	26.376.260.616	-	-
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi / Government of Banyuwangi District			
Pendapatan usaha / operating revenue	-	-	762.185.762
Pemerintah DKI Jakarta / Government of DKI Jakarta			
Piutang usaha / account receivable	13.480.562.028	-	-
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	25.301.483.758	-	-
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	17.920.684.175	-	-
Pendapatan usaha / operating revenue	165.543.465.535	12.294.670.129	-
Jumlah	222.246.195.496	12.294.670.129	-
BPJS Kesehatan Divisi Regional X			
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	684.080.060	-	-
PT Sanghyang Seri (Persero)			
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	-	-	15.995.610.361
Pendapatan usaha / operating revenue	-	93.691.599.735	15.995.610.361
Jumlah	-	93.691.599.735	31.991.220.722
PT Sahung Brantas Energi			
Pendapatan usaha / operating revenue	3.582.313.372	-	-
PT PLN (Persero)			
Piutang usaha / account receivable	17.857.253.231	7.976.355.851	25.940.989.111
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	32.943.555.188	9.628.888.033	38.180.468.362
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	23.151.142.583	30.719.358.023	35.353.785.780
Pendapatan diterima dimuka / unearned revenue	-	94.304.965	94.304.965
Pendapatan usaha / operating revenue	85.787.462.795	105.535.802.778	47.204.499.873
Jumlah	159.739.413.797	153.954.709.650	146.754.046.090
PT Angkasa Pura I (Persero)			
Piutang usaha / account receivable	13.813.665.274	1.730.526.140	-
Pendapatan usaha / operating revenue	3.452.305.469	14.029.658.531	-
Jumlah	17.265.970.743	15.760.184.671	-
PT Perhutani			
Piutang usaha / account receivable	-	1.711.147.876	14.585.848.838
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	-	-	4.378.110.789
Pendapatan usaha / operating revenue	-	-	34.222.957.525
Jumlah	-	1.711.147.876	63.164.717.162
PT Sinergi Perkebunan Nusantara			
Piutang usaha / account receivable	13.057.400.021	-	-
PT Adhi Karya (Persero), Tbk			
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	3.540.563.285	6.388.876.231	6.388.876.231
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			
Utang non bank / non bank loan	101.800.000.000	144.300.000.000	-
Universitas Negeri Gorontalo / Gorontalo State University			
Pendapatan diterima dimuka / unearned revenue	-	1.258.279.173	816.930.061
PT Waskita Karya (Persero), Tbk - PT Wijaya Karya (Persero), Tbk			
Piutang usaha / account receivable	6.142.540.333	13.360.183.137	2.031.503.847
Tagihan bruto pemberi kerja / gross amount due to employers	5.957.207.953	-	-
Uang muka pemberi kerja / advance from employers	-	1.748.555.343	2.329.112.576
Pendapatan usaha / operating revenue	3.803.971.334	2.924.207.129	15.098.322.670
Jumlah	15.903.719.621	18.032.945.609	19.456.938.893

36. INFORMASI SEGMENT

36. SEGMENT INFORMATION

Uraian	2014				Jumlah / Total	Description
	Konstruksi / Construction	Peralatan / Equipment	Beton / Precast			
Pendapatan	2.265.316.369.382	4.224.196.100	11.066.670.000		2.280.607.235.482	Revenue
Hasil segmen	225.043.219.769	513.042.186	1.162.000.350		226.718.262.305	Segment result
Bagian laba joint operation	39.776.397.788	-	-		39.776.397.788	Joint operation profit portion
Beban usaha tidak dapat dialokasikan	-	-	-		(80.891.715.129)	Unallocated operating expense
Laba usaha					185.602.944.964	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain	3.874.323.477				3.874.323.477	Others Income (lexpense)
Pendapatan (beban) lain-lain - yang tidak dapat dialokasikan					(10.762.781.922)	Unallocated others income (expense)
Laba sebelum beban bunga dan - pajak penghasilan					178.714.486.519	Profit before interest expense and income tax
Beban bunga krmk yang tidak dapat - dialokasikan					(27.584.117.963)	Unallocated krmk interest expenses
Laba sebelum pajak penghasilan					151.130.368.536	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan					(60.294.444.648)	Income tax expense
Laba Bersih					90.835.923.888	Net Profit

Uraian	2013				Jumlah / Total	Description
	Konstruksi / Construction	Peralatan / Equipment	Beton / Precast	Konsultan / Consultant		
Pendapatan	1.407.055.581.714	33.261.126.826	124.707.000	814.090.909	1.441.255.506.449	Revenue
Hasil segmen	146.478.792.045	8.850.904.642	13.593.063	118.193.364	155.461.483.114	Segment result
Bagian laba joint operation	74.171.434.256				74.171.434.256	Joint operation profit portion
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					(68.352.149.417)	Unallocated operating expense
Laba usaha	229.501.130.943	8.850.904.642	131.786.427	118.193.364	161.280.767.953	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain	(3.291.435.266)				(3.291.435.266)	Others Income (lexpense)
Pendapatan (beban) lain-lain - yang tidak dapat dialokasikan					(16.015.381.415)	Unallocated others income (expense)
Laba sebelum beban bunga dan pajak penghasilan					141.973.971.272	Profit before interest - expense and income tax
Beban bunga KMK yang tidak dapat dialokasikan					(32.632.812.963)	Unallocated krmk interest expenses
Laba rugi sebelum pajak penghasilan					109.341.158.309	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan					(36.557.200.116)	Income tax expense
Laba bersih					72.783.958.193	Net profit

Uraian	2012			Jumlah / Total	Description
	Konstruksi / Construction	Peralatan / Equipment			
Pendapatan	910.532.625.542	12.874.458.688		923.407.084.230	Revenue
Hasil segmen	90.155.322.280	2.644.506.613		92.799.828.893	Segment result
Bagian laba joint operation	79.163.771.888			79.163.771.888	Joint operation profit portion
Beban usaha tidak dapat dialokasikan				(52.885.422.299)	Unallocated operating expense
Laba usaha				119.078.178.482	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain				985.916.986	Others Income (lexpense)
Pendapatan (beban) lain-lain - yang tidak dapat dialokasikan				(7.813.544.049)	Unallocated others income (expense)
Laba sebelum beban bunga dan pajak penghasilan				112.250.551.419	Profit before interest expense and income tax
Beban bunga krmk yang tidak dapat dialokasikan				(39.953.492.170)	Unallocated krmk interest expense
Laba rugi sebelum pajak penghasilan				72.297.059.249	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan				(21.459.618.217)	Income tax expense
Laba bersih				50.837.441.032	Net profit

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

37. SUBSEQUENT EVENT

- a. Berdasarkan Surat Nomor : BIN/2.2/181/R, tanggal 16 Oktober 2014, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk memperpanjang fasilitas kredit sebagai berikut :
1. Fasilitas Plafond KMK Transaksional dengan maksimum plafond kredit sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja jasa konstruksi atas proyek-proyek yang diperoleh baik proyek pemerintah maupun pihak swasta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan 2 Oktober 2015 dengan suku bunga 11% dan provisi sebesar 0,25%.

- a. According to Letter No : BIN/2.2/181/R, dated October 16, 2014, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk extended the Company's credit facility as follows :
1. KMK Transactional Plafond Facility with maximum credit plafond of Rp 100.000.000.000,- (one hundred billion rupiah) for additional construction service working capital of projects, both Government project and . This facility has twelve (12) months time period since October 3, 2014 until October 2, 2015 with 11% interest rate and 0,25% provision.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

37. SUBSEQUENT EVENT (Continued)

2. Fasilitas Plafond NCL (LC/SKBDN, GB/SBLC, SCF/OAF) dengan maksimum plafond kredit sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) untuk keperluan Garansi Bank / SBLC, LC/SKBDN dan Supply Chain Financing (SCF). Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan 2 Oktober 2015.
Transaksi ini dijamin dengan tagihan termin proyek yang dibiayai / dijamin secara cession.
- b. Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 Seri A Tahap I sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), Tahap II sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) telah dilunasi oleh Perusahaan tanggal 6 Januari 2015 dan Tahap III sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dilunasi tanggal 26 Januari 2015.
- c. Utang pembelian tanah di desa Cipendey Kecamatan Cipendey, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebesar Rp 32.802.000.000,- telah dilunasi oleh Perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pelunasan Pembayaran Tanah tanggal 12 Februari 2015.

2. NCL (LC/SKBDN, GB/SBLC, SCF/OAF) Plafond Facility with maximum credit plafond of Rp 400.000.000.000,- (four hundred billion rupiah) for need of Bank Guarantee / SBLC, LC/SKBDN and Supply Chain Financing (SCF). This facility has twelve (12) months time period since October 3, 2014 until October 2, 2015 with 11% interest rate and 0, 25% provision.
This transaction is guaranteed by term project bill financed / cession guaranteed.
- b. Medium-Term Securities (Medium Term Notes/MTN) MTN I PT Brantas Abipraya (Persero) of 2013 Seri A Phase I amounting to Rp 50.000.000.000,- (fifty billion rupiahs), Phase II amounting to Rp 25.000.000.000,- (twenty five billion rupiahs) has been paid by the Company on January 6, 2015 and Phase III amounting to Rp 25.000.000.000,- (twenty five billion rupiahs) settled on January 26, 2015.
- c. Payable on land purchase in Cipendey Village, Cipendey sub region, Subang Region, West Java amounting to Rp 32.802.000.000,- has been repaid telah dilunasi by Company according to Minutes of Settlement Land Payment dated February 12, 2015.

38. PERIKATAN DAN KONTIJENSI

Komitment sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

38. COMMITMENT AND CONTINGENCY

Commitments until December 31, 2014 are as follows :

No.	Nama Proyek / Name of Project	Lokasi / Position	Pemilik proyek / Project Owner	Waktu pelaksanaan konstruksi / Time Period	
				Dimulai / Started	Selesai / Finished
1.	Pembangunan Bendung Sei Padang D.I. Bajayu, D.I. Paya Lembang dan D.I. Langau 7.588 HA	Sumatra Selatan / South Sumatera	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prop. Sumatera Utara	Feb-14	Jul-17
2.	Paket 9 : ICB 5 Pekerjaan Sipil untuk Saluran Sekunder Muncak Kabau, Seksi-1 dan Saluran Sub-Sekunder Blok-A dan B dan Pekerjaan Perbaikan untuk Fasilitas yang ada	Sumatra Selatan / South Sumatera	SNVT PPSDA Sumatera VIII	Des-06	Jul-14
3.	Paket 10 : ICB 6 Pekerjaan Sipil untuk Saluran Sekunder Muncak Kabau, Seksi-2 dan Saluran Sub-Sekunder Blok-B dan C dan Pekerjaan Perbaikan untuk Fasilitas yang ada	Sumatra Selatan / South Sumatera	SNVT PPSDA Sumatera VIII	Des-08	Jul-14
4.	Normalisasi Kali Sunter Paket-1	DKI Jakarta	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	Okt-11	Des-14
5.	JUFMP-1 : Dredging & Embankment of Ciliwung - Gunung Sahari Drain & Waduk Melati Sub	DKI Jakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nop-13	Nop-15
6.	Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3	DKI Jakarta	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	Des-13	Mei-17
7.	Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku Kota Lahat (0.20 m3/dt)	Sumatra Selatan / South Sumatera	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII	Des-13	Mei-15
8.	Lower Solo River Improvement Project (LSRIP) Phase-2 : Paket ICB Civil Works for Construction Package Jabung Ring Dike (Paket J-2(1))	Jawa Barat / West Java	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Jul-11	Des-14
9.	Contract Package C2 : Semarang Pumping Station (Mechanical and Electrical Works)	Jawa Tengah / Central Java	PPLP Jawa Tengah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Nop-11	Nop-14
10.	Paket SB-1 Pembn Bendung Gerak Sembayat (Pek Sipil)	Jawa Tengah / Central Java	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Des-11	Feb-16
11.	Pembangunan Waduk Bajulmati Di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo Tahap-II (Lanjutan)	Jawa Timur / East Java	BBWS Brantas	Jun-12	Jan-15
12.	Pembangunan Bendungan Pandanduri Di Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	BWS Nusa Tenggara I	Jun-12	Des-14
13.	Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Di Yogyakarta Bangunan Sabo Dam Merapi (14 Buah)	Jawa Tengah / Central Java	BBWS Serayu Opak	Mar-13	Mar-14
14.	Wonokromo River Improvement Surabaya (Wonokromo) Sub-Project (Package-3)	Jawa Timur / East Java	BBWS Brantas	Mar-13	Mei-15
15.	Pembangunan Waduk Tukul di Kabupaten Pacitan (Multiyears Contract)	Jawa Timur / East Java	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Des-13	Nop-15
16.	Pengaliran Lumpur ke Kali Porong - 2014	Jawa Timur / East Java	BPLS, Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Jan-14	Jan-18
17.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo DAM Merapi Kab. Sleman, Magelang dan Boyolali	Jawa Tengah / Central Java	BBWS Serayu Opak	Apr-14	Des-14
18.	Pembangunan Bendung Wariori di Manokwari Kabupaten Manokwari	Papua Barat	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Barat	Des-13	Des-16
19.	Pembangunan Bendungan Bintang Bano	Sumbawa Barat / West Sumbawa	Dinas PU, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Apr-09	Des-14

39. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, disajikan guna mencerminkan dampak dari penyajian-kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut. Penerapan ini sesuai dengan ketentuan di dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 (Revisi 2009) tentang "Penyajian laporan keuangan" manakala terdapat penyajian kembali atau reklasifikasi kembali atas pos-pos dalam laporan keuangan.

39. RESTATEMENT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company serves back the consolidated financial statements for the year ended December 2014, 2013 and 2012 are presented in order to reflect the impact of the presentation of the consolidated financial statement back. The application of these provisions in accordance with the statements of financial accounting standard (PSAK) No. 1 (Revised 2009) "Presentation of Financial Statement" when there is a presentation of the back or the reclassification of posts in the financial statement.

39. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

39. RESTATEMENT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

a. Piutang Lain-lain

Terdapat koreksi pada piutang lain-lain pihak beresili kepada entitas anak dengan kepentingan non pengendali yang terdiri dari :

a. Others Receivable

There is correction on others receivable related parties to the subsidiaries with interest of non controlling which are :

31 Desember 2013 / December 31, 2013

	Sesudah penyajian kembali / after restated	Sebelum penyajian kembali / before restated	
PT Fortius Investment Asia	-	1.200.000.000	PT Fortius Investment Asia
PT Cakrawala Energi Nusantara	-	1.000.000.000	PT Cakrawala Energi Nusantara
PT Prospek Engineering	-	700.000.000	PT Prospek Engineering
Koperasi Karyawan Brantas Abipraya	-	1.000.000	Koperasi Karyawan Brantas Abipraya
Jumlah	-	2.901.000.000	Total

b. Laporan Arus Kas

b. Statements of Cash Flows

	2013			Sesudah penyajian kembali / before restated	
	Sebelum penyajian kembali / after restated	Penambahan	Pengurangan		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan dari pelanggan	1.548.519.304.128	229.895.554.991	75.022.346.616	1.703.392.512.501	Receipt from customers
Pembayaran kepada :					Payment to :
Pemasok, Subkontraktor, Direksi, Karyawan, JO dan Pihak Ketiga dan lainnya	(1.126.208.862.546)	77.923.346.616	229.895.554.991	(1.278.181.070.921)	Suppliers, sub contractor, Director, employee, Jo and third parties and others
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	422.310.441.580	307.818.901.607	-	425.211.441.580	Cash in from operating activities
Bunga deposito dan jasa giro	2.039.923.003	-	-	2.039.923.003	Time deposit and current services interests
Pembayaran denda pajak	-	-	-	-	Tax penalty payment
Pembayaran bunga	(32.632.812.963)	-	-	(32.632.812.963)	Interest payment
Pembayaran pajak	(86.125.896.237)	-	-	(86.125.896.237)	Tax payment
Penerimaan restitusi pajak	31.015.175.162	-	-	31.015.175.162	Receipt from tax restitution
Hasil klaim dan penerimaan (pengeluaran) lainnya	(22.152.973.191)	-	-	(22.152.973.191)	Claim result and others receipt (payment)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	314.454.057.354	-	-	317.355.057.354	Net Cash Flows Provided by (Used for) Operating Activities
Arus kas dari aktivitas investasi					Cash Flows from Investing Activities
Penambahan aset tetap	(16.080.054.573)	-	-	(16.080.054.573)	Addition of fixed assets
Penjualan aset tetap	806.253.508	-	-	806.253.508	Sales of fixed assets
Pengurangan properti investasi	-	-	-	-	Deduction of property investment
Beban ditangguhkan	(6.878.819.029)	-	-	(6.878.819.029)	Accrued expenses
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	-	-	Environment development and partnership program
Kepentingan non-pengendali	2.961.000.001	-	2.901.000.000	60.000.001	Non-controlling interest
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(19.191.620.093)	-	2.901.000.000	(22.092.620.093)	Net Cash Flows Used for Investing Activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan					Cash Flows from Financing Activities
(Pembayaran) penambahan utang bank	(275.599.800.728)	-	-	(275.599.800.728)	(Payment) Addition of bank loan
(Pembayaran) penambahan utang non bank	144.300.000.000	-	-	144.300.000.000	(Payment) Addition of non bank payable
Penambahan surat berharga jangka menengah	75.000.000.000	-	-	75.000.000.000	Addition of medium-term note
Pembayaran deviden	-	-	-	-	Dividend payment
Penerimaan utang sewa pembiayaan	7.025.655.402	-	-	7.025.655.402	Addition of lease payable
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(49.274.145.326)	-	-	(49.274.145.326)	Net Cash Flows used for Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	245.988.291.935	-	-	245.988.291.935	INCREASE IN CASH AND AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	195.179.346.012	-	-	195.179.346.012	CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	441.167.637.947	-	-	441.167.637.947	CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE END OF YEAR

Reklasifikasi arus kas penerimaan dari pelanggan per 31 Desember 2013 semula sebesar Rp 1.548.519.304.128,- menjadi sebesar Rp 1.703.392.512.501,- dan arus kas pembayaran kepada pemasok, subkontraktor, direksi, karyawan, JO dan pihak ketiga per 31 Desember 2013 sebesar (Rp 1.126.208.862.546,-) menjadi sebesar (Rp 1.278.181.070.921,-) hal ini dikarenakan :

Reclassification cash flows of receipt from customers on December 31, 2013 before was Rp 1.548.519.304.128,- then becoming Rp 1.703.392.512.501,- and cash flows of payment to suppliers, subcontractors, directors, JO and third party on December 31, 2013 before was (Rp 1.126.208.862.546,-) then becoming (Rp 1.278.181.070.921,-). It is because the gross amount to customers were reclassified from payments to suppliers becoming receipt from customers.

1. Penambahan tagihan bruto sebesar Rp 229.895.554.991,- dan pengurangannya sebesar Rp 75.022.346.616,-.
2. Pembayaran kepada pemasok Rp 75.022.346.616,- dan pengurangannya sebesar Rp 229.895.554.991,-.
3. Penurunan ini dikarenakan koreksi atas transaksi kepentingan non pengendali sebesar Rp 2.901.000.000,-.

1. Addition of gross amount to customers amounting to Rp 229.895.554.991,- and deduction amounting to and Rp 75.022.346.616,-.
2. Payment to suppliers amounting to Rp 75.022.346.616,- and its deduction amounting of Rp 229.895.554.991,-.
3. This deduction is caused by correction of Non-controlling interest amounting to Rp 2.901.000.000,-.

39. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

39. RESTATEMENT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

b. Laporan Arus Kas (Lanjutan)

b. Statements of Cash Flows (Continued)

	2012				
	Sebelum penyajian kembali / after restated	Penambahan	Pengurangan	Sesudah penyajian kembali / before restated	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan dari pelanggan	984.936.597.324	168.814.274.756	311.223.043.297	842.527.828.783	Receipt from customers
Pembayaran kepada :					Payment to :
Pemasok, Subkontraktor, Direksi, Karyawan, JO dan Pihak Ketiga dan lainnya	(895.528.081.874)	311.223.043.297	168.814.274.756	(753.119.313.333)	Suppliers, sub contractor, Director, employee, Jo and third parties and others
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	89.408.515.450	480.037.318.053	480.037.318.053	89.408.515.450	Cash in from operating activities
Bunga deposito dan jasa giro	1.593.644.256	-	-	1.593.644.256	Time deposit and current services interests
Pembayaran denda pajak	(35.649.470)	-	-	(35.649.470)	Tax penalty payment
Pembayaran bunga	(39.953.492.170)	-	-	(39.953.492.170)	Interest payment
Pembayaran pajak	(17.974.154.973)	-	-	(17.974.154.973)	Tax payment
Penerimaan restitusi pajak	23.644.827.842	-	-	23.644.827.842	Receipt from tax restitution
Hasil klaim dan penerimaan (pengeluaran) lainnya	(8.385.621.849)	-	-	(8.385.621.849)	Claim result and others receipt (payment)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	48.298.069.086	-	-	48.298.069.086	Net Cash Flows Provided by (Used for) Operating Activities
Arus kas dari aktivitas investasi					Cash Flows from Investing Activities
Penambahan aset tetap	(178.459.251.600)	-	-	(178.459.251.600)	Addition of fixed assets
Penjualan aset tetap	-	-	-	-	Sales of fixed assets
Pengurangan properti investasi	151.989.480.000	-	-	151.989.480.000	Deduction of property investment
Beban ditangguhkan	(3.733.552.271)	-	-	(3.733.552.271)	Accrued expenses
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(520.254.578)	-	-	(520.254.578)	Environment development and partnership program
Kepentingan non-pengendali	2.221.320.732	-	-	2.221.320.732	Non-controlling interest
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(28.502.267.717)	-	-	(28.502.267.717)	Net Cash Flows Used for Investing Activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan					Cash Flows from Financing Activities
(Pembayaran) penambahan utang bank	139.833.414.944	-	-	139.833.414.944	(Payment) Addition of bank loan
(Pembayaran) penambahan utang non bank	(100.560.000.000)	-	-	(100.560.000.000)	(Payment) Addition of non bank payable
Penambahan surat berharga jangka menengah	-	-	-	-	Addition of medium-term note
Pembayaran deviden	-	-	-	-	Dividend payment
Penerimaan utang sewa pembiayaan	5.932.363.795	-	-	5.932.363.795	Addition of lease payable
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	45.205.778.739	-	-	45.205.778.739	Net Cash Flows used for Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	65.001.590.108	-	-	65.001.590.108	INCREASE IN CASH AND AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	130.177.755.904	-	-	130.177.755.904	CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	195.179.346.012	-	-	195.179.346.012	CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE END OF YEAR

Reklasifikasi arus kas penerimaan dari pelanggan per 31 Desember 2012 semula sebesar Rp 984.936.597.324,- menjadi sebesar Rp 842.527.828.783,- dan arus kas pembayaran kepada pemasok, subkontraktor, direksi, karyawan, JO dan pihak ketiga per 31 Desember 2012 sebesar (Rp 895.528.091.874,-) menjadi sebesar (Rp 753.119.313.333,-) hal ini dikarenakan tagihan bruto yang direklasifikasi dari pembayaran kepada pemasok menjadi penerimaan dari pelanggan.

Reclassification cash flows of receipt from customers on December 31, 2012 before was Rp 984.936.597.324,- then becoming Rp 842.527.828.783,- and cash flows of payment to suppliers, subcontractors, directors, JO and third party on December 31, 2012 before was (Rp 895.528.091.874,-) then becoming (Rp 753.119.313.333,-), it is because the gross amount to customers were reclassified from payments to suppliers becoming receipt from customers.

1. Penambahan tagihan bruto sebesar Rp 45.699.925.327,- dan pengurangannya sebesar Rp 229.895.554.991,-.
2. Penambahan uang muka proyek sebesar Rp 116.636.670.086,- dan pengurangannya sebesar Rp 76.160.239.422,-.
3. Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 6.477.679.344,- dan pengurangannya sebesar Rp 5.167.248.884,-.

1. Addition of gross amount to customers amounting to Rp 45.699.925.327,- and deduction amounting to and Rp 229.895.554.991,-.
2. Addition of project advance amounting to Rp 116.636.670.086,- and deduction amounting to and Rp 76.160.239.422,-.
3. Addition of unearned revenue amounting to Rp 6.477.679.344,- and its deduction amounting to Rp 5.167.248.884,-.

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

40. MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2015.

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements for the year ended December 31, 2014 that were completed on March 13, 2015.

LAMPIRAN
APPENDIX

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2014	2013	2012	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	428.191.869.823	431.662.766.203	185.804.148.033	Cash and cash equivalent
Piutang usaha				Account receivable
- Pihak-pihak berelasi	321.251.158.874	185.535.696.879	129.131.247.423	Related parties -
- Pihak ketiga	52.704.456.339	27.843.240.136	5.026.100.564	Third party -
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	6.459.102.426	1.268.036.460	9.673.858.221	Others receivable - Third party
Piutang pemegang saham	-	371.855.403	1.200.306.934	Shareholders receivable
Tagihan bruto kepada pemberi kerja				Gross amount due to employer
- Pihak-pihak berelasi	148.975.710.870	53.025.102.486	194.421.124.709	Related parties -
- Pihak ketiga	74.734.774.871	21.997.244.130	35.474.430.282	Third party -
Persediaan	39.936.168.845	37.474.611.083	24.201.265.150	Inventories
Uang muka	48.025.700.237	28.635.980.537	14.282.579.354	Advance
Beban dibayar dimuka	21.252.859.604	19.770.385.689	15.049.295.883	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	86.797.810.904	29.910.903.321	11.401.961.611	Prepaid taxes
Jaminan	775.985.186	10.153.831.648	7.681.578.007	Guarantee
Penyertaan Saham	241.480.000.000	171.480.000.000	71.480.000.000	Investment in share
Jumlah Aset Lancar	1.470.585.397.980	1.019.129.453.974	704.827.896.171	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 154.317.019.460,-, Rp 107.636.147.505,- dan Rp 78.487.691.891,- pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012	351.685.510.097	279.591.747.851	263.511.693.278	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 154.317.019.460,-, Rp 107.636.147.505,- and Rp 78.487.691.891,- December 31, 2014, 2013, and 2012
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.791.022.652,- pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012	-	-	-	Others assets - net of accumulated depreciation of Rp 3.791.022.652,- on December 31, 2014, 2013 and 2012
Jumlah Aset Tidak Lancar	351.685.510.097	279.591.747.851	263.511.693.278	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	1.822.270.908.077	1.298.721.201.825	968.339.589.449	TOTAL ASSETS

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2014	2013	2012	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT TERM LIABILITIES
Utang usaha - Pihak ketiga	697.190.481.047	322.899.686.187	235.288.094.565	Account payable - Third party
Utang bank - jatuh tempo satu tahun	-	1.345.145.427	55.854.216.551	Bank loan - one year maturity
Utang lain-lain				Others payable
- Pihak-pihak berelasi	140.404.311.807	150.358.486.487	61.325.218.867	Related parties -
- Pihak ketiga	32.802.000.000	-	-	Third party -
Utang pajak	21.558.971.991	7.643.230.545	7.478.384.705	Taxes payable
Uang muka pemberi kerja - jatuh tempo satu tahun	49.772.053.953	71.528.228.150	85.401.031.535	Employers advance - one year maturity
Pendapatan diterima dimuka	-	17.274.108.777	6.477.679.344	Unearned revenue
Biaya yang masih harus dibayar	52.930.925.778	42.237.902.702	24.473.878.760	Accrued expense
Utang sewa pembiayaan - jatuh tempo satu tahun	14.386.742.983	17.938.751.264	9.433.066.341	Lease payable - one year maturity
Surat Berharga Jangka Menengah - Jatuh Tempo Satu Tahun	100.000.000.000	-	-	Medium term securities one year maturity
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.109.045.487.558	631.225.539.539	485.731.570.668	Total Short Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG TERM LIABILITIES
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	9.060.100.002	7.574.832.371	10.968.966.747	Estimated liabilities on employee benefits
Utang non bank	101.800.000.000	144.300.000.000	-	Non bank loan
Utang bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	44.703.473.678	-	221.090.729.604	Bank loan - net of one year maturity portion
Uang muka pemberi kerja - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	96.011.248.681	146.498.269.497	31.235.638.551	Employers advance - net of one year maturity portion
Utang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	38.149.098.134	6.117.482.546	7.597.512.067	Lease payable - net of one year maturity portion
Surat berharga jangka menengah	-	75.000.000.000	-	Medium term loan
Utang lain-lain pihak berelasi	42.945.780.000	-	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	332.669.700.495	379.490.584.414	270.892.846.969	Total Long Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1.441.715.188.053	1.010.716.123.953	756.624.417.637	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham -				Capital stock -
Nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham				Par value of Rp 1.000.000,- per share
Modal dasar - 600.000 lembar saham				Authorized capital - 600.000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 161.555 lembar saham	161.555.000.000	161.555.000.000	161.555.000.000	Subscribed and fully paid capital - 161.555 shares
Cadangan	101.583.597.281	32.311.000.000	7.584.891.200	Reverse
Saldo laba	117.417.122.742	94.139.077.872	42.575.280.611	Retained earning
Jumlah Ekuitas	380.555.720.023	288.005.077.872	211.715.171.811	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.822.270.908.077	1.298.721.201.825	968.339.589.449	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
 STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
 YEARS ENDED ON DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2014	2013	2012	
PENDAPATAN USAHA	2.280.607.235.482	1.440.441.315.540	923.407.084.230	OPERATING REVENUE
BEBAN LANGSUNG	(2.047.598.981.106)	(1.285.098.025.790)	(830.607.255.337)	DIRECT EXPENSES
LABA KOTOR - SEBELUM BAGIAN LABA JOINT OPERATION	233.008.254.376	155.343.289.750	92.799.828.893	GROSS PROFIT - BEFORE PROFIT PART OF JOINT OPERATION
Bagian laba joint operation	39.776.397.788	74.171.434.256	79.163.771.888	Profit part of joint operation
LABA KOTOR	272.784.652.154	229.514.724.006	171.963.600.781	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Pegawai	51.529.333.486,09	39.743.039.817	34.477.233.655	Employee
Umum dan administrasi	22.552.273.573,84	17.534.994.215	12.961.755.596	General and administration
Penyusutan	2.530.562.347,00	2.498.757.105	2.550.745.340	Depreciation
Penjualan	4.279.545.722,00	4.844.548.768	2.299.506.290	Sales
Pengembangan usaha	-	-	596.181.418	Business development
JUMLAH BEBAN USAHA	80.891.715.129	64.621.339.905	52.885.422.299	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) USAHA	191.892.937.035	164.893.384.101	119.078.178.482	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHERS INCOME (LOSS)
Pendapatan lain-lain	18.019.291.160	5.145.440.526	10.746.881.026	Business development
Beban lain-lain	(25.952.556.504)	(24.607.750.943)	(17.673.594.798)	Others expense
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(7.933.265.344)	(19.462.310.417)	(6.926.713.772)	Total Others Income (Expenses)
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN	183.959.671.691	145.431.073.684	112.151.464.710	PROFIT BEFORE INTEREST EXPENSE AND INCOME TAX
Beban bunga	(27.584.117.983)	(32.632.812.963)	(39.953.492.170)	Interest income
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	156.375.553.708	112.798.260.721	72.197.972.540	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Pajak final	(60.178.985.557)	(36.508.354.661)	(21.459.618.217)	Final tax
Pajak kini	-	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	-	Deferred tax
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(60.178.985.557)	(36.508.354.661)	(21.459.618.217)	Total Income Tax Expenses
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	96.196.568.151	76.289.906.060	50.738.354.323	CURRENT YEAR COMPREHENSIF INCOME
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	96.196.568.151	76.289.906.060	50.738.354.323	CURRENT YEAR COMPREHENSIF INCOME

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 / AS OF DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Modal Saham / Capital Stock	Penyertaan Modal Negara / Stated Capital Participation	Cadangan / Reverse	Saldo Laba / Retained Earning	Jumlah Ekuitas Pemegang Saham / Total of Shareholders Equity
Saldo Per 1 Januari 2012 / Balance on January 1, 2012	10.000.000.000	151.554.480.000	7.585.411.200	(7.642.819.134)	161.497.072.066
Setoran modal / Paid in capital	151.555.000.000	-	-	-	151.555.000.000
Penyertaan modal negara / State capital participation	-	(151.554.480.000)	-	-	(151.554.480.000)
Cadangan / Reverse	-	-	(520.000)	-	(520.000)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Environment development and partnersih program	-	-	-	(520.254.578)	(520.254.578)
Laba komprehensif tahun 2012 / Comprehensive income in 2012	-	-	-	50.738.354.323	50.738.354.323
Saldo 31 Desember 2012 / Balance on December 31, 2012	161.555.000.000	-	7.584.891.200	42.575.280.611	211.715.171.811
Cadangan / Reverse	-	-	24.726.108.800	(24.726.108.800)	-
Laba komprehensif tahun 2013 / Comprehensive income in 2013	-	-	-	76.289.906.060	76.289.906.061
Saldo 31 Desember 2013 / Balance on December 31, 2013	161.555.000.000	-	32.311.000.000	94.139.077.871	288.005.077.872
Cadangan / reverse	-	-	69.272.597.281	(69.272.597.281)	-
Pembayaran deviden / dividend payment	-	-	-	(3.645.926.000)	(3.645.926.000)
Laba komprehensif tahun 2014 / Comprehensive income in 2014	-	-	-	96.196.568.151	96.196.568.151
Saldo 31 Desember 2014 / Balance on December 31, 2014	161.555.000.000	-	101.583.597.281	117.417.122.741	380.555.720.023

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2014	2013	2012
Arus Kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan dari pelanggan	1.921.601.512.157	1.547.577.417.764	984.936.597.324
Pembayaran kepada :			
Pemasok, Subkontraktor, Direksi, Karyawan, JO dan Pihak Ketiga	(1.727.994.926.148)	(1.118.450.293.403)	(896.212.138.855)
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	193.606.586.009	429.127.124.361	88.724.458.469
Bunga deposito dan jasa giro	14.994.704.033	1.884.432.555	1.469.805.200
Pembayaran denda pajak	(227.335.399)	-	(35.649.470)
Pembayaran bunga	(27.584.117.983)	(32.632.812.963)	(39.953.492.170)
Pembayaran pajak	(120.649.373.062)	(85.867.625.693)	(17.974.154.973)
Penerimaan restitusi pajak	17.499.221.368	31.015.175.162	23.644.827.842
Hasil klaim dan penerimaan (pengeluaran) lainnya	(23.400.249.028)	(22.152.996.480)	(8.410.362.847)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	54.239.435.938	321.373.296.942	47.465.432.050
Arus kas dari aktivitas investasi			
Penambahan aset tetap	(72.093.762.246)	(16.080.054.573)	(178.459.251.600)
Penjualan aset tetap	699.615.050	806.253.508	-
Pengurangan property investasi	-	-	151.989.480.000
Penyertaan anak perusahaan	(70.000.000.000)	(100.000.000.000)	(19.380.000.000)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	(520.254.578)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(141.394.147.196)	(115.273.801.065)	(46.370.026.178)
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
(Pembayaran) penambahan utang bank	43.358.328.251	(275.599.800.728)	139.833.414.944
(Pembayaran) penambahan utang non bank	(42.500.000.000)	144.300.000.000	(100.560.000.000)
Penambahan utang anak perusahaan	32.991.605.320	89.033.267.620	9.950.218.867
Penambahan surat berharga jangka menengah	25.000.000.000	75.000.000.000	-
Pembayaran deviden	(3.645.926.000)	-	-
Penerimaan utang sewa pembiayaan	28.479.607.307	7.025.655.402	5.932.363.795
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	83.683.614.878	39.759.122.294	55.155.997.606
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(3.471.096.380)	245.858.618.171	56.251.403.478
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	431.662.766.203	185.804.148.033	129.552.744.555
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	428.191.669.823	431.662.766.203	185.804.148.033

Cash Flows from Operating Activities
Receipt from customers
Payment to : Suppliers, sub contractor, Director, employee, Jo and third parties
Cash in from operating activities
Time deposit and current services interests
Tax penalty payment
Interest payment
Tax payment
Receipt from tax restitution
Claim result and others receipt (payment)
Net Cash Flows Provided by Operating Activities

Cash Flows from Investing Activities
Addition of fixed assets
Sales of fixed assets
Deduction of property investment
Investment in subsidiaries
Environment development and
Net Cash Flows Used for Investing Activities

Cash Flows from Investing Activities
(Payment) Addition of bank loan
(Payment) Addition of non bank payable
Addition of subsidiaries loan
Addition of medium-term note
Dividend payment
Addition of lease payable
Net Cash Flows Provided by Financing Activities

**NET INCREASE (DECREASE)
IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**

**CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT THE BEGINNING OF YEAR**

**CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT THE END OF YEAR**

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page as intentionally left blank